



**Reportase  
dari Tanah Papua  
Konflik, Ketimpangan,  
dan Harapan**

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK  
PESERTA FELLOWSHIP PELIPUTAN SEKTOR KEAMANAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

*Reportase dari Tanah Papua*  
**Konflik, Ketimpangan, dan Harapan**

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK  
PESERTA FELLOWSHIP PELIPUTAN SEKTOR KEAMANAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA



***Reportase dari Tanah Papua***  
**Konflik, Ketimpangan, dan Harapan**

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK  
PESERTA FELLOWSHIP PELIPUTAN SEKTOR KEAMANAN DAN  
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

**PENULIS :**

Adi Briantika  
Alfonsa Jumkon Wayap  
Atamus Kepno  
Dwi Bobby Kurniawan  
Dwi Reinjani  
Elfira Halifa  
Hengky Yeimo  
Imelda Vinolia  
Jekson Simanjuntak  
Kristina N. Rejang  
Mukhamad Qistiyanto  
Neno Karlina Paputungan  
Reiner S Brabar  
Reno Surya  
Theresia F. Tekege

**EDITOR :**

Ahmad Arif

**MENTOR :**

Ahmad Arif  
Muhammad Miftah Faridl  
Evi Mariani

**CETAKAN PERTAMA :**

April 2022

**DITERBITKAN OLEH :**



**ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA**

Jalan Sigura Gura No.6A, Duren Tiga,  
Jakarta Selatan 12760 - Indonesia Tel. +62 21 22079779  
E-mail: sekretariat@ajiindonesia.or.id, Web : www.aji.or.id

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar AJI .....	7
Kata Pengantar Mentor .....	9

## I. Lingkaran Kekerasan dan Tragedi Kemanusiaan

1. Empat Tahun Pengungsi Nduga Merayakan Natal dalam Duka .....	12
2. Kisah Heroik Pengungsi Kiwirok .....	23
3. Luka Lama di Kiwirok .....	31
4. Pengungsi Kiwirok Hidup Dalam Bayang- Bayang Ketakutan .....	38
4.1. Pendamping: Rentetan Peristiwa Kiwirok dan Trauma Mendalam .....	55
5. Misteri Hilangnya Dua Pemuda di Serambakon Pegunungan Bintang .....	58
6. Kontak Tembak Terus Terjadi, Negara Abai Dengan Kasus Pelanggaran HAM di Papua .....	65
7. Kisah Anak Tokoh OPM dan TPNPB .....	72
8. Pupusnya Masa Depan Anak OPM .....	80
9. Kisah Pilu dalam Bayang-Bayang Kemerdekaan Papua .....	88
10. Berharap Kemerdekaan di Atas Tanah Sendiri .....	96
11. Lara Korban Kontak Senjata di Daerah Konflik .....	102

## II. Berebut Sumber Daya di Tanah Surga

1. Hutan Keramat dan Sumber Hidup yang Hancur .....	110
2. Janji Manis Jadi Konflik, Hutan Hancur Jadi Sawit .....	122
3. Habis Era Sawit, Masuk KEK .....	140
4. Hutan Adat Rusak, Suku Moi Terdesak .....	152
5. Masyarakat Adat di Sorong Menolak KEK .....	159
6. Menelusik Akar Konflik Hak Ulayat di Papua .....	164

7. Terbenam dan (Terancam) Tersingkir di Saukobyte .....	175
8. Mereka yang Pro dan Kontra Bandar Antariksa Biak .....	183
9. Pro dan Kontra Pembangunan Bandar Antariksa di Biak .....	189
10. Proyek LAPAN di Biak Mengancam Marga Abrauw di Saukobyte .....	201
11. Sikap MRP dan Konsekuensi Hukum Pembangunan Bandar Antariksa di Biak .....	207

### III. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi Ekonomi Orang Asli Papua di Balik Daya Tarik Mimika .....	216
2. Sejak Lama Pendatang dari Luar Papua Terus Mendatangi Mimika .....	225
3. Ketimpangan di Kota Dolar .....	235
4. Kota Bisnis Menjadi Tujuan .....	247
5. Sumur Minyak Untuk Negara, Air Sungai untuk Masyarakat .....	259
6. Masyarakat Adat Anggai di Tengah Konsesi Sawit .....	265
7. Nasib Petani di Kebun Sawit Tua Keerom .....	270
8. Hidup Segan Matipun Tak Mau .....	276
9. Mengintip Vaksinasi Di Merauke (Bagian I) .....	283
10. Mengintip Vaksinasi Di Merauke (Bagian II) .....	300
11. Mengintip Vaksinasi Di Merauke (Bagian III) .....	317
12. Problematik dan Tingginya Cakupan Vaksinasi Di Ujung Timur Indonesia (Bagian I) .....	329
13. Problematik dan Tingginya Cakupan Vaksinasi Di Ujung Timur Indonesia (Bagian II) .....	337

### IV. Harapan dari Tanah Papua

1. Kami Harus Bisa Pulang ke Kampung Halaman Kami .....	346
2. Menanti Jalan Damai di Papua .....	356
3. Menyeru Dialog dan Demiliterisasi, Merawat Asa Damai untuk Papua .....	369

4.	Dialog untuk Menyudahi Konflik Papua, Bukan Pasukan .....	378
5.	Konflik Bersenjata Tak Surutkan Mimpi Mereka .....	389
6.	Harapan Mama Rita dan Anak-anak Papua .....	396
7.	Lapak Jualan Mama-Mama Papua Harus Mendapat Perhatian Khusus .....	401
8.	Mencari Model Ekonomi yang Berpihak Pada Orang Asli Papua di Mimika .....	407
9.	Keadaan Memaksa Harus Bisa .....	419
	Tentang Penulis .....	430

# Kata Pengantar AJI

Kekerasan di Bumi Cendrawasih tak kunjung surut. Komnas HAM mencatat setidaknya terdapat 53 peristiwa kekerasan terjadi di wilayah Papua sepanjang 2021. Sebanyak 47 orang menjadi korban kekerasan, 24 orang di antaranya meninggal. Ironinya negara melalui Polri dan TNI menjadi pelaku kekerasan, di samping kelompok bersenjata.

Jumlah peristiwa tersebut diperkirakan masih jauh dibandingkan kekerasan yang terjadi di lapangan. Sama halnya dengan angka kekerasan terhadap jurnalis di Papua dan Papua Barat yang dicatat AJI, yang belum bisa menjangkau semua wilayah.

Kekerasan ini menjadi satu contoh dari sekian persoalan keamanan dan hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat. Belum lagi persoalan penempatan militer yang dianggap berlebihan dan kurang akuntabilitas. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung selesai dan kerusakan alam karena pembangunan yang terus mewarnai perjalanan warga Papua.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo yang diharapkan membawa perubahan di sektor keamanan dan HAM di Papua masih sebatas angan-angan hingga periode kedua kepemimpinannya. Bahkan, pemerintah sempat melabeli teroris kepada kelompok bersenjata di Papua yang disesalkan berbagai kalangan karena dikhawatirkan memutus jalan damai di Papua.

Komunitas pers yang diharapkan menjadi jembatan antara warga dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan dalam sektor keamanan dan HAM juga memiliki sejumlah tantangan. Antara lain mulai dari profesionalisme jurnalis, etika, hingga keselamatan jurnalis.

Berangkat dari kondisi ini, AJI Indonesia menggelar sejumlah pelatihan untuk meningkatkan pemahaman jurnalis di Papua dan luar Papua mengenai sektor keamanan dan HAM, terutama di Papua. Liputan-liputan jurnalis yang akurat dan utuh diharapkan menjadi perwakilan suara masyarakat dan bagi pemerintah dapat menjadi masukan dalam mengambil kebijakan yang lebih manusiawi dalam sektor keamanan.

Adapun buku di tangan Anda ini merupakan bagian dari tugas akhir belasan jurnalis di Papua dan luar Papua yang telah mengikuti program ini sejak Juli 2021 hingga Januari 2022. Berbagai tema diusung peserta mulai dari persoalan pengungsi, kerusakan hutan adat, hingga dialog Papua yang terus menjadi wacana.

Para peserta didampingi jurnalis senior yang bertugas sebagai mentor selama program ini berlangsung. Pendampingan berupa penajaman proposal liputan, saran ketika ada masalah dalam liputan, hingga penulisan karya. Kami mengucapkan terima kasih kepada tiga jurnalis senior yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya menjadi mentor yaitu Evi Mariani, Ahmad Arif, dan M. Miftah Faridl.

Akhirnya, AJI Indonesia berharap sumbangsih kecil ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mengurai berbagai persoalan keamanan dan HAM di Papua. Sebab, kami meyakini kebaikan dapat menjadi virus bagi semua dan menjadi gerakan bola salju di masyarakat baik secara nasional maupun internasional.

Selamat membaca.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia  
**Sasmito**

# Kata Pengantar Mentor

Kisah tentang Papua di media massa begitu identik dengan perang dan kekerasan. Korban berjatuh dari kedua belah pihak yang bersengketa, melahirkan dendam dan lingkaran konflik tak berkesudahan. Kekerasan yang melahirkan kekerasan baru itu terus bergenerasi di Papua, membuat seolah-olah tidak ada jalan keluar lebih damai dan bermartabat.

Masyarakat sipil, terutama anak-anak dan perempuan, menjadi pihak yang paling menderita. Banyak yang dipaksa mengungsi dari tanahnya sendiri, menjadi perantau di tanah orang, bahkan hingga ke negara tetangga. Tak hanya kehilangan masa lalu, banyak anak-anak Papua yang kehilangan masa depan. Ada banyak kisah, anak-anak yang ditembak mati saat di rumah, sekolah, maupun di kebun. Bahkan, anak-anak yang hilang, seolah dianggap suatu yang biasa, sebagaimana dikisahkan dalam salah satu reportase jurnalistik ini di Pegunungan Bintang.

Namun demikian, suara penyintas yang mampu bertahan hidup-dan harapan mereka--kerap tak terdengar karena minimnya pemberitaan dari perspektif korban. Sulitnya akses ke pusaran konflik, baik dari segi biaya maupun keamanan, membuat banyak kisah penting dari Papua terlewatkan. Akhirnya, berita di media massa lebih sering menjadi corong propaganda dan saling klaim dari para pihak yang bersengketa.

Di luar konflik berdarah ini, ada banyak fakta lain di Papua yang juga terlewatkan. Ketimpangan sosial ekonomi dan sengketa ulayat serta sumber daya alam, yang menjadi salah satu akar sengketa di Papua, juga kerap luput disuarakan. Ketimpangan itu, terutama antara orang asli Papua dan pendatang jelas terlihat di Timika, kota yang puluhan tahun menjadi sumber emas bagi PT Freeport Indonesia. Fenomena serupa juga terjadi di Sorong,

yang sejak zaman Belanda menjadi sumber minyak bumi dan belakangan di kavling kelapa sawit. Pembangunan, yang kerap diterjemahkan dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam dan perampasan tanah ulayat ini pada akhirnya memicu kemiskinan akut di Papua, yang menambah api konflik.

Kompleksitas persoalan ini coba dipotret oleh para wartawan yang mengikuti fellowship yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Para penulisnya adalah wartawan lokal Papua dan wartawan dari luar Papua. Mereka berkolaborasi di lapangan untuk menelisik tema-tema yang mereka pilih sendiri, dan kemudian ditulis berdasarkan perspektif masing-masing.

Sebagian reportase ini memang mengisahkan tentang dampak konflik bersenjata, namun para jurnalis berusaha melengkapinya dengan akar masalah dan mencoba menyuarakan nasib korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Sebagian lagi mengisahkan tentang konflik sumber daya alam, serta kekeliruan “pembangunan” yang memicu ketimpangan yang melebar. Di bagian akhir, para jurnalis juga mempraktikkan jurnalisme solutif, dengan tulisan-tulisan yang mencoba mencari solusi terbaik untuk Papua.

Selamat membaca!

Jakarta, 15 Februari 2022

Ahmad Arif

**Bagian I.**

**Lingkaran Kekerasan dan  
Tragedi Kemanusiaan**

---

# 1.

## Empat Tahun Pengungsi Nduga Merayakan Natal Dalam Duka<sup>1</sup>

Oleh: Reno Surya



Raga Kogoya (tengah) adalah koordinator pengungsi di kampung Sekom, distrik Muliama, kota Wamena. Sepanjang hidupnya, ia telah lebih dari empat kali mengalami hidup sebagai pengungsi (Project Multatuli/Reno Surya)

*Orang bilang, kalau kau melakukan perjalanan di Tanah Papua belum lengkap tanpa kakimu menapak di Wamena. Sebuah kota yang berada di punggung negeri Cendrawasih. Sejuk angin kurima yang bertiup dari lembah Baliem akan membuatmu betah berlama-lama di sana. Dan yang terbaik dari tanah ini adalah manusianya.*

*Mereka akan selalu merentangkan kedua tangannya di udara*

---

<sup>1</sup> Tulisan diterbitkan oleh Project Multatuli edisi 2 Februari 2022

*dan mendekapmu ke dalam dada menyambut kedatanganmu. Dalam waktu singkat, kau akan kami anggap sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, juga sebagai nayak yang berarti keluarga.*

*Semuanya tampak begitu indah dan baik-baik saja. Tapi tunggu, segalanya segera gugur setelah kamu mendengar cerita kami.*

Hari itu 24 Desember 2021. Satu hari menjelang natal tiba. Kami berpesta dan mengelat upacara bakar batu. Dua ekor babi dewasa dimasak di dalam sebuah lubang galian. Di dalamnya, daun singkong, ubi, ayam, dan wam [daging babi] dimasak bersama. Dua ekor babi itu kami beli dengan uang patungan. Para lelaki meletakkan batu panas sebesar kepala di atasnya. Mama-mama duduk melingkar bersama anak-anak, sembari ngobrol.

Nama saya Raga Kogoya, umur 42 tahun dan hidup bersama suami dan dua anak lelaki yang tampan dan cerdas. Dua anak itu, adalah Berlian dan Junior. Kami berempat kini mengungsi dan tinggal di kampung Sekom, sebab kampung kami di desa Nitkuri, Nduga, telah porak-poranda diterjang perang yang semakin panas. Saya lahir dan besar di desa itu. Tak pernah terbayang sebelumnya, bagaimana nasib kami menjadi sial: terkating-katung di desa lain. Sejak empat tahun yang lalu, sampai hari ini.

Asap hitam membumbung tinggi di udara. Ada aroma hangit yang menguar. Kami tunggu kepul asap hitam sampai lambat-lambat memutih. Jika asap sudah jadi putih, bertiup dari celah-celah batu, artinya pesta akan segera dimulai.

Dentum dansa *Wisisi Sapusa* meletup dari speaker milik pendeta. Anak, mama, dan bapa, mulai larut dan menggoyangkan badan. Kemudian kami berdansa mengitari api. Setelahnya, firman Tuhan dibacakan.

Pendeta mengatakan, bahwa dunia akan terus bergerak; tak selamanya hidup akan terperangkap dalam gelap. Begitu juga nasib pengungsi, nasib kami. Kami tidak pernah tahu kapan terang itu akan tiba. Tetapi kami percaya, bahwa cepat atau lambat, hari-hari gelap akan segera tersibak. Kami kembali ke Nduga, dan hidup kembali pulih: kami bisa kembali ke sekolah, bekerja di ladang di bawah langit yang terang, dan bergumul dalam kehangatan sebuah keluarga.

Setelah ditutup dengan doa, batu-batu panas mulai dibongkar. Potongan daging, ubi, daun singkong, dan ayam dibagi rata. Setiap orang, harus dapat bagian yang sama. Kami duduk melingkar, dan bersama-sama menyantap apa-apa yang tersedia di hadapan kami. Ini adalah secuil kebahagiaan yang dititipkan Tuhan, kepada kami, para pengungsi yang telah empat tahun terkatung-katung di tanah sendiri.

### *Saya Benci Bulan Desember*

Orang-orang biasanya menyambut Natal dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Kemudian, mereka pergi beribadah di gereja, menyanyikan puji-pujian, merayakan hari kelahiran Yesus.

Tetapi saya sama sekali tidak berhasrat untuk turut serta.

Saya berencana melewati malam kudus dengan bermalas-malasan di dalam honai. Sepoi sejuk angin kurima yang bertiup dari lembah, serta langit mendung yang tampak seperti kertas buram, membuat saya malas beranjak dari rumah.

Saya begitu benci Desember.

Desember adalah bulan yang berjejal nestapa. Empat tahun lalu, saya dan berpuluh-puluh ribu orang Papua lain terpaksa angkat kaki dari desa untuk mencari keselamatan. Desa kami mulanya adalah tempat yang damai dan indah. Tapi kini wajahnya telah remuk diterpa perang. Kami tidak begitu mengenalnya setelah Nduga berubah menjadi medan perang.

Kenangan pahit pada menjelang pergantian tahun bukan hanya itu saja. Dua tahun lalu, adik dan bapa tua (paman) saya, tewas diterjang pelor yang meluncur dari bedil, diduga tentara pelakunya. Tiap akhir tahun, ingatan saya akan kembali mengenang salah satu peristiwa terpahit itu.

*Seandainya saya tidak memberi izin. Seandainya saya tahu siapa yang menembaknya!* Pertanyaan itu terus berkelebat di pikiran. Sampai hari ini, saya tidak pernah tahu persis siapa yang menarik pelatuk dan merenggut paksa nyawa adik dan bapa tua.

*Sayang, sayang. Ade sayang e, bapa sayang.*

Waktu itu, mereka kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang berharga yang tersisa. Surat-surat penting, atau sedikit perkakas lain yang mungkin akan berguna hidup

di pengungsian. Mereka tidak punya senjata. Hanya sebilah pedang untuk membat rumput-rumput liar, serta noken berisi sedikit bekal makanan untuk perjalanan. Tetapi tentara bilang mereka membawa senjata. Mereka dituding sebagai bagian dari kelompok separatis. Tuduhan tanpa bukti yang masih mengambang hingga sekarang.

Saya semakin larut dalam kekecewaan sebab tidak bisa menguburkan mereka dengan layak. Bayang-bayang peluru yang bisa menembus tubuh kapan saja, memerangkap saya di dalam ketakutan. Jenazah adik ditemukan tergeletak di antara rerumputan pekarangan kami selama berhari-hari.

*Kami dibiarkan saja mati seperti binatang*



Saya ingat dulu saya dan adik bermain bersama, membuat gaduh kampung dengan gelak tawa sampai diperingatkan mama tawa kami bisa saja mengganggu seisi desa. Kami bermain di pekarangan yang sama, di bawah langit yang tampak cerah dan pendar matahari menimpa kulit kami berdua. Hidup begitu berbahagia: kami kerap menertawakan banyak hal, dan berbagi kesedihan tentang hal-hal yang sama. Belakangan, pekarangan itu tak lagi mengingatkan pada peristiwa-peristiwa bahagia milik kami berdua. Tetapi kepada kematian, dan kekecewaan yang terus berkelindan berbuntut penyesalan.

Hari itu pukul 12 siang, tetapi pendar matahari sama sekali tak mampu menerobos mendung tebal yang bergelayut di atas sana. Saya menunjuk ke arah langit dan berkata kepada reporter yang hari itu bertemu kami:

“Seperti itulah, adek, nasib kami, para pengungsi. Mendung setiap hari. Belum ada terang sampai kapan kita akan terus menumpang di sini.”

Pendeta Kones, yang baru tiga hari pulang dari Nduga bercerita bahwa jika saya berkunjung ke sana, barangkali tak akan lagi mengenali kota itu. Empat tahun ditinggalkan oleh penduduknya, kini Nduga tampak kembali sebagai belantara; rerumputan liar tumbuh setinggi orang dewasa dan pohon-pohon tampak semakin besar menutup seisi kota. Kebun-kebun, rumah, dan jalanan berbatu yang biasa kami lintasi sehari-hari tak lagi tampak.

Pendeta Kones mempertaruhkan nasib untuk kembali ke Nduga dengan memikul harapan. Ia berharap bisa bernegosiasi untuk menghentikan perang, dan bisa kembali membawa warga yang kini mengungsi di kampung Sekom, distrik Muliama untuk kembali ke rumah mereka. Tetapi perundingan tersebut nihil.

Mereka bilang pada pendeta Kones “Jika terus datang ke sini, kami tak bisa jamin keselamatan bapa. Ini adalah ladang perang. Jangan dulu bawa masyarakat ke sini. Bawa pulang ketika kita su selesai begitu.”

Saya tak tahu kapan perang akan selesai. Menurut saya, perang tak akan berhenti sebelum bangsa Papua diberi kebebasan untuk menentukan haknya sendiri. Momentum itu bisa saja terjadi besok, lusa, satu tahun ke depan, atau beberapa tahun lagi. Tetapi ongkos dari perang itu adalah nasib kami, masyarakat Papua; kami mesti terkatung-katung di tanah orang, dan hidup berkalang keterbatasan.

### **Krisis Kesehatan dan Hak Hidup Yang Tak Sepadan**

Jalan menuju kampung Sekom penuh dengan berangkal batu dan lumpur. Meski jalannya lebar, namun tidak mungkin mobil bisa melewatinya. Jika hendak ke sana, orang harus turun di pinggir jalan raya distrik Muliama, perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar 1 jam. Sepanjang jalan banyak sekali kubangan yang tertutup air sisa hujan kemarin malam.

“Kaka hati-hati e, awas terperosok. Kami tra tau apa yang ada di dalam lubang itu. Barangkali ular. Kalau tra berbisa, paling kasih bengkak saja itu kaka pu kaki. Kalau sial [berbisa], aduh mamae! Rumah sakit jauh sekali!”

Reporter yang mengikuti kami langsung pucat, setelah anak saya melempar mop itu. Mop semacam itu biasa kami lontarkan untuk mengusir lelah. Di antara mop, sebetulnya terselip kenyataan tragis. Sebab, akses kesehatan hampir bak angan-angan. Sebagian dari kami, tidak bisa mengakses puskesmas. Sebab ketika keluar rumah, kami tidak membawa kartu identitas.

Saya masih ingat hari pertama kami harus angkat kaki dari rumah. Bulan Desember, tahun 2018. Sebuah asap berwarna biru turun dari udara dan menyelimuti desa. Tampak seperti kabut. Tak lama, sebuah helikopter datang, terbang semakin rendah. Lalu semuanya menjadi merah. Padang rerumputan menyala. Api menjalar dan membakar hampir seisi desa. Membumihanguskan segala yang dilewatinya: kebun, rumah, dan pohon-pohon meniupkan hawa panas sementara orang-orang memekik ketakutan. Seperti kiamat.

Orang-orang berlarian tak tentu arah. Kami tidak tahu mesti ke mana. Anak-anak bayi menangis di dalam noken mamanya. Kepanikan membuat kami melupakan segalanya: ada yang tanpa sadar meninggalkan orang tua yang sedang sakit, sebagian melupakan suami, anak, atau istri. Harta benda jelas berada di perhitungan terakhir. Di dalam kepala hanya ada satu perkara: pertama-tama mesti menyelamatkan nyawa.

Kami pikir, nasib kami akan jauh dari marabahaya setelah bisa keluar dari Nduga. Tetapi tidak. Di pengungsian, hidup masih saja pelik sebab kami tidak punya akses kesehatan. Saya mencatat, sudah lebih dari 30 orang nayak meninggal karena sakit selama di pengungsian. *Aih*, yang bikin saya makin sedih, sebagian besar yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak.



Relawan kesehatan beberapa kali naik menengok kami. Tetapi mereka datang pada saat yang tidak tepat. Mereka baru datang ketika yang sakit sudah mati. Terlambat sudah.

Saya sebetulnya ingin bicara dengan pemerintah provinsi. Empat tahun kami mengungsi, pemerintah provinsi tidak ada memberi perhatian untuk kesehatan warga. Jika terus begini, mesti menunggu berapa lagi pengungsi yang meninggal tanpa obat, tanpa perawatan, dan berapa lagi mesti ada mama dan anak yang meninggal karena penanganan yang lambat?

Kami seperti anak yatim piatu. Di Nduga kami diusir, sementara di Wamena kami terlantar.

Perempuan di pengungsian berada dalam kondisi paling susah. Sebagian dari kami, harus melahirkan tanpa bantuan dokter ataupun bidan. Ongkos melahirkan bagi perempuan Papua sangat mahal, sebab nyawa adalah taruhannya.

Kami sudah biasa melahirkan sendiri. Kami melahirkan di mana saja; di dalam gua, di tengah perjalanan mencari desa tumpangan, di bawah air terjun, di sungai, atau di dalam hutan. Pengungsi yang tak memiliki identitas, tidak punya akses ke rumah sakit. Jika ada, kami mesti jalan kaki dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai di puskesmas terdekat yang terletak di distrik Muliama.

Tetapi, bagi yang tidak punya identitas, biasanya

melahirkan di honai ataupun rumah penduduk yang ditumpanginya. Tapi jika tuan rumah marah, mau tidak mau, kami mesti ke sungai untuk mencari air mengalir dan melahirkan di sana. Saya sudah sering lihat dengan mata kepala sendiri; tak jarang mama dan bayinya terenggut nyawanya di saat yang sama.

Di kampung Sekom, kami tinggal menumpang di tanah ulayat suatu suku. Kami berduyun-duyun mengungsi dari Nduga bersama 540 orang lainnya. Kami mesti pintar-pintar jaga hati warga asli agar tidak diusir. Tidak jarang, kami kena amuk sebab dianggap merecoki hajat hidup mereka. Segalanya serba terbatas dan kami tak punya kebebasan.

Kami juga tidak bisa mengambil air yang mengalir di sungai sembarangan. Tidak jarang selepas makan, kami mesti menelan air liur banyak-banyak agar tidak tersedak. Kami tidak bisa juga sembarangan menanam di kebun-kebun di sini. Sebab, itu bukan milik kami. Umbi-umbi sebagian menumpang tanam di tanah mereka, dan sebagian lain kami menggantungkan makan sehari-hari dari ternak dan hewan buruan.

Kami hidup bersama-sama di dalam honai, dan sebagian lain tinggal di rumah-rumah warga asli. Satu honai dihuni sekitar 3-5 keluarga. Artinya, di dalam satu rumah, ada sekitar 8-15 orang. Kami tidur berjajar-jajar di dalam sana.

Tetapi, yang paling celaka, adalah mereka yang tinggal bersama tuan rumah. Mereka mesti baik-baik. Anak-anak tidak boleh menangis. Mama-bapa tidak boleh bikin bising. Sebab, jika tuan rumah tak enak hati, mereka bisa diusir.

Itu semua belum termasuk beban utang yang harus kami tanggung. Beberapa bulan lalu, salah seorang warga asli tewas karena tabrak lari. Sebuah mobil menabraknya saat ia sedang mengendarai motor, sialnya mobil itu kabur tak meninggalkan jejak. Si penabrak pun bebas dari ganjaran hukum adat yang mesti mengganti ongkos kematian anggota keluarga dengan uang Rp200 juta, 30 ekor babi, dan satu sepeda motor.

Karena tak bisa menemukan pelaku penabrakan itu, kami, para pengungsi yang terpaksa mesti menanggung denda adat tersebut. Ini adalah hal yang tak masuk akal. Tapi toh itu benar terjadi kepada kami. Ancamannya, jika kami tak segera membayar hutang itu, kami mesti angkat kaki dari desa Sekom. Kami sudah tidak tahu lagi di mana mesti menumpang.

Akhirnya, mau tidak mau, kami yang menanggung utang itu.

Sejak menjadi pengungsi, kami menggantungkan hidup pada hutan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan di hutan adalah obat dari lapar. Itu saja yang alam dan Tuhan sediakan untuk umatnya. Kami tidak punya kesempatan menggarap kebun seperti saat masih bermukim di Nduga. Di sini, kami hanya bekerja sebagai pembantu petani dan karena berstatus sebagai pengungsi, kami harus terima dibayar murah.

Bagi pengungsi seperti kami, kebebasan tampak seperti fatamorgana. Ia akan menjauh saban kali kami dekati. Ibaratnya kami hidup di bawah langit yang terbuka bebas, tetapi dengan kaki dan tangan yang terikat. Kebebasan tak akan pernah kami raih sepanjang hidup masih terkatung-katung di tanah orang. Di tanah pengungsian yang selamanya asing bagi kami.

### **Anak-Anak Terbuat dari Darah, Daging, dan Dendam**

Pembaca, saya akan memperkenalkan kalian dengan seorang bocah bernama Ebed Nde. Saat ini, ia masih berusia enam tahun. Ebed adalah anak yang cerdas. Ia cakap berhitung dalam berbahasa Inggris. Jika saja sekolah yang kami bangun tak dibubarkan paksa oleh tentara, barangkali Ebed bakal jadi juara kelas.

Keluarga Ebed adalah kloter terakhir pengungsi yang tiba di kampung Sekom. Bapa Ebed adalah seorang tuli, karena kondisi itu Ebed jadi tumpuan keluarga saat mencari jalan menuju Sekom. Untuk menemukan jalan, Ebed mula-mula mencari jejak kaki manusia di dalam hutan. Bila sudah dapat, ia akan membuat asap sebagai tanda untuk memudahkan orang tuanya menyusul. Begitu terus sampai akhirnya mereka tiba di Sekom.

Ada puluhan anak lain seusia Ebed yang akhirnya putus sekolah. Sebagian dari mereka, bahkan tak lagi ingat pada kelas berapa mereka berhenti sekolah. Anak saya, Junior, bahkan tidak ingat lagi berapa usianya.

Pada awal-awal masa pengungsian, saya sempat membuat sekolah darurat di pengungsian. Anak-anak senang kembali sekolah, saya pun bahagia melihat mereka sekolah. Namun pada saat bersamaan, kami selalu cemas, sebab aparat selalu mengawasi kami, bahkan ketika kami di gereja. Anak-

anak begitu takut pada aparat, setiap kali aparat datang, anak-anak langsung lari. Akibatnya, anak-anak tidak tenang saat belajar. Tak lama berselang sekolah itu dibubarkan oleh aparat. Seorang tentara bilang pada saya, bahwa kegiatan itu bikin malu negara.



Bagi aparat negara, sekolah darurat hanya akan semakin membuat wajah bopeng mereka kian kentara. Tetapi bagi saya, pendidikan berarti harapan. Saya percaya, pendidikan adalah salah satu cara untuk mengubah kesunyian nasib kami, para pengungsi.

Saya punya cita-cita, anak-anak hidupnya lebih baik dari orang tua mereka. Dulu, di tahun 90-an, di desa kami pernah ada juga operasi militer, namanya operasi Mapenduma, dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang saat itu adalah jenderal milik rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Saya dan kawan-kawan saat itu tengah bersekolah di Wamena. Ketika amuk perang kembali memanas, kawan-kawan di sekolah, satu persatu memilih pulang ke rumah mereka. Mereka kembali ke Nduga demi membantu dan menjaga keluarga mereka.

Saya memilih tidak pulang dan menetap di Asrama. Sebab, saya percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan Papua yang lebih terang. Saya tidak ingin Papua

dikenal sebagai daerah yang terbelakang. Toh itu terjadi, sebab pemerintah melakukan pembiaran.

Mimpi itu kini makin kabur, sebab negara memaksa sekolah bubar. Anak-anak kembali terlantar. Anak-anak di sini sudah akrab dengan rasa kecewa. Saya khawatir, tidak adanya akses pendidikan, akan semakin menguatkan keinginan mereka untuk kembali ke Nduga. Mereka akan turut angkat senjata, dan saya khawatir, mereka akan jadi korban pertempuran.

Seorang anak pernah bercerita, bahwa ketika lulus SMP, ia tidak mau melanjutkan sekolah, ia ingin pulang ke Nduga, ikut angkat senjata. Cerita itu membawa kemarahan sekaligus kekecewaan. Saya ngeri membayangkan dendam yang tertanam dalam diri anak-anak ini. Seorang tetua desa bilang, anak-anak lahir sudah memegang pisau. Entah itu nanti akan dihunuskan kepada siapa. Mungkin kepada yang pernah membunuh saudara mereka.

Ongkos dari perang tidak hanya mengorbankan nyawa mereka yang angkat senjata. Tetapi, hajat hidup kami, masyarakat Papua juga turut dipertaruhkan. Jika pemerintah hanya memakai bahasa kekerasan dan pendekatan militer atas upaya menegakkan perdamaian, saya kira selamanya nasib kami tak akan bisa berubah.

Empat tahun limbung di tanah pengasingan adalah sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Seolah-olah waktu hanya bergerak di luar sana. Di dunia pengungsi, detik seperti tak pernah beranjak.

*Kisah ini ditulis berdasarkan cerita yang dilisankan oleh Raga Kogoya, seorang pengungsi yang tinggal di kampung Sekom, distrik Muliama, Wamena, kepada kontributor kami, Reno Surya, pada 24 Desember 2021. Raga telah memberi Reno izin untuk menuliskan kisah ini dari sudut pandang orang pertama, yaitu dari sudut pandang Raga. Tulisan ini bukan merupakan transkrip verbatim cerita lisan Raga, melainkan penceritaan kembali yang diupayakan sedekat mungkin dengan apa yang dikatakan Raga pada Reno.*

## 2.

# Kisah Heroik Pengungsi Kiwirok<sup>2</sup>

Oleh: Theresia F. Tekege



*Pengungsi konflik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua - Wagadei/aktivis KNPB*

*Hendrik (bukan nama sebenarnya) menyeka air matanya kala bertemu Wagadei.com akhir tahun lalu. Matanya berkaca-kaca mengenang konflik bersenjata di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, antara TNI/Polri melawan TPNPB/OPM, yang pecah pada 13 September 2021. Beberapa fasilitas umum, rumah warga dan salah seorang tenaga kesehatan meninggal dalam konflik Kiwirok.*

*Konflik itu kemudian membuat Hendrik terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan tidak bersekolah. Bersama*

---

<sup>2</sup> Tulisan dimuat di Wagadei.com edisi 2 Februari 2022. Merupakan tulisan pertama dari tiga seri tulisan. Jurnalis Wagadei.com dalam peliputan ini ke lapangan bersama dengan [suaraperempuanpapua.id](http://suaraperempuanpapua.id).

*warga kampung, mereka mengungsi ke Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang.*

Ketika itu masih pukul 06.00 WIT pagi, Hendrik hendak menuju ke sekolah, yang berjarak sekitar dua kilometer dari kampung halamannya. Satu jam kemudian, pukul 07.00 WIT, dia tiba di sekolah, di Kiwirok.

Setengah jam dia berada di sekolah itu. Tak seperti biasanya, pagi ini terlihat sepi. Padahal seharusnya murid-murid berdatangan untuk memulai upacara bendera pada Senin pagi.

Tiba-tiba dia didatangi seorang temannya. Sang kawan memberi tahu bahwa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) telah bersiap dan mengumumkan akan membakar fasilitas umum di pusat distrik Kiwirok, 13 September 2021.

Hendrik pun langsung menuju pasar di pusat kota Kiwirok, untuk memastikan informasi tersebut. Di sana dia mendapati beberapa orang sudah bersiaga dengan bensin.

Anak ini kemudian bergegas ke kampung halamannya pada pukul 08.00 WIT. Dari kejauhan, dalam perjalanan pulang, Hendrik melihat api sudah menyala. Rupanya kantor Distrik Kiwirok, gedung SMA, SD, bank Papua dan Puskesmas Kiwirok dibakar. Di tengah nyala api, bunyi tembakan bersahut-sahutan di langit Kiwirok.

Dia pun berlari untuk mencari perlindungan. Sekitar satu kilometer jaraknya dari tempat dia berdiri, hingga tiba di rumah pada pukul 10.00 WIT. Nahas menimpunya. Di rumah tak ditemui mamanya.

“Saya lari dari pusat distrik ke kampung. Sampai di kampung, saya lihat mama sudah mengungsi duluan ke Papua Nugini (PNG). Sudah empat bulan saya tidak ketemu mama. Bapa saya, sudah meninggal waktu saya kecil,” kata Hendrik sambil menyeka air mata.

Tak mendapati mamanya, Hendrik mengecek keberadaan sang mama di rumah bapa tua (paman) dan tantenya yang tak bisa melihat. Keduanya didapati sedang berada di rumah.

“Saya berpikir untuk harus menyelamatkan mereka. Pintu semua *sa* (saya) kunci. Selama satu minggu enam hari kami bertahan tanpa makan dan minum,” ujarnya.

Keesokan harinya, Selasa, 14 September 2021, terjadi pembakaran gedung puskesmas dan kantor Distrik Okhika, serta gedung sekolah YPPGI di kampung Kiwi, Distrik Kiwirok.

“Pada 26 September 2021, rumah kami diketuk pintu. Kami didatangi beberapa pemuda dan mereka memberi kabar bahwa kampung kami akan dibakar, sehingga harus melarikan diri,” kata Hendrik.

Dia pun mengajak bapak tua dan tantenya yang berkebutuhan khusus itu untuk lari ke hutan. Perjalanan ke hutan sangat jauh. Sekitar tiga hari tiga malam berjalan kaki menyusuri hutan.

Mereka memanjat tebing yang terjal dan menyeberangi sungai. Aksinya terbilang heroik. Dalam medan yang seperti itu, Hendrik menggendong bapa tuanya yang tak bisa melihat sama sekali, sedangkan tantenya masih bisa melihat sehingga harus dituntun.

“Ia jalan sendiri dengan memegang tangan saya sebagai penunjuk jalan,” kata Hendrik mengenang.

Di hari keempat, mereka tiba di hutan. Hendrik lalu membangun gubuk. Setelah membangun gubuk, anak ini meninggalkan dua orang berkebutuhan khusus itu. Ia lalu ke kampung halamannya sekadar mengambil selimut dan pakaian.

### **“Rumah warga dibakar, saya ditembaki”**

Hendrik lalu kembali ke kota usai mengantar selimut dan pakaian kepada bapak tua dan tantenya. Di kota rumah warga sudah dibakar, termasuk rumah warga empat kampung di sekitar kota.

Dia terus berjalan. Hingga tibalah dia di lokasi yang tak jauh dari pos TNI/Polri.

“Sesampainya di lokasi itu, saya ditembaki dan kena di kaki kiri. Saya tidak melihat dari mana saya ditembak. Saya juga tidak melihat siapa dan kelompok apa pelakunya,” kata Hendrik sembari menunjuk bekas luka di kakinya.

Hendrik tak kuasa menahan sakit. Dia tidak bisa jalan meski hanya terserempet peluru.

“Saya beristirahat beberapa waktu di rumah yang ada di samping tempat saya ditembak. Saya takut kalau saya jalan lagi, saya pasti ditembak, sehingga saya pilih tinggal di rumah itu dalam ketakutan,” katanya.

Setelah beberapa hari berlalu, bengkak di kakinya berkurang. Dia lalu memutuskan untuk ke hutan lagi.

Dia menceritakan bagaimana dirinya menahan kesakitan akibat tembakan dan rasa lapar. Oleh karenanya, anak ini ke ibu kota kabupaten untuk mengobati luka tembakan dan membeli makanan.

“Saya mau kembali ke hutan karena di sana lebih aman. Saya belum pikir untuk sekolah,” kata siswa kelas X di Kiwirok ini.

### **Mendapat kabar dalam perjalanan**

Kisah lain datang seorang mama. Namanya Mama Martha (bukan nama sebenarnya).

Mama Martha pada Sabtu, 11 September 2021, hendak mengantar anak dan suaminya untuk mengecek SK (Surat Keputusan) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selepas mengantar suami dan anaknya, Mama Martha ke kebun untuk mengambil kayu bakar. Kemudian kembali ke rumahnya yang tak jauh dari Bandara Kiwirok.

Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang anak kecil. Anak itu menginformasikan bahwa pada 13 September 2021 fasilitas pemerintah dan rumah-rumah warga akan dibakar.

Mama Martha kembali ke kebun untuk memanggil anak perempuannya, yang sedang santai mengambil ubi kayu. Martha pun mengajak anak ini untuk pulang. Namun sang anak tak mengindahkannya.

Anak perempuan ini bersikukuh untuk tetap mencari ubi di kebun ini. Mama Martha pun mengalah. Dia menuruti kemauan si anak kepala batu tadi, untuk bertahan di kebun mencari ubi kayu.

Sekembalinya di kampung, Mama Martha mendapati kampung kosong, sebab warga kampung mencari perlindungan. Mama Martha lalu mengumpulkan anak-anaknya untuk mengungsi.

Berbekal senter, pakaian seadanya dan tanpa makanan dalam noken, Mama Martha dan anak-anaknya kemudian mengungsi.

Sekitar pukul 14.00 WIT, pada 11 September 2021, Mama Martha menyusul suami dan anaknya yang terlebih dahulu ke

kampung sebelah mengecek SK CPNS Formasi 2018.

“Saya pikir harus menyelamatkan anak-anak, termasuk masa depan mereka,” kata Mama Martha.

Tiba di sekitar Gunung Koll, Mama Martha menemukan seorang anak kecil sehingga pun bersamaan mengungsi. Anak perempuan Mama Martha meminta beristirahat saja di gunung ini, karena waktu menunjukkan pukul 19.00 WIT.

Namun Mama Martha tetap memaksakan mereka, untuk terus menyusuri hutan meski hanya diterangi cahaya senter. Rasa lapar tak mereka pedulikan. Badan pun sudah lelah. Namun mereka harus terus berjalan demi menyelamatkan nyawa.

Di hutan ini, Mama Martha menemukan seorang anak yang sedang mencari ayahnya. Malam itu mereka terpaksa mencari apa saja di hutan ataupun kebun untuk mengisi perut. Hingga tiba hari baru, Minggu, 12 September 2021. Mereka lalu menuju Oksibil.

### **Tiga hari makan mie mentah**

Kisah lain dituturkan Rosy (bukan nama sebenarnya), yang Senin pagi (13/9/2021) itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah sekolah di Oksibil. Beberapa menit berselang, seorang guru mengumpulkan semua siswa dan memberitahukan bahwa akan ada pembakaran fasilitas umum oleh kelompok TPNPB-OPM di Distrik Kiwirok.

“Kalian semua kumpul. Ada informasi dari orangtua, katanya sekolah kita, puskesmas, kantor distrik dan lain-lain mau dibakar. Sekarang kalian pulang saja untuk berlindung ke orang tua,” kata Rosy menirukan perintah gurunya.

Seusai mendengar perintah guru itu, semua siswa ke rumah masing-masing. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 9 pagi, gedung Sekolah Dasar (SD), gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), puskesmas Kiwirok dan beberapa fasilitas umum dibakar kelompok TPNPB/OPM.

“Saya, saya punya teman dua orang dan ada salah satu guru kami sembunyi di salah satu rumah. Saya lihat sendiri lewat jendela gedung SD dan SMP kami dibakar,” ujar Rosy.

Selama tiga hari Rosy bersama dua teman dan gurunya sembunyi di salah satu rumah. Mereka bertahan dengan makan mie mentah.

Hingga pada Kamis pagi, 16 September 2021, sekitar pukul 5 pagi, Rossy bersama rombongannya lari dari tempat persembunyiannya. Mereka menyelamatkan diri ke kampung tetangga. Ribuan kilo jaraknya dengan melewati gunung-gunung, jurang terjal dan sungai deras.

“Sungguh, perjalanan yang menguras tenaga,” katanya.

Rossy terpisah dari kakak dan ibunya sejak konflik bersenjata di Kiwirok dan baru bertemu mereka di Oksibil.

“Saat saya lari, sa takut akan ditembak. Tetapi keyakinan saya keluar dari tempat yang tidak nyaman itu membuat saya berani berlari. Sebelum saya lari, saya berdoa: Tuhan tuntun saya dalam pelarian ini. Saya bilang, Tuhan bila waktuMu untuk saya mati, saya pasti akan ditembak, tetapi jika bukan pasti saya, Engkau selamatkan. Puji Tuhan, Tuhan su antar saya di Oksibil dalam keadaan selamat dan bisa sekolah di sini,” ujar Rossy.

### **Kronologis peristiwa Kiwirok versi TNI/Polri**

Dalam pers rilis yang disampaikan Polda Papua, Senin (13/9/2021), disebutkan, pukul 09.30 WIT terjadi kasus pembakaran kantor kas Bank Papua, pasar, puskesmas, dan SD Inpres di Kiwirok. Aksi itu dilakukan oleh kelompok TPNPB/OPM.

Kejadian bermula saat personel Pos Pamtas Yonif 403/WP melihat 9 orang TPNPB, yang berjarak sekitar 300 meter dengan gelagat mencurigakan. Melihat hal tersebut selanjutnya 1 regu Satgas Pamtas melakukan pengamatan dan pengintaian.

Pukul 08.45 WIT terjadi penyerangan oleh TPNPB-OPM dengan tembakan beberapa kali dari arah bawah kantor Koramil Kiwirok dan Polsek Kiwirok.

Akibatnya, Prada Ansar anggota Pamtas Yonif 403/WP, menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan TPNPB di Pegunungan Bintang hingga dalam perawatan medis.

Namun yang bersangkutan dalam kondisi baik, sehingga personel TNI/Polri melakukan respons dan terjadi kontak tembak. Pada pukul 09.30 WIT selanjutnya terjadi aksi pembakaran berturut-turut oleh TPNPB/OPM pada kantor kas Bank Papua Kiwirok, pasar Kiwirok, puskesmas Kiwirok, dan SD Inpres Kiwirok.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal berkata, aparat keamanan langsung melakukan

penyidikan dan penyelidikan atas kejadian itu. Lalu polisi berkoordinasi dengan TNI untuk mengejar TPNP/OPM.

Kepala perwira penghubung yang bermarkas di Oksibil, Pegunungan Bintang, Kapten Inf M. Tuahena juga menjelaskan, menyoal pelaku awal konflik bersenjata di Kiwirok, masyarakat tidak mau mengakui. Padahal dari bentuk seragamnya terlihat jelas apakah aparat keamanan (TNI/Polri), TPNPB/OPM ataukah masyarakat sipil.

“Sudah beberapa kali saya tanya pelaku awal konflik bersenjata di Kiwirok, tapi masyarakat tidak jujur. Semua pilih diam,” katanya.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pegunungan Bintang, Papua, AKBP Cahyo Sukarnito menjelaskan, kejadian di Kiwirok merupakan rentetan peristiwa yang mengganggu keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Pegunungan Bintang yang dulu dikenal sebagai zona hijau.

Peristiwa di Kiwirok itu sangat mengganggu keamanan negara dan meresahkan warga.

“Dulu Pegunungan Bintang ini dikenal dengan zona hijau tetapi kini sudah berubah status jadi zona merah,” kata Cahyo.

Tak hanya Kiwirok yang menjadi zona merah, tetapi juga melebar ke Distrik Serambakon, dengan beberapa peristiwa pembakaran gedung sekolah.

### **213 warga Kiwirok mengungsi ke Oksibil**

Data Tim Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua dan Dekanat Pegunungan Bintang menyebutkan, telah terjadi penyerangan terhadap pos TNI, pembakaran puskesmas, pasar, sekolah (SD, SMP, SMA Negeri), gedung Pos TNI, Bank Papua Cabang Kiwirok, perumahan dan Balai Kampung Pelebib, Gedung SD di Kampung Asua dan Kampung Sopamikma. Para pelaku aksi tersebut diduga berasal dari kelompok TPNPB/OPM.

Penyerangan dan pembakaran itu mengakibatkan sejumlah orang menjadi korban, diantaranya; petugas medis suster Gabriela Meliani (meninggal dunia), Elli Mimin (anggota TPNPB) meninggal dunia dan anggota TNI (terkena tembakan).

Disebutkan bahwa Selasa, 14 September 2021, terjadi penyerangan di kota Distrik Okikha. Para penyerang dilaporkan

telah membakar gedung puskesmas dan kantor distrik. Pelakunya bahkan belum teridentifikasi.

Kemudian pada Selasa, 21 September 2021 dilaporkan terjadi kontak senjata di Bandara Kiwi, Distrik Kiwirok, akibat aksi saling tembak antara TNI dan TPNPB, jatuh korban, Serda Ida Bagus Dari Satuan Yonif 403 (meninggal). Iptu Budi Basra (tertembak di bagian dada dalam proses perawatan).

Hingga Sabtu, 25 September 2021, ada juga aksi kekerasan bersenjata di kota Distrik Okyop, dengan kejadian pembakaran gedung puskesmas dan SD Negeri. Para pelaku penyerangan dan pembakaran sedang diidentifikasi dan dilaporkan tidak ada korban. Pada Minggu, 26 September 2021, di kawasan kompleks Polsek, Kiwirok, terjadi lagi aksi baku tembak antara TPNPB dan TNI-Polri.

Warga dari Kiwirok kota, Apom, Pomding kemudian mengungsi ke Distrik Oklip (Kampung Otem, Pelepkon, Okbumul).

Selain itu SKPKC menghimpun 213 warga Kiwirok kota, Pomding berhasil diungsikan dan ditampung pada Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Sion Oksibil, sebagai posko utama. Sedangkan di Kabiding Lokasi 2, di Jalan SMA Negeri Oksibil ada 22 warga, Jalan SMK Oksibil, Atbon (ada 2 lokasi), Balusu (2 lokasi dengan jumlah 31 warga) Jalan SMP YPPK Mabilabol, Okpol (4 lokasi), sehingga total 213 warga mengungsi di Oksibil.

Reverendus Dominus (RD) James Kosay dari SKPKC Dekenat Pegunungan Bintang mendesak Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada warga Kiwirok yang mengungsi ke hutan, Oksibil, dan Papua Nugini.

“Mereka ini korban, bukan pelaku. Negara melalui Pemda Pegunungan Bintang jangan tutup mata,” kata Kosay.

### 3.

## Luka Lama di Kiwirok<sup>3</sup>

Oleh: Theresia F. Tekege



*Perjalanan pengungsi Kiwirok di hutan/Foto: Aktifis KNPB*

*Yohanes Kakyarmabin masih mengingat peristiwa pada era Presiden Soeharto tahun 1970-an. Ketika itu kawasan Kiwirok hingga Distrik Batom menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Akibatnya masyarakat Kiwirok Besar berbondong-bondong untuk mengungsi ke Papua Nugini (PNG).*

Ketika itu TNI menduga sepanjang pesisir Sungai Pasifik adalah jalur transportasi yang sangat strategis bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) untuk menyeberang ke PNG. Wilayah

---

<sup>3</sup> Tulisan dimuat di Wagadei.com edisi 7 Februari 2022. Merupakan tulisan kedua dari tiga seri tulisan. Jurnalis Wagadei.com dalam peliputan ini ke lapangan bersama dengan [suaraperempuanpapua.id](http://suaraperempuanpapua.id).

itu juga menjadi jalur utama dalam melakukan diplomasi TPNPB/OPM dengan PNG, guna mendukung kedaulatan Papua Barat.

Peristiwa itu terus dikenang masyarakat Kiwirok. Betapa tidak, tragedi masa silam itu seperti borok lama, yang diceritakan turun-temurun hingga sekarang.

Buntutnya ketika terjadi konflik bersenjata di Kiwirok, luka lama itu seperti tergores lagi. Masyarakat kembali mengosongkan kampung halamannya dan mencari perlindungan di hutan-hutan atau ke negara tetangga seperti PNG.

“Dalam ingatan itu, jika terjadi lagi konflik, maka masyarakat di sana (Kiwirok) memilih mengungsi ke hutan atau PNG, karena orang-orang di PNG wilayah perbatasan kami memiliki latar belakang budaya yang sama,” kata Kakyarmabin, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Pegunungan Bintang.

Gelombang pengungsian pun kembali terjadi usai tragedi 13 September 2021. Masyarakat menjadi trauma. Kini mereka berada di pengungsian. Salah satunya di Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang.

Gereja Katolik Keuskupan Jayapura melalui Dekanat Pegunungan Bintang mencatat, pengungsian masyarakat sipil Kiwirok ke berbagai daerah di Papua hingga ke PNG merupakan kejadian yang kedua kalinya.

Beberapa tahun lalu Kiwirok sampai ke Batom dijadikan daerah operasi militer, hingga membuat masyarakat mengungsi ke PNG. Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Vanimo kemudian bersepakat untuk memulangkan mereka ke kampung halaman di Tanah Papua.

Pada tahun 2008, masyarakat Kiwirok korban DOM yang mengungsi ke Yapsi, PNG dipulangkan. Kepulangan mereka terjadi berkat komunikasi Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladar, OFM dengan Uskup Vanimo. Ketika mereka pulang, pemerintah kemudian menyiapkan rumah di Batom.

“Di Kiwirok Besar itu dulu DOM, yang membuat masyarakat Kiwirok melarikan diri ke daerah perbatasan PNG hingga menetap di sana,” kata Pastor Dekanat Pegunungan Bintang, Reverendus Dominus (RD) James Kosay di Oksibil, Sabtu (18/12/2021).

Pastor Paroki Roh Kudus Mabilabol Oksibil ini berkata, masyarakat Kiwirok yang pulang dari pengungsian di PNG itu trauma dengan keberadaan pasukan bersenjata. Perasaan takut pun menghantui mereka saat melihat TNI/Polri berpatroli di sekitar tempat pengungsian di Oksibil.

“Apalagi kalau mereka jalan di kompleks kami. Biasanya kami kunci pintu rapat-rapat dan tinggal diam dalam rumah,” kata Mama Martha, salah seorang pengungsi di Oksibil.

Yang lebih menakutkan bagi Mama Martha adalah melihat aparat berseragam dan bersenjata lengkap di pusat kota Oksibil. Dia kemudian mengurungkan niatnya ke pusat kota sekalipun ada keperluan.

Salah seorang pengungsi yang tak mau disebutkan namanya bercerita kepada kami pada Desember 2021 di Oksibil. Dia mengalami hal yang sama seperti Mama Martha.

Dia berkata bahwa anak-anak yang pulang-pergi ke sekolah kerap merasa takut, jangan-jangan dimata-matai TNI/Polri.

Anak-anak yang naik ojek ke sekolah pun mengalami hal demikian. Ketakutan ini berdasar, sebab, mereka kerap mendapat pertanyaan perihal nama, kampung halaman, tempat tinggal, bahkan identitas.

“Mau balik ke kampung, rumah semua sudah dibakar habis,” katanya.

Pastor Deken Dekenat Pegunungan Bintang, RD James Kosay, bahkan pernah dihentikan beberapa anggota TNI/Polri, dan diminta menunjukkan identitas.

“Mereka hentikan saya di jalan dan minta KTP. Saya bilang, ‘silahkan ikut saya ke rumah. Saya tinggal di dekat tempat tinggal kalian (mess polisi). Nanti, saya akan tunjukkan KTP.’ Saya kemudian diberi izin pergi,” kata RD James Kosay.

Aparat keamanan memang melakukan patroli di Oksibil pada malam hari, dan pada waktu tertentu yang dijadwalkan. Selama liputan di Oksibil kami juga pernah didatangi dua pria gondrong yang diduga aparat keamanan.

Dua pria gondrong ini datang di waktu berbeda ke penginapan di Balusu ketika kami tiba pada Jumat, 17 Desember 2021. Satu datang pagi hari dan seorang lainnya pada sore. Dia yang datang pagi hari sempat mengeluarkan handphone dan memotret aktivitas kami tanpa izin.

Aksi dua pria gondrong ini kemudian dihentikan oleh salah satu pemuda asal Oksibil. Kehadiran mereka membuat kami tidak nyaman, sehingga kami memutuskan untuk pindah penginapan.

### **Pengungsi dipandang sebelah mata**

Seorang pengungsi yang tak mau disebutkan namanya berkata, Pemkab Pegunungan Bintang pernah memberikan bantuan bahan makanan (bama) melalui gereja GIDI. Bantuan itu diberikan kepada pengungsi di 17 titik di Oksibil.

“Pemda hanya kasih kami beras dan supermie. Mereka titip di gereja GIDI jadi kami ambil di gereja,” ujarnya.

Sumber ini bercerita bahwa mereka terpaksa ke apotek atau puskesmas terdekat bila sakit. Hal ini disebabkan karena pemerintah setempat tak memberikan obat-obatan. Namun anak-anak sekolah tetap bersekolah dengan baik bersama anak-anak Oksibil lainnya.

Pengungsi lainnya, seorang siswa mengaku senang karena bisa bersekolah di Oksibil. Dia bahkan bisa membaur dengan teman-teman lainnya di sekolah baru tersebut. “Katanya *pa* guru, kalau sekolah sudah dibangun akan kami kembali sekolah di kampung (di Kiwirok),” katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang dinilai tidak mengawal nasib korban konflik bersenjata di Kiwirok. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa Pemkab Pegunungan Bintang tak memiliki posko pengungsian di Oksibil.

“Bagaimana pemda mau cek data berapa orang yang amankan diri ke Oksibil, berapa orang yang sakit, berapa yang butuh makan minum, berapa yang harus sekolah, berapa yang harus diberikan bantuan trauma healing, dan lain-lain,” kata Pastor Deken Dekenat Pegunungan Bintang, RD James Kosay.



*Penulis ketika foto di posko pengungsi Kiwirok di Oksibil – Dok. Penulis*

Menurut Kosay, jika Pemkab Pegunungan Bintang benar-benar ingin mengembalikan masyarakat Kiwirok ke kampung halamannya, maka mereka harus diberi jaminan keamanan.

“Pemda bilang para korban ini harus balik ke Kiwirok. Apakah pemda menjamin hak hidup mereka di kampung halamannya? Apakah pemda sudah bangun kembali rumah-rumah yang dibakar? Apakah pemda sudah selesai membangun sekolah dan puskesmas? Jika belum, pemerintah tolong perhatikan nasib mereka selama di Oksibil sambil mempersiapkan tempat yang layak di Kiwirok, sambil membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, untuk menjamin keamanan mereka di Kiwirok,” katanya.

Dinas Sosial Kabupaten Pegunungan Bintang kewalahan menangani para pengungsi di Oksibil, karena tidak memiliki data akurat tentang mereka.

Kepala Sub Bagian Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pegunungan Bintang, Lasarius Oktemka berkata, pihaknya langsung mengantar bantuan ke posko umum, untuk dibagikan kepada masyarakat.

“Di posko umum, mereka kumpul kartu keluarga dan (kami) memakai data itu kemudian dibagikan bama,” kata Oktemka.

Oktemka menjelaskan pemerintah harus membuka ruang selebar-lebarnya untuk mendiskusikan keselamatan dan kenyamanan para pengungsi. Ruang dengar pendapat sebelumnya tidak pernah ada sejak pengungsi ada di Oksibil.

“Memang pernah ada tapi tidak membicarakan cara seperti apa yang harus ditempuh agar jaminan keamanan, keselamatan, hak pendidikan, hak hidup, hak tempat tinggal dan lainnya bagi para pengungsi ini dijawab,” katanya.

Polres Pegunungan Bintang bekerja sama dengan Polda Papua dan Mabes Polri melakukan trauma healing dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para korban konflik bersenjata di Oksibil. Pada September 2021, Binmas Noken Nemangkawi dan Polres Pegunungan Bintang melakukan trauma healing dalam program Peduli Kamtibmas (Peka) dan Polisi Pergi Mengajar (Si Ipar).

Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito di Oksibil mengatakan, trauma healing dilakukan supaya masyarakat sipil tidak terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) berpandangan bahwa pemerintah mesti bertanggung jawab terhadap pengungsi. Karenanya tidak alasan bagi pemerintah untuk tak mengetahui keberadaan pengungsi.

“Pengungsi tidak boleh diabaikan, karena saat ini mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan apalagi sebagian besar merupakan keluarga rentan yakni perempuan dan anak-anak,” kata Anum.

Dia mengatakan, para pengungsi meninggalkan kampung, kebun, ternak, dan sekolah. Keberadaan masyarakat korban konflik bersenjata di tempat pengungsian dinilai tidak layak, sebab mereka kehilangan hak-hak dasarnya.

“Keberadaan masyarakat korban konflik bersenjata di tempat-tempat pengungsian ini tidak boleh lama. Secara otomatis mereka akan kehilangan hak-hak dasar seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi keluarga, pelayanan pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Anum Siregar berharap agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menggandeng tokoh adat, agama, pemuda dan tokoh-tokoh lainnya, untuk

menangani pengungsi dan mengatasi konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi stigma terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan.

## 4.

# Pengungsi Kiwirok Hidup dalam Bayang-Bayang Ketakutan<sup>4</sup>

Oleh: Alfonsa Jumkon Wayap

*Pecahnya peristiwa Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang telah menimbulkan ketakutan dan trauma berkepanjangan bagi masyarakat .*

Desember 2021 lalu [suaraperempuanpapua.id](http://suaraperempuanpapua.id) (spp.id) dan [wagadei.com](http://wagadei.com) melakukan liputan investigasi pasca konflik bersenjata di Kiwirok terhadap warga sipil. Liputan ini terselenggara atas kerjasama peliputan khusus Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Diikuti 15 jurnalis dari berbagai platform media di beberapa kota di Indonesia.

*Spp.id* pada 17 Desember 2021 melakukan perjalanan menuju Oksibil, ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari Jayapura, *spp.id* menggunakan pesawat Trigana Air menuju Oksibil. Penerbangan ditempuh selama 45 menit.



*Pesawat Trigana Air Service yang ditumpangi spp.id saat melakukan liputan ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Desember 2021 lalu (Foto : Fonsa/tspp)*

---

<sup>4</sup>Tulisan ini terbit di [suaraperempuanpapua.id](http://suaraperempuanpapua.id) edisi 29 Januari 2022.

Di Oksibil, spp.id tinggal di sebuah penginapan di Balusu. Siang itu, 18 Desember 2021, pukul 11 WIT, spp.id menuju Posko Pengungsi di Gereja GIDI, Jemaat Sion Oksibil (18 Desember 2021). Tiga bulan sudah Konflik terjadi – September-Desember, 2021 – luput dari liputan media tentang nasib pengungsi.

*Spp.id* bergegas menemui koordinator (ketua tim) pengungsi, Nelson Nawipa di Posko Pengungsian. Sebelumnya Nelson sudah sepakat untuk bertemu di lokasi posko pengungsi.

*Spp.id* lebih awal ke lokasi pengungsian. Di depan gapura Gereja GIDI, terpanjang spanduk bertuliskan, “Posko Pengungsian, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Posko Penanganan Kemanusiaan Peristiwa di Distrik Kiwirok.”



*Gedung Gereja Injili di Indonesi (GIDI) Sion Oksibil (Foto : Fonsa/tspp)*

Itu adalah gedung Gereja GIDI yang lama. Bangunannya terbuat dari bahan kayu. Jarak antara gereja yang baru dibangun dengan bahan beton sekitar sepuluh meter. Di bagian sayap gereja baru itu, ada kerangka bertenda biru. Situasi tampak lengang. Tak ada aktivitas di lokasi itu.

Sembari menunggu Nelson, *spp.id* sempat masuk ke dalam ruang gereja lama. Tempat ini rupanya pernah menjadi tempat tinggal para pengungsi Kiwirok. Di dalamnya banyak bangku kosong berjejer. Di salah satu sudut ada beberapa karung beras.

Sekitar 30 menit menunggu. Sekretaris Koordinator pengungsi, Rano Bidana datang menyampaikan pesan Nelson. Katanya, dia tidak bersedia memberikan keterangan. Alasannya,

banyak yang datang dan melakukan wawancara, mengambil data, memberikan janji-janji untuk membantu dan lainnya. Katanya, semua itu tidak pernah terealisasi.

Cuaca pagi itu cukup cerah. Biasanya, cuaca di Oksibil tidak menentu. Kadang cerah-adakalanya hujan tiba-tiba. Spp.id kemudian bergegas mencari narasumber lainnya. Diantaranya menemui beberapa pengungsi yang menurut informasi, mereka tersebar di 16 titik. Salah satunya di Okpol.

Dari depan Gereja GIDI, spp.id menumpang ojek, sekitar 5 menit, tiba di Okpol. Ongkos ojek sekali jalan Rp 30 ribu.

Ketika berjalan memasuki sebuah rumah, tempat beberapa pengungsi tinggal. Ada sebagian yang melihat spp.id datang, mereka (pengungsi) kemudian pergi menghindari, lantaran merasa takut.

Setelah menyampaikan tujuan spp.id ke sejumlah orang di rumah itu, kemudian mereka bersedia ditemui. Kata salah satu dari mereka, "tadi waktu lihat kamu datang, sebagian saudara-saudari kami, termasuk salah satu sekretaris kampung asal Distrik Kiwirok, pergi dari sini. Mereka takut dan masih trauma."

Di sebuah dapur kecil, spp.id menemui beberapa orang (anak sekolah dan salah satu keluarga). Demi kenyamanan pengungsi, nama mereka tidak disebut dalam tulisan ini. Lelaki paruh baya bersama istri dan tiga anaknya. Dua anak laki-laki dan satu perempuan. Putra pertamanya berusia 12 tahun. Yang kedua, kelas IV SD dan si kecil, masih TK.

Ayah tiga anak ini kemudian bercerita tentang pengalamannya bersama istri dan anak-anak yang memilih mengungsi ke Oksibil. Kabupaten Pegunungan Bintang, memiliki 34 Distrik dan 227 kampung. Luas wilayahnya 15.683 kilometer persegi dan jumlah penduduk 73.473 jiwa lebih. Distrik Kiwirok memiliki 12 kampung. Kiwirok kota, Pomding. Dari keterangannya, telah terjadi penyerangan Pos TNI, pembakaran puskesmas, pasar, sekolah (SD, SMP, SMA Negeri I Kiwirok) kantor distrik, Bank Papua Cabang Kiwirok, perumahan dan balai.

"Sebelum membakar rumah warga. Mereka (yang membakar) lebih dulu mengambil kualii, belanga, panci, piring dan peralatan dapur lainnya. Setelah itu, baru mereka membakar

rumah-rumah kami. Yang saya bawa dalam tas, hanya ijazah anak-anak, surat-surat penting. Sedangkan ibu, dia hanya membawa noken besarnya. Selain dari itu, hangus terbakar,” kata dia.

Dalam situasi seperti itu, mereka harus berjalan ke arah hutan. Waktu itu sekitar pukul 17.00 WIT. “Kami menginap di sebuah kampung bernama Mangabib, Distrik Soba,” kisahnya.

Kisah lain tentang detik-detik penyerangan di Kiwirok diceritakan Wosot [bukan nama sebenarnya]. “Pagi itu, sekitar jam 7 pagi, saya pergi ke sekolah. Ada satu guru mengatakan, akan ada aksi hari ini. Jadi, anak-anak, kalian pulang saja. Belum lama kemudian, sekitar pukul 9, sekelompok orang yang saya lihat, mereka masuk dan melakukan aksi anarkis. Dengan membakar sejumlah fasilitas: puskesmas, bank dan termasuk *sa pu* (sekolah milik saya) sekolah SMP Negeri I Kiwirok,” cerita Wosot.

Wosot adalah Ketua OSIS SMP Negeri I Kiwirok. “Ada 107 siswa total dari keseluruhan mulai dari kelas I-III. Sedangkan jumlah siswa di kelas saya sendiri sebanyak 30 siswa,” kata dia.

Selain sekolah, lanjut Wosot, sebagian besar rumah warga, termasuk rumah milik keluarganya juga dibakar. “Saya bersama mama dan warga lainnya kami pergi ke hutan. Kami berjalan dari Kiwirok menuju pegunungan Apom. Gunung itu berada di antara Distrik Kiwirok dan Oklip. Di hutan wilayah Oklip, kami tinggal selama satu minggu,” ujar Wosot yang bermimpi suatu kelak bekerja di bank.

Untuk sampai ke Oksibil para pengunjung dari Kiwirok ini harus melewati banyak sungai, di antaranya Kali Oktelie dan Kali Oklip yang besar dan cukup deras arusnya. Jembatannya terbuat dari tali rotan.

Perjalanan dari Kiwirok ke Oksibil, biasanya ditempuh dalam dua hari. Sangat relatif, karena ada yang bisa ditempuh cukup sehari, tergantung situasinya. Biasanya sesuai kemampuan si pejalan kaki. Wosot dan rombongan berjalan kaki selama dua hari. Mereka bermalam di kampung yang namanya Kubibkok.

“Saya ikut mama ke Oksibil. Sedangkan, bapa saya, kami berpisah di tengah hutan. Dia memilih ke Papua New Guinea (PNG). Sejak itu, kami berpisah satu dengan lainnya.”

Di Oksibil, Wosot masuk sekolah di SMP Negeri I Oksibil. Ia akan mengikuti ujian di Oksibil. Setelah selesai SMP,

Wosot ingin melanjutkan sekolah di Jayapura. Entah di mana?

“Itu cita-cita saja. Saya belum mau kembali ke Kiwirok. Saya ingin keluar,” kesan Wosot.

Selain kisah Wosot, ada cerita lain dari Joe [nama bukan sebenarnya]—anak laki-laki muda, berpostur tinggi. Ketika ditemui, ia mengenakan singlet putih, duduk di tepi tungku api. Joe, anak kedua dari tiga bersaudara. Ketiganya, semua laki-laki. Ibu, Joe, sudah meninggal. Ayahnya tinggal di Oksibil.

Setelah menyelesaikan sekolah SMP di Oksibil. Ia pergi ke Kiwirok untuk melanjutkan sekolah SMA di sana. Selama di Kiwirok, ia tinggal di rumah kepala sekolah. Di kala liburan, Joe berlibur di rumah saudara dari ayahnya, (disebutnya, bapak tua).

Joe saat ini kelas I SMA Negeri Kiwirok. Setiap hari, ia berjalan dari kampung Soba ke sekolah di SMA Negeri I Kiwirok. Saat terjadi tragedi itu, Joe bersama kelima kawannya pergi ke sekolah. Di sekolah ada teman-teman lain yang datang ke sekolah.

“Kami mendengar informasi akan ada aksi pembakaran sekolah. Dari sekolah, saya dan kawan-kawan, kami pergi ke pasar. Situasi pasar juga tidak ada aktivitas layaknya di pasar. Ada beberapa laki-laki mengatakan, kalian lebih baik pulang saja,” kisahnya.

Mendengar arahan itu, Joe dan kawan-kawan akhirnya berpisah. Joe kembali ke rumah jam 8 pagi. “Karena, *sa* (saya) terlalu *soak* (lelah). Lalu membaringkan diri sejenak,” ujarnya.

Satu jam kemudian, jam 0.09 WIT, sudah terdengar suara tembakan. Api sudah mulai membakar sekolah, puskesmas, bank dan rumah-rumah warga. Sedangkan SD Inpres Pulobakon, dibakar jam 14.00 WIT. Aksi saling tembak mulai semakin memanas antara TPNPB dan TNI. Itu terjadi sejak jam 09.00-17.00 WIT.

Joe mengaku melihat kelompok orang yang datang dan langsung membakar puskesmas serta rumah guru. Saat peristiwa itu terjadi, ia berada di rumah kepala sekolah.

“Kami melihat telah terjadi saling tembak antara TPNB dan TNI dari Pos. Karena takut, kami yang berada di dalam rumah kepala sekolah, ada lima orang. Selama tiga hari, kami tinggal di dalam rumah itu. Dua hari saya tidak makan. Kawan-kawan hanya makan supermi mentah. Tidak berani memasak di

tungku api. Takut terlihat kepulan asap dari dalam rumah itu," katanya.

Hari keempat ada seorang anggota TNI yang datang ke dekat rumah kepala sekolah. "Kalian jangan tinggal di sini. Bahaya, sebaiknya sekarang juga kalian pergi ke Pos Tentara. Setelah itu, kalian mau ke hutan silahkan saja," Joe mengulang perkataan salah satu anggota TNI itu.

Tepat pukul 5 pagi, Joe bersama rekan lainnya keluar dari Pos Tentara. Mereka pergi ke hutan. Di sana tidak ada rumah. Ia harus membuat sebuah bivak untuk seorang lelaki tua yang disebut bapak tua. Kondisi kedua matanya mengalami gangguan penglihatan. Begitu juga anak perempuan, anak dari si bapak tua yang menurut Joe, juga mengalami gangguan pada mata.

"Selama di hutan, ubi jalar (*boneng*) menjadi menu andalan kami. Selama tinggal di hutan, ada rasa takut. Anak-anak yang menangis. Orangtua mereka dengan cepat membujuknya. Jangan sampai ada suara tangisan anak," kisahnya.

Mereka tidur tanpa selimut. Pakaian pun hanya yang masih melekat di badan. Tidak ada stok pakaian untuk dirinya dan juga bapak tua. Menurut Joe, kedua mata bapak tua mengalami gangguan penglihatan. Setiap malam, Joe melihatnya selalu kedinginan.

Joe berniat kembali ke kampung untuk ambil selimut yang masih tersisa. Pagi-pagi, Joe berjalan kembali ke kampung di Kiwirok. Saat memasuki ujung kampung, tiba-tiba saja, peluru mengenai bagian betis kirinya. Ia menduga, peluru itu arahnya dari Pos TNI yang berada di sedikit ketinggian.

"Saya kaget sekali, gemetar dan berlari kembali dengan kaki dipenuhi lumuran darah. Saya tidak jadi ambil selimut. Luka ini, saya rawat sendiri dengan air hangat sampai sembuh," kata Joe sambil menunjukkan bekas luka di betis kirinya.

Joe kemudian memilih untuk pergi ke Oksibil dengan harapan bisa melanjutkan sekolah. Namun, kenyataan yang dialami berbeda dengan harapan.

Sekolah SMA Negeri I Oksibil, jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Joe di Okpol. Belum lagi, ia tidak memiliki perlengkapan untuk sekolah. "Kalau ikut ojek pergi pulang, saya tidak punya ongkos. Saya memutuskan untuk tidak sekolah. Ada keinginan untuk kembali ke hutan dan tinggal bersama

bapak tua. Saya membayangkan, mereka hidup seperti apa di sana? ”tuturnya dengan raut muka yang sedih.

Dalam kesedihannya, Joe masih mau berbagi kisah tragis yang dialami (kakek) Yehuda Tepmul, dia berasal dari kampung Okmangol Dia seorang duda. Kedua matanya buta.

Hari-hari *tete* Tepmul hidup bersama anak perempuan dan keluarga lainnya. Saat terjadi pembakaran, anak perempuan dan keluarga lainnya lari meninggalkannya seorang diri di rumah itu. *Tete* Tepmul pun terbakar bersama rumahnya.

Semua terjadi dalam waktu sekejap. Hanya tertinggal bayang-bayang ketakutan dan trauma. “Kami merasa, ancaman bukan saja dari aparat negara (TNI-Polri) tetapi juga dari kelompok bersenjata atau yang dijuluki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di bawah komando Lamek Taplo dan rombongan,” ujarnya.

Awal tiba di Oksibil, mereka semua yang ditemui *spp.id*, tinggal di posko pengungsi, lingkungan Gereja GIDI. Namun, menurut Joe mereka tinggal di situ, tiga hari saja. Setelah itu, kembali ke tempat keluarga. “Selama tinggal di rumah saudara. Rasa trauma masih menghantui kami. Apalagi, di saat ada anggota (TNI-Polisi) melakukan patroli di sekitar tempat tinggal kami,” ujarnya.

Trauma itu dialami setiap kali melihat aparat keamanan TNI-Polri, entah itu di jalan atau di sejumlah titik. Terlebih di pusat kota Oksibil (Mabilabol dan sekitarnya) dan di beberapa fasilitas pemerintahan dan swasta (bank, ATM) di Mabilabol. Pasti yang ditemui, aparat berpakaian lengkap dengan gagah menggantung senjata di bahu. Dengan terus mengawasi setiap aktivitas warga.

Dari pantauan *spp.id* selama beberapa hari di Oksibil (Desember 2021), itu pula yang terlihat. Satuan Brimob yang dikirim ke beberapa titik di Oksibil hampir setiap waktu, melakukan patroli dengan alasan melakukan pengamanan. Patroli dilakukan saat malam hari dan waktu-waktu tertentu yang telah dijadwalkan.

Tak jarang, warga yang tinggal di antara batas kota Oksibil dimintai kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepada *spp.id*, Pastor James Kossay menceritakan pengalamannya usai melakukan pelayanan ke umat di luar kota dan hendak kembali ke Pusat Paroki Hati Kudus, Mabilabol,

tempat tinggalnya.

Di tengah jalan Pastor James dihentikan aparat. "Mereka meminta saya untuk menunjukkan KTP. Saya bilang, silahkan ikut saya ke rumah. Saya tinggal di dekat tempat tinggal kalian (mess Polisi). Nanti, saya akan tunjukkan KTP. Saya kemudian diberi izin pergi," tutur Pastor James.

Pengalaman serupa dialami *spp.id* ketika menumpang ojek ke Okpol. Di tengah jalan, si pengendara ojek bertanya, "Mbak asalnya dari pegunungan ya? mau ke mana?"

Memang itu yang terjadi, jika ada wajah baru di Oksibil. Pasti saja ada yang memantau, entah itu tukang ojek, penjual di kios-kios, warung makan dan lainnya.

Di penginapan tempat kami tinggal, di waktu sore, datang dua orang dan menanyakan siapa saja yang menginap di situ kepada tuan penginapan. Ciri-ciri keduanya, yang satu berperawakan gempal, berambut gondrong, dan berkemeja putih. Lainnya menggunakan kopiah putih, berbaju kaos merah. Kehadiran keduanya seperti mengintai. Merasa tidak nyaman, *spp.id* dan *wagadei.com* pergi dari situ.

Situasi ini cukup membuat warga korban pengungsi merasa kenyamanan nya terganggu. Seorang ibu tiga anak menceritakan kisahnya, "Kalau kami pergi ke arah kota di Mabilabol. Dari Okpol mesti dengan ojek, lima menit. Ojek yang ditumpangi, sering banyak bertanya kepada kami. Dan di sana banyak aparat yang berjaga-jaga lengkap dengan senjata. Kami biasa rasa takut. Jadi, kalau kami ke kota, pulang nya pasti cepat dan tidak sampai jam 5 sore."

Ibu ini juga bercerita belum bisa kembali ke Kiwirok. "Kalau kami kembali, di mana kami akan tinggal? Anak-anak mau sekolah di mana? ibu mau berjualan di mana?. Apakah kami akan aman-aman saja? banyak pertimbangan untuk kembali ke Kiwirok."

Saat ini, anak pertama dan kedua mereka tinggal di Oksibil dengan Om ( adik dari mama) sambil sekolah. Sebelumnya, anak pertama mereka yang berusia 12 tahun sudah SMP kelas I di SMP Negeri Kiwirok. Anak kedua, kelas IV SD Inpres Pulobakon, Kiwirok. Sedangkan yang kecil, umur lima tahun, baru masuk TK.

Sang adik sekarang sekolah di SD Dabolding, Oksibil. Sedangkan kakaknya bersekolah di SMP Negeri Oksibil. Untuk

fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi ini, menurut Ibu, difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang. Mereka mendapatkan pakaian seragam dan peralatan belajar (buku, bolpen dan lainnya).

Namun, akses kesehatan menjadi tidak mudah. "Waktu saya sakit, saya kadang beli obat di luar. Atau pergi ke puskesmas terdekat," kata ibu tiga anak ini.

Besar harapan mereka kepada pemerintah, supaya secepatnya membangun rumah warga, juga fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kiwirok dan Oklip.

Menyangkut nasib siswa-siswi, Kepala Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang, Bernardus Tapyor, di ruang kerjanya mengatakan, dari data yang dihimpun secara kasar, jumlah pengungsi anak SD, SMP dan SMA secara keseluruhan mencapai 750-an anak.

"Data ini yang saya perkirakan dari sekian banyak anak sekolah. Yang ditangani secara darurat dengan cara dititipkan di beberapa sekolah yang ada di Oksibil," kata dia.

Anak-anak ini tersebar di beberapa sekolah, diantaranya SMA Negeri Kasipding, SMA YPPK, SMK Oksibil, SMP Negeri Oksibil dan SMP YPPK Oksibil. Ada juga yang masuk di SD Mabilabol, SD Dabolding dan Esipding.

"Nah, yang menjadi kendala anak-anak adalah soal tempat tinggal. Sebagian besar tinggal di keluarga. Ada juga yang tinggal di SMP GIDI Sion. Di situ ada seperti asrama, di jalan Okpol. Terkait kebutuhan makan minum," kata dia.

Menurut Tapyor, Dinas Pendidikan sudah menyumbang berupa beras, supermi, air minum dan bahan tulis.

"Menyangkut Dapodik siswa, kita akan tindaklanjuti khususnya yang ada di jenjang kelas I dan II SMP. Sedangkan mereka yang sudah kelas III tetap akan mengikuti ujian di sini. Nanti, ijazah mereka, kita gunakan alamat dan lainnya sesuai asal sekolah," kata dia.

Lantas bagaimana dengan mereka yang masih kelas I dan II SMP, serta di bawah kelas VI SD. "Nah, mereka ini, kami harapkan, apabila bangunan sekolah mereka sudah dibangun, kami akan kembalikan mereka ke sekolah asal. Itu sempat dibicarakan dalam rapat koordinasi dengan bupati. Harapannya, fasilitas pendidikan bisa cepat di bangun dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan seperti semula," ujarnya.

Jika bangunan fisik sekolah belum juga rampung Tapyor melihat alternatif lain dengan memindahkan dapodiknya ke sekolah tempat mereka mengenyam pendidikan di sini (Oksibil).

Tapyor mengatakan, tidak ada sekolah darurat yang dibangun. "Tapi, inisiatif dinas pendidikan langsung menitipkan anak-anak sesuai jenjang pendidikan mereka ke tiap sekolah," ujarnya.

Menurut Tapyor, pihaknya tetap memberikan akses pendidikan. "Kami akui meskipun situasinya berbeda dengan kondisi sekolah awal. Namun, yang terpenting di sini adalah mereka bisa belajar kembali. Semua siswa-siswi korban dari pembakaran sekolah SMP dan SMA yang terjadi di Serambakon, Oksibil juga kami perhatikan."

Ketua Dewan Adat Pegunungan Bintang-Yohanes Kakyarmabin merasa prihatin, mengapa fasilitas sekolah dan kesehatan harus dibakar. "Dengan membakar fasilitas sekolah, sama saja telah memutuskan masa depan generasi mendatang. Anak-anak akhirnya banyak yang mengalami trauma. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian akan masa depan," kata dia.

Sejak pembakaran di Kiwirok, sebagian besar warga sipil melarikan diri atau mengungsikan diri secara sadar—karena merasa terancam. Mereka pergi mencari tempat yang aman. Entah, itu ke negara tetangga (PNG) atau ke kampung-kampung terdekat.

Pihak Dewan Adat meminta kepada pemerintahan daerah mulai dari tingkat kampung, distrik hingga pemerintahaan di Kabupaten Pegunungan Bintang agar bertanggung jawab sepenuhnya menangani pengungsian. "Harus ada koordinasi antara pihak lintas sektor menyangkut penanganan pengungsian. Saya lihat sampai hari ini, tidak ada niat baik dan serius untuk duduk bersama dan melihat duduk persoalannya," ungkap Yohanes.

Yohanes menilik akar masalah di Kiwirok, sejak peristiwa itu terjadi belum jelas apa penyebabnya. Menurutnya, kalau masyarakat dari Kiwirok yang datang ke Oksibil dan dianggap sebagai pengungsi, berarti jelas juga penanganan dan soal datanya.

Namun demikian, menurut Yohanes, hingga saat ditemui spp.id, tidak ada data yang lengkap di tangannya.

Pihaknya kesulitan untuk memastikan kepada pihak-pihak terkait yang menanyai data pengungsi kepadanya.

“Mereka ini, mau dibilang pengungsi juga tidak jelas. Sedangkan mereka yang tinggal di lingkungan Gereja GIDI hanya dua tiga hari saja. Lalu pergi mencari tempat sendiri di keluarga. Apakah ini dikategorikan pengungsi? Setelah mereka menyebar ke rumah keluarga, ada yang bertanggung jawab secara moril dan materil? Saya secara pribadi merasa sangsi,” tegas Yohanes.

Dalam laporannya kepada Dewan Adat Papua, pihaknya hanya melaporkan gambaran umumnya saja. “Sebenarnya, pihak distrik dan kampung yang mestinya memberikan laporan berupa data tentang warganya kepada kami Dewan Adat atau pihak-pihak terkait. Kami sangat prihatin dengan kondisi warga yang hingga memasuki bulan ke-3 (September-Desember). Bagaimana nasib mereka? semua kembali pada pemerintah, mulai dari kepala kampung, distrik, hingga bupati, semua harus bertanggung jawab terhadap nasib pengungsi Kiwirok.”

Kesimpangsiuran data para pengungsi Kiwirok juga diakui Perwira Penghubung Organik Kabupaten Pegunungan Bintang, Kodim 1715 Yahukimo, Mayor Infantri, P.H.B.B. Panjaitan.

“Kita tidak bisa katakan (warga Kiwirok) yang datang ke Oksibil ini pengungsi. Kalau pengungsi, harus ada tempat khusus untuk mereka. Dan di situ didata. Ini, tidak demikian. Tidak bisa dikategorikan pengungsian, karena tidak ada tempat kumpul yang jelas,” kata Panjaitan.

Data jumlah pengungsi juga masih menjadi masalah untuk saat ini, padahal Panjaitan sudah berkomunikasi dengan koordinator penanganan pengungsi Kiwirok, Nelson Nawipa.

“Sudah saya tanya Nelson tentang data pengungsi. Dia mengaku tidak memiliki data yang akurat. Katanya, dia kesulitan mendata warga pengungsi. Hanya menyampaikan, pengungsi tersebar di 16 titik di Oksibil, itu saja. Sedangkan, dari pihak kami (TNI) sebenarnya mau mendata, tapi, kami juga agak kesulitan,” kata Panjaitan.

Menurut Panjaitan, sebelumnya dikabarkan ada sembilan orang pengungsi. Setelah tim ke sana, tidak sesuai dengan jumlah itu. Kadang hanya ada 5-6 orang saja.

“Saat kami membantu mendistribusikan logistik

dari posko ke tempat tinggal pengungsi tidak jelas datanya. Bagaimana dengan kepala kampung, distrik di sana? Bisa dikatakan tidak jelas. Kita mau menyatakan fungsi dari pemerintahan kampung sendiri seperti apa?" ujarnya.



Lokasi Posko penanganan kemanusiaan di Pegunungan Bintang (foto : fonsa wayap/tspp)

Menurut Panjaitan, dia juga bertanya kepada beberapa warga Kiwirok di Oksibil. "Siapa pelakunya, jawabanya tidak tahu. Ketika kejadian kami langsung lari ke hutan begitu jawaban mereka," ujar Panjaitan.

Sementara itu, Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarinto, S.IK,M.KP mengatakan, setiap konflik di manapun pasti warga sipil menjadi korban. Akibat konflik, semua menjadi terhenti. Misalnya, akses kesehatan. "Bagaimana mungkin mama-mama yang mau melahirkan bisa ditolong tenaga medis. Begitu pula yang balita tidak bisa dapat imunisasi dan lainnya. Sementara akses kesehatan dibakar. Petugas kesehatannya tidak ada. Mereka keluar dari situ," ujarnya.

Dari segi kondisi geografis, dari 34 distrik di daerah Pegunungan Bintang, yang bisa diakses dengan jalan darat hanya lima distrik. Di sisi lain, Cahyo juga melihat dampak terhadap pendidikan anak. "Kita ingin supaya adik-adik yang

sekolah bisa difasilitasi. Bukan malahan dihancurkan,"kata Cahyo.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah yang lebih tahu situasi dan kondisi masyarakat di sana agar segera melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh, supaya kondisi yang sulit di pegunungan Bintang bisa dibicarakan bersama untuk mencari solusi.

Sejak terjadinya pelarian ke Oksibil, pemerintah tidak menyediakan tempat khusus untuk mereka. "Pemerintah sendiri tidak pernah menyediakan pos pengungsi yang jelas," ujar Pastor Dekanat Pegunungan Bintang selaku Pastor Paroki Roh Kudus Mabilabol, Oksibil Pastor James Immanuel Kossay.

Kalau disebut pengungsi idealnya bukan sekedar ditampung di Posko yang ada di Gereja GIDI. "Setidaknya ada fasilitas khusus yang dibuat untuk menangani trauma healing. Kan, sampai hari ini tidak ada," kesan Pastor James.

Menurut dia, yang dikatakan pengungsi itu harus mendapatkan pendampingan khusus supaya mereka bisa keluar dari situasi hidup yang berat.

"Saya sangat percaya, setiap mereka yang mengalami trauma (mengalami peristiwa itu) tidak akan hilang dalam waktu sekejap. Itu tadi, sebelumnya sudah ada 'luka-luka' peristiwa masa lalu," kata dia..

Pastor James mengaku sempat menyambangi para pengungsi di posko, yang kebanyakan anak-anak. Dia juga sempat bertanya, apakah dalam waktu dekat mereka akan kembali ke Kiwirok.

Namun, para pengungsi rata-rata menjawab masih takut untuk kembali ke Kiwirok. "Apalagi situasi di sana benar-benar tidak memberikan keamanan kepada kami," ujar Pastor James, menirukan jawaban para pengungsi..

Peristiwa Kiwirok seperti mengulang peristiwa sebelumnya, pernah terjadi operasi militer mulai dari wilayah Kiwirok hingga ke Distrik Batom.

"Luka itu masih membekas. Mereka betul-betul seakan kembali ke peristiwa masa lalu. Dan hari ini, ada yang masih hidup dan kembali mengalami peristiwa Kiwirok. Narasi-narasi setiap peristiwa itu kemudian diceritakan kepada anak, cucu mereka. Dan ketika kejadian itu terjadi lagi. Kecemasan itu

benar-benar terjadi dan membuat mereka harus mengungsi,” ujarnya.

Sejak itu, sebagian besar warga mengungsi ke PNG. Pada 2008 atas komunikasi dengan Uskup Keuskupan Jayapura Leo Laba Ladar, OFM dengan Uskup Vanimo (PNG) waktu itu. Membuat sebagian warga kemudian dipulangkan ke Kiwirok dan sekitarnya.

“Ada yang ke Oklip ada juga yang ke kampung-kampung tetangga di wilayah Kiwirok besar. Mereka tersebar di Oklip, Okhika, Kotyobakon, Okyop, Oksip (wilayah Ambisibil) ada juga yang sampai ke wilayah Kubibkok. Ada sebagian yang ke arah wilayah Ketengban di Mongham. Yang lainnya berpencar ke Tinibil (masuk kabupaten Pegunungan Bintang),” kisahnya.

Orang-orang Kiwirok yang datang ke Oksibil terbagi atas dua kelompok agama: Katolik dan GIDI. Yang Katolik kata Pastor James, datang dan melapor diri tentang keberadaan mereka di Oksibil. Mereka itu tersebar di beberapa komunitas basis (kombas).

“Saya juga sampaikan kepada umat di tiap kombas dimana ada saudara-saudari dari Kiwirok. Tolong dibantu,” ujarnya.

Menyikapi pasca peristiwa Kiwirok, pihaknya juga membuat seruan moral kepada pihak-pihak terkait. Pertama, dalam hal ini kepada Bupati Pegunungan Bintang dan DPRD yang membidangi persoalan tersebut supaya memberikan perhatian dan perlindungan serius bagi warga yang sudah mengungsi dari tanahnya.

Kedua, diusulkan agar pemerintah segera membentuk dan mengirim tim independen untuk melakukan investigasi mengenai konflik tersebut.

Dari ribuan pengungsi yang ada di Papua paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Disoroti Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar kepada media di Papua yang dikutip [tssp.id](https://tssp.id) (17 Desember 2021-Cendrawasih Pos).

Para pengungsi ini mencari jalannya sendiri-sendiri. Hal ini karena minimnya peran pemerintah di setiap konflik di daerahnya. Sudah seharusnya ditanggapi dengan serius oleh pemerintah.

Situasi di daerah konflik yang menjadi korban adalah

warga sipil yang mencari jalannya masing-masing. Mereka ini adalah kelompok yang paling rentan saat konflik. Mereka mencari keselamatannya sendiri karena negara gagal melindungi mereka.

Apabila penanganan para pengungsi tidak ditangani secara baik, termasuk pemenuhan hak dasar mereka untuk mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan, hal ini akan berakibat fatal. Sebab, daerah-daerah yang mengalami konflik hingga memicu pengungsian adalah daerah dengan pelayanan publik yang sangat rendah.

“Ini kemudian menjadi kompleks persoalannya, sehingga ketika terjadi konflik mereka sama sekali tidak terlindungi. Padahal, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan keamanan yang utama adalah tugasnya pemerintah. Itu undang-undang yang berbicara,” tegas Anum.

Pada kondisi biasa saja sebelum adanya konflik, kata Anum, aktivitas sekolah dan fasilitas kesehatan tidak berjalan baik di daerah tersebut. Apalagi ketika adanya konflik. Dengan melihat kondisi tersebut, sangat penting pemerintah segera menangani pengungsi di wilayah-wilayah konflik.

Para pengungsi sebaiknya, diajak kembali ke kampungnya. Dengan memberikan perlindungan keselamatan untuk mereka. “Cara pemerintah yang mengabaikan warganya di lokasi pengungsian bisa berpotensi menyebabkan mereka bergabung dengan kelompok OPM. Yang paling terpenting, para pengungsi ini tidak diberi stigma apapun. Pemenuhan hak dasar mereka harus terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan, makan minum dan tempat tinggal,” ujar Anum.

Anum menambahkan, “Mengabaikan warga di daerah konflik terutama mereka yang mengungsi merupakan bagian dari pelanggaran kejahatan, pelanggaran yang dilakukan pemerintah dengan mengabaikan hak-hak mereka.”

Menurut dia, warga sipil di beberapa daerah di Papua sebagai korban konflik dari dua kekuatan bersenjata yaitu TNI-Polri dan OPM. Dua kekuatan ini kerap berkonflik di ruang publik.

“Warga sipil di daerah konflik kerap menyaksikan kematian dan ruang-ruang publik digunakan untuk aksi kekerasan, sehingga tak sedikit masyarakat sipil menjadi korban,” ujar Anum.

Di mana perlindungan hak terhadap anak ketika

peristiwa konflik bersenjata terjadi di Kiwirok? Padahal, hak anak juga menjadi kewajiban negara. Sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (2), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak”

Perlindungan terhadap hak hidup anak dalam konflik bersenjata menjadi kewajiban hukum negara, melalui Pemerintah Pusat, Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten.

Kepada *spp.id* Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH-Papua) Emmanuel Gobay mengatakan, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi konflik bersenjata.

Sampai saat ini, menurut Gobay belum ada satupun upaya yang dilakukan oleh KPAI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi konflik bersenjata di Papua dan terlebih khusus di Pegunungan Bintang.

Padahal secara hukum perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata merupakan tanggung jawab negara berdasarkan perintah ketentuan. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban

mereka menurut hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Maka, negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang dipengaruhi oleh suatu konflik bersenjata. Sebagaimana itu diatur di pasal 38 ayat (4), konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak anak.

Secara teknis perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu telah diatur dalam ketentuan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya.

Sampai dengan berita ini diturunkan *spp.id*, Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana belum memberikan komentar meski *spp.id* telah menghubunginya untuk mengonfirmasi terkait penanganan Pengungsi Kiwirok.

Berikut data yang dihimpun *suaraperempuanpapua.id* dari Tim Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKCFP) dan Dekanat Pegunungan Bintang.\*

## 4.1. Pendamping: Rentetan Peristiwa Kiwirok dan Trauma Mendalam<sup>5</sup>

Oleh: Alfonsa Jumkon Wayap

*Peristiwa penyerangan mendadak dan diikuti pembakaran merupakan aksi sadis yang menimbulkan trauma bagi masyarakat setempat.*

Sejumlah peristiwa penyerangan dan pembakaran di Kiwirok beberapa waktu lalu, telah menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat setempat, utamanya perempuan dan anak-anak. Aksi anarkis tersebut menimbulkan keresahan yang berkepanjangan.

Berikut adalah informasi yang dihimpun dari data Tim Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua dan Dekanat Pegunungan Bintang tentang kejadian tersebut.

Dari data dan informasi tersebut dinyatakan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap pos TNI, pembakaran puskesmas, pasar, sekolah (SD, SMP, SMA Negeri) Gedung Pos TNI, Bank Papua Cabang Kiwirok, Perumahan dan Balai Kampung Pelebib, Gedung SD di Kampung Asua dan Kampung Sopamikma. Para pelaku aksi tersebut diduga berasal dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN/PB)



Kota Oksibil (foto : fonsa wayap/tspp)

---

<sup>5</sup> Tulisan ini terbit di *suaraperempuanpapua.id* edisi 30 Januari 2022.

Akibat aksi penyerangan dan pembakaran tersebut, sejumlah orang menjadi korban, diantaranya adalah petugas medis suster Gabriela Meliani (meninggal dunia), Elli Mimin (TPN-PB) meninggal dunia, dan anggota TNI (kena tembakan).

Disebutkan, pada Selasa (14/9/2021), terjadi penyerangan di Kota Distrik Okikha. Para penyerang dilaporkan telah melakukan pembakaran Gedung Puskesmas dan Kantor Distrik. Namun, pelakunya belum teridentifikasi.

Kemudian pada Selasa (21/9/2021) dilaporkan terjadi kembali kontak senjata di Bandara Kiwi, Distrik Kiwirok. Akibat aksi saling tembak antara TNI dan TPN-PB, jatuh korban Serda Ida Bagus Dari Satuan Yonif 403 (meninggal). Iptu Budi Basra (tertembak di bagian dada dalam proses perawatan).

Hingga Sabtu (25/9/2021) terjadi kembali aksi kekerasan bersenjata di Kota Distrik Okyop, berupa pembakaran Gedung Puskesmas dan SD Negeri. Para pelaku penyerangan dan pembakaran sedang diidentifikasi dan dilaporkan tidak ada korban.

Pada Minggu (26/9/2021), di kawasan kompleks Polsek, Kiwirok, terjadi lagi baku tembak antara TPN-PB dan TNI Polri. Pelaku, TPN PB, TNI Polri, dan Satgas Nemangkawi Bharatu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio.



*Seorang Anak di bevak pengungsian (foto : fonsa wayap/tspp)*

Akibat serangkaian konflik ini, warga yang mengungsi berasal dari Kiwirok Kota, Apom, Pomding. Mereka banyak yang mengungsi ke wilayah Distrik Oklip (Kampung Otem, Pelepkon, Okbumul).

Sedikitnya 213 warga Kiwirok Kota, Pomding berhasil diungsikan dan ditampung di Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Sion Oksibil, sebagai Posko Utama. Kabiding Lokasi 2, di Jalan SMA Negeri Oksibil ada 22 Warga) Jalan SMK Oksibil, Atbon (ada 2 lokasi), Balusu (ada 2 lokasi dengan jumlah 31 warga) Jalan SMP YPPK Mabilabol, Okpol (ada 4 lokasi). Jumlah pengungsi sebanyak 213 Warga di Wilayah Oksibil.



*Bevak yang dibangun warga yang menghindari dari aksi serang dan pembakaran fasilitas publik di Kiwirok, Pegunungan Bintang (foto : fonsa wayap/tspp)*

Dari jumlah warga yang diungsikan, tercatat berdasarkan usia adalah bayi 6 orang, SD 22 orang, SMP 31 orang, SMA 140 orang dan dewasa 140 orang. Warga yang mengungsi dari Kiwirok Kota, Apom Pomding- Wilayah Distrik Oklip (Kampung Oktem, Pelepkon, Okbumul).

## 5.

# Misteri Hilangnya Dua Pemuda di Serambakon Pegunungan Bintang<sup>6</sup>

Oleh: Alfonsa Jumkon Wayap

*Dua anak muda dari Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang hilang setelah kontak tembak antara tentara TNI dengan TNPB-OPM pada 28 April 2020. Banyak persoalan yang dampaknya terhadap anak-anak. Namun, seakan terlihat seperti tidak ada masalah. Meski terpuruk gereja terus ada bersama umatNya.*

ASPENAS Kasipmabin, siswa sekolah menengah atas dari Kampung Seramkatop, Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua. Sedangkan Jekson Sitokmabin, pemuda Kampung Wanbakon, juga di Distrik Serambakon. Keduanya dinyatakan hilang dalam rentang waktu berdekatan. Aspenas hilang pada 18 Maret 2021, disusul Jekson sehari setelahnya.

Kabar hilangnya kedua pemuda tanggung ini, bermula dari peristiwa saling tembak antara TNI versus TPNPB-OPM di Daolbakon, Serambakon, Oksibil, Pegunungan Bintang pada 28 April 2020.

Dari penuturan Sakjap [bukan nama sebenarnya] kepada *spp.id*, siang itu, usai pulang dari sekolah, Aspenas melewati jalan raya utama menuju kampungnya, Seramkatop. Di tengah perjalanan, tempat terjadinya peristiwa saling serang. Aspenas kemudian dihadang dan entah di kini dia berada, masih misteri.

Sedangkan, Jekson Sitokmabin ditangkap di tengah jalan utama Serambakon, pada 19 Maret 2021. Sakjap bersama warga lainnya sempat terlibat dalam pencarian terhadap keduanya.

“Kami tidak menemukan keberadaan keduanya sampai hari ini (Januari 2022). Yang saya sayangkan, tidak ada tindakan serius yang dilakukan oleh pihak keamanan. Terkesan kasus hilangnya

---

<sup>6</sup> Tulisan ini terbit di *suaraperempuanpapua.id* edisi 31 Januari 2022.

dua orang ini dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Satu hal juga yang diutarakan Sakjap adalah ketika ada peristiwa di kampung, pihak keamanan sering datang setelah peristiwa itu terjadi. Sehari atau dua hari kemudian. Lalu datang dan bertemu dengan orang yang tidak tahu tentang peristiwa itu. Bahkan terjadi salah tangkap.

Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarinto, S.IK,M.KP saat dikonfirmasi *spp.id* terkait penanganan kasus Jekson dan Aspenas menjawab melalui pesan singkat. "Kami telah melakukan pencarian bersama dengan masyarakat. Hingga saya ini belum ditemukan. Upaya-upaya tetap kami lakukan khususnya untuk melakukan pencarian dan juga menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Di antaranya kepala distrik dan para tokoh-tokoh masyarakat guna mendapat informasi. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan," ujarnya.



Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarinto, S.IK,M.KP (foto : fonsa wayap/tspp)

Dengan adanya peristiwa-demi peristiwa di wilayah Serembakon, ditambah lagi dengan meningkatkan aktivitas keamanan yang lebih intens, jam aktivitas masyarakat diatur sesuai peraturan militer yang berlaku.

"Sudah satu tahun ini berjalan, masyarakat tidak merasa bebas untuk beraktivitas. Kami sekarang terkekang dan

bukan lagi hidup dalam negara demokratis yang menjamin hak-hak kebebasan dalam melakukan aktivitas sebagai masyarakat biasa," ujar Sakjab.

Sebagian besar tempat-tempat mencari makan dan minum dibatasi. Bahkan juga ke kebun, tempat sumber air, mandi, cuci, kakus (MCK), hingga tempat berburu, berkebun, serta berbagai tempat yang dianggap sakral. Tempat-tempat ini hanya boleh dimasuki orang-orang tertentu sesuai suku-marga.

Ston [bukan nama sebenarnya] yang merupakan rekan Sakjab yang tinggal di wilayah Serambakon kepada *spp. id*, mengeluhkan, "Kami kadang mengira mereka tidak ada di tempat-tempat yang kami anggap sakral. Atau kebun-kebun tempat kami mencari makan. Ibu-ibu bertaman, di sumber-sumber air, tempat kami mengambil air untuk kebutuhan makan, minum. Dan itu masih berlangsung. Kapan saja kami bisa bertemu mereka. Kami merasa terganggu sekali. Seluruh aktivitas makan, minum kami ada dalam pengawasan mereka (TNI-Polri)."

Bukan hanya itu. Aktivitas ibu-ibu yang sering berjualan di pasar Oksibil juga dibatasi. Beberapa ibu yang dari Serambakon mengatakan, "Kami datang ke sini untuk berjualan, biasa dari pagi buta. Kami pulang juga harus cepat-cepat, sebelum malam. Kami biasa ditanyai macam-macam, harus kasih tunjuk KTP."

Kebebasan dalam beraktivitas juga dibatasi, namun penjarahan kerap terjadi. Rumah-rumah yang terkunci dengan sengaja didobrak dan barang milik masyarakat diambil, seperti alat dapur, alat tidur, alat-alat kerja serta busur dan anak panah, hingga senapan angin.



Paroki Keuskupan Pegunungan Bintang (foto: fonsa wayap/tspp)

Kronologis Peristiwa yang *spp.id* himpun dari Dekanat Pegunungan Bintang, Paroki Mabilabol, Oksibil, Pastor James I.Kossay,Pr adalah sebagai berikut.

Pertama, terjadi kontak senjata antara TNI dan TPNPB-OPM tanggal 28 April 2020 di kampung Seramkatop dan Wanbakon. Setelah peristiwa ini, pihak militer mulai bertempat di Seramkatop.

Kedua, 23 Oktober 2020, terjadi penangkapan dan penganiayaan dan pemenjaraan terhadap dua warga sipil selama dua minggu di Polres Pegunungan Bintang. Keduanya adalah Ponius Uropmabin (penginjil) dan Salmon Kaladana (umat katolik). Mereka dituduh terlibat sebagai anggota TPNPB-OPM, tanpa barang bukti yang jelas.

Ketiga, 18 Maret 2021 telah terjadi saling tembak, menurut dugaan sementara pihak militer sendiri. Itu terjadi di jembatan Okbon/Oksibil tepatnya di tanjakan kampung Etilkatop. Namun, hal ini dianggap mengalikan isu atau menuduh baku tembak antara TNI dengan TPNPB-OPM.

Mobil yang sering digunakan pihak aparat (TNI) dengan rute arah bukit di Seramkatop maupun turun ke dataran rendah di ibu kota kabupaten, Oksibil. Ketika itu, kendaraan tersebut menuju Seramkatop. Di dalamnya ada seorang lelaki paruh baya, bernama Yupensius Oktemka (umat Katolik). Nah, dari keterangan itu, tuduhan terhadap aksi baku tembak itu dari TPNPB-OPM. Kehadiran Yupensius, menegaskan bahwa tuduhan itu tidak berlanjut. Sampai di situ, isu itu redam.

Keempat, pada 28 April 2020 sampai dengan 18 Maret 2021. Menurut keterangan Sakjap, terhitung sebelas bulan, terus terjadi operasi militer mulai dari penyisiran rumah tempat tinggal masyarakat sampai di tempat-tempat aktivitas masyarakat.

Kejadian lainnya yang dialami delapan pelajar SMP Negeri Serambakon, pada 12 November 2021. Kedelapan anak tersebut adalah Kayus Uropmabin, Bedilan Asemki, Musiel Asemki, Benidiktus Asemki, Elsi Kasipmabin, Nason Kalakmabin, Yonan Uropmabin dan Koper Asemki. Kedelapan anak ini dituduh mengancam anggota Brimob menggunakan api.

Kasus ini bermula saat delapan anak ini merencanakan untuk rekreasi bersama usai pulang sekolah pada hari itu.

Tempat rekreasi yang dituju adalah Sungai Oksibil. Dapat *spp.id* gambarkan kondisi geografis di wilayah Serambakon ini tanahnya berbukit, sedikit mengarah ketinggian.

Menggunakan kendaraan roda empat, *spp.id* sempat melakukan perjalanan darat dari kota Oksibil sampai ke ujung distrik Serambakon. Jalannya aspal. Beberapa sungai-sungai besar –bejembatan– diantaranya Sungai Oksibil, sempat dilewati *spp.id*. Aliran airnya cukup deras dan sangat jernih. Berbanding terbalik dengan yang diberitakan dalam berita-berita yang menggambarkan kondisi wilayah ini. Seakan kondisinya sulit dijangkau. Itu sekilas gambaran tentang Serambakon.

Kembali ke kisah delapan anak tadi. Mereka yang berjalan menuju Sungai Oksibil, membawa beberapa ekor ayam untuk dibakar, tepat pukul 11.00 WIT.

Diperkirakan jarak antara kampung dan Kali Oksibil sekitar 3 kilometer. Ketika itu, musim kemarau. Di pinggiran kali, banyak rumput kering. Mereka sempat membakar rumput kering di sekitar kali. Sambil bersenda gurau, layaknya anak-anak. Tak disangka, menurut sumber terpercaya, muncul sejumlah anggota satuan Brimob lengkap dengan atribut, langsung menangkap kedelapan pelajar ini.

Kedelapan pejar itu kemudian dibawa melalui jalan tikus (jalan setapak) menuju “markas” Brimob. Dalam perjalanan mereka mendapat penyiksaan.

Tidak jauh dari situ, untungnya ada kepala kampung yang mendengar suara anak-anak yang berteriak meminta tolong. Ia kemudian bergegas menuju ke sumber suara. Dengan menggunakan baju kebesaran seorang kepala kampung.

Sesampainya disana, dijumpainya kedelapan pelajar tersebut. Mereka sudah terbagi menjadi dua kelompok. Yang empat pelajar dimasukkan dalam satu ruangan, dan empat lainnya di ruang sebelah.

Menurut kesaksian kepala kampung, mereka hampir saja mendapat penyiksaan. Kepala kampung meminta kepada pihak keamanan dengan mengatakan, “Bapak-bapak yang terhormat, saya sebagai perwakilan dari pemerintah kampung ini, memohon segera mengembalikan anak-anak saya. Apapun yang terjadi terhadap anak-anak ini, biarlah terjadi bersama saya!”

Setelah itu satuan Brimob langsung mengembalikan kedelapan pelajar itu kepada kepala kampung.

Pastor James kepada *spp.id* mengaku menyesalkan situasi yang masih terus berkejolak di Serambakan. Dalam situasi ini, anak-anak mendapat intimidasi. Untuk itu pihaknya berharap agar semua tokoh, termasuk Bupati Pegunungan Bintang untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sejumlah harapan yang disampaikan Pastor James belum terwujud. Pihaknya masih berharap agar semua pihak satu kata untuk bersama menyelesaikan masalah ini. "Yang saya amati, itu tidak terjadi. Situasi di sini mau dibilang aman juga tidak. Di saat ada orang meninggal, seperti tidak ada orang yang meninggal. Bila ada keluarga yang hilang, juga terkesan seakan tidak ada yang hilang. Padahal, ini gaungnya luar biasa dalam hubungannya dengan persoalan kemanusiaan. Jika terus dibiarkan maka diyakini dampaknya buruk."

Itu bisa dilihat dari kenyamanan masyarakat yang terus terusik dengan berbagai tindakan mulai dari teror, intimidasi, dan pemeriksaan terhadap setiap masyarakat yang keluar masuk wilayah Serambakan.

"Ada banyak hal yang kemudian berakibat buruk bagi kehidupan umat di sini. Saya harap kepada pihak-pihak yang masih ada ego: secara pribadi, kelompok, antar kampung. Saya mengajak, untuk menanggalkan kepentingan. Mari kita memberikan perhatian penuh untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengutamakan nilai manusia dan demi anak-anak kita," ujar Pastor James.



Pastor James Kossay (foto : fonsa wayap/tspp)

Pastor James mengajak semua pihak untuk melihat nasib anak-anak yang sekolahnya dibakar. Mereka mau sekolah bagaimana? Sekali lagi, kata Pastor James, jangan melihat masalah ini hanya milik kampung, orang atau kelompok tertentu. Tapi, dengan kerendahan hati mengemukakan persoalan ini sebagai persoalan bersama.

“Banyak persoalan yang dampaknya luar biasa. Dan anak-anak itu betul-betul kena dampak. Tapi, terlihat seperti tidak ada masalah. Itu yang terjadi. Punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tapi tidak melihat. Kami dari pihak gereja tetap ada terus bersama umat. Dengan cara kami, kami terus bekerja melalui data. Itu pun sudah kami perjuangkan, tapi, semakin terus terjadi,” ujar Pastor James dengan nada sedikit kesal dan terus menginginkan adanya solusi bersama.

Pemerintah daerah seharusnya bisa jadi tuan rumah. Pastor James merasa seperti tidak sanggup lagi melihat masalah ini. “Kami bisa juga menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua atau Pemerintah Pusat, yang memang kalau mau mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (manusia). Boleh turun dan lihat kami di sini (Pegunungan Bintang),” kata Pastor James mengakhiri rangkaian wawancara *spp.id* dalam peliputan khusus Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. (Desember 2021) pasca konflik bersenjata di Kiwirok terhadap warga sipil di beberapa titik di Pegunungan Bintang.

## 6.

# Negara Abai dengan Pelanggaran HAM di Papua<sup>7</sup>

Oleh: Elfira Halifa



*PENGUNGSI YAHUKIMO: Sejumlah perempuan dan anak-anak terpaksa mengungsi akibat kerusuhan yang terjadi Oktober 2021 lalu.*

*Papua, sebuah Provinsi paling timur Indonesia. Orang orang menyebutkan surga kecil yang jatuh ke bumi. Gunung gunung menjulang tinggi, bukit bukit tersusun hijau dan aliran sungainya yang deras.*

*Tapi, Papua yang dieluk elukkan sebagai surga kecil berbanding 80 derajat dengan kehidupan masyarakatnya. Kontak senjata antara TPN-OPM atau versi lain KKB dan TNI-Polri kerap terjadi di tanah, bisa di bilang hampir setiap hari di waktu waktu tertentu kontak senjata itu terjadi. TNI-Polri, warga sipil hingga KKB*

---

<sup>7</sup> Tulisan ini terbit di Cenderawasih Pos pada 31 Januari 2022.

*berguguran dalam kontak senjata di atas tanah yang pernah dijajah belanda ini.*

*Masyarakatnya kerap menjadi korban kekerasan di atas tanahnya sendiri, menjadi korban konflik bersenjata. Bahkan, mengungsi di atas tanahnya sendiri.*

Cerita cerita pilu kerap terdengar, setiap kali terjadi kontak senjata. Anak anak dan perempuan ditembak. Anak anak yang meninggal di lokasi pengungsian akibat kelaparan, atau lansia yang meninggal dunia akibat tak mendapatkan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Di lain sisi, kontak senjata yang dilakukan pihak bertikai TPNPB dan TNI-Polri terjadi di ruang ruang publik. Ruang dimana anak anak dan perempuan berada, semisalnya di pasar, di bandara hingga di pemukiman warga. Pertikaian yang disaksikan langsung oleh anak anak dan perempuan.

Di Papua, konflik bersenjata yang paling sering terjadi di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya dan Yahukimo. Di tujuh daerah ini, korbannya mulai dari sipil, aparat hingga OPM atau penyebutan lain KKB.

Sepanjang tahun 2020, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terjadi 40 peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Ke-40 kasus tersebut didominasi kasus kekerasan berupa penembakan, penganiayaan dan penangkapan sewenang wenang oleh aparat. Dari puluhan kasus itu, mengakibatkan 276 orang menjadi korban baik ditangkap, luka luka maupun meninggal dunia.

Data lainnya, Amnesty International Indonesia mencatat sepanjang 2020 setidaknya ada 19 kasus pelanggaran HAM berupa pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil di Papua dan Papua Barat.

Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya mengungkapkan dari 19 kasus tersebut, 10 diantaranya melibatkan TNI, 4 kasus melibatkan anggota kepolisian, dan 5 kasus melibatkan keduanya. Adapun, jumlah korban yang jatuh dari keseluruhan kasus tersebut mencapai 30 orang. Seluruh terduga pelaku dari 19 kasus tersebut belum ada yang dijatuhi vonis dari pengadilan, baik pengadilan militer maupun pengadilan umum.

Sedang Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, sepanjang tahun 2021 menerima pengaduan

sebanyak 71 aduan. Dalam aduan tersebut, paling banyak hak yang dilanggar adalah hak atas rasa aman.

Data Polda Papua dalam 12 tahun terakhir ada 90 orang sipil tewas dan 127 orang lainnya luka luka akibat kontak senjata yang terjadi di beberapa daerah di Papua. Data lainnya, sebanyak 61 personel TNI-Polri tewas dan 135 personel TNI-Polri mengalami luka luka.

Dari jumlah 90 orang sipil yang tewas, salah satunya Pendeta Jeremia Zanambani yang ditembak TNI di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada September 2020. Tertembaknya seorang pendeta ini menambah daftar kekerasan di Intan Jaya yang masih terjadi hingga saat ini menyusul beberapa daerah lainnya seperti Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga dan Yahukimo.

Daftar konflik yang terjadi di beberapa Kabupaten di Papua ini membuat ribuan warga mengungsi ke hutan dan beberapa daerah lainnya yang dianggap aman, warga Intan Jaya yang masih mengungsi ke Nabire dan Mimika, serta warga Kiwirok yang mengungsi di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang.

### **Kewajiban Negara yang Tidak Terpenuhi**

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan, seluruh janji dan kewajiban negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua tidak ada yang terpenuhi.

Terlebih, impunitas selama ini yang terjadi di Papua. Sejak Papua masih berada di era orde baru hingga Papua berada di era reformasi. Khususnya, dalam hal kejahatan pelanggaran HAM.

“Hingga saat ini, pembunuhan yang tidak sah, pembunuhan di luar proses hukum, penculikan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan hingga pemindahan paksa masih saja terjadi di Papua dan terus berulang, tanpa ada satupun pelaku yang dihukum secara adil,” papar Usman.

Disisi lain, beberapa pejabat militer yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua justru mendapatkan promosi tanpa adanya penghukuman. Usman ingat benar, janji pemerintah Indonesia pada tahun 2015 di depan sidang dewan HAM PBB untuk membawa kasus Wamena dan Wasior ke pengadilan. Namun, itu semua tidak terpenuhi.

“Bisa dikatakan, kondisi Papua di bidang HAM sama sekali tidak ada kemajuan yang berarti. Praktek masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan, membuat orang Papua untuk melawan Negara,” kata Usman.

Dalam segi hukum humaniter, banyak norma hukum humaniter yang tidak dipatuhi baik negara maupun pihak berkonflik yang bersenjata di Papua. Norma hukum humaniter misalnya, tidak boleh menyerang objek sipil, menasar warga sipil, kantor pemerintahan sipil, rumah warga sipil.

Kenyataannya, justru itu terjadi. Norma lainnya kata Usman, dalam berperang atau dalam konflik bersenjata, serangan hanya bisa dilakukan terhadap objek militer atau sasaran militer. Serangan itu hanya bisa dilakukan secara proporsional, namun itu juga tidak terpenuhi dalam banyak kasus.

Di sisi lain kata Usman, tidak ada proses penegakan hukum humaniter di Papua. Tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah yang menyatakan memberlakukan hukum humaniter di Papua.

“Dalam benturan konflik bersenjata di Papua, terdapat sejumlah kasus dimana ketika salah satu pihak tokoh pro kemerdekaan ditangkap. Ia masih mengalami penyiksaan, penyerangan dan penangkapan. Padahal, dalam hukum humaniter hanya dibolehkan terhadap sasaran militer atau sasaran kepada pihak yang berperang,” terangnya.

## Negara Tak Serius Selesaikan Pelanggaran HAM



*Linus Hiluka*

Eks tahanan politik Papua Linus Hiluka menyampaikan, Indonesia harusnya menyelesaikan kasus kasus pelanggaran HAM di Papua baru bisa berbicara masalah lainnya.

Kata Linus, semua korban pelanggaran HAM dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran HAM Berat, kompensasinya adalah Papua Merdeka. Ini karena negara tidak pernah serius menyelesaikan persoalan HAM di Papua.

“Semua pelanggaran HAM dia punya harga Papua adalah merdeka. Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM dan OPM adalah korban,” kata ayah empat anak ini.

Menurut Linus, negara melakukan pelanggaran HAM di Papua dengan senjata resmi yang dimilikinya. “Alat negara itu membunuh rakyatnya yang sementara berusaha memberontak atas ketidakadilan, itulah pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada rakyatnya di Papua,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua apalagi pelanggaran HAM. Bahkan, semakin hari pelanggaran HAM itu meningkat. Indonesia harusnya berbesar hati, membuka akses di Papua sehingga komisi tinggi HAM PBB bisa mengadvokasi semua kasus pelanggaran HAM di Papua.

### **Konflik Papua yang Sengaja Dipelihara**

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hese gem menyoroti penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak serius oleh pemerintah pusat. Seperti Wamena berdarah, Wasior hingga Paniai berdarah.

“Penanganan HAM di Papua sengaja dipelihara pemerintah pusat dengan catatan penanganannya tidak serius. Padahal, yang diharapkan masyarakat Papua adalah penanganan pelanggaran HAM harus serius, sebagai warga negara punya hak untuk memberikan keyakinan bahwa proses penyelesaian itu terjadi,” ucap Theo.

Terlebih Theo menyampaikan, konflik di Papua yang sengaja dipelihara orang-orang tertentu. Sebagaimana, operasi penegakan hukum di Papua yang dianggap gagal selama ini dan menimbulkan pelanggaran HAM baru.

## **Pendekatan Keamanan Menimbulkan Trauma**

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang BRIN) Cahyo Pamungkas menyebutkan, pendekatan keamanan yang dilakukan negara di Papua justru menimbulkan luka trauma. Dari tahun ke tahun ada saja korban dari konflik bersenjata di ujung timur Indonesia ini.

Bahkan lanjut Cahyo, luka dari korban jiwa yang hidup belum tersembuhkan lalu muncul lagi luka baru. Sehingga anak anak mereka, cucu mereka berpotensi akan ikut bergabung dalam gerakan itu.

“Indonesia secara langsung maupun secara tidak langsung, turut membesarkan gerakan OPM dengan cara masyarakat sipil yang menjadi korban dari operasi militer. Kemudian mereka bergabung dengan gerakan TPNPB,” tutur Cahyo.

Menurut Cahyo, Negara ingin memberikan solusi tetapi tidak menyelesaikan masalah di Papua. Termasuk dengan masa lalu maupun sekarang, kasus masa lalu tidak adanya penyelesaian masalah pelanggaran HAM, tidak ada rekonsiliasi dan tidak adanya dialog.

“Kekerasan politik dari dulu hingga sekarang mungkin sampai yang akan datang, seperti rantai siklus yang tidak hilang,” ungkapnya.

Untuk kasus pelanggaran HAM di Papua, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan Komnas HAM sudah menyerahkan tiga berkas perkara kasus pelanggaran HAM di Papua mulai dari peristiwa pelanggaran HAM Wasior, Wamena dan Paniai agar segera diselesaikan.



*Frits Ramandey*

“Paniai kami sudah menyerahkan berkas dan ini sedang dalam proses penyelidikan, sudah ada beberapa orang dimintai keterangan terkait dengan peristiwa Paniai ini,” kata Frits.

Jauh hari, Komnas HAM mengajukan 3 kasus pelanggaran HAM ini untuk segera diselesaikan dengan menggunakan mekanisme UU 26 tahun 2000. Komnas HAM dan rakyat Papua tentu punya pengalaman dengan kasus Abepura berdarah, mestinya penyelesaian 3 kasus ini segera direspon untuk memberi kepastian rasa aman, tapi juga meyakinkan warga Papua soal penanganan kasus pelanggaran HAM dalam konteks HAM berat.

## 7.

# Kisah Anak Tokoh OPM dan TPNPB<sup>8</sup>

Oleh: Hengky Yeimo



*Damianus Yogi dan pasukan TPNPB yang dipimpinnya di Kabupaten Paniai, Papua. - Jubi/Hengky Yeimo*

*Pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah Indonesia selama puluhan tahun menimbulkan banyak kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM. Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM itu membuat banyak anak-anak asli Papua, baik itu warga biasa ataupun anak dari tokoh pergerakan Papua, mengalami trauma yang mendalam.*

---

<sup>8</sup> Tulisan ini terbit di [jubi.co.id](http://jubi.co.id) pada 25 Januari 2022 dengan judul "Kisah anak tokoh OPM dan TPNPB, dari menjadi buronan, sampai didiskriminasi"

Meskipun ada sebagian dari mereka yang memilih jalan berbeda, sebagian yang lain memilih jalan terjal untuk melakukan perlawanan bersenjata. Praktik impunitas yang dijalankan Indonesia membuat para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM tak terjangkau hukum, membuat para korban tidak mendapatkan keadilan.

Praktik impunitas juga memperparah trauma korban, menciptakan aktor pelaku kekerasan baru, memperpanjang siklus kekerasan berulang di Papua. Ketidakadilan dan praktik impunitas menjadi penyemai kekerasan baru, dan Negara seolah menjadi sutradara rangkaian kekerasan yang tak berujung di Tanah Papua.

Damianus Magai Yogi adalah salah satu anak kandung dari Tadeus Yogi, salah satu tokoh Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM, kini dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB) di Wilayah Adat Meepago, Papua. Saat ditemui Jubi pada November 2021 lalu, Damianus Yogi menuturkan bagaimana kisah hidupnya.

Sejak kecil, ia menyaksikan perjuangan ayahnya melakukan perlawanan bersenjata melawan aparat keamanan TNI/Polri membuat kisah hidupnya tak pernah sama dengan kisah anak-anak pada umumnya.

Damianus Yogi yang lahir pada 1994 menjadi saksi bagaimana keluarganya selalu dalam ancaman. "Saya dan mama saya kerap berpindah pindah tempat dari satu daerah ke daerah lain, untuk menghindari serangan dari aparat TNI/Polri," katanya.

Damianus mengatakan sejak ia kecil ibu kandungnya selalu melindungi dirinya dari ancaman. Ibunya melakukan apapun untuk memastikan anaknya tetap sehat dan aman. "Sejak dini saya sudah berpisah dengan ayah saya. Saya memilih tinggal bersama mama saya di Paniai, sembari bersekolah," katanya.

Bila Demianus Yogi ingin menjumpai ayahnya yang berada di hutan, Demianus harus bersurat dulu. Hal itu dilakukannya untuk mencegah risiko bagi ayahnya.

"Waktu bapak saya masih hidup, dia juga sering bercerita tentang keturunan kami. Beliau selalu berpesan agar sebagian dari kami harus bersekolah, tapi juga ada yang harus

melanjutkan perjuangan yang dirintisnya bersama Yulius Goo di wilayah Paniai pada tahun 1970-an,” kata Demianus.

Demianus Yogi yang bersekolah di Paniai dulu bercita-cita ingin menjadi Tentara Perdamaian. Namun situasi dan keamanan yang tidak membuat mimpinya kandas. Di bangku kelas 5 SD, cita-cita itu pupus lantaran ia tidak bisa lagi melanjutkan sekolahnya, gara-gara ia dan ibunya menjadi incaran aparat.

Demianus mengenang, cita-citanya gagal tercapai bukan karena ia malas bersekolah, namun karena keselamatan dirinya selalu terancam. “Cita-cita saya itu pupus seiring dengan menyaksikan keluarga disiksa aparat. Ayah-ibu saya, serta kakak-kakak saya, kerap dikejar aparat,” katanya sambil tersenyum.

Ia berandai-andai, jika keluarganya tak melulu dalam ancaman, mungkin cita-citanya menjadi Tentara Perdamaian bisa terwujud. “Jika waktu itu saya tetap dibiarkan bersekolah di Paniai, mimpi untuk menjadi Tentara Perdamaian di luar negeri itu bisa tercapai. Namun saya harus menerima konsekuensi sebagai anak dari TPN-OPM, sehingga mimpi saya tidak terindahkan,” katanya.

Demianus berandai-andai, jika cita-citanya itu terwujud, ia tidak akan menjadi warga yang mengangkat senjata di tanahnya sendiri demi meminta merdeka. “Saya pastinya bisa menolong orang lain di luar West Papua juga yang membutuhkan perdamaian. Seperti bangsa saya Papua yang hari ini butuh perdamaian,” katanya.

Ia mengatakan apa yang dialaminya juga dirasakan oleh anak keturunan para tokoh OPM dan TPN lainnya. “Di daerah lain di Papua, yang menyaksikan konflik hingga keluarga mereka tewas akibat ditembak aparat, juga merasakan hal seperti yang saya alami,” katanya.

Demianus meyakini, sepanjang Indonesia masih menduduki Papua, Orang Asli Papua (OAP), khususnya anak-anak para tokoh OPM, tidak akan pernah mengalami hidup yang baik. “Kami selalu diperhadapkan dengan pemerkosaan, kematian dan penyisiran. Sebagaimana yang dialami oleh kakak beradik anak-anak dari mendiang Tadeus Yogi,” katanya.

Demianus merasa, semenjak tahun 1961 - sekarang pemerintah Indonesia belum mengganggu Orang Asli Papua

sebagai bagian dari Indonesia. Di pihak lain, TPNPB juga belum beranggapan bahwa Papua dan Orang Asli Papua adalah bagian dari Indonesia.

“Selama pemerintah Indonesia ada di Tanah Papua, kami belum pernah hidup aman dan baik. Pemerintah tidak pernah melihat kami. Kami justru diperhadapkan dengan penyisiran, pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan intimidasi di tanah kami sendiri,” katanya.

Baginya, perlakuan Negara Indonesia terhadap Orang Asli Papua, khususnya anak-anak tokoh TPN-OPM, bukanlah hal yang baru. “Sejak tahun 1970-an hingga kini, pengalaman [kekerasan] itu terus berulang. Peristiwa yang sama juga dialami oleh kakak-kakak saya. Perlakuan seperti itu kami hadapi tidak hanya dari pemerintah, tapi juga TNI dan Polri,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya keluarganya yang mengalami korban dari aparat keamanan Republik Indonesia. “Rakyat kecil yang tidak tahu soal juga selalu menjadi sasaran tembak. Ini sangat ironis,” katanya.

Demianus juga menyoroti masalah diskriminasi dan marginalisasi Orang Asli Papua, terlebih terhadap anak-anak dari pimpinan gerakan Papua merdeka dan para keluarga korban pelanggaran HAM. Ia meyakini, diskriminasi itu tidak akan berakhir selama Papua masih menjadi bagian dari Indonesia. “Kami juga kerap mengalami perlakuan diskriminasi,” katanya.

Hal itulah yang membuat Demianus Yogi membulatkan tekadnya untuk angkat senjata dan memperjuangkan kemerdekaan Papua. “Orang tua telah meletakkan dasar perjuangan kemerdekaan bangsa Papua kepada generasi muda West Papua. Saya akan melanjutkan perjuangan bapak saya. Itu pesan bapak saya selama hidupnya,” katanya.

### **Jalan Sunyi Jimy Hiluka**

Anak kandung mantan narapidana politik (Napol) Linus Hiluka, Jimy Hilsom Hiluka mengatakan menjadi anak dari TPN-OPM menempanya untuk belajar mandiri dan selalu optimis untuk menentukan nasib sendiri demi masa depan bangsa Papua.

“Saya bertumbuh dan besar tanpa bapak di Wamena. Sejak usia saya masih 16 tahun, selama bapak ditangkap oleh aparat kepolisian [dan ditahan] di Lembaga Pemasyarakatan

sejak tahun 2003, hingga pada tahun 2015 ia diberi grasi oleh Presiden Joko Widodo," katanya.

Hiluka mengatakan, dirinya menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di Wamena, lalu berkuliah di Bali hingga meraih gelar Sarjana Pariwisata Internasional. Ia tidak tinggal diam, dan memilih menjadi tulang punggung keluarganya.

"Setelah menamatkan pendidikan saya kembali ke kampung halamannya di Muliama, Wamena. Saya pernah bekerja dengan organisasi yang mengkampanyekan perdamaian di Tanah Papua," katanya.

Hiluka mengatakan selama ia berkuliah, pemerintah Indonesia tidak pernah membiayai kuliahnya. Ia berhasil menamatkan pendidikannya dari hasil usaha ibunya serta hasil usaha mandiri.

"Mama saya membiayai kuliah, saya juga berusaha bekerja sendiri untuk membiayai studi. Saya berterimakasih kepada mama dan bapak, keluarga, bahkan semua pihak manapun yang telah membantu kami dalam menyelesaikan studi saya," katanya.

Sejak kuliah, Hiluka tidak pernah bermimpi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bekerja untuk pemerintah Indonesia. "Saya punya mimpi, bahwa saya harus bersekolah hingga mendapatkan gelar sarjana itu komitmen saya," katanya.

Hiluka berpandangan setiap anak tokoh OPM juga berhak dan harus bisa bersekolah. Ia merujuk hak atas pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. "Walaupun bapaknya dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia di balik jeruji, dan walaupun dia dipindahkan dari penjara ke penjara. Orang tua saya tidak pernah menempuh pendidikan menjadi sarjana, sehingga saya berpikir bahwa saya harus belajar," katanya.

Hiluka mengatakan ia juga memotivasi adik-adiknya untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. "Saya bersyukur kepada Tuhan karena adik berhasil, bahkan sedang studi magister di luar negeri," katanya.

Meskipun Hiluka pernah mendapatkan diskriminasi dari teman temannya, ia tetap konsisten dan belajar agar bisa meraih kehidupan yang lebih dari bapaknya yang bukan berlatar belakang seorang sarjana.

"Mereka pernah mengatakan 'bapaknya pernah masuk

tahanan, dipenjarakan di Makassar', sampai [mengatakan] 'dia anak OPM'. Tapi saya tidak pernah kecewa, hanya saya sedih. Bapak tidak sama sama dengan saya, itu saja," katanya.

Hiluka pun tak tergoda tawaran orang yang ingin mencalonkannya sebagai bakal calon Wakil Bupati Jayawijaya. "Pada saat saya SMA, bapak tidak pernah bawa saya di panggung politik. Jadi kita pikir itu urusan bapak," ujarnya.

Hiluka pernah memiliki seorang dosen Bahasa Inggris berkebangsaan Amerika Serikat. "Dosen saya, warga negara Amerika, dia bertanya, 'ke depan kamu mau jadi apa?' Saya bilang saat itu, 'setelah saya tahu Bahasa Inggris saya akan membantu TPNPB dan OPM'. Tapi ketika itu saya tidak mengerti TPNPB dan OPM seperti apa," kata Hiluka.

Ia selalu resah dengan banyak orang Papua yang sudah sekolah hingga sarjana, bahkan meraih gelar Doktor, tetapi tidak pernah berbicara untuk nasib orang Papua yang selalu mengalami perlakuan tidak adil dari Negara. Sebaliknya, para pejuang TPNPB dan OPM berjuang dengan pendidikan yang minim, namun mereka bicara demi kepentingan banyak orang.

"Hal itulah yang mendasari saya sehingga saya berkomitmen untuk harus sekolah hingga sarjana. Sekarang saya sudah tahu Bahasa Inggris, saya bisa menyampaikan kepada dunia tentang Papua seperti apa. Itu menjadi impian serta saya dari dulu. Saya memutuskan untuk tidak akan bekerja di pemerintah sejak saya kuliah. Kalau bisa, saya swasta saja, atau saya bantu di lembaga swadaya masyarakat, atau menjadi relawan. Saya suka bagian itu, dan dapat [sesuai] dengan jiwa saya," kata Hiluka.

Hal itu pula yang membuat Hiluka menampik tawaran untuk menjadi bakal calon Wakil Bupati Jayawijaya. Ia berpegang teguh pada komitmennya bahwa ia tidak akan pernah menjadi aparatur di NKRI. Ia tak menampik, dirinya juga memiliki asa bahwa Papua akan merdeka.

"Saya memang tidak suka dengan sistem yang ada di Indonesia. Dan saya tidak suka diperintah, [karena membuat] saya tidak bebas. Saya independen. Sehingga apapun yang bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan. "Yang penting orang tidak provokasi saya, orang tidak intervensi saya," katanya.

Prinsip itu pula yang membuat Hiluka mengajari anak-anaknya agar rajin bekerja keras. Ia juga mendidik anak

seperti sebagaimana orang tua lain mendidik anak-anaknya. “Pembinaan anak akan disesuaikan dengan lingkungan juga. Anak saya, kalau bertumbuh di lingkungan bapak saya, mereka akan sama seperti kami,” katanya.

Istri Hiluka juga bagian dari puluhan ribu Orang Asli Papua yang pernah menjadi korban kekerasan di Papua. Hiluka menyatakan ia dan istrinya tidak menyembunyikan latar belakang mereka dari anak-anaknya.

“Apabila anak-anak kami bertanya tentang aktivitas saya atau bapa saya, istri saya tentu akan menjelaskan kepadanya. Kami dalam satu kehidupan, sama-sama menderita dalam perjuangan. Saya selalu menceritakan sejarah integrasi [Papua dalam Indonesia], kami cerita di honai. Mereka memperhatikan aktivitas kami, dan anak-anak saya yang biasanya melontarkan pertanyaan kepada saya tentang sejarah Papua. Saya harus beritahu karena itu bagian dari pendidikan nonformal,” katanya.

Bagi Hiluka, apa yang dia alami, dan apa yang Orang Asli Papua alami merupakan sejarah hidup yang diketahui anak-anaknya. Ia tahu, suatu saat kelak orang bertanya kenapa kakek anak-anaknya pernah ditahan dari penjara ke penjara. “Itu cerita yang wajib saya sampaikan kepada anak-anak saya. Itu cerita yang akan mereka ceritakan kepada generasi mendatang,” katanya.

Anak-anak Hiluka pun punya banyak panggilan kesayangan untuk kakek mereka. Terkadang mereka memanggil kakeknya “Komandan”, terkadang mereka memanggilnya “Bapak Papua”, terkadang mereka juga menyapa dengan sebutan “kakek”. “Anak saya yang pertama selalu mengikuti kemanapun bapak jalan. Dia dekat dengan bapak saya,” kata Hiluka.

Ia berharap anaknya akan bisa mendapatkan pendidikan terbaik, sesuai keinginan mereka. “Perjuangan membuat saya pas-pasan, itu tantangan anak-anak saya. Tapi kalau Tuhan mau, mereka mengikuti saya. Bapak tidak pernah mengintervensi kami untuk ‘kamu harus jadi yang seperti bapak mau’. Tetapi hari ini adik-adik saya ada yang sudah selesai kuliah dan persiapan mau kuliah ke luar negeri,” katanya.

Hiluka memandang ke masa depan, namun ia juga ragu dengan masa depan Papua bersama Indonesia. “Sepanjang kami masih berada dalam bingkai Indonesia, pada umumnya nasib

kami tidak akan membaik. Mulai dari saya [kecil], sudah masuk dalam arena pejuang,” ujar Hiluka.

Namun ia mengingat, ayahnya tak pernah mengharuskan Hiluka menjadi OPM atau TPNPB. Ia pun tak akan mengatur bagaimana anak-anaknya akan menjalani kehidupan mereka.

“Mereka biar menentukan nasib mereka sendiri. Dan talenta yang Tuhan berikan, itu berbeda-beda. Saya ini korban politik dari [situasi yang dialami] bapak. Tapi untuk anak-anak saya, saya tidak bisa mengarahkan mereka harus sama seperti saya. Mereka mau menjadi apa saja, itu hak mereka nanti,” katanya.

Hiluka mengatakan, walaupun ke depan anak-anaknya akan mengikuti jejak kakek mereka, atau mengikuti jejaknya, silahkan saja. Baginya, jalan yang nanti dipilih anaknya adalah pilihan Tuhan.

“Tanggung jawab saya adalah anak-anak saya nasibnya harus [lebih] bagus dari saya. Mereka harus sukses ke depan, sukses dalam perjuangan, dalam ekonomi-politik, dalam budaya, dalam pendidikan. Mereka akan mendapatkan pendidikan. Akan tetapi visi-misi [mereka] ke depan seperti apa, saya tidak tahu. Saya harapkan nasib anak-anak saya itu menjadi baik,” katanya.

Ayah Hiluka, Linus Hiluka mengatakan dirinya kecewa dengan Negara Indonesia yang telah membuatnya mendekam di penjara. Ia juga kecewa, lantaran selama dirinya dipenjara nasib anak-anaknya diabaikan oleh Negara.

“Saya sangat kesal dengan Negara Indonesia. Saya ditangkap di depan anak-anak saya. Saya diproses hukum, namun Negara tidak pernah perhatikan nasib anak-anak saya,” katanya.

## 8.

# Pupusnya Masa Depan Anak OPM<sup>9</sup>

Oleh: Elfira Halifa



Foto Demianus Magai Yogi

*Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini, masih berlumur konflik. Berbagai operasi militer dilancarkan di tanah ini. Ribuan nyawa orang Papua mati tertembak dalam kontak senjata antara aparat dan TPN-OPM atau versi lainnya KKB*

Anak anak di daerah konflik bersenjata turut menjadi korban atas apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Bahkan, cita cita dari anak Milisi ini pupus sedari dini ketika negara turut menyerang mereka. Padahal, anak anak ini tak tahu menahu dengan apa yang dilakukan orang tua mereka.

---

<sup>9</sup> Tulisan ini terbit di Cenderawasih Pos pada 31 Januari 2022.

Untuk mengetahui seberapa trauma dan bagaimana perlakuan aparat terhadap anak-anak dari kelompok Milisi ini, Cenderawasih Pos berkesempatan mewawancarai Demianus Magai Yogi, anak dari almarhum Tadius Yogi.

Mewawancara Demianus tidaklah mudah, perlu meyakinkannya terlebih dahulu dengan perantara Komnas HAM Papua. Membuat janji dengan mengirimkan pesan via pesan pendek pada 19 November 2021. Namun, Demianus baru merespon pesan tersebut pada 25 November.

Mengirimkan foto saya sebagai upaya meyakinkan kepada Demianus bahwa saya seorang jurnalis, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan meneleponnya. Dan, pemuda 28 tahun itu bersedia untuk diwawancara pada 25 November melalui via telepon. Saat itu, Demianus sedang berada di Paniai baru saja pulang dari markasnya.

Dia pun berkisah tentang masa kecilnya, sejak duduk di bangku kelas 5 SD YPPK Badauwo, Distrik Paniai Timur. Hari-harinya dikejar aparat. Dor, dor, dor. Suara tembakan pagi, siang dan malam kerap ia dengarkan saat usianya beranjak lima tahun kala itu.

Bukan hanya suara tembakan dari pihak yang bertikai ia dengarkan setiap harinya, Demianus yang baru saja dilantik jadi Panglima Tertinggi TPN-PB OPM West Papua Sorong-Merauke juga menyaksikan, bagaimana kakak perempuannya ditembak aparat saat tali noken masih menempel di kepalanya.

“Sewaktu kecil, ada beberapa keluarga saya meninggal akibat ditembak aparat yang datang ke kampung saya di Paniai. Ada juga yang disiksa. Kami ini, manusia tapi diperlakukan seperti bukan manusia. Mati dan hidup kami bukan lagi di tangan Tuhan, melainkan di tangan aparat,” amarah suara Demianus terekam jelas di ponsel saat itu.

Menarik nafas, lalu Demianus melanjutkan pembicaraan. Sejak tahun 1980, aparat mulai melakukan penyiksaan terhadap keluarganya, termasuk ayahnya. Inilah yang kemudian membuat cita-cita Demianus menjadi tentara perdamaian pupus di bangku kelas 5 SD, ketika aparat datang mencarinya di sekolah kala itu.

Demianus lahir dan dibesarkan di hutan Paniai sejak tahun 1994 silam. Ia kehilangan seorang ayah saat usianya beranjak 9 tahun dan berpindah-pindah tempat lantaran dikejar aparat. Namun ia mengutamakan pendidikannya. Sedangkan

ibunya, setia mengantarnya ke sekolah kala itu meski tahu situasinya tak aman bagi mereka.

“Andai saat itu tentara tidak mengejar saya, membiarkan saya tetap bersekolah. Mungkin saya sudah berada di Amerika Serikat atau Rusia menjadi seorang tentara perdamaian atau pilot. Hanya saja, semua itu pupus seiring dengan tentara melakukan pengejaran terhadap saya dan keluarga. Untuk apa saya melanjutkan sekolah jika aparat terus terusan mengejar keluarga kami, bahkan sampai mencari saya di sekolah hingga ibu saya ketakutan,” amarah Demianus semakin menjadi jadi, saat mengingat perlakuan aparat terhadap dirinya kala itu.

Demianus mengingat betul bagaimana situasi yang mencekam saat itu, masa kecilnya yang merasa tidak aman di kampungnya sendiri (Paniai Timur). Dikejar-kejar aparat, lalu memutuskan tinggal di hutan hingga ibunya menghembuskan nafas terakhirnya di hutan pada tahun 2002.

Demianus melanjutkan percakapan via telepon. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, keluarga Demianus tinggal di hutan dan tidak pernah kembali ke kampung mereka di Paniai. Kalaupun kembali kata Demianus, bakal dikejar aparat.

“Kami tidak aman di kampung kami sendiri, hidup dalam kecemasan. Itulah kenapa masih tetap berada di markas hingga saat ini. Kalaupun kembali sudah pasti kami ditangkap atau bisa saja ditembak aparat,” ucapnya dengan nada pelan, sementara nafasnya terdengar jelas.

Demianus menyukai mata pelajaran Bahasa Inggris sewaktu duduk di bangku SD. Tidak pernah terlintas di benaknya kala itu untuk mengangkat senjata seperti ayahnya yang sudah meninggal sejak tahun 2009 lalu akibat diracuni. Situasi dan keadaan yang membuatnya berubah, menyaksikan penembakan dan turut mengalami langsung ketika dikejar kejar aparat.

Di awal sekolah, Demianus mengaku tak satu orangpun yang tahu jika dia anaknya Tadius, kecuali ibunya. Tak ada aparat yang menggangukannya saat itu, sehingga ia bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Namun, ketika aparat mulai mengetahui identitasnya di bangku kelas V SD. Sejak itu, ia dan ibunya dikejar aparat hingga menyisakan trauma.

Tahun 2000, Demianus pergi dari Paniai ke Dogiyai dengan niat untuk masuk TK. Sekaligus mengantarkan surat dari

ayahnya Tadius kepada Keuskupan Leo Laba Ladjar. Isi surat yang tertuang dalam lembaran kertas putih yang ditulis Tadius untuk keuskupan saat itu adalah, meminta aparat menghentikan pengejaran terhadap anak dan istrinya.

“Niat mengantar surat dari ayah untuk Keuskupan, malah saya dan ibu dikejar tentara saat itu tanpa menggunakan alas kaki,” kenangnya.

Selama pengejaran, Demianus tak pernah bertemu dengan ayahnya Tadius. Jika ayah dan anak ini saling merindukan, maka akan bertukar kabar melalui surat, saat itu telepon genggam belum mereka miliki. Tadius yang berada di hutan, sedang Demianus dan ibunya berpindah-pindah tempat ketika keberadaan mereka diketahui aparat.

Tahun 2009, tepat dimana Tadius Magai tewas di markasnya, yang menurut Demianus ayahnya itu diracuni. Sesaat sebelum meninggal dunia, sang ayah berpesan kepada anak bungsunya itu untuk tidak menyerah dan harus berjuang mempertahankan hingga bangsa Papua keluar dari bingkai NKRI.

“Sejak saat itu, saya berjanji untuk menepati permintaan ayah saya,” kata Demianus dengan suara yang lirih.

Waktu kecil, Demianus tidak pernah berpikir untuk mengangkat senjata lalu melakukan perlawanan. Meski ia sendiri tahu ayahnya seorang OPM, yang dipikirkan Demianus saat itu hanyalah menjadi seorang tentara perdamaian di PBP atau menjadi seorang Pilot.

“Hanya saja, negara ini memaksa saya untuk mengangkat senjata atas rasa trauma dan dendam masa kecil yang saya alami,” tuturnya dengan nada yang lirih.

Dendam Demianus yang paling membekas adalah, ketika dua kakaknya Salmon dan Leo Magai Yogi ditembak mati oleh aparat di Kabupaten Nabire pada tahun 2015. Menyusul kakak perempuannya ditembak aparat di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai.

Demianus ingat benar, kakak perempuan nya itu ditembak aparat ketika sedang berjalan memikul noken. Kekejaman lainnya yang dilakukan aparat terhadap kakaknya, diikat dengan posisi kaki di atas lalu disiksa hingga meninggal dunia pada tahun 1999.

“Saya berpikir saat itu, kenapa keluarga saya menjadi

sasaran penembakan aparat. Apa karena kami terlahir dari seorang ayah OPM, penyiksaan yang dilakukan terhadap keluarga saya dan orang-orang Papua lainnya membuat saya menginginkan Papua ini segera merdeka. Sehingga kami bisa hidup tenang, tanpa adanya gangguan penembakan,” Demianus bertanya-tanya.

Hingga saat ini, aparat masih melakukan pengejaran terhadap Demianus dan saudaranya. Inilah yang membuat Demianus tak bisa lagi masuk ke kampungnya sendiri di Paniai Timur.

“Kami bertahan di hutan dengan segala perlawanan, hingga nanti Papua merdeka barulah kami kembali ke kampung kami,” ucapnya.

Atas tindakan dan perlakuan yang dilakukan oleh aparat kepada keluarga Demianus dan orang Papua lainnya, Demianus berharap PBB bisa datang dan melihat hal dan pemerintah Indonesia bisa membuka ruang.

Belasan tahun mengikuti jejak sang ayah, dalam perjuangan, Demianus tidak pernah merugikan sipil. Bahkan, beberapa kali menyelamatkan orang yang kembali ke tempat tugas mereka seperti tenaga medis dan guru.

“Selama ini kami tidak pernah melakukan penyiksaan terhadap masyarakat sipil bahkan masyarakat non-papua sekalipun. Perjuangan kami berhadapan dengan aparat, bukan warga sipil. Bahkan ketika saya mau perang, saya tetap bersurat agar anak-anak dan perempuan keluar dari Enarotali untuk keselamatan mereka,” jelasnya.

Sekalipun sudah menikah dan memiliki anak, Demianus tak memaksakan ideologi apa yang bakal dipahami anaknya ketika besar nanti. Termasuk memberikan kebebasan kepada anaknya mau jadi seperti apa.

“Seperti apa anak saya ke depan, itu menjadi urusan dia. Bahkan ketika dia mau jadi seorang tentara perdamaian melanjutkan keinginan saya sewaktu kecil, saya tetap mendukungnya,” kata Demianus.

Yang diinginkan Demianus saat ini hanyalah kemerdekaan, penentuan nasib sendiri. Sehingga itu, pemerintah harus membuka ruang untuk berdialog dibawah mediator PBB. Jika tidak, Demianus dan kawan kawan akan terus melakukan perlawanan hingga Papua merdeka. Sebab, bagi Demianus.

Terlalu kejam perlakuan negara melalui aparat terhadap warga sipil Papua.

“Kita berjuang bukan untuk membunuh warga sipil, apalagi dilabeli teroris. Tujuan kami perang dan beberapa aktivitas yang selalu kami ganggu tujuannya hanya untuk merdeka, bukan minta Otsus apalagi pembangunan,” kata Demianus.

Anak anak dari kelompok milisi seperti Egianus Kogoya, Demianus Magai Yogi dan lainnya, punya kisah tersendiri hingga mengikuti jejak ayah mereka. Punya trauma hingga menyaksikan bagaimana keluarga mereka dibunuh secara tidak wajar oleh TNI-Polri, inilah yang membuat anak anak dari Milisi ini mengangkat senjata.

Direktur Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Anum Latifah Siregar menilai, anak-anak dari anggota OPM mengikuti jejak orang tua mereka lantaran perjalanan sejarah konflik di Papua. Sewaktu orang tua mereka berjuang, mereka turut dibawa serta.



*Anum Latifah Siregar*

Anum mengistilahkan, internalisasi pemahamannya bukan karena mereka diberitahu. Melainkan mereka ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Mereka melihat bagaimana orang tua mereka melakukan perlawanan dan bagaimana keluarga mereka menjadi korban.

“Internalisasinya karena pengalaman dan itu jauh lebih kuat ingatannya, pengalaman masa lalu bagi mereka itu adalah sesuatu yang buruk dan menyakitkan, yang membuat mereka kecewa tapi juga membuat mereka marah. Ada memori buruk di pikiran mereka, usai massa orang tuanya berjuang selesai. Mereka merasa harus meneruskan perjuangan ayah mereka,” tutur Anum

Lanjut Anum, anak anak dari OPM ini merasa penderitaan itu bukan saja penderitaan dia dan bapaknya. Tapi juga dia punya kelompok, dia merasa ini menjadi keprihatinan bersama. Apalagi kata Anum, di Papua orang hidup dengan komunal.

“Jika anak semasa kecilnya mengalami sejarah yang buruk, itu berpengaruh pada saat dia dewasa. Mempengaruhi psikologinya, sama dengan anak anak OPM ini. Ketika melihat sejarah buruk terhadap orang tuanya, saudaranya, keluarganya. Itu akan mereproduksi pemikiran untuk masa depan mereka. Melihat itu menjadi sesuatu kejahatan yang harus mereka perangi bersama,” tuturnya.

Anak anak OPM kata Anum, mengalami internalisasi berdasarkan pengalamannya bukan berdasarkan cerita. Sehingga, ketika dia tidak bisa melawan pada saat dia anak anak dan hanya bisa menyaksikan orang tua dan keluarganya dibunuh akibat ditembak. Maka dia akan menyimpan kemarahan, kesedihan dan kekecewaan itu.

Anum mengkhawatirkan apa yang dirasakan anak anak OPM ini, bisa melebar kepada anak anak pengungsi yang ada di daerah konflik yang tidak tertangani dengan baik.

“Nantinya, pengungsi dengan usia muda berpotensi untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang ada di hutan. Karena dia melihat pemerintah tidak menangani mereka selama berada di lokasi pengungsian, cepat atau lambat itu akan terjadi. Sehingga ini harus ditangani,” kata Anum.

Menurutnya, Papua ini sudah kompleks persoalannya. Sehingga itu, harus ada jeda kemanusiaan. Pemerintah harus

bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak hak dasar, jangan berpikir dengan membangun jembatan, membangun infrastruktur yang besar. Bukan itu yang disuguhkan, tapi hak hak dasar pendidikan dasar mereka bagaimana.

Anum juga mengatakan negara memelihara siklus kekerasan di Papua. Adanya kejahatan karena pembiaran, padahal sudah banyak pakar di negara ini yang menjelaskan situasi ini.

“Harusnya, pemerintah memberikan pemenuhan hak hak dasar. Selain itu, aksi aksi kekerasan itu harus diselesaikan secara hukum. Sehingga masyarakat percaya pada pemerintah,” kata Anum.

Namun, yang terjadi di Papua saat ini kata Anum. Non zero zom konflik, jika ini tidak dihentikan, maka konflik ini akan panjang dan masyarakat sipil akan jadi korban. Perlindungan, pemenuhan hak itu tanggung jawab negara. Jadi negara harus segera menyelesaikan konflik di Papua.

## 9.

# Kisah Pilu dalam Bayang-Bayang Kemerdekaan Papua<sup>10</sup>

Oleh: Hengky Yeimo



Sebagian warga Intan Jaya yang mengungsi ke Nabire, Rabu, (10/3/2021). - Jubi/Abeth You

*“Dari timur ke timur”, kalimat ini pas untuk menggambarkan perjuangan anak-anak anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka yang memilih melanjutkan perjuangan orang tua mereka. Bagi mereka, cita-cita untuk memerdekakan Papua selalu ada. Begitu pula dengan anak-anak dari para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.*

Demianus Magai Yogi, salah seorang anak tokoh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka

---

<sup>10</sup> Tulisan ini terbit di [jubi.co.id](http://jubi.co.id) pada 27 Januari 2022 dengan judul "Kisah Pilu dalam Bayang-Bayang Kemerdekaan Papua"

(TPNPB/OPM) di Kabupaten Paniai, Tadeus Yogi, memilih mengikuti jejak ayahnya untuk mengangkat senjata. Ia kini menjadi kombatan TPNPB karena menyaksikan keluarganya menjadi korban kekerasan oleh aparat TNI/Polri.

“Bapak kandung saya, Panglima Tinggi Tadeus Magai Yogi memimpin pergerakan kemerdekaan bangsa Papua sejak awal tahun 1970-an, hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 Januari 2009,” kata kata Demianus.

Demianus mengatakan kehidupan yang aman dan damai adalah sesuatu yang mustahil bagi seorang anak tokoh TPNPB. Ia menerimanya sebagai konsekuensi dari perjuangan orangtuanya.

“Kami hidup tidak terlepas dari teror dan intimidasi kepada Tadeus Yogi, istrinya, dan anak-anaknya. Bahkan Tadeus Magai Yogi meninggal dunia akibat diracuni. Kalau mama, meninggal karena sakit, kelelahan kerap dikejar aparat,” kata Demianus sambil mengenang kedua orang terkasihnya.

Kendati ayahnya telah meninggal, Demianus menuturkan ia dan saudara-saudaranya terus mengalami intimidasi, teror, dan diincar timah panas aparat keamanan. Sejumlah tujuh orang saudaranya meninggal dalam konflik panjang yang terjadi di sekitar Kabupaten Paniai.

“Kaka, dan adik saya ada sekitar 7 orang yang meninggal dunia. Seperti Antonius M Yogi, dibius oleh aparat di sekitar Ugi, Distrik Paniai Timur, pada tahun 2017 silam. Yosina M Yogi ditembak oleh pasukan TNI/Polri di Pugo, Paniai. Salmon Magai Yogi ditembak oleh pasukan TNI/Polri di Markas Komando Daerah Pertahanan TPNPB Paniai di Eduda pada 2013. Leo M Yogi ditembak TNI/POLRI di Nabire pada tahun 2015 silam. Kristianus M Yogi ditembak Tim Kasuari di Ugapuga pada tahun 1997. Paul M Yogi meninggal dunia di Markas Eduda pada tahun 2002. Debora M Yogi meninggal dunia di Markas Eduda pada tahun 2005 silam,” katanya.

Demianus menyatakan orang-orang yang terlibat membunuh saudaranya tidak pernah diadili dan dihukum. Sama seperti para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua yang juga tidak pernah diadili dan dihukum. “Tidak hanya adik dan kakak saya, hampir sebagian anak-anak OPM selalu mendapatkan perlakuan demikian, kalau tidak disiksa, dibunuh,” katanya.

Demianus mengatakan Negara Indonesia terus menunjukkan watak kolonial di hadapan dunia, karena tidak pernah menjalankan hukum yang dibuatnya sendiri dengan mengatasnamakan keamanan Negara. “Tidak akan pernah ada keadilan bagi kami, dengan kisah pilu yang [kami] alami. Mungkin Tuhan turun baru bisa ada jawaban bagi kami,” katanya.

Jimmy Hilsom Hiluka – anak kandung mantan narapidana politik (Napol) Linus Hiluka yang dinyatakan bersalah terlibat peristiwa pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, pada 3 April 2003 – memilih tidak ikut angkat senjata. Namun ia tidak menampik bahwa dirinya menyimpan harapan bahwa Papua akan merdeka.

Jimmy masih berusia 16 tahun saat ia menyaksikan ayahnya ditangkap aparat keamanan. Ia juga melihat kakeknya meninggal ditembak aparat keamanan.

“Saya menyaksikan aparat keamanan menangkap bapak saya dan menembak kakek saya. Waktu itu bapak saya tidak lari ke hutan, [dan ditangkap] di rumah kami, di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 27 Mei 2003,” katanya.

Setelah Linus Hiluka ditangkap, Jimmy dan saudaranya kehilangan sosok ayah yang mengasuh mereka. Jimmy kecewa karena Negara juga mengabaikan nasib mereka, tak memenuhi hak dasar mereka selaku korban konflik panjang di Papua.

“Waktu ayah saya ditangkap, saya sedih dan menyesal terhadap Negara Indonesia. Sebab, siapa yang mau memperhatikan kami? Masa depan kami seperti apa? Tapi Tuhan baik, sehingga kami semua bisa selesai kuliah,” katanya.

Jimmy menyatakan seharusnya Negara memberikan perhatian kepada para anak tahanan politik atau narapidana politik, juga kepada para keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serta pembunuhan di luar hukum yang dilakukan aparat keamanan, serta para korban konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua.

Dalam praktiknya, Jimmy merasa Negara Indonesia seakan tidak menyadari bahwa anak-anak kombatan TPNPB sekalipun adalah warga negara dengan hak dasar yang harus dipenuhi Negara. Tidak pernah ada mengatakan bahwa, Negara tidak pernah memberikan restitusi, rehabilitasi, ataupun *trauma*

*healing* bagi anak-anak TPNPB.

“Padahal Negara menghilangkan nyawa, atau mengamputasi hak asuh orangtua terhadap anak-anaknya. Meskipun orang tuanya ditahan, hak-hak korban itu harus diperhatikan oleh Negara. Apabila ada pembiaran seperti yang saya dan adik-adik saya alami, juga [pembayaran] kepada anak-anak korban pelanggaran HAM atau pembunuhan di luar hukum, itu bisa menjadi bumerang bagi NKRI,” katanya.

Jimy mengatakan Negara Indonesia seolah-olah memandang anak-anak kombatan TPNPB atau tokoh OPM maupun para korban pelanggaran HAM sebagai musuh. “Tapi saya sebagai anak-anak dari mantan tahanan politik dan anak pimpinan OPM, saya menyadari bahwa hal itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima dan jalannya,” katanya.

### **Bukan Diwarisi, Tapi Mengalami**

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar yang banyak melakukan pembelaan hukum bagi tahanan politik maupun narapidana politik di Papua mengatakan hasrat untuk merdeka memang selalu ada di antara anak-anak kombatan TPNPB maupun tokoh OPM. Kombatan TPNPB kerap kali bergerilya dengan membawa serta anak mereka.

Di sisi lain, praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terus berulang. Di Papua, trauma atas konflik bukan cerita diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, namun justru sesuatu yang dialami sendiri oleh Orang Asli Papua, dari generasi ke generasi.

“Pemahamannya bukan karena mereka diberitahu [orang tuanya] tentang konflik, melainkan mereka ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Mereka melihat bagaimana orang tua mereka melakukan perlawanan, bagaimana keluarga mereka menjadi korban. Jadi, internalisasi [hasrat untuk merdeka itu] karena pengalaman [sendiri], dan itu jauh lebih kuat [dibanding sekadar mendengar cerita orangtua],” katanya.

Menurut Siregar, pengalaman itu buruk dan menyakitkan, membuat anak-anak para tokoh TPNPB dan OPM kecewa, tapi juga membuat mereka marah. “Ada memori buruk yang ada di pikiran mereka. Akhirnya, setelah orangtuanya selesai berjuang, mereka merasa harus meneruskan perjuangan ayah mereka. Hal itu yang dialami Egianus Kogoya, Damianus

Magai Yogi, dan anak-anak TPNPB/OPM lainnya,” katanya.

Siregar mengatakan bahwa hal serupa juga dialami anak-anak korban pelanggaran HAM, yang orang tuanya ditembak mati di luar hukum, dengan para pelaku yang tak kunjung diadili. Memori buruk tentang Indonesia pun terbentuk menjadi ingatan kolektif.

“Di kalangan anak-anak korban pelanggaran HAM juga terjadi internalisasi traumatik. Praktik impunitas [yang membiarkan pelaku tidak adili] itu semacam momok baru bagi orang Papua. Penderitaan yang dialami orangtua mereka itu bukan saja penderitaan mereka, tapi juga dia punya kelompok. Dia merasa itu menjadi keprihatinan bersama, apalagi Orang Asli Papua hidup dengan budaya komunal,” kata Siregar.

“Ketika melihat sejarah buruk terhadap orang tuanya, saudaranya, keluarganya, itu akan mereproduksi pemikiran untuk masa depan. Mereka melihat itu menjadi sesuatu kejahatan yang harus mereka perangi bersama. Mereka tidak bisa melawan pada saat masih anak-anak, menyaksikan orang tua dan keluarganya dibunuh. Maka dia akan menyimpan kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan itu,” imbuh Siregar.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan hingga kini tidak ada kemajuan berarti atas kondisi dan situasi di Papua, khususnya dalam bidang HAM. Praktik kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan, dan hal itu membuat orang Papua semakin melawan negara.

Yang terjadi saat ini, konflik bersenjata di Papua justru semakin meluas. Selain itu, para pihak yang bertikai, baik pasukan TNI/Polri maupun TPNPB, sama-sama abai terhadap norma hukum humaniter yang dibentuk untuk melindungi warga sipil pada situasi konflik.

“Dalam segi hukum humaniter, banyak sekali norma hukum humaniter yang tidak dipatuhi, baik itu oleh negara maupun oleh pihak berkonflik yang bersenjata dari Papua. Norma hukum humaniter misalnya, tidak boleh menyerang objek sipil atau sasaran sipil warga sipil, kantor pemerintahan sipil, rumah warga sipil. Kenyataannya justru itu terjadi. Norma lainnya, dalam berperang atau dalam konflik bersenjata serangan itu hanya bisa dilakukan terhadap objek militer atau sasaran militer, dan dilakukan secara proporsional. Itu tidak

terpenuhi dalam banyak kasus," kata Usman.

Usman menyatakan tidak ada proses penegakan hukum humaniter di Papua. Selain itu, tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah yang menyatakan memberlakukan hukum humaniter di Papua.

"Dalam benturan konflik bersenjata, terdapat sejumlah kasus dimana ketika salah satu pihak tokoh pro kemerdekaan ditangkap masih mengalami penyiksaan. Penyerangan, penangkapan, dalam hukum humaniter hanya dibolehkan terhadap sasaran militer atau sasaran kepada pihak yang berperang," kata Usman.

Usman mengatakan pendekatan keamanan tidak akan bisa menjadi solusi untuk mengakhiri konflik di Papua. Pemerintah seharusnya menempuh jalan non-kekerasan demi mencegah jatuhnya korban dari semua pihak, aparat keamanan maupun TPNPB, dan lebih penting lagi untuk mencegah jatuhnya korban dari pihak warga sipil.

"Jalan penegakan hukum lebih dikedepankan daripada jalan pendekatan keamanan yang mengandalkan pengarahannya pasukan militer. Pengerahan pasukan militer hanya berujung dengan kekerasan yang merugikan semua pihak," katanya.

### **Justru harus didekati**

Kendati sejumlah anak tokoh TPNPB dan OPM merasakan pahitnya pengucilan dan diskriminasi, Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda) Papua Irjen Mathius D Fakhiri justru menyatakan pemerintah tidak ingin mengucilkan mereka. Ia menyatakan anak-anak para tokoh TPNPB dan OPM adalah generasi baru yang berbeda dari orangtua mereka, dan tidak boleh didiskriminasi.

Ia menegaskan, di mana hukum anak tokoh TPNPB dan OPM memiliki kedudukan dan hak sama dengan warga negara lainnya. "Tanggung jawab kami, pemerintah, yang didalamnya ada Polri juga, untuk menjaga mereka menjadi warga negara. Saya melihat mereka sebagai masyarakat yang harus kita sentuh, kita layani. Mudah-mudahan dari mereka itu bisa menjadi duta pencerahan, pencerdasan bagi orangtua mereka atau keluarganya yang selalu berpikiran keluar dari Indonesia," katanya.

Fakhiri mengatakan pemerintah justru ingin merangkul

anak-anak anggota TPNPB atau OPM, dan bukan malah mengucilkannya. “Tidak pernah kami berpikir bahwa mereka masyarakat yang liar. Mereka malah harus saya dekati, supaya mereka bisa menarik saudaranya yang lain keluar dari paham yang mereka yakini, agar [mereka] menjadi warga negara yang baik. Saya memberikan contoh, ada keluarga mereka yang terlibat dalam KKB kami didik, saya tidak takut. Saya yakin dari mereka [ada yang] menjadi anggota Polri. Itu bisa menjadi stimulus, rangsangan bagi keluarganya untuk keluar [dari gerakan Papua merdeka] dan bergabung dengan negara Indonesia,” katanya.

Fakhiri menyatakan jajaran kepolisian akan memberikan perhatian khusus kepada mereka, agar mereka tidak terbawa arus. Menurutnya, anak-anak para tokoh TPNPB dan OPM justru menjadi jembatan komunikasi antara aparat keamanan dan TPNPB.

“Yang kami didik jumlahnya belum lebih dari 10 orang. Mereka dari daerah pegunungan, yang selama ini sedang [menjadi lokasi] kontak tembak. Mereka menjadi pengawasan khusus bagi kami, kami berharap mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarganya untuk meletakkan senjata dan kembali menjadi masyarakat normal,” katanya.

Fakhiri mengatakan menyatakan pihaknya justru tidak ingin mengucilkan para eks tokoh TPNPB dan OPM ataupun anak-anak mereka. “Mereka yang eks KKB tidak perlu lagi pantau. Namun sekali kali kami mengundang [mereka untuk] melihat perkembangannya setelah dia menjadi warga binaan. Kalau kami menjauhi, itu berbahaya. Kalau kami memberikan dia label, itu malah berbahaya. Biarkan mereka hidup bermasyarakat,” ujarnya.

Fakhiri mengatakan selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Papua, tidak ada bagian atau kelompok masyarakat, termasuk anak-anak eks OPM, yang harus dimata-matai. “Kami malah membangun komunikasi, dengan begitu kita mengetahui apa kekurangannya, kebutuhannya, dan kemauannya,” katanya.

Bagaimanapun, sentimen anti Indonesia dan hasrat untuk memerdekakan Papua tetap hidup di kalangan generasi muda Orang Asli Papua, dan bahkan dihidupi oleh rangkaian panjang kekerasan baru yang terus terjadi Papua. Banyak pihak telah mengingatkan, banyak pihak juga menegaskan upaya

pemerintah mengatasi masalah Papua tak menyentuh akar masalah Papua. Akankah kali ini pemerintah mau mendengar?

## 10.

# Berharap Kemerdekaan di Atas Tanah Sendiri<sup>11</sup>

Oleh: Elfira Halifa



*Linus Hiluka dan keluarga saat menerima kedatangan tim di honai mereka di Wamena pada Desember 2021*

*Trauma dan dendam masa kecil masih membekas di benak Jimmy Hilsom Hiluka, anak dari eks tahanan Politik (Tapol) Papua Linus Hiluka, yang kini tinggal di Kabupaten Jayawijaya.*

Untuk bertemu Linus Hiluka dan keluarga, tim kolaborasi membuat janji terlebih dahulu. Pertama-tama kami berupaya meyakinkan Bapak Linus dan keluarga agar bersedia diwawancara. Tim kemudian terbang dari Jayapura ke Wamena pada pertengahan Desember 2021.

---

<sup>11</sup> Tulisan ini terbit di Cenderawasih Pos pada 2 Februari 2022 dengan judul "Kisah Pilu dan Bayang-Bayang Kemerdekaan dan Stigma di Atas Tanah Sendiri"

Setiba di Wamena, tim dijemput langsung oleh Jimmy Hilsom Hiluka di Bandara Wamena. Dia mengantarkan kami ke honai mereka yang berada di salah satu distrik di Kabupaten Jayawijaya, jauh dari pemukiman warga. Tak ada jaringan internet ataupun telekomunikasi.

Tiba di honai, tim disambut oleh istri Linus Hiluka, anak anak dan cucunya, hingga rekan-rekan Linus yang masih setia mendampingi hingga saat ini. Masuk di honai, tak boleh menggunakan atribut seperti bendera merah putih atau label NKRI. Sebab, keluarga ini punya trauma masa lalu dengan negara ini.

Setelah disuguhi kopi panas buatan istri Linus, percakapan pun dimulai. Di luar honai, gerimis mulai turun.

Kami kemudian mewawancarai Jimmy yang tumbuh dalam proses korban politik, menyaksikan sang ayah ditangkap dini hari lalu dimasukkan ke dalam penjara. Bagi Jimmy saat itu, ayahnya dengan kemampuan terbatas memperjuangkan bangsa ini.

Perlakuan negara terhadap keluarganya saat itu, membuat Jimmy menginginkan agar Papua segera merdeka.

### **Stigma terhadap Orang Papua**

Lahir dari seorang ayah OPM, stigma “dia anak OPM” kerap kali diterima pria bergelar S1 Jurusan Pariwisata Internasional dari salah satu kampus di Bali. Jimmy juga jago berbahasa Inggris.

“Orang orang selalu mengatakan Bapak saya di penjara dari penjara ke penjara. Saya anak OPM dan lainnya, tapi saya tidak pernah kecewa dengan status ayah saya saat itu. Saya hanya sedih, secara darah Bapak tidak bersama kami,” tutur putra pertama Linus Hiluka.

Sewaktu kecil, Jimmy tak pernah sekalipun mengikuti ayahnya ke panggung-panggung politik. Bagi Jimmy, itu urusan ayahnya. Yang jadi urusan Jimmy hanyalah bersekolah. Saat Linus berorasi dan melakukan hal apapun, ia hanya menyaksikan dari arah kejauhan.

“Terbesit jadi OPM-pun enggan saat itu. Namun, perlakuan negara terhadap kami sehingga kami memberontak,” kata Jimmy sembari menyeruput kopi di gelas plastik yang baru saja dibuat ibunya.

Perlakuan negara yang paling diingat Jimmy hingga membuatnya trauma adalah ketika Bapaknya ditangkap pada dini hari di rumahnya yang terletak di salah satu distrik di Kabupaten Jayawijaya.

Jimmy ingat benar bunyi tembakan di honai dan bagaimana aparat memperlakukan keluarganya pada tahun 2003 silam. Ayahnya dipaksa tiarap di tanah yang basah, lalu terdengar bunyi tembakan dan suara tangisan adik-adik Jimmy dan ibunya. Penangkapan tersebut membuat Jimmy dan keluarganya lari ke hutan, lantaran ketakutan jangan sampai aparat datang menangkap mereka.

Yang paling disesalkan Jimmy, setelah bapaknya ditangkap lalu diproses hukum dan kemudian dipindah dari penjara ke penjara. Negara tidak pernah memperhatikan anak-anak dari tahanan politik ini, bahkan tak ada jaminan keamanan untuk mereka saat itu.

“Hingga saat ini, ketika muncul TNI-Polri ke rumah kami, stigma kami kepada mereka mau datang menangkap bapak. Sekarang, di sekitar honai kami. Tidak boleh atribut negara Indonesia masuk, kami trauma akan hal itu,” kata Jimmy.

Sekalipun ayahnya berpindah pindah penjara, namun Jimmy bersama tiga adiknya eksis dalam pendidikan. Bapaknya, boleh menjadi apapun bahkan dicap sebagai OPM dan lainnya. Namun Jimmy dan adik-adiknya harus tetap bersekolah.

Bahkan, sewaktu berada di penjara, Jimmy ingat benar, sang ayah selalu mengingatkan bahwa tugasnya menyekolahkan anak-anaknya. “Kedepan, mau jadi apa itu terserah kami. Bagi saya, itu kebijaksanaan seorang ayah menghargai hak kami meski situasinya saat itu sedang tidak baik,” ujarnya.

Jimmy masih terus menganggap bahwa negara ini tidak bertanggung jawab atas anak-anak korban politik. Dan itu yang paling disesalkan Jimmy. Bahkan, terus memanggil mereka dengan sebutan gerombolan.

“Bapak kami ditangkap dan anak-anak dimusuhi oleh negara, padahal bapak sendiri sudah bilang saya sekolahkan mereka tidak harus menjadi OPM mengikuti jejaknya. Jika seandainya kami anak-anak OPM sukses jadi bupati, apakah negara ini tidak malu? Terlebih, di masa-masa sulit negara mengabaikan kami,” terang Jimmy sembari menatap wajah sang ayah yang berada di depannya saat itu.

“Saya tidak pernah kecewa dengan pekerjaan orang tua saya, saya juga tidak begitu dendam terhadap negara ini. Tapi, saya selalu mengingat apa yang negara lakukan kepada saya, adik-adik saya dan orang tua saya. Kami dipaksa berhenti berjuang, sementara pemulihan belum dilakukan negara terhadap kami,” kata Jimmy.

Sekarang, Jimmy aktivis di relawan atau kegiatan kemanusiaan lainnya di Wamena. Tidak terbesit di benaknya bekerja di pemerintahan meski sebelumnya ia pernah ditawarkan akan hal itu.

Percakapan dalam honai terus berlanjut, sementara di sudut lain, anak-anak dan mama-mama menghangatkan tubuh di bara api bekas buatan kopi.

### **Menyaksikan Keluarga Ditembak**

Or Pawuka, istri Hiluka yang hatinya paling hancur dan trauma saat menyaksikan tentara datang ke tempat mereka pada pukul 03.00 dini hari. Dor, dor, bunyi tembakan membangunkannya. Segera tangannya meraba-raba sekelilingnya mencari anak-anaknya.

“Tak ada lampu saat itu,” kata perempuan berwajah tirus ini. Gelap dan hanya ada suara tembakan serta aba-aba dari aparat yang memaksa mengeluarkan suaminya dari dalam honai, lalu diminta tiarap di atas tanah basah.

“Mama-mama juga dikeluarkan dari honai dan dikumpulkan di halaman. Aparat bilang jangan bergerak dan tetap tenang. Kita punya pikiran malam itu kita nyawa akan hilang,” kata Or Pawuka dengan logatnya.

Dalam kecemasan dan saling mengkhawatirkan satu dan lainnya, isteri Linus dan orang-orang yang ada di lokasi saat itu menyaksikan seorang bapak meninggal akibat ditembak tentara di depan honai.

“Waktu itu, Bapak (Linus-red) tiarap. Sementara di lain sudut, tentara menembak seorang bapak dan ia meninggal di depan kami tepat di halaman honai. Bapak ditembak, sementara kami dipaksa makan dan *telang* (telan) kalung manik-manik,” kisah Pawuka dengan suara yang sendu.

Berkali-kali mulutnya menyatakan “kita trauma saat itu”. Terlebih, selepas penangkapan suaminya dan kemudian dipenjara. Mobil aparat lalu lalang berpatroli ke rumah mereka

dan masih melakukan pengawasan.

“Setiap saat mobil lewat, pagi, siang, sore dan malam. Kami lari ke hutan kosongkan rumah. Begitu terus hingga dua bulan lamanya, kalau aparat sudah pergi dari tempat kami maka kami kembali lagi ke honai,” katanya.

Ia mengingat betul perlakuan aparat kepada mereka saat itu, hingga kini masih merasakan trauma itu. Setiap kali TNI-Polri datang ke kampung mereka, ia selalu mengkhawatirkan kejadian 2013 jangan sampai terulang lagi.

Yang paling menyakitkan baginya saat itu, ketika anak bungsunya meninggal akibat busung lapar karena sering berlarian ke hutan saat aparat mendatangi mereka. Anak bungsunya itu meninggal ketika sang suami sedang dipenjara.

Untuk membesarkan anak-anaknya ketika sang suami berada di penjara, Prawuka mengandalkan hasil kebun, jualan noken dan kayu bakar. Terlebih saat itu semua anak-anaknya bersekolah.

“Meski kesusahan dan suami berada di penjara, anak-anak tak boleh putus sekolah. Malah tiga anak saya saat ini masih kuliah, satu anak saya kuliah S2 dan dua lainnya S1 dengan biaya dari buat noken dan jual kayu bakar,” katanya menginspirasi.

## **Dari Penjara ke Penjara**

Selepas Jimmy bercerita, sang ayah melanjutkan percakapan sembari menyeruput kopi di gelas plastik. Eks tahanan politik ini mengaku sebagai korban politik dan saat ini masih eksis di arena perjuangan. Penangkapan dirinya 19 tahun lalu dianggap sebagai resiko politik sekalipun diberikan hukuman mati.

Mengenang masa lalunya, Linus menganggap negara ini memperlakukan korban politik sebagai tidak adil. Dan sekarang, Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM dan OPM adalah korban. “Negara yang memasukkan kami ke penjara dan negara juga yang mengeluarkan kami dari penjara,” kata Linus.

Yang seharusnya dilakukan Indonesia kata Hiluk yaitu dengan bertobat. Sebab, Indonesia yang cari masalah dan Indonesia sendiri yang mencari perhatian dunia. Sedang yang dilakukan terhadap OPM yakni penangkapan, penembakan, pemukulan dan pembunuhan.

“Lebih baik Indonesia stop lakukan penangkapan, sebab

itu bukan solusinya. *Ko kas* masuk penjara bukan solusi untuk orang Papua. Dengan menangkap OPM, dengan sendirinya Indonesia mempromosikan Papua itu ada kegiatan politik,” tutur Linus sembari melirik orang-orang yang ada di dalam honai.



*Linus Hiluka*

Bebas dari penjara, Linus mengaku hingga saat ini ia masih diawasi oleh aparat. Istri dan anak-anaknya masih terus mencemaskannya terlebih saat Linus tak pulang rumah. Trauma itu masih ada.

“Saya selalu mengingatkan keempat anak saya bahwa ayahnya ini seorang tokoh perjuangan dan mereka tahu itu, tak mengapa bagi mereka. Biar tidak makan tidak apa-apa, asalkan orang tua mereka jangan diculik,” kata Linus sembari menatap anak pertamanya dalam honai.

Seperti apapun kondisi Linus waktu itu, ia menginginkan anak-anaknya tetap bersekolah. Mau jadi apa empat anaknya ke depan, itu hak mereka yang tak bisa ia ganggu gugat.

“Tuhan yang atur anak-anak saya mau jadi apa ke depan. Saya ingin mereka pintar melebihi saya dan saya menanamkan konsep mandiri kepada mereka,” ucapnya.

## 11.

# Lara Korban Kontak Senjata di Daerah Konflik<sup>12</sup>

Oleh: Elfira Halifa



*Pengungsi Kiwirok saat mengamankan diri di Hutan akibat kontak senjata yang terjadi di Kiwirok*

*Imbas dari kontak senjata antara TNI-Polri dan OPM adalah terjadinya pengungsian. Warga memilih lari ke hutan atau ke gereja yang dianggap paling aman.*

Trauma sudah pasti mereka alami, terlebih mereka yang suami istri atau anaknya meninggal akibat ditembak. Belum lagi, konflik yang terjadi di daerah mereka yang terus berulang.

---

<sup>12</sup>Tulisan ini terbit di Cenderawasih Pos pada 3 Februari 2022 dengan judul Lara Korban Konflik Bersenjata di Lokasi Pengungsian "Saya Mengajarkan Anak Saya Untuk Tidak Membunuh"

Mereka berlarian ke hutan, membawa serta anak-anak mereka. Mendirikan bivak beratapkan dedaunan. Untuk bertahan hidup, para pengungsi seperti yang ada di Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo ataupun Nduga terpaksa mengkonsumsi apa yang ada di hutan saat itu. Tak sedikit dari mereka meninggal dunia akibat sakit atau kelaparan.

### **Tak Aman di Tanah Sendiri**

Seorang pengungsi Intan Jaya yang kini berada di Kabupaten Nabire berkisah, sebelum adanya konflik di Kabupaten Intan Jaya, ia dan anak-anaknya bisa hidup tenang aman dan damai. Anak-anak mereka leluasa ke sekolah, sementara mama-mama sibuk berkebun tanpa adanya rasa ketakutan.

Mereka bisa kemana saja di kampung, tanpa khawatir dengan peluru nyasar ataupun deru suara tembakan. Tetapi, semua itu berubah sejak adanya konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPN-OPM yang terjadi di daerah mereka di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya awal 2021.

Peristiwa setahun lalu itu seperti mimpi buruk baginya. “Mereka (TNI-Polri dan TPNPB-red) baku tembak tepat di kampung kami, Titigi, Dusun Songandogo,” kata Mama dengan suara sedikit gemetar.

Tepat di Kampung Titigi, TNI-Polri membangun sebuah Pos penjagaan. Pos yang mempersempit ruang gerak bagi mama-mama dan warga lainnya yang ada di kampung tersebut.

Lebih lanjut pelayan gereja itu berkisah, ketika TNI-Polri melakukan kontak tembak dengan TPNPB yang berada di lokasi Songandogo, warga memilih untuk menghindar dengan berlindung di Pastoran Titigi atau gereja.

“Ternak babi milik saya dan lain sebagainya itu juga ikut terkena peluru dari aparat keamanan yang ditunjukkan kepada TPNPB,” tuturnya.

Dalam hitungannya saat itu, ia memiliki tiga ekor babi induk betina. Sementara anak anak sekitar 30 ekor, “Sekarang, semua ternak babi itu mati terkena peluru aparat. Bahkan, kandang babi saya juga ikut hancur,” ia mengisahkan.

Tak hanya dirinya yang mengalami kisah pilu tersebut.

Kebun dan honai mama-mama lainnya di kampung tersebut dirusak aparat keamanan.

Yang paling menyakitkan baginya, sudah menjadi korban konflik bersenjata malah dicurigai aparat keamanan. Akibatnya, banyak yang mengalami korban dari kecurigaan tersebut bahkan terkena peluru nyasar TNI-Polri.

“Kami dicurigai oleh aparat di kampung kami sendiri, kapan saja kami bisa terkena peluru nyasar entah dari TPNPB atau dari TNI-Polri,” ucap seorang peternak babi ini.

Dampak dari kontak senjata TNI-Polri dan TPNPB ini membuat anak-anak ketakutan dan trauma mendengar rentetan bunyi tembakan yang bertubi-tubi. Anak-anak tak bisa lagi ke sekolah. Terlebih, ketika warga yang ada di lokasi gereja dan paroki kerap dicurigai kedua pihak yang bertikai TNI-Polri maupun TPNPB.

Para warga yang ada di Titigi saat itu juga menjadi korban dari pertikaian kedua belah pihak, padahal mereka tak tahu-menahu persoalan. “Kami mau pergi ke kebun atau ke kandang babi tidak bisa saat itu, sebab TNI-Polri TPNPB saling berjaga. Jika kami bergerak, kami bisa saja ditembak dari kedua kelompok yang bertikai,” tuturnya.

Mama pelayan gereja ini tak hanya kehilangan ternak babinya saat konflik yang terjadi di kampung mereka pada tahun 2021 lalu, melainkan adik laki-lakinya, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tewas akibat ditembak tentara.

“Bukan hanya adik saya yang ditembak, tapi warga sipil lainnya juga ikut ditembak,” kenangnya.

Adik laki lakinya itu menjadi korban penembakan TNI. Padahal kata Mama, TNI yang bertugas di kampung-kampung di Intan Jaya, biasanya meminta buah-buahan seperti alpukat dan markisa kepadanya.

“Kalau jeruk saya biasa jual, tapi alpukat yang saya tanam dan saya biasa kasih ke mereka (TNI-red). Tetapi perlakuan mereka terhadap kami menyakitkan, rumah kami ditembak itu membuat kami sakit hati,” kata Mama.

Konflik yang tak kunjung usai, ternak hingga adik laki-lakinya tewas akibat ditembak. Mama tinggalkan kampung halamannya, memilih mengungsi ke Kabupaten Nabire untuk mencari perlindungan dan menghindari kontak tembak.

Berharap aman dan tanpa gangguan berada di lokasi pengungsian, mama dan warga lainnya justru kerap dipantau intel yang yang menyamar menjadi tukang ojek, atau penjual sayur.

“Warga yang ada di pengungsian ini salah apa. Sehingga aktivitas kami terus dipantau,” keluhnya.

Setahun berada di lokasi pengungsian, mama mulai merasa jenuh. Ingin kembali ke kampungnya melaksanakan aktivitas seperti berkebun atau beternak babi. Di Kampung, mereka kerap berdoa di gereja. Sementara di lokasi pengungsian, mengaku tidak dapat beribadah dengan baik.

Bahkan saat Natal 2021, mereka merayakannya dengan kesederhanaan di Nabire bersama keluarga. Sembari memikirkan nasib pengungsi lainnya yang berada di daerah lain. Mayoritas pengungsi Intan Jaya yang berada di Nabire adalah ibu-ibu, anak-anak, pelajar dan lansia.

Berada di lokasi pengungsian, mama-mama terus memikirkan pendidikan anak-anak mereka. Memiliki keinginan agar anak-anak mereka bisa bersekolah di Nabire, Jayapura atau Mimika. Hanya saja, mereka khawatir siapa yang akan memperhatikan anak-anak mereka itu.

“Anak-anak di pengungsian sebagian besar tidak disekolahkan karena takut mendapatkan diskriminasi. Kami juga takut anak-anak kami akan dipantau di sekolah oleh aparat,” kata mama.

Tak mengenyam pendidikan di lokasi pengungsian, Mama membina anaknya dengan rajin berdoa kepada Tuhan. Serta mengingatkan anak lelakinya tidak nakal dan menghargai orang lain.

“Saya menasehati agar anak saya tidak nakal apalagi membunuh orang lain, sebab itu melanggar perintah Tuhan sebagaimana yang tercatat dalam alkitab,” ucapnya.

## Nasib Anak-Anak dan Perempuan



*Nur Aida Duwila*

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH-Apik) Jayapura, Nur Aida Duwila memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap anak-anak dan perempuan yang ada di daerah konflik bersenjata di Papua.

“Saya takutkan tertanam dalam diri anak-anak dan perempuan di daerah konflik bahwa mereka bukan bagian dari NKRI dan menjadi musuh negara. Dendam dan rasa trauma mereka di daerah konflik sejak dini membuat mereka berpotensi untuk melawan negara dengan mengangkat senjata kedepannya,” kata Nona sapaan akrab dari Nur Aida.

Padahal kata Nona, perempuan akan melahirkan anak-anak generasi selanjutnya dan anak-anak akan tumbuh menjadi dewasa. Tapi jangan sampai hati dan pikirannya tertanam di atas tanah mereka sendiri namun menjadi orang asing.

“Karena dendam dan trauma serta merasa menjadi orang asing, sehingga anak-anak ini punya peluang menjadi aktor di masa depan dan ingin balas dendam,” kata Nona.

Menurut Nona, anak-anak dan perempuan yang berada

di daerah konflik sudah pasti menyaksikan kondisi yang menurut mereka pasti itu berperang. Dan mereka sendiri pun tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan dari konflik bersenjata tadi.

“Apakah negara hadir untuk perempuan dan anak di wilayah konflik bersenjata? Apakah ada usaha negara dalam hal ini Pemda setempat untuk mengamankan anak dan perempuan pasca konflik, apakah dibantu pemulihannya. Jika ini tidak dilakukan, maka konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua berakibat fatal untuk pemulihan korban,” kata Nona.

Lanjut Nona, anak-anak yang trauma sedari dini akibat konflik dan ketika tumbuh dewasa akan tertanam dalam diri mereka “kami ini siapa”? Apalagi kebanyakan anak-anak di daerah konflik bersenjata mengikuti orang tuanya mengungsi ke hutan.

“Di benak anak-anak ini pasti akan bertanya pada diri mereka sendiri, di atas tanah saya namun saya harus lari ke hutan,” kata Nona.

Dikatakan Nona, harus ada pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak dan perempuan yang berada di daerah konflik. Harus diberikan pemahaman terkait situasi dan kondisi yang terjadi di Papua saat ini. Sehingga, anak-anak di daerah konflik tidak mempertanyakan mereka warga negara mana.

Perlu saling mengingatkan bagaimana kondisi anak-anak dan perempuan dalam situasi ini. Rangkul anak-anak dan perempuan korban konflik, sehingga mereka tahu bahwa mereka diperhatikan oleh negara.

“Saya selalu memikirkan bagaimana kondisi mereka berlari setiap saat ketika mendengar suara tembakan. Saya yakin mereka trauma, padahal dalam UU tertulis anak-anak dan perempuan dilindungi di daerah konflik. Tapi mereka malah berlari ke hutan akibat ketakutan,” tutur Nona

Nona mendorong pemerintah terutama Pemda harus bergerak dan melakukan sesuatu untuk melindungi anak dan perempuan di daerah konflik. Minimal, dibantu pemulihan psikologinya.

## **Menghilangkan Trauma Pengungsi**

Di Kabupaten Jayawijaya, Pdt Sipekel Nea pelayanan di

Gereja Kingmi Betlehem Ilekma Klasik Paling Tengah, Wamena sejak 2018 lalu hingga saat ini setia menangani korban konflik Nduga. Dalam kesaksiannya, ada pengungsi yang meninggal lantaran kelaparan, sakit dan lainnya.

Mirisnya, sejak 2018 hingga saat ini kata Pdt Sipekel, Pemerintah tutup mata dengan pengungsi yang masih membutuhkan bantuan semua pihak ini. Di lain sisi, pengungsi enggan kembali ke Nduga lantaran masih terjadinya kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNOPM.

Untuk kontak senjata ini, ia meminta penarikan pasukan TNI-Polri dari daerah tersebut. "Dengan penarikan pasukan, maka OPM mau bertikai dengan siapa, pasti mereka diam di hutan," kata Pdt Sipekel.

Di lokasi pengungsian kata Pdt Sipekel, peran gereja turut menghilangkan rasa trauma kepada pengungsi dengan melakukan kegiatan ibadah meski dengan keterbatasan yang ada. Gereja turut melakukan pelayanan di lokasi pengungsian.

Terkait keinginan pengungsi untuk pulang ke kampung halaman di Nduga, pihak Gereja sudah membicarakan hal ini dengan pemerintah. Tetapi tidak ada tanggapan serius, pemerintah hanya diam.

"Hingga saat ini, tidak ada pihak manapun yang menyampaikan ke kami bahwa pengungsi bisa kembali ke kampung dan jaminan keamanan dan kendala lainnya ditanggung. Ucapan itu belum keluar dari mulut pemerintah, kalau ada yang meninggal di lokasi pengungsian ya kita kubur saja," kata Pdt Sipekel.

Doa di lokasi pengungsian terus dipanjatkan Pendeta dan para pengungsi, berharap kampung mereka segera aman agar mereka bisa kembali meski kenyataannya pemerintah tidak punya niat untuk membantu pengungsi.

"Pemerintah tidak punya niat untuk memulihkan psikolog korban pengungsian Nduga, malah dibiarkan begitu saja," tuturnya.

**Bagian II.**

**Berebut Sumber Daya  
di Tanah Surga**

---

# 1.

## Hutan Keramat dan Sumber Hidup yang Hancur<sup>1</sup>

Oleh: Imelda Vinolia



*Sungai Klasafet yang kerap disebut Sungai Klamono tampak dangkal dan kering. Melalui dermaga sederhana, warga menggunakan transportasi kapal kecil kedesa yang terletak di sepanjang bantaran sungai..(FOTO/SRc/imelda vinolia)*

*Air adalah sumber kehidupan. Bisa dibayangkan jika di suatu wilayah air menjadi sesuatu yang langka. Kegersangan, kotor dan suasana kematian begitu terasa, seperti yang terjadi di wilayah Kampung Klawana, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat.*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini terbit di suarariau.co pada 26 Januari 2022 dengan judul "Tradisi Suku Moi: Hutan Sumber Hidup dan Keramat Yang Hancur & Kembali Kepangkuan Adat"

Jika ada perempuan kuat dan lincah, maka cerita mama-mama di Kampung Klawana ini salah satunya. Seperti yang dikatakan Mama Hagar Klagili, bahwa selama ini, untuk mencukupi kebutuhan air keluarga, yang dilakukan adalah dengan memenuhi drum minyak berkapasitas 400-500 liter dengan air keruh Sungai Klasafet, dan mengangkatnya ke pemukiman. Air bersih hanya jadi impian belaka bagi mereka.



*Mama Hagar yang berbincang sambil menunjukkan noken buatannya. (FOTO/SRC/Imelda Vinolia)*

Hampir 77 tahun NKRI berdiri, mereka belum memiliki kedaulatan terhadap air bersih, setidaknya itu yang terjadi di Papua Barat, khususnya di Kampung Klawana. Perempuan lebih banyak bersentuhan dengan air dibandingkan laki-laki.

Sumber air tak berbayar di dusun ini hanya ada dua yaitu Sungai Klasafet (kerap disebut Klamono, red) yang ketika dipantau [suarariau.co](http://suarariau.co) kelihatan memiliki debit yang kecil dan berwarna keruh kecoklatan. Selebihnya dari air hujan.

Konon, menurut para perempuan dan penduduk Klawana yang usianya sudah tua, orang tua mereka dulu masih bisa menikmati air Sungai Klasafet yang jernih dan layak untuk digunakan bagi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun sejak masuknya industri, air sungai berubah.

Sebuah penampungan air hujan berwarna biru dengan tinggi sekitar dua meter, berbentuk buku terbuka di atasnya. Penampungan itu bantuan Pemerintah Sorong, berdiri diantara rumah-rumah warga Kampung Klawana, Distrik Klamono yang tampak kusam dan hampir ambruk. Penampungan air yang kelihatan jarang dipakai tersebut, merupakan satu-satu wadah bantuan untuk penyediaan air bagi warga sekitar.

Kebutuhan air minum dan air bersih untuk kebutuhan hidup lainnya diperoleh warga dengan cara membeli. “Ketersediaan air bersih bagi warga Klamono hanya impian,” ujar Hagar, seorang mama warga Kampung Klamono. Dia mengatakan itu sambil menyirih dan memegang noken buatannya.

Untuk membeli air, Mama Hagar harus merogoh kocek sebesar Rp 8.000 -10.000 per galon setiap hari. Untuk itu, dalam setahun mereka bisa mengeluarkan uang sebesar Rp3.600.000 per tahun untuk ketersediaan air minum dan memasak. Sedangkan untuk keperluan lainnya, mandi misalnya, biasanya menggunakan air sungai sekitar atau menggali sumur di lahan gambut yang airnya berwarna coklat kehitaman.



*Kampung Klawana, Distrik Klamono. (FOTO/SRC)*

Menurut cerita salah satu Wakil Ketua Adat Malamoi, Manasye Fadan, ketika ditemui *suarariau.co* di rumahnya di wilayah Kampung Klawana, Sabtu (15/1/20022), cara hidup warga adat sebelum industri masuk berbeda ketika. Masyarakat Suku Moi di Klamono dulu hidup bergantung dari alam, baik hutan maupun sungai. Dari pangan, sampai obat-obatan, semua terpenuhi dari alam sekitar.

Suku Moi sebagai penguasa wilayah di Kabupaten Sorong umumnya menjadikan hutan sebagai sumber hidup. Jauh sebelum negara berdiri dan agama tiba di wilayah ini. Wilayah adat dan hutan sebagai segala sumber kehidupan untuk mendapatkan sumber kehidupan secara cuma-cuma dari alam dan kemudahannya bagi suku Moi.

Namun kini sudah tidak sama lagi. Masuknya industri ke wilayah suku Moi di Sorong membawa dampak luar biasa. Industri minyak hingga sawit telah merusak sumber air bersih wilayah ini. Sungai Klamono tempat mereka mendapatkan air minum sejak jaman dahulunya, kini sudah tercemar. Debit air yang makin berkurang dan dangkal.

“Kemarin saya coba mandi di sungai, badan saya gatal-gatal. Air sudah tercemar. Sebab, di hulu limbah pabrik kelapa sawit ada di sisi sungai,” ujarnya. “Baru-baru ini banyak ikan di sungai yang mati. Sungai menjadi bau,” tambahnya.

Hal ini menyebabkan warga hanya berharap dari air hujan.

Dulu, ujar Manasye, dengan mata menerawang, kehidupan saat ia masih bersama orangtuanya begitu aman, damai dan mudah. “Begitu kita bangun tidur, langsung terjun ke sungai yang tinggal dekat sungai, terjun ke laut yang tinggal di laut, tanpa mikir-mikir,” ujarnya.



*Mansye Fadan, Wakil Ketua Adat Moi ketika berbincang dengan suarariau.co. (FOTO/SRC/imelda vinolia)*

Dengan hasil alam hutan, semua hal kebutuhan keluarga sukunya terpenuhi. Tanpa harus mengalami hal-hal yang sulit dan buruk. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, ujar Manasye, hutan juga sebagai apotik hidup. Segala penyembuhan penyakit, mulai dari muntaber, demam, patah tulang atau sesak nafas dan lain sebagainya, diambil dari bahan-bahan hasil hutan. "Hampir segala jenis obat penyakit diobati dari ramuan hasil hutan yang dibuat secara tradisional," paparnya.

Hutan itu dimanfaatkan untuk berburu dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka juga mempertahankan tanah dari kepungan perambah yang mengekspansi hutan.

Semua bahan dari hutan maupun pekarangan warga. Bagi Suku Moi, hutan merupakan nafas hidup mereka. Ia tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari tergantung dari hasil hutan.

Suku Moi, mengandalkan sagu dan umbi untuk makanan pokok. Semua berasal dari hutan. Selain itu, mereka juga telah mengenal konservasi. "Kami sudah mengenal konservasi sejak lahir," kata Manasye.

Konservasi tersebut meliputi hutan, laut dan manusia. "Kami menyebutnya konservasi kawasan, yang sudah dibangun dari orangtua terdahulu," katanya.

Hidup berdampingan antar suku, selalu hidup harmoni

berdampingan dengan alam dan menjadi pilihan bagi Suku Moi yang ada.

Tak heran kehidupan mereka dulunya untuk mendapatkan obat-obatan, pangan lokal, air bersih, udara bersih mereka dapatkan cuma-cuma, membuat mereka menjaga hutan sangat ketat.

Hutan yang terjaga itu kami temui saat *suarariau.co* dan tim memasuki hutan adat yang terletak tak jauh dari jalan raya, di Kota Administrasi Sorong, dengan jarak tempuh lebih dari 2 jam naik mobil. Kami menempuh jalan yang sangat kecil. Sebagian besar jalan lintas tersebut tidak terawat.

Sepanjang perjalanan, memasuki wilayah adat memang tanaman sawit tidak tampak. Berbeda dengan di Sumatera, langsung tampak berjejer di pinggir jalan antar lintas kota dan wilayah.

Menurut Gamal, seorang pemuda tempatan yang ikut bersama kami, lahan sawit yang ada berada jauh di pedalaman. Lahan di kiri dan kanan jalan yang tampak hanya hutan kosong tidak terpelihara. Hanya kelihatan sedikit kebun warga yang menanam pisang dan beberapa tanaman kebutuhan hidup.

Di perjalanan tampak para mama berjualan buah hasil hutan seperti pisang, durian, salak yang manis dan rambutan kecil-kecil berambut halus ciri khas Papua. Selain itu, buah pinang juga menjadi barang dagangan, selain sirih yang jadi tradisi masyarakat sehari-hari sebagai pengganti mengisap rokok bagi laki-laki dan perempuan muda dan tua.

Selain itu, ada ragam buah lainnya, meski bukan seperti hasil panen hasil perkebunan unggulan, seperti buah naga, langsung dan lainnya. Kemudian kelapa muda yang berukuran kecil menjadi andalan hasil kebun yang dijual di sepanjang jalan. Rasanya agak beda dengan kelapa muda di Sumatera. Diminum dengan gula merah. Manasye mengatakan, para mama penjual di pinggir jalan di dekat desanya menjual hasil hutan dan kebun mereka.

Ia juga menyebutkan obat-obatan, salah satunya daun gatal yang banyak dicari orang. Tumbuhan ini cukup terkenal di Papua sebagai obat menghilangkan rasa lelah. Ia juga menunjukkan beberapa contoh lagi yang merupakan bagian dari obat panas, sesak nafas yang disemburkan ke bagian tubuh seseorang yang sakit. "Percaya atau tidak, jika kami membuat

obat-obatan itu, hasilnya sembuh. Sembuhnya lebih cepat dari obat dokter,” jelas Manasye.

Bagian daun gatal ini terdapat bulu-bulu halus, yang kemudian diusapkan pada bagian tubuh yang capek. Kulit akan muncul bentolan dengan rasa sedikit gatal, dan hangat. “Kami juga mengenal daun tali kuning untuk obat malaria,” ujarnya.

Manasye mengatakan lagi, alam juga selain sumber kehidupan, juga bagian tempat keramat yang sangat dihormati. Hutan memberikan kebutuhan bagi warga adat, hewan buruan, seperti babi hutan, rusa, dan lainnya. Jika berjalan ke hutan akan ditemukan jalan setapaknya, selain rimbun pepohonan alami, tampaklah sagu, pisang, singkong, cabai, ubi, dan sukun yang ditanam warga. “Kami punya mama (hutan, *red*) yang kasih makan sejak nenek moyang. Kalau kami melepas hutan demi uang semata, itu sama saja menjual ibu kandung atau ruh dan jiwa kami,” katanya.

### **Tradisi Menjaga Alam**

Sistem mata pencaharian Suku Moi secara khusus adalah peramu, berburu, petani dan nelayan, dalam mencukupi kebutuhan hidup baik secara individu ataupun kelompok atas hak adatnya. Selain itu, sistem kekerabatan masyarakat Moi mengenal makan bersama bagi mereka yang kepemilikan tanahnya berdekatan.

Namun dalam proses ini jelas Manasye, terdapat larangan-larangan pada waktu tertentu. Pelarangan adat berupa pengambilan hasil alam dalam kurun waktu 3-4 bulan (disebut sasi) dalam hubungannya dengan mata pencaharian yang meliputi hasil hutan, kebun, sungai dan hasil lainnya. Proses pengambilan hasil laut, kebun, hutan dan lain sebagainya akan dapat dilakukan ketika telah dilakukannya upacara adat (*bemfie*) dan doa secara keagamaan.

Masyarakat Moi di Klamono tinggal di bantaran sungai. Suku Moi lainnya yang di dekat danau dan laut umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sejak dahulu Suku Moi menggunakan alat-alat yang sangat sederhana (*sbatum*) kulit kayu berbentuk silinder maupun tombak ikan dari bambu dan dahan kayu. Hal itu cara-cara yang sangat tradisional yaitu meracuni ikan dengan kulit kayu (*sabekesik*) dibarengi dengan mantra-matra berupa lagu-lagu agar tangkapan ikan berjalan

dengan sangat mulus.

Sedangkan bagi masyarakat pedalaman hidup dengan cara berburu hewan seperti rusa, babi, kasuari, dan burung. Dalam berburu, alat yang digunakan adalah tombak bambu, batu, panah dengan matra-mantra dan lagu pada kepercayaan lokal. Kemudian, di daratan berprofesi sebagai petani yang bercocok tanam berupa ubi jalar, keladi, pisang, singkong, sagu, ulat sagu dan buah-buahan seperti kelapa, mangga, durian. Dalam bercocok tanam juga mereka memiliki doa dan mantra. Dengan menggunakan alat berupa cangkul batu dan bambu dengan cara melubangi tanah untuk menanam sayur dan buah-buahan.

Akan tetapi sekarang ujar Mansye, sebagian besar masyarakat Moi telah memiliki beragam profesi tidak hanya sebatas berburu, bertani, nelayan. Sebagian telah bekerja pada berbagai instansi pemerintahan seperti menjadi pegawai negeri sipil, polisi, dosen, tukang ojek, penjual di pasar dan berbagai macam profesi lainnya.

Namun demikian, jelas Mansye, menekuni profesi yang baru, tidak membuat masyarakat Moi meninggalkan profesi lama, seperti berkebun, bertani dan berburu dan lain-lain. Seperti saya, segala profesi saya lakoni. "Jangan tanya apa kerja saya," ujarnya tersenyum. "Kini masih banyak orang-orang tua yang ke hutan, ke laut, bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan."

Jumlah masyarakat Moi dibandingkan dengan suku lain memang relatif kecil. Akan tetapi, suku Moi adalah pemilik ulayat yang sangat luas di Papua Barat.

Sedangkan struktur masyarakat Moi mengikuti garis patrilineal. Struktur adat penyebutan terhadap laki-laki disebut (*needle*) laki-laki dan (*negili*) perempuan."Struktur adat seperti ini telah tercipta sejak dahulu kala sebelum masuknya pengaruh dari luar.

Secara umum kaum laki-laki dalam struktur masyarakat Moi berhak memiliki jabatan adat seperti kepala keret, kepala suku dan lain sebagainya. Tangung jawabnya menjaga integritas serta kelangsungan kehidupan suku Moi.

Laki-laki Moi terlahir dengan hak-hak khusus seperti kepemilikan tanah. Hal tersebut diturunkan ke generasi selanjutnya dengan bertanggungjawab terhadap marganya.

Sedangkan perempuan Moi (nelagi) memiliki pemimpin tersendiri yang disebut (fulus) yang ahli dalam berbagai bidang seperti cara dalam meramu obat-obatan alam, pengetahuan tentang kewanitaan sebagai bentuk persiapan akan masa perkawinan, bekerja di kebun mencari sayur-mayur, kayu bakar serta memelihara anak sebagai kelangsungan suku Moi.

### Tanah Dan Hak Adat

Suku Moi mempunyai hak ulayat atas tanah mereka sebagai warisan budaya yang dapat dimanfaatkan secara adat. Hak tanah bagi Suku Moi bersifat komunal. Namun dalam pemanfaatannya dapat bersifat kelompok ataupun individual. Tidak ada suatu keharusan hak atas tanah dipergunakan secara kolektif, mengingat kebutuhan sebagai individu sangat dibutuhkan dikarenakan berbagai macam faktor ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Kebutuhan akan tanah secara kelompok dapat dipenuhi dengan cara tanah tersebut dijadikan sebagai pengembalaan ternak, tanah untuk pasar, tanah dusun adat, dan tanah untuk membangun kampung (iik fagu). Hak ulayat atas tanah Suku Moi meliputi 8 subetnik yakni :1. Moi Segin: Gisim, Segun, Waimon, Katapop, Katimin, Yeflio, Kasimle.2. Moi Lamas: Seget, Durian Kari, Waliam, Malabam, Seilolof, Ketlosuf.3. Moi Maya: Salawati, Raja Ampat, Sailolof, dan Julbatam.4. Moi Kelin: Aimas, Mariat Gunung dan Klamono5. Moi Klabra: Beraur, Misbra, Buk, Wanurian, Klarion, Wungkas, Wilti, Tarsa dan Hobar.6. Moi Karon: Sausapor dan 7. Moi Moraid: Sayosa dan Salmak,8. Moi Legin: Batulubang, Makbon, Malaumkarta, Asbaken, Dela, Mega, Klayili, Maladofok, dan Sayosa.

### Hak Ulayat Atas tanah Suku Moi Meliputi 8 Subetnik

1	2	3	4.	5	6	7	8
Moi Segin	Moi Lamas	Moi Maya	Moi Kelin	Moi Klabra	Moi Karon	Moi Moraid	Moi Legin

Table: [suarariau.co/imelda\\_vinolia](http://suarariau.co/imelda_vinolia) • Source: pemkabsorong • Created with Datawrapper

Table: [suarariau.co/imelda\\_vinolia](http://suarariau.co/imelda_vinolia) Source: pemkabsorong Get the data Embed Download image Created with Datawrapper

Berdasarkan pembagian di atas, telah diatur dengan sangat baik mengingat menghindari terjadinya konflik dalam klan-klan Suku Moi. Dalam status sebagai pemilik hak ulayat tanah, masyarakat Moi sangat menjunjung tinggi serta menjaga tanah serta menjadikannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka,

Sejak tahun 1930-1950 Suku Moi berdomisili di seantero Kota Sorong. Namun sejak tahun 1970-2005 tercatat hanya sedikit masyarakat Moi yang mendiami Kota Sorong, diakibatkan banyaknya pendatang dari luar Suku Moi yang berdomisili di Kota Sorong.

Selain itu, masyarakat Moi mempunyai sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang sejak dahulu kala telah di wariskan melalui hukum adat. Dalam pelaksanaannya kini, seringkali terjadi pelanggaran adat, dimana suatu marga seringkali mencoba untuk mengambil tanah marga lain, dengan cara memindahkan pembatas (patok). Pelanggaran adat seperti ini didasari pada kepentingan ekonomi, dimana terdapat pohon kayu besi, pasir atau tanah yang datar pada kepemilikan suatu marga.

Bertolak dari hal tersebut pemanfaatan hasil alam menjadi dua bagian pokok, yaitu hutan keramat/mamali (*kufok*) dan hutan biasa (*kuwos*). Hutan keramat merupakan daerah hutan yang dilindungi oleh hukum adat serta dianggap sakral dikarenakan keyakinan akan roh para nenek-moyang yang tinggal dan berdiam di hutan tersebut. Dalam hutan juga keramat diyakini merupakan tempat penyimpanan harta yang di kubur dalam tanah. Oleh karena itu tidak diperkenankan pembukaan lahan baik skala kecil ataupun besar.

Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari pemanfaatan akan pohon dan kayu dalam daerah hutan keramat hanya diperbolehkan dalam skala berdiameter kecil demi kepentingan pembuatan rumah, alat berburu dan pertanian. Dan juga satwa yang ada diatur dalam aturan adat, seperti hewan berburu, burung, ikan dimanfaatkan terbatas pada kebutuhan hidup saja. Namun jika jumlah yang diambil berlebihan dan digunakan untuk suatu kepentingan, maka terlebih dahulu harus melalui proses doa-doa yang dipanjatkan kepada arwah-arwah.

Masyarakat Moi percaya bahwa pemanfaatan hasil jika tidak disertai dengan doa-doa para arwah, maka segala sesuatu

yang dibutuhkan tidak akan tampak oleh mata. Kepercayaan terhadap para arwah juga terwujud dalam bentuk sasi, yaitu pantangan atau larangan untuk mengambil dan memanfaatkan tumbuhan atau hewan buruan tertentu ataupun suatu dusun secara keseluruhan secara kurun waktu 1-5 tahun yang akan berakhir jika telah dilakukannya proses adat.

Manasye juga memaparkan, sebelum mengenal pendidikan formal, sejak dahulu masyarakat Moi mengenal pendidikan adat, yakni pendidikan Kambik yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan melalui alam, belajar melalui alam yang diajarkan secara turun-temurun. Hakekatnya alam mengajarkan tentang hidup dan kehidupan. Gejala alam seperti gempa, banjir, longsor dan lain sebagainya dapat diketahui hanya melalui pendidikan Kambik.

### **Ajaran Kambik Dengan Mantra**

Veronika Kusumaryati, peneliti sejarah dan etnografi kolonialisme di Tanah Papua mengatakan, secara etimologi Kambik berasal dari kata Kam yang artinya rumah atau tempat bermain. Namun, pada hakekatnya rumah pendidikan adat Kambik merupakan sekolah adat yang menempatkan anak-anak suku Moi sebagai subjek dengan menggunakan pendekatan pendidikan tentang alam, rumah belajar.

Kambik merupakan tujuan masyarakat Moi dalam upaya memberikan pembelajaran kepada generasi akan datang dengan kemampuankhusus yang meliputi kesehatan pengobatan traditional, pertanian, sosial, adat-istiadat, berburu, berperang dan sebagainya. Kambik ialah menciptakan pemimpin serta mempunyai kedudukan dalam suku Moi

Sumber pembelajaran dalam Pendidikan Adat Kambik berasal dari leluhur. Oleh karena itu Pendidikan Adat Kambik sangat kental dengan unsur animisme. Kandungan mantra-mantra dan penyembahan kepada arwah para leluhur masih dipraktekkan. Hal ini, menurut Veronika, mereka lakukan saat perburuan sebelum masuk hutan, diajarkan untuk menginjak tanah sebanyak tiga kali serta mengetahui arah angin terlebih dahulu dan membacakan matra-matra. Cara ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan hewan buruan tanpa bersusah payah untuk mencarinya di tengah hutan. Selain itu, mantra-mantra tersebut membuat hewan buruan menjadi tak berdaya

dan mudah untuk dibunuh.

Dalam pemanfaatan hutan, Suku Moi punya ketentuan adat yang diterapkan secara musyawarah. Yang disebut *egek*, merupakan konsep konservasi tradisional masyarakat Moi. Mereka secara musyawarah menetapkan zona inti di laut dan hutan dengan pemanfaatan diatur dalam hukum adat. Egek tak hanya berlaku di darat juga laut. Itu adalah larangan mengambil sumber daya alam tertentu laut dan hutan sebagai upaya pelestarian ekosistem.

Saat mengambil hasil panen ikan dilarang pakai alat tangkap yang membahayakan bagi keberlanjutan sumber alam, seperti jaring dan bahan peledak/kimia.

Alat menangkap ikan hanya boleh dengan cara yikmen (mengail), yafan (memanah) dan yakalak (menembak). Biasanya, mereka memanen tripang, lobster, dan lola (kerang). Untuk itu ujar Veronika, cara-cara Suku Moi memelihara lingkungan dan aturan adat yang mereka pahami sangat relevan untuk mengatur kehidupan jaman sekarang dengan lingkungan.

Feky Mobalen sebagai pemuda adat dan generasi penerus yang sekaligus Ketua AMAN Sorong, yang dikunjungi tim ke tempat ia tinggal di Pulau Doom, mengatakan bahwa masih boleh mengambil ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tak bisa mengambil spesies dilindungi dan ditetapkan masyarakat.

Ia menyebutkan, seperti di Malaumkarta, dahulu terkenal sebagai masyarakat pemburu penyu. Sampai pada populasi penyu kian berkurang. Masyarakat pun sepakat menghentikan perburuan penyu dan jadi pantangan. Kalau melanggar, akan ada denda adat yang ditentukan melalui musyawarah. "Kami tak mau kampung rusak seperti yang sudah terjadi di lokasi lainnya. Jika rusak, maka ikan-ikan tidak bisa lagi berkembang biak sebagaimana mestinya," katanya.

Untuk Ancaman lainnya papar Feky, tetap ada. Seperti pada 2007, perkebunan sawit maupun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sempat menawar lahan masyarakat. Warga bersamasama menolak. *(Seperti apa konflik yang terjadi, maka akan diulas di bagian kedua dan ketiga tulisan ini).*

## 2.

# Janji Manis Jadi Konflik, Hutan Hancur Jadi Sawit<sup>2</sup>

Oleh: Imelda Vinolia



*Para penuda adat Klagilit melakukan aksi penolakan terhadap jalan tembus KEK melalui tanah mereka pada 2019 (FOTO/Pemuda Adat Klagilit)*

*Bumi Sorong atau kepala burung memiliki kekayaan alam yang menggiurkan pihak investor. Iming-iming harta benda dari sejumlah perusahaan datang silih berganti ditawarkan kepada masyarakat adat Moi sebagai penguasa wilayah Sorong. Warga tinggal memilih ingin dibangun rumah, dibelikan mobil, atau diberi uang ganti rugi dan uang upacara adat.*

---

<sup>2</sup>Tulisan ini terbit di [suarariau.co](http://suarariau.co) pada 27 Januari 2021 dengan judul "Suku Moi: Janji Manis Jadi Konflik, Hutan Hancur Jadi Sawit, Ini Dia Perjuangan Panjang Izin Sawit Dicabut Bupati (Bagian-2)"

Pemuda Adat Feky Mubalen yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong memaparkan, sejak 1900-an, Sorong Raya mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Raja Ampat di Papua Barat sudah melewati tiga era industri. Era pertama adalah zaman minyak bumi yang dimulai 1935, ketika maskapai minyak Belanda mengebor minyak di Sorong. Era kedua, zaman minyak sawit mulai tahun 2000-an. Era ketiga, yang terbaru, adalah zaman Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diresmikan pada 2016. KEK berada di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong dengan luasnya 523,7 hektar dan diperuntukkan bagi suplai logistik, pertambangan, hingga perkebunan.



*Pompa Angguk pertama yang tertua milik Pertamina di Sorong yang berlokasi di Distrik Salawati. (FotoSRc/Imelda V)*

“Tapi kemakmuran di setiap zaman itu tak pernah mampir ke komunitas masyarakat adat sebagai pemilik kawasan tempat semua industri itu berdiri,” ujarnya memandang laut luas, saat diwawancara di rumahnya yang terletak di tepi pantai.

Sampai hari ini bisa dihitung dengan jari berapa banyak profesor, doktor, S1, S2, dosen, guru, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bisa diakses secara gratis oleh komunitas adat dan marga yang wilayahnya dikuasai oleh industri. “Realitas

yang sudah dilihat, pemukiman Klamono, sulit mendapatkan air bersih di sana,” ulasnya.

Namun, pengakuan atas hak Masyarakat Adat hanya sekedar teori hukum. Implementasinya di lapangan lain cerita. Janji industri membuat komunitas adat dan marga sejahtera, malah jadi sengsara di wilayah adat mereka sendiri.

Bagi komunitas Adat, hutan, dusun, atau wilayah adat adalah Mama (sebutan hutan, wilayah adat, red) yang memberikan kehidupan. Ketika masyarakat adat membutuhkan sagu, dia akan pergi ke dusun sagu. Ketika dia membutuhkan sayur dan daging, dia ke hutan. Ketika dia membutuhkan ikan, dia akan memancing. Ketika dia butuh obat, ada obat-obatan di dalam hutan. Ketika dia butuh keindahan, dia ke hutan untuk melihat anggrek hingga burung cenderawasih. Hingga akhirnya, investasi mengubah hutan mereka yang kaya raya menjadi suatu jenis tanaman saja, yakni kelapa sawit. Hal itu terjadi karena kesengajaan dari industri dan investor untuk keuntungan pribadi. Akhirnya penderitaan berkepanjangan dirasakan masyarakat hingga kini.

### Sulit Cari Bahan Noken



*Mama Welmince Kalawen wargs Distrik Salawati merangkai daun untuk dibuat keampilan seperti tikar dan lainnya yang bisa dijual dan digunakan warga. (FOTO/SRC)*

Hancurnya hutan sangat berdampak bagi para mama Suku Moi. Hal itu dirasakan oleh seorang wanita yang dipanggil Mama Welmince Kalawen, warga Distrik Salawati. Mama Welmince mengenang ketika ia masih bersama orang tuanya dahulu sebelum berkeluarga. Dia mengatakan ketika itu tidak ada yang merusak hutan mereka. Perempuan adat dari Suku Moi kelima ini mengingat semua kehidupan sebelum era industri sawit. "Tetua dulu mengatakan hutan aman. Tidak ada perusahaan yang rusak hutan. Hutan aman karena ada rotan yang tumbuh. Hutan aman, punya rotan yang banyak," paparnya mengingat semua kejadian dahulu, sambil menyirih dan duduk bersandar di dinding rumahnya.

Sejak perusahaan sawit masuk, hutan menjadi hancur. Bagi dirinya dan perempuan kebanyakan, kreativitas perempuan dalam membantu ekonomi keluarga serta menjalankan kehidupan sejak itu juga ikut hancur. "Kini mau buat tikar dan keterampilan susah. Sekarang mencari bahan noken saja susah. Hanya dengan rumput saja," ujarnya. "Kasih masuk perusak, akhirnya bahan-bahan di hutan sudah tidak ada."

Ketika itu perusahaan yang masuk di Salawati adalah batubara, sawit, dan hutan pun ditebangi. Kayu tersebut ditebang dari hutan dan dijual keluar. "Kini rumah untuk membuat kayu saja susah," jelasnya, sambil menghembus nafas berat.

Kini, rumput untuk membuat noken di hutan sudah tidak ada. Kini mereka menggantikannya dengan menanam sendiri di kebun atau di pekarangan. "Dulunya tumbuh sendiri," katanya sambil menunjuk noken hasil karyanya di ruangan itu.

Sekarang jika ingin membuat noken, tikar dan lainnya, bahan tanamannya dari tanam sendiri. Jika mereka malas menanam, maka bahan-bahan keterampilan lokal tersebut tidak tersedia lagi di hutan karena sawit. Menanam bahan noken penuh perawatan. Jika tidak dirawat, maka bahan-bahan tersebut tidak tumbuh dengan baik.

Menanam rumput bahan noken dilakukan perempuan adat, karena hutan sudah habis. Memerlukan waktu masuk ke hutan yang jauh lebih dalam dan berbahaya. "Cari di rawa-rawa besar baru bisa ambil. Itulah sebabnya bahan noken dan tali noken juga sudah susah didapatkan," ujarnya.

Perusahaan kelapa sawit, memiliki janji untuk menyekolahkan anak. Tetapi menurut Mama Walmince, itu

hanya sebatas bahasa manis saja. “Khusus untuk Salawati tidak ada. Hanya janji dalam bahasa. Mulai dari pembukaan hutan pertama kali hingga kini,” ungkapnya.

Akhirnya, para mama mengelola tanah untuk menanam bahan noken sendiri dan merawatnya. “Sementara membuat bahan dan tali noken, kini banyak dilakukan dengan karung bekas. Hasilnya produknya tidak asli lagi,” ujarnya.

Pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat dan perempuan dari perusahaan sawit di Salawati tidak ada. Bahkan mendukung pendidikan juga tidak mendapat perhatian. “Hanya dinas perikanan pemerintah yang pernah melakukan,” jelasnya.

Mama Walmince juga mengeluhkan sulitnya menanam rumput noken. Sebab membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pihak warganya telah menanam rumput noken. Hal itu mereka dapat dari ganti rugi lahan mereka yang tercaplok perusahaan, yakni hanya diganti 60 hektar dari luas lahan yang sebenarnya lebih besar dari itu. Hal itupun didapatkan mereka dengan mengurusnya ke kantor bupati berkali-kali. Pergantian tersebut tidak setara dengan tercaploknya lahan mereka. Hanya dinilai sekitar Rp300 ratus juta saja ke warganya.

“Belum lagi tanah wilayah yang lain, yang luas yang hanya dihargai Rp 11 juta saja,” ujarnya dengan nada lirih.

### Iming-Iming Hidup Layak



*Esau Klagilit (FOTO/SRC)*

Di sisi lain, dampak keberadaan industri yang semakin membuat warga menderita juga dirasakan warga Distrik Moi Sigin, Sorong. Sama halnya dengan warga Distrik Klamono, ir bersih dari alam seperti cerita orangtua dulu menjadi harapan bagi warga adat Katapop, Distrik Moi Sigin. Namun itu juga hanya tinggal impian belaka.

Kekeringan dan gersang tetap menjadi bagian penderitaan yang tidak ada hentinya, selain dampak lain akibat masuknya era industri di Distrik Moi Singin. Itulah gambaran yang disampaikan Esau Klagilik dari warga Moi Singin bercerita pada *suarariau.co*.

Hilangnya alam sebagai sumber segala kehidupan ujanya, terjadi di tanah Moi Sigin sebelum Indonesia merdeka. Belanda sudah masuk dan menjajah dengan mengeruk minyak bumi selama puluhan tahun. Sejak itu, wilayah adat mereka banyak yang dicaplok oleh Belanda dengan kekerasan demi mengeruk minyak. Kini meski minyak tersebut sudah diambil alih Indonesia, masyarakat adat sebagai pemilik wilayah tidak pernah diberikan ruang atas hak mereka yang diambil alih oleh pihak investor.

Selanjutnya masuk era industri sawit juga awalnya menjadi harapan meraih impian yang menjanjikan bagi warga adat mereka. Namun yang terjadi justru penambahan penderitaan yang berkepanjangan.

Sebelum tahun 1982, wilayah dan hutan adat Moi Singin masih banyak dan terlindungi. Era itu terjadi sebelum masuknya transmigrasi penduduk dari Jawa ke Papua.

Awalnya warga Moi Singin tinggal masih di Pulau Katinin, pesisir pantai. Belum di darat seperti sekarang ini. Ketika masuknya transmigrasi, barulah tinggal di Kampung Pongala/Kataponpante, setelah terbentuk Distrik Salawati. Kemudian di tahun 1984-1985, mereka tinggal di Kampung Matawolot. Kemudian paska 1985/1986 pindah ke Kalasari yang kini disebut Kampung Wonosobo, dimana Distrik Salawati menjadi Moi Singin dan Salawati sendiri.

Sejak transmigrasi itu, jelas Esau yang merupakan warga adat di tempat itu, hutan mulai ditebang dengan skala besar untuk pemukiman warga transmigrasi. Perusahaan kayu ilegal logging masuk dan menjual kayu Merbau sebagai ciri khas hutan di wilayah tersebut. Tahun demi tahun kian habis dijual

ke luar. "Coba lihat itu lahan di sepanjang jalan, ketika masuk hingga kedalam, tidak ada lagi pohon atau hutan seperti yang kamu lihat. Kayu Merbau habis, illegal logging marak. Sangat sulit menjumpai pohon-pohon kayu yang besar. Yang ada semak belukar dan gersang," ujarnya menjelaskan wilayah tersebut.

Sepengetahuan dirinya, ketika itu, perusahaan yang ada adalah Uni Raya Timber dan beberapa perusahaan lainnya. Menurut penjelasan Esau, keberadaan perusahaan tersebut tidak diketahui oleh warga adat.

Selain PT Uni Raya Timber, perusahaan lainnya ketika itu PT Hasrat Mandiri Gisin yang juga bergerak dibidang kayu. Sampailah pada tahun 2006, iming-iming pendirian kebun untuk tanam sawit dikatakan sebagai solusi bagi warga untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layakpun masuk. Dimana perluasan penebangan hutan makin marak di tahun 2008, yang diberikan oleh 12 marga yang ada.

Hal ini kemudian untuk setiap tahunnya diikuti oleh marga lainnya. Karena tergiur dengan harapan yang dijanjikan dari hasil sawit dan sebagainya. "Awalnya, sosialisasi pertemuan dilakukan oleh 4 marga, kemudian 12 marga dan seterusnya demikian satu demi satu diikuti oleh marga-marga lainnya," papar Esau.

Pengambilalihan lahan adat tersebut dilakukan dengan upacara adat dan pembayaran, pembangunan rumah sebagai perjanjian yang belakangan membawa petaka bagi kehidupan warga itu sendiri. Ketika itu, 1 hektar lahan digantikan rumah 4x5 meter semi permanen dengan bangunan ala kadarnya (tanpa cor yang kuat, *red*). "Sebab, perjanjian kenyataannya realisasi tidak lagi sesuai dengan perjanjian itu sendiri," ujarnya.

Lama kelamaan, tidak sesuai, hutan habis, tempat berburu hilang, apotek alam hilang, tempat memancing hilang, sungai penuh limbah dan terutama ketersediaan air bersih dari alam yang dulu mereka dapatkan menjadi sekarat.

### **Memicu Konflik Antar Marga**

Adanya uang di belakang upacara adat dan ganti rugi ini menimbulkan konflik yang kerap terjadi ketika warga mengambil tapal batas marga. Bahkan ujar Esau, hingga Desember 2021 masih sempat menuai konflik antar marga soal tapal batas. Konflik tersebut antara marga Nebra dan Mugu, di

kampung Katinin atau Kapaponte, Distrik Salawati.

Hal itu terjadi antar marga, biasanya salah satunya salah atau sengaja mengambil tapal batas yang tidak sesuai. Biasanya mereka lakukan tanda batas dengan cara sederhana, yakni memberi pewarna seperti cat dan kayu yang dipancang. Terkadang juga ada yang dicor. Hal ini terjadi ketika mereka mau mendapatkan uang upacara adat dan ganti rugi lahan mereka yang akan diambil jalan tembus oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)..

Esau menambahkan, pihak yang satu melaporkan ke Polsek. Pelaporan ini biasanya terjadi karena pihak yang merasa bersalah biasanya menghindar tidak mau duduk bersama. Kemudian Posek turun dan juga mengundang pihak bertikai, saksi-saksi dan tetua adat dari marga masing-masing, untuk duduk bersama. Jika penyelesaian secara adat, biasanya dengan sidang terbuka adat dengan menghadirkan saksi-saksi. Jika sidang terbuka buntu, maka akan diadakan sidang tertutup, dan orang tidak boleh masuk. "Hanya tetua adat yang terpenting saja," ujarnya.

Sementara hasilnya cukup unik. Jika hasil sidang tertutup biasanya diumumkan, maka dalam adat Suku Moi sidang tertutup hanya diketahui secara kebiasaan. Yakni, ketika mereka keluar sidang, biasanya yang menang adalah yang digendong seseorang tetua penting. "Tidak ada pengumuman," jelasnya.

Kini, sumber air bersih bagi warga yang dulunya bisa didapatkan dari sekitar Sungai Klasef dan anak-anak sungainya telah menghilang. Sungai itu sudah lama tercemar dan tidak bisa dipakai warga lagi sebagai sumber kehidupan. Selain itu, anak-anak sungai banyak yang ditanami sawit sehingga airnya kering atau hilang. Sungai utama sebagai alur transportasi utama ke desa-desa di bantaran sungai juga menjadi dangkal, debit air banyak berkurang.

Hingga kini dampak lingkungan tersebut belum pernah ada solusi. Warga tidak bisa mengadu dan mengekspresikan penderitaannya kepada pihak manapun. "Apa lagi kepada perusahaan," ujarnya.

Sementara hal lainnya yang tak kalah menambah mirisnya penderitaan warga adat dan tak kunjung tuntas, justru warga pemilik tanah adat menjadi buruh di kebun sawit.

Kerap kali mereka mendapat perlakuan dan disuruh keluar dari wilayah secara paksa. Dua tahun terakhir sebanyak 500 buruh di PHK yang hingga kini masih menyisakan persoalan yang belum tuntas. “PT Inti Kebun Sawit (IKS) belum membayarkan hak mereka,” imbuh Esau.

Sebagai penerus dan warga adat ia dan barisan pemuda lainnya serta pihak-pihak yang mendukung, kini sedang menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak mereka. “Kini kami sedang pengumpulan data untuk menuntut PT IKS,” ujarnya.

### **Akhirnya Bupati Cabut Izin**

Lelah dengan tekanan keadaan yang demikian, akhirnya masyarakat adat pun menggugat keberadaan sawit. Dengan mendatangi kantor Bupati. Bertahun-tahun sudah dilalui oleh masyarakat Adat Moi untuk melakukan aksi penolakan.

Sampai pada akhirnya, yang menggembirakan datang dari petinggi Kabupaten Sorong. Johny Kamuru sebagai Bupati Sorong mencabut izin usaha perkebunan dan izin lingkungan sejumlah perusahaan sawit. Pencabutan izin sawit yang dilakukan Jhoni pada Agustus 2020, diberlakukan kepada PT Mega Mustika Plantation, PT Inti Kebun Lestari dan PT Sorong Agro Sawitindo.

Sebelumnya, 27 April 2021 Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat juga mencabut izin lokasi, lingkungan dan izin usaha terhadap empat perkebunan sawit besar, yakni PT Inti Kebun Lestari (IKL), PT Papua Lestari Abadi (PLA), PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) dan PT Cipta Papua Plantation.

Sejak itu, ujar Esau lagi, masyarakat adat suku Moi, berkomitmen untuk menjaga hutan dan tak ingin lagi terjebak. Namun rintangan datang kembali. Bupati Jhonni justru digugat tiga dari empat perusahaan sawit yang izin operasinya dicabut.

Jadi keempat perusahaan yang izinnya dicabut itu yakni PT Cipta Papua Plantation yang berlokasi di Distrik Mariat dan Sayosa dengan lahan seluas 15.671 ha. PT Papua Lestari Abadi yang berlokasi di Distrik Segun dengan luas lahan 15.631 ha. PT Sorong Agro Sawitindo yang berlokasi di Distrik Segun, Klawak dan Klamono dengan luas lahan 40.000 ha. Sementara satu perusahaan yakni PT Inti Kebun Lestari yang berlokasi di Distrik Salawati, Klamono dan Segun dengan luas lahan 34.400

ha, izinnnya ikut dicabut.

## Empat Nama Perusahaan Sawit di Sorong Yang Izinnnya Dicabut Bupati Sorong Agustus 2021

Nama		PT Cipta Papua Plantation	PT Papua Lestari Abadi	PT Sorong Agro Sawitindo	PT Inti Kebun Lestari
Distrik		Mariat & Sayosa	Segun	Segun, Klawak & Klamono	Salawati, Klamono dan Segun
1	Luas (ha)	15.671	15.631	40.000	34.400

Table: suarariau.co/Imelda vinolia • Source: Pemkab Sorong • Created with Datawrapper

Table: suarariau.co/Imelda vinolia Source: Pemkab Sorong Get the data Embed Download image Created with Datawrapper

Pada 9 Desember 2021, Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jayapura menolak gugatan dua perusahaan kelapa sawit PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo atas pencabutan izin usaha oleh Bupati Sorong Johnny Kamuru.

Perkara tersebut bergulir, sejak Bupati Sorong Johnny Kamuru mengeluarkan Surat Keputusan No.525/Kep.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Papua Lestari Abadi pada lahan seluas 15.631 hektare, tertanggal (27/4/ 2021). Dan, Surat Keputusan No.525/Kep.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Sorong Agro Sawitindo pada lahan seluas lebih kurang 40 ribu hektar, tertanggal 27 April 2021 lalu.

Tindakan Johnny mencabut izin itu kemudian digugat oleh tiga perusahaan yang berperkara di PTUN, termasuk PT Inti Kebun Lestari. Namun ketika itu gugatan yang diajukan PT Inti Kebun Lestari (PT IKL), belum diputus oleh majelis hakim PTUN Jayapura Desember lalu.

Pada 12 Januari 2022 lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara juga Jayapura menolak gugatan PT Inti Kebun Lestari (IKL) atas pencabutan izin konsesi sawit mereka di Kabupaten Sorong. Perusahaan menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Bupati Sorong.

PT IKL menggugat Kepala Dinas PMPTSP Sorong atas pencabutan izin lokasi, dan menggugat Bupati Sorong atas pencabutan izin usaha perkebunan dan izin lingkungan. Gugatan perusahaan didaftarkan di PTUN Jayapura 2 Agustus 2021. Perkara dua gugatan ini tercatat berturut-turut dengan Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR (perkara 29) dan 30/G/2021/PTUN.JPR (perkara 30). Hakim perkara kasus ini adalah Yusuf Klemen, Firman, dan Muhammad Bima Sakti

### **Pengelolaan Wilayah Oleh Masyarakat Adat**

Hutan dan wilayah adat yang sebelum era industri di kelola dengan aman dan harmonis, meski kini sudah rusak oleh industri, akan dikembalikan ke pangkuan Suku Moi tahap demi tahap. Ketua AMAN Sorong, Feky Mubalen berpendapat, meski butuh proses, wilayah-wilayah yang telah dicabut izinnya kemudian akan didorong pengelolaannya untuk dan oleh masyarakat adat.

Sarles Ulimpa dari Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Malamoi mengatakan, sejarah panjang dan jalan terjal yang sudah mereka lalui dengan memperjuangkan wilayah adat masyarakat penuh kesedihan mendalam. Hal itu telah dilakukan sejak tahun 2012 lalu. "Kebijakan pemerintah dan perusahaan serta orang-orang yang melakukan investasi di tanah Moi Kelim, Distrik Laso, tidak berdampak positif terutama bagi masyarakat adat," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Sarles, AMAN hadir bersama masyarakat adat untuk memperjuangkan, membantu mengadvokasi soal apa saja masalah yang dialami masyarakat adat. "Kami selalu berada memperjuangkan isu-isu masyarakat adat. Jika hari ini masyarakat yang wilayahnya terganggu, maka kami juga terganggu," ujarnya.

Kurang lebih dari tahun 2012 dan sampai tahun 2017, AMAN telah mendampingi masyarakat adat dari Moi Kelim, Distrik Laso. Di situ masyarakat adat telah menolak salah satu perusahaan yang izinnya dikeluarkan pada 2011. Izin itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan warga adat.

Sejak 2009, bersama AMAN, masyarakat melawan agar izin tidak diberikan. Namun izin tetap keluar pada 2011. Masyarakat adat tetap melawan. Kurang lebih 9 tahun, yaitu 14 Agustus 2020, Bupati Sorong mencabut izin yang merupakan

hak masyarakat adat itu. Dengan harapan masyarakat adat bisa mengelola apa yang menjadi keinginan masyarakat adat itu. Selain itu, AMAN juga hingga kini mendampingi masyarakat dari Moi Sigin dan mendampingi soal buruh yang haknya belum dibayarkan sejak PHK. AMAN juga membantu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk mendukung Bupati yang digugat tiga perusahaan dan Bupati menang di PTUN, hingga 7 Januari 2022.

Menurut Sarles, fakta membuktikan bahwa masyarakat adat yang tanahnya dikuasai perusahaan, belum sejahtera. “Memang ada yang jadi sarjana tetapi sedikit, dan kelayakakan hidup masih di bawah standar,” ujarnya.

“Saya melihat perusahaan tidak mampu untuk menepati janji yang diberikan kepada masyarakat adat. Kami bersepakat perusahaan harus adil memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat itu sendiri. Tetapi kenyataannya, itu hanya janji yang tidak ditepati,” imbuhnya.

Franky Samparante dari Yayasan Pusaka mengatakan, ada dua jenis konflik tanah adat di Papua, termasuk dialami masyarakat adat Moi. Pertama, konflik saling klaim dan rebutan penguasaan pemilikan atas tanah antara masyarakat adat, dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Kedua, konflik struktural, yaitu pemerintah menerbitkan izin-izin usaha pada tanah dan hutan adat, dengan motif ekonomi, pengembangan proyek-proyek usaha skala luas.

Sementara, Yayasan Pusaka sendiri terlibat dalam upaya advokasi bersama masyarakat adat Moi di beberapa wilayah distrik yang sedang bersengketa dengan perusahaan. Strategi dan aksi Pusaka dilakukan melalui tiga jalur, memperkuat dan mendampingi masyarakat adat, mengupayakan adanya pengakuan negara terhadap hak masyarakat dan membuat perusahaan menerima dan patuh pada peraturan dan standart terbaik untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan solusi kedepan adalah memenangkan perkara di PTUN sehingga bisa mengembalikan wilayah hak warga adat. Untuk itu, Yayasan Pusaka mengorganisasikan masyarakat adat Moi yang terdampak langsung dan tidak langsung karena perusahaan tersebut. Mereka juga mendorong masyarakat dapat merencanakan dan mengelola tanah dan hutan adat secara mandiri. Yayasan Pusaka juga , meminta

pemerintah mengakui hak masyarakat. "Termasuk menjaga dan mengamankan kawasan hutan yang menjadi sumber pangan dan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Lury da Costa, dari Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan juga melihat bahwa keberadaan perusahaan yang beroperasi wilayah adat Moi hanya bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada, dengan menjalankan administrasi dengan praktek-praktek kotor di lapangan.

Seharusnya, ada yang namanya izin dari masyarakat. Tetapi justru yang mereka lakukan membuat sosialisasi selolah-olah mendapatkan izin masyarakat. Selain mengabaikan masyarakat adat, perusahaan juga suka membenturkan masyarakat adat di dalam sendiri. Contoh, mempengaruhi kelompok A, agar bagaimana mendukung pihak perusahaan. "Sehingga satu sama lain antar marga jadi ada saling bermusuhan," ujarnya. "Untuk itu cara-cara seperti itu tidak akan berlaku lagi, ketika hak warga adat dikembalikan ke pangkuannya," imbuhnya.

### **Perusahaan Lebih Baik Legowo**

Wakil Ketua I Dewan Kabupaten Sorong Elon Fadan sangat mendukung keputusan PTUN yang memihak warga adat. Ia mengatakan bahwa adat adalah hal yang paling penting bagi orang Papua. Adat pertama kali bagi kita, apa lagi suku Moi, sehingga adat bukan untuk dipermainkan. Karena adat adalah satu aturan khusus yang diturunkan Tuhan kepada nenek moyang. Untuk itu, adat adalah harapan yang diturunkan secara turun temurun untuk menjaga wilayah adat.



*Elon Fadan.(FOTO/SRc)*

Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlalu menekan masyarakat adat. Adat telah menjadi cara hidup Suku Moi sebelum agama dan aturan negara masuk.

Ia mencontohkan jika ada kemauan pemerintah dan apa keinginan adat dalam pembangunan, maka harus berjalan dengan kesepakatan bersama dengan tidak saling merugikan. Tetapi justru harus berdampak bagi warga adat. "Jika belum ada solusi adat dan pemerintah, maka pembangunan tidak akan berjalan," ujarnya.

Selaku Dewan ia mengatakan tidak bisa mengambil keputusan. Tetapi Dewan bisa memberikan respon, karena dua pihak pemerintah dan perusahaan sudah mengambil komitmen, izin. Dewan akan setuju jika keputusan yang diambil bagi warga adat sudah aman dan memberikan makna positif.

Elon mengatakan lagi, jika bagi pemerintah yang dilakukan perusahaan sawit telah menimbulkan pelanggaran, maka pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin sawit seperti yang sudah terjadi tersebut. "Khusus dewan dari Badan Kehormatan, kami menyetujui pencabutan izin perusahaan tersebut," ujarnya.

Ia berharap perusahaan lebih baik legowo saja. Elon mengaku mendengar satu dari empat perusahaan sawit mengajukan banding atas pencabutan izin oleh Bupati Jhony. Disarankan agar pihak yang mau banding, seperti PT Agro Sawitindo untuk tidak banding. Sebab, ia yakin nanti hasilnya sama saja. Warga akan kembali menolak dan akan menyebabkan bentrok. "Lebih baik perusahaan negosiasi ke warga adat terhadap lahan yang masih bisa berjalan dengan kesepakatan yang tidak untuk dilanggar kembali," sarannya.

Ia mencontohkan kenyataan di wilayah adat di marganya sendiri di Klamono. Warga di sana tiba-tiba didatangi pihak perusahaan yakni PT IKS dan Agro Sawitindo. Perusahaan ini tidak pernah koordinasi dengan warga adat. Mereka datang dengan peta dan mengatakan lokasi akan diambil untuk sawit. Hal itu kemudian ditolak warga Klamono.

Harapannya ke depan dengan kembalinya wilayah adat ke pangkuan warga adat itu sendiri, Dewan siap mendukung warga untuk menjaga kelestarian alam. Ia juga berharap pemerintah bisa memberikan dukungan pembangunan yang sesuai bagi warga adat. Sementara pihak yang lain juga

diharapkan bisa membantu warga adat bagaimana mengelola wilayah adatnya.

### Perusahaan Itu Layak Dicabut Izinnya



*Bupati Johny Kamuru .(File)*

Pencabutan izin ini merupakan tindak lanjut evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat dimana KPK menjadi salah satu pendukung tim dari provinsi sejak Juli 2018. Bupati Sorong Johny Kamuru, melalui Asisten I Bidang Pembangunan Pemkab Sorong Suroso S.Ip MA, ketika diwawancara *suaraiu.co*, Selasa (26/1/2022), mengatakan, tindakan pemkab untuk mencabut izin tersebut berdasarkan sejumlah alasan.

Pertama, keputusan pencabutan izin dua perusahaan sawit oleh pemkab adalah tindak lanjut evaluasi perizinan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat dan telah melalui proses yang panjang sesuai dengan tata aturan pemerintah. Evaluasi melibatkan kabupaten Sorong. “Secara nyata empat perusahaan tersebut mengatongi izin, namun tidak beraktivitas di lapangan. Sehingga hal ini dipandang perlu untuk dicabut,” ujarnya.

Kedua, dari sisi mainstreamnya, bahwa pemkab ada

keinginan untuk melindungi masyarakat hukum adat dalam konteks masyarakat asli Papua. Hal ini juga dipandang perlu. Dimana pejabat sebelumnya sudah mengeluarkan izin, namun “tidak dimanfaatkan dan digunakan”, maka bupati memandang hal itu patut untuk dicabut.

Apalagi, sudah ada Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2017. Dalam Perda tersebut ada 389 marga dengan 23 komunitas Moi Lemas, 31 Komunitas Moi Segen, 47 Komunitas Moi Kobra, 32 Komunitas Moi Maya, 27 Komunitas Moi Salah, 29 Komunitas Moi About Taat, dan 7 Komunitas Abun JII.

Mengomentari soal adanya keinginan banding atas PTUN Jaya Pura dari salah satu perusahaan, menurut padangan pemkab upaya mereka harus dihargai. Namun Pemkab tetap berkeyakinan akan tindakan yang mereka ambil untuk melindungi masyarakat hukum adat Suku Moi.

## Komitmen



*Asisten I Bidang Pembangunan Pemkab Sorong Suroso S.Ip MA,(File)*

Suroso mengatakan paska PTUN ini, kedepan pemerintah daerah khususnya Pemkab Sorong, harus berkomitmen dan menyiapkan sejumlah upaya untuk memastikan areal tersebut bisa dikelola dengan baik. Sebab sudah dikembalikan ke pangkuan sepenuhnya kepada masyarakat hukum adat. Sebab, saat ini semua lahan di Tanah Papua telah mempunyai kepemilikan baik secara *de facto* (kenyataan) maupun secara *de jure* (hukum).

Penyerahan kembali areal hutan itu kepada masyarakat juga akan diiringi dengan pemetaan wilayah dan penetapan kawasan hutan yang dilengkapi pengajuannya lewat program reforma agraria. Seluruh upaya ini harus menghasilkan ketetapan yang menjamin legalitas wilayah tersebut. Ini dapat berbentuk surat keputusan bupati tentang penetapan hutan adat atau produk hukum lainnya yang sejenis.

Sedangkan wilayah (izin) yang sudah dicabut ini dapat didorong pemanfaatannya dengan skema perhutanan sosial atau dijadikan kawasan pertanian pangan skema kampung. "Nantinya diserahkan dengan keinginan masyarakat untuk melakukan pemetaan ulang dan kajiannya yang paling cocok untuk wilayah mereka. Sesuai masyarakat hukum adat untuk mengelolanya," katanya.

Yang jelas sekarang, Bupati Sorong Johny Kamuru, ujarnya sudah menjamin lahan sawit yang telah dicabut izinnya akan dikembalikan kepada masyarakat adat setelah proses di pengadilan selesai sampai menunggu ingkrah akhir bulan ini. Setelah putusan pengadilan. Pemkab akan menunggu warga adat datang untuk mengajukan idenya dalam pengelolaan sesuai dengan apa yang mereka perlukan.

Setelah PTUN, konsep dasar dalam rangka keberpihakan dan melindungi masyarakat hukum adat di sini, maka Pemkab berkeyakinan areal tersebut dicoba kepada masyarakat hukum adat untuk dikelola. Namun yang menjadi masalah, sebagian di antaranya merupakan area konsesi HPK dan APL. Perlakuan areal ini akan berbeda. Spiritnya adalah bagaimana memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat untuk mengeksplor sumber daya alam yang ada.

"Wilayah ini akan dikembalikan ke pangkuannya. Untuk saat ini untuk kami landai-landai saja menunggu ide dari masyarakat hukum adat pengelola wilayahnya. Pengembangan

ekonomi mereka kedepan juga pasti berjalan sesuai untuk kebaikan masyarakat. Kami siap menunggu masyarakat hukum adat, sampai putusan ingkrah pengadilan,” ujarnya.

### 3.

## Habis Era Sawit, Masuk KEK<sup>3</sup>

Oleh: Imelda Vinolia



Plang batas yang hingga kini masih terpasang di wilayah adat marga Klagilit (FOTO/SRC)

Jalan terjal dan panjang sudah dilalui Suku Moi di Sorong, Papua Barat. Sejak masuknya perusahaan di zaman Hindia Belanda hingga era perkebunan sawit telah merambah wilayah mereka. Namun hal itu tidak cukup. Kini, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Provinsi Konservasi Papua Barat dikhawatirkan akan mengguncang kehidupan mereka yang hanya mengenal aturan adat.

---

<sup>3</sup> Tulisan ini terbit di [suarariau.co](http://suarariau.co) pada 27 Januari 2021 dengan judul, "Suku Moi: Habis Era Sawit, Masuk KEK, Takut Lahan Dicaplok Lagi Marga Klagilit Jaga Hutan Adat (Bagian 3-selesai)"

Takut lahannya dicaplok lagi, membuat mereka waswas atas wilayah adatnya. Khawatir suatu hari nanti, tiba-tiba lahan adat sudah berpindah kepemilikannya.

Kekhawatiran ini dirasakan marga Klagilit di Kampung Wonosobo, Distrik Moiseigin, Papua Barat. Lazarus Klagilit (56), salah seorang warga mengatakan, meski sudah diangkat jadi guru sejak tahun 1984 dan hingga pensiun, ia dan keluarga lebih banyak hidup tergantung dari hasil hutan. Hutan sagu yang disebut Dusun Sagu bagi marga Klagilit dan keturunannya sudah ada sejak bumi ini dijadikan.

Bagi Klagilit, tumbuhan sagu yang menjadi makanan pokok mereka sejak dulu sudah disediakan oleh bumi dengan sendirinya. “Kami tahu bahwa bumi sudah menyediakan makanan berupa sagu untuk kami sejak bumi ini dijadikan,” ujar Lazarus.

Selain sebagai tempat mencarui makanan, warga Klagilit menjadikan hutan sebagai tempat keramat warganya yang mesti dilindungi. “Selain itu, tanah-tanah keramat harus kita lindungi dengan baik,” ujarnya, menekankan kenapa dirinya dan istri tinggal di hutan.

Dusun Wonosobo yang jika kita masuk akan melalui jalan lintas cor semen yang sempit. Kemudian bisa kita jumpai jalan-jalan desa yang masih seperti seadanya. Tampak perkampungan ditumbuhi pohon pinang kelapa dan tumbuhan alam lainnya dengan rumah-rumah yang cukup berjarak dan sangat sederhana.

Marga Klagilit menolak keberadaan KEK dan memalang jalan masuk yang melintasi dusun mereka sejak tahun 2019. Penolakan tersebut dikarenakan sepanjang jalan KEK itu adalah Dusun Sagu mereka yang selama ini memberikan mereka kebutuhan sehari-hari.

Mereka khawatir pembangunan jalan KEK, akan menembus wilayah adat marga mereka, yakni Klagilit Maburu dan Klagilit Maveria. Kedua marga ini bersama-sama menolak perencanaan jalan KEK yang melewati wilayah adat. Hal ini dikhawatirkan, dengan pembangunan jalan tembus KEK tersebut, akan menghilangkan sumber pangan yang menjadi kebutuhan hidup warga.

“*Site plan* pembangunan awal jalan itu hanya sampai Manyamuk. Namun kami melihat pohon-pohon wilayah adat

kami dipatok dengan tanda cat merah,"jelasnya.

Menurut dia, pematokan ini bertentangan dengan keputusan MK No 35/tahun 2012 tentang hutan adat. Tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 2016 tentang KEK Sorong. KEK Akan beroperasi di atas lahan dengan luas seluruhnya 523,7 hektare, yang terletak di Wilayah Distrik Manyamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Lahan tersebut milik masyarakat adat. Tidak semua masyarakat adat menyerahkan lahannya untuk KEK dengan alasan tertentu.

### Penjaga Dusun Sagu



*Kampung Marga Klagilit.(FOTO/SRc)*

KEK sudah diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada 19 Oktober 2019 yang lalu. Meski demikian tidak semua marga mau lahannya digunakan untuk KEK. Sekalipun untuk jalan tembus KEK.

Seorang marga Klagilit bahkan meninggalkan kampungnya dan tinggal di dusun sagu. Alasannya, tidak mau melepas lahan mereka untuk dijadikan KEK.

Memasuki wilayah Dusun Sagu akan terasa setengah berada di kawasan kelapa sawit. Mengingat tanaman ini termasuk jenis palm dan bentuk pelepah yang hampir mirip pohon sawit, serta berada di lahan gambut. Tidak jauh beda

dengan lahan gambut seperti di Bengkalis, Riau yang juga kaya dengan sagunya.

Warga Dusun Sagu Moisegen mengatakan, bahwa orang tua mereka sejak dahulu berasal dan tinggal di Kampung Wonosobo. Kini perusahaan KEK sedang berusaha masuk wilayah tinggal mereka. "Kami tidak mau karena di dalam hutan kami ada daun tikar, kali pemali, dan tempat cari ikan," ujar Samuel Klagilit (48) yang selalu hidup dan tinggal di hutan sejak KEK muncul.

Setelah pengalaman kehilangan banyak hal atas wilayah mereka, kali ini warga bertekad tidak akan memberikan wilayah mereka untuk dipakai KEK. "Kami tidak akan kasih. Karena itu tempat kami berlindung dan mata pencarian," ujarnya. "Jika kami memberikannya. Dari mana nanti kami akan mendapat kebutuhan dan makanan."

Bagi Samuel dan warga adat, kehidupan tergantung dengan sagu. Warga di dusun tersebut terbiasa mengelola dan bermata pencarian dari sagu.

Namun jika tidak ada pesanan, maka warga pergi mencari kayu di hutan dan mencari kegiatan lainnya. Selain itu, waktu luang mereka untuk istirahat.

"Kalau mencari kayu terkadang karena ada warga yang memerlukan kayu untuk membuat rumah. Dari dulu orang tua sampai sekarang kami tidak pernah meninggalkan hutan," ujar Samuel yang bersama istrinya mengelola sagu.

Meski dusun sagu ini adalah tempat warga mencari makan. Namun dalam mengelola sagu, mereka juga tergantung cuaca. "Jika hujan mereka akan istirahat dan jika cuaca baik maka pekerjaan mengelola sagu tetap berjalan," ujar Esterlina Mugu (48), yang bersuamikan Klagilit.

Samuel berharap, keberadaan KEK jangan sampai membongkar tempat keramat dan dusun. Sebenarnya, penolakan pembuatan jalan KEK karena melalui kampung dan dusun mereka tersebut. Melihat pengalaman sebelumnya, hal itu berdampak hutan habis. Banyak warga adat di Papua sengsara setelah masuknya industri. "Kami mengingat nasib cucu kami kedepannya," ujarnya.

"Kini anak-anak sudah ada yang menikah. Cucu juga bertambah banyak. Nah, bagaimana nasib mereka kedepan untuk cari makan. Sehingga kami tidak mau dusun ini dibongkar

untuk keberadaan industri KEK tadi,” ujarnya duduk di sekitar kayu di lahan sagu.

### **Peran Perempuan Jaga Hutan**

Esterlina selalu menemani sang suami terlihat cekatan berjalan dan memeras sagu. Terkadang menimba air dan kembali ke sebuah mesin pemerasan sederhana dan menimba kembali. Sesekali memberikan komentar menjawab pertanyaan. Tubuh kurusnya tampak sangat kuat dan cekatan berjalan bolak-balik di seputaran mesin sagu yang sederhana. Sesekali ia menimba ke bak sagu dari air yang juga dari alam hutan sekitar pengelolaan tersebut, seperti bancah di tanah hutan dan rawa.

Esterlina mengatakan membantu sang suami menjaga dusun sagunya. “Meski saya perempuan saya bantu suami jaga dusun sagu dengan tinggal bersama di hutan sagu,” ujarnya.



*Mesin sagu sederhana ini menjadi mata pencarian marga Klagilit. (FOTO/SRC)*

Selain itu, ujar Esterlina, dusun sagu belum bisa diserahkan pengelolannya kepada anak dengan begitu saja. Anak-anaknya dalam hal ini masih dalam proses belajar. Suku Moi memiliki proses belajar tradisional untuk bertani, menjaga hutan, dan sebagainya yang biasanya dengan mantra-mantra sehingga bisa berkomunikasi dengan alam. “Hidup saya dan Bapak di dusun sagu, tidak tinggal di rumah mereka yang ada di perkampungan. Karena percuma di kampung. Kami hanya mau jaga hutan dan dusun saja!” ujarnya.

Hal ini dikarenakan jangan sampai ada perusahaan yang masuk. “Kami akan katakan pada mereka yang ingin masuk, bahwa ada orangtua (roh leluhur, *red*) mereka yang jaga hutan,” ujarnya.

Dengan mengatakan hal tersebut, menunjukkan bahwa hutan itu ada penjaganya secara fisik dan juga secara spiritual, yakni sebagai tempat keramat bagi mereka, sehingga wilayah tersebut bukan wilayah kosong. Tetapi, wilayah itu berdaulat karena sudah dijaga adat mereka, agar lahan tidak diserobot begitu saja oleh pihak manapun.

### **Memasang Palang**

Mewakili barisan muda masyarakat adat, Esau Klagilit mengatakan, munculnya KEK di tahun 2016 adalah persoalan lain setelah sawait yang marak sejak 2008-2015. Konsep awal KEK yang akan menggunakan lahan sekitar 523,7 hektar itu hanya sampai distrik Manyamuk.

Namun belakangan patok untuk membuat jalan tembus KEK ikut bersentuhan dengan wilayah adat mereka di Distrik Moisegen. Hal inilah akhirnya KEK juga mendapat penolakan dari warga Distrik Manyamuk-Salawati. Tahun 2019, ia bersama dua marga hingga kini memalang untuk menolak keberadaan KEK atas wilayah mereka tersebut.

Awalnya seorang memberitahukan bahwa ada jalan tembus yang akan melewati wilayah adat mereka. Sebulan sebelum lahan dipatok, para pemuda adat dari kedua marga pulang dari kota ke kampung. Selalu bersiap-siap menjaga lahan agar tidak dipatok.

Esau menjelaskan, sekitar 600 hektar wilayah marga Klagilit kini masih utuh. Lahan itu merupakan lahan hutan yang tersisa, setelah perjalanan panjang era industri sawit yang menyebabkan hutan hancur. Marga tersebut menolak hutan mereka untuk ditebang dalam rangka menyediakan lahan KEK. “Marga melakukan pemalangan,” ujarnya.

Oleh karena itu jalan tembus tersebut kini dibelokkan ke wilayah marga yang mau menjual lahannya. Meski demikian hingga kini kedua marga selalu jaga dusun sagu.

“Sebelumnya, hutan kami sudah banyak dipakai untuk transmigrasi, kebun sawit. Negara atau pihak manapun tidak pernah mengganti hancurnya lingkungan higu. Untuk itu KEK

kami tolak,” paparnya.

Esau menerangkan bahwa kuatnya penolakan warga adat, selain untuk tetap memelihara keberadaan hutan itu sendiri, karena hal itu merupakan wilayah sagu. “Warga ingin melindungi wilayah itu atas dasar Perda No 10/ 2017 dan Keputusan MK No 35/tahun 2012 tentang hutan adat soal perlindungan hukum untuk wilayah adat Moi,” ujar Esau yang juga voluntir Amandan di video dokumenter ini.

Ia juga menyayangkan pemerintah Kabupaten Sorong belum pernah menyosialisasikan KEK kepada masyarakat. Kemajuan yang dijanjikan untuk wilayah adat ini sejak dulu, mulai dari nenek, orangtua dan hingga saat ini dengan kedatangan transmigran dan perkebunan sawit, tidak pernah terealisasi. “Yang ada hanya kehancuran hutan sebagai tempat bergantung hidup dan kerusakan lingkungan di sana sini,” ujarnya.

Pembangunan seperti apa kekhususan KEK yang dimaksud pemerintah dipertanyakan Feki Mubalen sebagai warga adat dan Ketua AMAN Sorong. Pada dasarnya warga Sorong sendiri hampir semua sama sekali tidak mengerti. “Kenyataan konsepnya tahu-tahu sudah mucul KEK,” ujar Feky.

Menurutnya, persoalan yang tampak sebagai contoh sebagai bagian masalah besar yang selama ini terjadi akibat era industri sudah kelihatan dalam KEK ini. Persoalan itu adalah bagaimana KEK menyediakan air. Sementara, di berbagai warga adat persoalan air akibat dampak industri sawit hingga kini jadi persoalan. Kebutuhan dasar hidup warga ini belum teratasi tuntas.

“Hanya bantuan mendapatkan air bersih di beberapa tempat. Namun sebagian besar warga adat mengalami masalah persoalan air akibat industri sawit. Sungai tercemar dan kering. Hutan hancur, pendidikan warga masih sedikit yang layak, klinik dan pelayanan kesehatan belum memadai dan sebagainya,” paparnya.

Apakah KEK ini nanti bisa memberdayakan warga adat jika mereka dilibatkan dalam pengelolaan KEK itu? Dalam master plan itu nantinya akan ada 5-6 industri, seperti logistik, tambang nikel, kelautan, hutan dan lainnya.

Sementara warga adat hanya tahu ke kebun berburu dan bertanam secara tradisonal. “Pemerintah tentu harus memiliki

rencana lebih bagaimanabisa mengikutsertakan warga adat dalam KEK, dengan skill warga yang belum memadai,” jelasnya.

Melihat sejarah dan pengalaman, ketika zaman Belanda hingga kini hanya beberapa suku Moi yang berpendidikan. Kemudian soal infrastruktur juga tidak ada. Kehidupan hingga dari dulu kemarin dan hari ini masih minim. Fasilitas itu tidak satupun dikuasai orang Moi.

Di era transmigrasi, ujar Anna, warga Moi (36) yang ditanya *suarariau.co* di tempat yang berbeda, fasilitas kesehatan berbeda. Untuk warga adat hanya 1 klinik kesehatan untuk banyak wilayah. Sementara untuk warga transmigrasi diberikan 10 klinik dalam beberapa wilayah. “Warga adat tidak dianggap,” ujarnya.

Apa lagi era perkebunan sawit dari hutan yang dulunya beragam, dijadikan satu jenis yakni sawit. Semua yang bersentuhan dengan alam, hilang begitu saja. Masyarakat dipaksa keluar dari wilayah mereka. Kemudian harus hidup menyesuaikan diri dengan orang di luar. Mereka tidak tahu siapa dan kebingungan dengan situasi kehidupannya yang baru. “Kita bisa lihat sampai hari ini bagaimana di Klamono. Jika dulu bangun tidur, langsung lompat ke kali mandi. Tiba-tiba mereka tidak bisa begitu lagi.” Feky mencontohkan. “Hingga kini seperti ada yang hilang dari hidup mereka.”

Sementara, yang kelihatan selama ini soal KEK, jelasnya lagi, KEK yang diketahui memiliki luasan 500-an hektar. Kemudian ada rencana penyediaan air, seperti di SP 3, ada jembatan yang disebut kontainer. “Untuk KEK ini tahapan yang baru dibangun. Desember lalu dari kabupaten sendiri dengan beberapa instansi dan kontraktor mengundang beberapa tokoh membicarakan masalah penyediaan air untuk KEK,” paparnya.

Rencananya mereka akan menyuplai air dari Klamono. “Jadi wilayah industri KEK ini butuh air yang sangat besar. Tahapan saat ini adalah bagaimana air bisa masuk ke wilayah itu,” ujarnya. Di sisi, dampak sawit yang masih banyak menyisakan penderitaan mendalam masyarakat adat.

### **Dari KEK, ke Konservasi**

Setelah tahun 2016, wilayah Kepala Burung Sorong menjadi KEK, kini muncul konsep baru. Sejak tahun 2020, Papua Barat dideklarasikan menjadi Kawasan Konservasi. Konsep

konservasi seperti apa? Apakah semua wilayah hijau akan dibuat aturan dilindungi dijaga atau konsep konservasi yang dimaksud seperti apa. Konsep ini dikeluarkan Pemprov dan KLHK. "Hal apa sih yang di Sorong untuk jadi konservasi. Kita belum mengetahui apa yang ingin dilindungi dan dijaga dan apa aturan-aturanya, sampai sekarang," tambah Feky.

Oleh karena pengalaman pahit warga Sorong, maka timbul berbagai pertanyaan negatif yang terkesan tidak bisa dijawab. "Apakah konsep KEK dan Konservasi ini dideklarasikan untuk kepentingan tertentu, seperti misalnya untuk mengakses dana abadi? Ataukah dibuat karena iklim perdagangan di dunia yang kini begitu kuat. Ataukah lihat persoalan climate change sebagai persoalan iklim global," ujarnya bertubi-tubi mempertanyakan. "Kemudian Provinsi Papua Barat saja deh yang dicoba."

Menjadi provinsi konservasi ujar Feky, minimal harus ada kota/kabupaten yang harus ikut mendampingi. Apa lagi masyarakat adat yang sekitar tidak tahu soal KEK. Mereka tahu dengan tiba-tiba pemerintah sudah membuat konsep tersebut. Namun dampak dan wujud seperti apa, posisi masyarakat seperti apa? Tidak diketahui sama sekali. "Kaget-kaget sudah ada yang menguasai dan dibangun hal ini dan itu. Tidak ada yang memberikan edukasi dari pihak pemerintah dan instansi terkait yang terlibat soal ini," jelasnya.

Menurut Feky, masyarakat adat disatu sisi sebenarnya tidak semua menolak pembangunan. Namun proses pembangunan haruslah yang memikirkan mereka tanpa menyingkirkan tatanan hidup yang turun-temurun yang sudah berjalan di wilayah adat. "Lantas hidup warga adat bagaimana?" ujarnya mempertanyakan.

Berbicara soal KEK ini, sebenarnya master plan sejak 2016 sudah ada. Master plan konsep KEK itu sendiri sudah direncanakan untuk semacam wilayah perdagangan dan akan dibangun beberapa industri di wilayah ini. Bukan hanya itu saja. Melihat dokumen UU Otsus pasal-pasalnyanya menyebutkan keberadaan wilayah ekonomi. KEK ini tidak hanya soal industri. Tetapi memiliki hubungan dengan pemekaran.

Sekarang isu pemekaran masih mencuat naik. Dalam UU Otsus itu, apabila suatu wilayah dimekarkan minimal ada syarat teknis dan administrasi yang harus dipenuhi. Administrasi

seperti SK, tim yang terbentuk dan bagaimana situasi terakhir konteks wilayah dan geopolitik masyarakat. Ada wilayah khusus untuk menyupport proses pemekaran wilayah ini. "Wilayah KEK ini memegang kendali semacam menyuplai," ujarnya.

Pandangannya sebagai warga adat dan sebagai AMAN, pihak-pihak yang mendorong ini. Minimal harus memberikan porsi bagi masyarakat adat untuk ikut andil. "Seperti masyarakat adat bisa ikut menyuplai sayur atau daging hasil mereka, mengelola lahan adatnya untuk bisa andil dalam KEK, tanpa merusak tatanan dan aturan adat yang adat sekitar KEK," ujarnya.

Tidak jauh beda dengan pendapat Feky, Elon Fadan sebagai Wakil Ketua I Dewan Papua Barat, mengatakan bahwa KEK ini dari awal salah arah. Karena harus ada sosialisasi khusus dari Pemerintah Pusat dan instansi terkait hingga ke kabupaten dan kepada masyarakat hukum adat.

Sejak tahun 2016 hingga kini, KEK kurang dikoordinasikan dengan masyarakat adat setempat. Tidak heran berakibat bentrokkan antara masyarakat adat yang tanahnya beririsan dengan wilayah KEK tersebut. Mereka menolak. "Jika awalnya bagus, dikoordinasikan dengan aman dan damai, sebelum menerbitkan sesuatunya untuk pembangunan," ujarnya.

Kapasitasnya sebagai Dewan dengan masalah ini siap menunggu jika ada warga yang keberatan dengan terganggunya kawasan mereka dengan KEK. Dewan siap menerima aduan warga untuk memanggil pemerintah dan pihak terkait untuk duduk bersama. Dengan harapan agar pembangunan KEK tidak hanya untuk kelompok masyarakat menengah ke atas. Atau terkesan KEK memanfaatkan kekayaan wilayah adat. Contoh sejarah di Klamono, kehadiran Petrogas tidak memberikan dampak apa-apa. Demikian wilayah Salawati dengan Pertamina.

"Warga adat hanya jadi penonton dan merasakan kehancuran alamnya," imbuhnya.

Sama halnya dengan pendapat warga Lury da Costa, dari Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan mengatakan KEK, sudah bermasalah sejak awal. Tahapan-tahapan sosialisasi marga-marga yang berhak disana tidak diikutsertakan. "Justru yang diikuti kebanyakan marga-marga dari luar yang tidak memiliki hak di tanah tersebut," imbuhnya.

## Belum Ada Penolakan Resmi

Terkait penolakan yang terjadi dari warga adat soal KEK, pemerintah Kabupaten Sorong menampik dengan mengatakan bahwa hal tersebut belum pernah ada secara resmi disampaikan kepada pihaknya. "Sampai sekarang penolakan terhadap KEK itu kepada pemerintah belum pernah ada. Hal ini dikatakan Bupati Sorong Johnny Kamuru, melalui Asisten I Bidang Pembangunan Pemkab Sorong Suroso S.Ip MA, ketika ditanyakan suarariau.co, Selasa (26/1/2022),

Dijelaskannya, untuk KEK, kawasan berbeda dengan lahan perizinan sawit dan lainnya. Di mana luas 523,7 hektar, kawasan itulah yang dilepaskan untuk dibebaskan dari masyarakat hukum adat oleh pemerintah

Selanjutnya, PT Malamoi Olom Wobok adalah Perusda milik Kabupaten Sorong yang bergerak dalam usaha Migas dan BUPP KEK Sorong yang ditunjuk untuk mengelolanya.

Suroso mengatakan KEK ini diusulkan atas inisiatif pemerintah provinsi, untuk ditempatkan di Kabupaten Sorong. Dimana ada skema-skema yang menjadi tanggungjawab provinsi, kabupaten dan pusat. Sementara, kini dan sudah beberapa industri sudah mulai beraktivitas. Meski penyediaan ketersediaan air di Sorong masih bermasalah, kenyataannya untuk penyediaan air KEK dikatakan Suroso menjadi perhatian sendiri dan salah satu penggunaannya yang disebut air baku.



*Kawasan KEK Sorong yang berakhir di pelabuhan KEK.(FOTO/SRC)/dok*

Air baku sangat banyak digunakan dan akan diambil dari sungai. Dan yang satunya lagi dari sumber air tanah. Air baku disediakan oleh Balai Wilayah Sungai Papua Barat (BWSPB) dari Sungai Klasefet di Klamono. Sedangkan air bawah tanah untuk operasional kantor.

Rencananya ujar Suroso, kawasan KEK diberikan kepada siapa pun bagi warga untuk beraktivitas. Termasuk UMKM yang juga dialokasikan didalam rencana KEK. Jika masyarakat setempat mau berusaha riil, maka pemerintah akan memberikan ruang..

Harapannya, KEK, sebagai salah satu kawasan bisa mengakomodir keintegrasian perekonomian daerah. "Sebenarnya KEK ini bentuk hilirisasi. Kami mengundang untuk bisa berinvestasi," imbuhnya.

## 4.

# Hutan Adat Rusak, Suku Moi Terdesak<sup>4</sup>

Oleh: Reiner Brabar



*Sungai Klasafet atau sering disebut sungai Klamono di distrik Klamono, kabupaten Sorong (Reiner Brabar - SP)*

*Kehidupan masyarakat Papua pada umumnya tidak bisa terlepas dari hutan, begitu pula Suku Moi di Sorong. Bagi mereka hutan adalah sumber kehidupan dimana semua kebutuhan dapat di peroleh disana. Namun, tradisi kehidupan masyarakat adat suku Moi mulai hilang pasca hutan adat mereka di rusak perusahaan.*

Mama Hagar Kokmala, warga Kampung Klawana, Distrik Klamono saat di temui [suarapapua.com](http://suarapapua.com) (15/1)

---

<sup>4</sup> Tulisan ini terbit di [suarapapua.com](http://suarapapua.com) edisi 29 Januari 2022 dengan judul yang sama.

menjelaskan pada zaman dulu masyarakat Moi sangat mudah mendapatkan bahan-bahan lokal untuk membuat anyaman, noken dan lainnya.

“Dulu kami cari kulit kayu, rotan dan rumput dekat-dekat sini saja. Sampai di kamarpun tidur ada rumput tumbuh,” ujarnya menjelaskan kehidupan di Klamono pada zaman dahulu (27/1/2022).

Lebih lanjut Mama Hagar bilang segala jenis kebutuhan mereka pada saat itu lebih banyak diperoleh dari hutan. “Hutan ini segalanya bagi kami, dulu kami bekebun dan berburu di dekat-dekat saja, sekarang sudah tidak,” jelasnya.

### **Memiskinkan Suku Moi**

Distrik Klamono, merupakan wilayah yang berada di sebelah timur Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. distrik ini, jauh dari perkotaan, untuk mengakses ke daerah itu, diperlukan waktu sekitar 2,5 jam dari pusat Kota Sorong dengan kendaraan roda dua ataupun empat.

Akan tetapi, jalan menuju wilayah itu tidak semuanya mulus. Sepanjang perjalanan terlihat hutan yang sudah tidak lebat seperti dulu namun sebagian wilayah masih di tutupi hutan. Di daerah yang sepi tersebut, ternyata menyimpan harta karun sumur minyak peninggalan zaman kolonial Belanda di Distrik Klamono.

Mama Hagar Kokmala, menjelaskan tatanan kehidupan masyarakat yang dulu telah hilang seiring masuknya berbagai perusahaan. “Kehidupan dulu telah hilang, noken asli sekarang banyak terbuat dari karung,” kata Mama Hagar.

Mama Hagar mengakui, tidak ada perhatian serius dari pihak pemerintah maupun perusahaan untuk memberdayakan perempuan. “Jangankan pemberdayaan, untuk jualan saja kami tidak memiliki tempat, di Klamono ini yang membuat noken asli Moi hanya sekitar tujuh orang. Kami biasa buat kalau ada pesanan, kalau tidak yang pesan kami tidak buat,” jelas Mama Hagar Kokmala.

Hal serupa juga di sampaikan Mama Welmice Kalawen, warga Kampung Katapop Pantai, Distrik Salawati. Menurut Mama Welmice, jangankan melestarikan budaya suku Moi, kondisi jalan saja menuju berapa distrik di Kabupaten Sorong banyak yang rusak.

“Nanti orang Moi bikin noken pake karung, bahan lokal sudah tidak,” kata Mama Welmince kepada *suarapapua.com* di Katapop Pantai, (19/12/2021).

Mama Welmince juga menjelaskan selain hutan yang rusak mayoritas masyarakat Moi yang berkerja di PT. Inti Kebun Sejaterah (IKSJ) yang beroperasi di wilayah distrik Moi Segin di PHK sepihak sekitar tahun 2018.

“Ada 500 orang buruh yang di PHK, perusahaan tidak kasih pesangon,” ujar Mama Welmince Kalawen.

Sementara itu, Silas Ongge Kalami, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi menjelaskan, kehidupan Suku Moi sejak dahulu sangat berketergantungan dari hutan. Namun, pola hidup yang tergantung pada alam itu terancam musnah seiring invasi industri minyak maupun kelapa sawit. Eksistensi Suku Moi di ujung tanduk karena hutan tempat mereka berkehidupan, lenyap dalam kurun waktu sekejap mulai rusak.

“Hutan itu tokoh obat, bank dan juga pasar. Sekarang hutan habis di babat perusahaan,” ujar Silas Ongge Kalami, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi kepada *suarapapua.com* saat di temui di kediamannya, Sabtu (8/1/2022).

Silas Kalami mengisahkan praktik perampasan tanah adat orang Moi yang dilakukan oleh investor sawit dengan berbagai rayuan kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat Moi. “Ada marga yang sudah tidak memiliki tanah adat lagi,” jelas Silas Kalami.

Silas Kalami juga menguraikan secara rinci empat perusahaan yang beroperasi di wilayah adat Suku Moi, yakni PT Papua Lestari Abadi di Distrik Segun dengan luas lahan 15.631 ha, PT Cipta Papua Plantation di Distrik Mariat dan Sayosa dengan luas lahan 15.671 ha, PT Sorong Agrisawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono dengan luas lahan 40.000 ha, serta PT Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun dengan luas lahan 34.400 ha.

“Di tahun 2000an ada empat perusahaan yang masuk tanpa ijin yang jelas di wilayah adat suku Moi. Pada kawasan hutan alam tersebut terdapat vegetasi tanaman yang bernilai ekologi dan ekonomi penting, seperti: pohon matoa, langsung hutan, kayu besi merbau, bangkirai, benuang, nyatoh, mangga hutan, keruing, dan sagu,” jelasnya.

Lanjut Silas selain kaya akan kayu hutan tersebut juga tempat hidupnya berbagai jenis satwa. “Ada jenis satwa liar untuk tumbuh dan berkembang. Hutan menyediakan makanan, air, dan tempat untuk berkembang biak. Beberapa jenis satwa liar yang hidup didaerah ini dan dilindungi, yakni: burung enggang, burung cenderawasih, biawak, kura-kura dan kangguru pohon,” katanya.

Oktovianus Kolin, kepala distrik Klamono mengatakan air bersih merupakan salah satu tingkat kesulitan yang di rasakan masyarakat di Klamono sendiri. Menurutnya sejak perusahaan Nederlands Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) di tahun 1935 hingga perusahaan kelapa sawit sekarang kehidupan masyarakat di Klamono masih tampak seperti dahulu meskipun daerah Klamono merupakan sumber minyak.

“Karyawan Pertamina pake air bersih, masyarakat selama ini andalkan air hujan air maupun air kali Klamono untuk kebutuhan mereka. Dalam tahun ini masyarakat sudah harus menikmati air bersih, selama ini hanya lewat di program pamsimas tetapi saya rasa itu hanya program jangka pendek. Sebagai anak yang lahir di Klamono saya tegaskan kepada pihak Pertamina agar secepatnya membangun air bersih di Klamono,” tegas kepala distrik Klamono, (11/1/2022).

Manase Fadan, tokoh adat suku Moi menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini mereka menjual hasilnya berburu, mancing dan berkebun. “Bapa bisa berburu, mancing dan bikin kebun. Hasilnya itu di jual. Harganya juga tidak menentu kadang bagus kadang tidak. Hasil jualan juga kadang untuk anak-anak punya sekolah, dan sisanya untuk kebutuhan di rumah. Selain itu masyarakat juga berharap dari bantuan dana kampung yang di berikan pemerintah,” katanya tanpa menjelaskan kepastian harga hasil jualan mereka.

### **Lahan Eks Sawit**

Pencabutan izin ini merupakan tindak lanjut evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat dimana KPK menjadi salah satu pendukung tim dari provinsi sejak Juli 2018.

Menurut Bupati Sorong Johnny Kamuru, melalui Asisten I Bidang Pembangunan Pemkab Sorong, Suroso, tindakan Pemkab untuk mencabut izin tersebut merupakan tindak

lanjut hasil evaluasi perizinan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat dan telah melalui proses yang panjang sesuai dengan tata aturan pemerintah. Evaluasi melibatkan melibatkan kabupaten Sorong. Secara nyata 4 perusahaan tersebut mengatongi izin namun tidak beraktivitas di lapangan.

Selain itu, dari sisi mainstreamnya, pemkab ingin melindungi masyarakat hukum adat dalam konteks masyarakat asli Papua. Hal ini dipandang perlu. Dimana sebelumnya pejabat sebelumnya sudah mengeluarkan iaizn namun tidak dimanfaatkan dan dugnakan, maka bupati memandang hal itu patut untuk dicabut. "Sehingga hal ini dipandang perlu untuk dicabut," ujarnya.

Silas Ongge Kalami, Ketua LMA Malamoi mengatakan, untuk melindungi tanah adat agar tidak ada yang menjualnya lagi. LMA Malamoi melakukan sosialisasi perda no 17/2017 dan perbub 06/2020. "Stop jual tanah, sekarang lakukan pemetaan tapal batas dan jaga tanah untuk anak cucu kedepan nanti," tegasnya.

### **Sekilas Suku Moi**

"Masyarakat adat Moi terdiri dari delapan sub suku yakni, Kelim, Segin, Abun Taa, Abun Jii, Klabara, Salkhma, Lemas dan Maya, dengan wilayah administratif yang berbeda," ungkap Silas Ongge Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi kepada *suarapapua.com* saat di ditemui di kediamannya, Senin (17/1/2022).

Silas Ongge Kalami menceritakan, Moi Kelim mendiami wilayah adat di Distrik Selemekai, Klaso, Mega, Saingkeduk, Makbon, Klaili, Aimas, Sorong, Mayamuk, Kiasafet, Klamono, dan Sayosa. Sementara Moi Sigin mendiami wilayah adat di Distrik Seigun, Sigin Salawati.

Sedangkan Abun Taa mendiami wilayah adat di Distrik Maudus, Sunook dan untuk Abun Jii mendiami wilayah adat di Distrik Saingkeduk. Klabra mendiami wilayah adat di Distrik Klabra, Buk, Beraur, Bagun, Hobart, Konhir, Klawak. Salkhma mendiami wilayah adat di Distrik Sayosa Timur, Wemak. Sementara itu, Lemas mendiami wilayah adat di Distrik

Seget dan Maya mendiami wilayah adat di Salawati Selatan, Salawati Tengah.

### **Sejarah Minyak di Sorong**

Pemerintah kabupaten Sorong dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 1967, dijabat oleh Wakil Bupati sebagai koordinator wilayah kepala pemerintahan setempat. Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru yang dibentuk sebagai satu wilayah Kabupaten Administratif yang terpisah dari Manokwari.

Setelah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tanggal 01 Mei 1969, sebagai tonggak sejarah keberhasilan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang terbentuknya Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Dalam perkembangan sebagai daerah otonom selalu berupaya membenahi birokrasi, kemasyarakatan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (dikutip dari website resmi kabupaten Sorong).

Rovicky Dwi Putrohari, Ketua Umum/Presiden Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) (2011-2014) mengatakan, Sejarah Eksplorasi Migas di Indonesia Perminyakan Sebelum kemerdekaan. Uraian dibawah ini dikumpulkan dari berbagai sumber terutama di internet yang sumber asalnya tidak diketahui serta beberapa buku bacaan dan diskusi di maillist IAGI-net. Untuk perkembangan yuridis telah disusun oleh BPK terlampir sebagai addendum tulisan ini.

Pemanfaatan dan penggunaan minyak bumi dimulai oleh bangsa Indonesia sejak abad pertengahan. Menurut sejarah, orang Aceh menggunakan minyak bumi untuk menyalakan bola api saat memerangi armada Portugis. Selama ini yang lebih dikenal sebagai awal eksplorasi atau pencarian migas dilakukan adalah pengeboran sumur Telaga tunggal oleh Zijker, namun penelitian yang dilakukan oleh salah satu anggota IAGI (Awang HS) menemukan bahwa usaha pengeboran pertama kali dilakukan oleh Jan Reerink. Jan Reerink adalah seorang anak laki-laki saudagar penggilingan beras pada zaman Belanda di Indonesia pada paruh kedua abad ke-19.

Pada tahun 1935 untuk mengeksplorasi minyak bumi di daerah Irian Jaya dibentuk perusahaan gabungan antara BPM,

NPPM, dan N.K.P.M. yang bernama NNGPM (Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Mij) dengan hak eksplorasi selama 25 tahun. Hasilnya pada tahun 1938 berhasil ditemukan lapangan minyak Klamono dan disusul dengan lapangan Wasian, Mogoi, dan Sele. Namun, karena hasilnya dianggap tidak berarti akhirnya diserahterimakan kepada perusahaan SPCO dan kemudian diambil alih oleh Pertamina tahun 1965. (<http://www.rovicky.com> dan <http://rovicky.wordpress.com>)

## 5.

# Masyarakat Adat di Sorong Menolak KEK<sup>5</sup>

Oleh: Reiner Brabar



Lokasi KEK Sorong. (Reiner Brabar - SP)

*Perusakan hutan adat rusak oleh perusahaan kelapa sawit dan diabaikannya hak-hak masyarakat adat menyebabkan sebagian masyarakat adat kini menolak hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).*

Meskipun KEK disebutkan akan menyejahterahkan masyarakat adat, Penolakan KEK terus terjadi. Seperti yang di lakukan Gelek (Marga) Klagilit sejak 2019 silam hingga saat

---

<sup>5</sup> Tulisan ini terbit di suarapapua.com pada 29 Januari 2022 dengan judul "Masyarakat Adat di Sorong Menolak Pembangunan KEK".

ini. Alasan penolakan, jalan KEK akan melintas di tanah adat mereka yang merupakan lokasi perkebunan sagu milik marga Klagilit.

Silas Ongge Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi saat ditemui *suarapapua.com* Selasa (8/1/2022) mengakui tidak mengetahui soal Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“LMA tidak tahu menahu soal Amdal KEK, silahkan tanya instansi terkait. LMA tidak dilibatkan dalam prosesnya,” tegas Kalami.

Silas Ongge Kalami meminta pihak pemerintah maupun investor untuk menghargai dan menghormati masyarakat adat sebagaimana masyarakat adat telah di lindungi telah dengan perda no 17/2017 dan perbub no 06/2020.

“LMA tidak menolak pembangunan di Sorong, namun sebelum melakukan pembangunan perlu untuk menghormati masyarakat adat Moi, sebagaimana masyarakat adat adalah pemilik hak atas tanah dan hutan, sudah cukup hutan adat ini di rusak oleh perusahaan sawit,” kata Silas.

Elon Fadan, Wakil Ketua II DPRD kabupaten Sorong mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait Amadal KEK. “Amdal KEK saya sendiri belum melihatnya,” kata Fadan kepada *suarapapua.com* di ruang kerja, (19/1/2022).

Elon juga mengakui pihaknya akan berkordinasi dengan LMA Malamoi terkait hal itu.

“Soal Amdal KEK, saya akan kordinasi dengan LMA, sehingga kami juga mengetahui masalahnya seperti apa? LMA harus menyurati DPRD secepatnya sehingga permasalahan ini harus secepatnya diselesaikan. DPRD tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar keterangan dari semua pihak,” ujarnya.

Selain itu, Elon juga menegaskan, terlepas dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sorong, dirinya merupakan bagian dari adat yang tanahnya telah dicaplok oleh perusahaan sawit. Sehingga Elon menyarankan agar tanah adat tidak jual lagi. “Saya punya tanah perusahaan kasih rusak, kami marga tidak mengetahui hal itu, saran saya untuk masyarakat adat agar tidak menjual tanah kepada pihak mana pun,” ujarnya.

## Masyarakat Tolak KEK

Esau Klagilit, warga Kampung Wonosobo Distrik Moi Seigin menjelaskan, persoalan kelapa sawit dan hak buruh yang di PHK oleh PT.Inti Kebun Sejenterah (IKS) belum selesai muncul lagi persoalan baru di tahun 2008 di mana KEK yang akan mencaplok lahan sekitar 5500 ha. KEK, juga mendapat penolakan dari warga Distrik manyamuk-Salawati. Tahun 2019, warga memalang lahannya untuk menolak keberadaan KEK atas wilayah mereka. "Marga Klagilit menolak KEK yang bersentuhan dengan wilayah mereka. Sekitar 600 hektar wilayah marga Klagilit kini masih utuh, karena marga tersebut menolak hutan mereka untuk ditebang dalam rangka menyediakan lahan KEK. Sebelumnya, hutan kami sudah banyak dipakai untuk transmigrasi, kebun sawit dan makin habis. Negara atau pihak manapun tidak pernah menggantinya. Untuk itu KEK kami tolak," paparnya.

Esau menerangkan bahwa untuk KEK marga Klagilit menolak tegas, selain untuk tetap memelihara keberadaan hutan, wilayah sekitar KEK milik warga adatnya, merupakan wilayah sagu.

"Sudah cukup hutan kami di rusak oleh perusahaan sawit. Untuk itu kami marga Klagilit ingin melindungi wilayah itu dengan Perda No.10/2017 dan Perbub No.06 /2020, soal perlindungan hukum untuk wilayah adat Moi,' tegas Esau yang juga merupakan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Sementara itu, Loury da Costa, Direktur Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) mengatakan, melihat dari berbagai perusahaan sawit di Sorong sama sekali tidak ada kontribusi yang baik bagi masyarakat adat Moi. Menurutnya sejak awal hadirnya KEK telah terjadi permasalahan ganti rugi yang hingga saat ini belum terselesaikan.

"Awal masuk saja ada hak masyarakat yang di abaikan. Contohnya ada marga yang menuntut ganti rugi namun tidak ada penyelesaian hingga saat sekarang," kata Loury da Costan.

Loury da Costa juga mengawatirkan kehadiran KEK akan berpotensi terjadi pelanggaran HAM di kemudian hari nanti. "Kalau masalah ganti rugi tidak di selesaikan dengan baik, Maka akan berpotensi konflik berkepanjangan hingga terjadi pelanggaran HAM," duga Loury da Costa.

Veronika Kusumaryati, peneliti sejarah dan etnografi kolonialisme di tanah Papua mengatakan sebelumnya Papua di kenal dengan nama Irian Jaya. Provinsi terpencil dan sangat terpinggirkan di Indonesia.

Tidak heran jika suku Moi yang merupakan warga dan menempati hampir seluruh wilayah adat di Sorong, Papua Barat juga kini seperti kembali bangkit berjuang untuk mendapatkan wilayah adatnya kembali. Hal ini sebagai bagian cara untuk hak penentuan nasib wilayahnya dengan cara-cara yang sebelumnya lebih memelihara lingkungan atau hidup harmoni dengan alam. "Tidak ada suku Moi menolak KEK," kata Veronika.

Veronika Kusumaryati menjelaskan, yang menarik soal Papua bukan hanya soal ekstrasi kekayaan alamnya. Tetapi seperti contoh orang Inggris di India, orang Belanda di Indonesia, demikian juga orang Indonesia ini banyak mengirim orang yang non-Papua ke Papua dan Papua Barat melalui program transmigrasi. Program ini berlangsung setelah Indonesia masuk ke Irian Jaya Tahun 1963. Dan itu diintensifikasi di tahun 1970-an dan 1980-an, dimana yang pertama itu di Marauke, Kerom, Kabupaten Jayapura, kemudian Nabire, hingga ada kampung yang namanya Wonorejo.

"Dari versi pemerintah pertama transmigrasi bertujuan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan. Karena ada anggapan bahwa orang Papua ini dianggap tidak bisa berkembang secara ekonomi dan secara cepat. Dimana hal ini sebenarnya hanya asumsi," jelasnya.

Veronika Kusumaryati yang juga alumni Departemen Antropologi, Universitas Harvard itu menjelaskan, KEK perlu pertimbangan dalam melibatkan masyarakat adat. Kemudian oleh karena penduduk Papua Barat dan Papua sebenarnya dalam statistik adalah 65% penduduk pertanian, maka konsep KEK hendaknya harus korporasi dengan penduduk harus disesuaikan dengan data statistik yang demikian.

"Apakah pemerintah mendirikan KEK menurut data statistik tersebut atau KEK hanya untuk segelintir orang?" ujarnya mepertanyakannya.

Hal-hal seperti hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah dalam KEK. "Sehingga pembangunan sinkron dengan masyarakat adat itu nantinya," tungkasnya.

## **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

KEK Sorong ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pertama di tanah Papua. Penetapan KEK Sorong diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia yang turut sejalan dengan salah satu prinsip Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Berlokasi di Distrik Mayamuk kabupaten Sorong.

Menurut Bupati Sorong Johnny Kamuru, melalui Asisten I Bidang pembangunan Pemkab Sorong, Suroso mengatakan KEK berbeda dengan lahan perizinan sawit dan lainnya. Dimana luas 523,7 hektar, kawasan itulah yang dilepaskan untuk dibebaskan dari masysrakat hukum adat oleh pemerintah. Selanjutnya, PT. Malamoi Olom Wobok adalah perusahaan daerah milik kabupaten Sorong yang bergerak dalam usaha Migas dan BUPP KEK Sorong yang akan mengelolanya.

Suroso mengatakan KEK ini diusulkan Pemerintah Provinsi Papua Barat. "KEK ini inisiatif provinsi untuk ditempatkan di Kabupaten Sorong dimana ada skema-skema yang menjadi tanggungjawab provinsi, kabuapten dan pusat. sementara kini dan sudah dan beberapa industri sudah mulai beraktivitas,"katanya (26/1/2022).

Untuk penyediaan air, ada air baku dan air tanah. Air baku akan lebih banyak digunakan, Air baku disediakan oleh Balai wilayah Sungai Papua Barat yang diambil dari Sungai Klasefet di Klamono. Sedangkan air bawah tanah untuk untuk operasional kantor.

Suroso mengatakan rencananya kawasan KEK diberikan kepada siapapun bagi warga untuk beraktivitas. "Termasuk UMKM yang juga dialokasikan didalam rencana KEK jika masyarakat setempat mau berusaha riil, maka pemerintah akan memberikan ruang," jelasnya.

Terkait penolakan yang terjadi dari warga adat soal KEK, sampai searang menurut Suroso ketika belum ada penolakan dari masyarakat hukum adat secara resmi yang disampaikan ke pemerintah. "Sampai sekarang belum ada informasi resmi terkait penolakan KEK dari masyarakat adat," pungkasnya.

## 6.

# Menelisik Akar Konflik Hak Ulayat di Papua<sup>6</sup>

Oleh: Adi Briantika



*Pantai Ordori, lokasi ritual dan pohon adat keret Abrauw. Selasa, 14 Desember 2021. [tirto.id/Adi Briantika](https://tirto.id/Adi-Briantika).*

*Biak adalah pulau matahari terbit, secara harfiah. Terletak di Teluk Cenderawasih, Biak berarti 'timbul', selayaknya pulau yang muncul dari cakrawala.*

Penduduk Biak adalah pelaut andal yang telah membina hubungan dagang dengan pulau tetangga, jauh sebelum penjajah Portugis datang di abad ke-16. Di daerah sekitar seperti Teluk Wandamen, Yapen, Waropenkai dan di sepanjang pantai barat

---

<sup>6</sup> Tulisan terbit di *tirto.id* edisi 7 Februari 2022 dengan judul yang sama.

dan selatan yang berawa-rawa, para penduduknya berprofesi sebagai pelaut sekaligus pekebun pohon sagu.

Para penduduk di pesisir, terutama Biak dan Yappen, terkenal sebagai pembuat perahu, dari ukuran mungil hingga kapal laut besar yang menampung 40 awak kapal. Ada banyak klan - atau keret - di kawasan Biak-Numfor yang menganut sistem patrilineal.

Sejak dulu, orang Biak dan Numfor sudah angkat sauh hingga Maluku, Gorontalo, Timor, Seram, Nusalaut, Buru dan Selayar. Orang Numfor berasal dari pulau yang sama namanya dan masih berkerabat dengan orang Biak. Mereka berabad-abad menempati pulau Biak dan Supiori.

Namun pulau indah seluas 2.455 km<sup>2</sup> itu tak luput juga dari konflik. Pada awal Juli 1998, lebih dari satu bulan sejak Soeharto mundur dari jabatannya, puluhan warga sipil dibantai militer dalam apa yang disebut sebagai Peristiwa Pembantaian Biak. Saat itu, warga sipil mengibarkan bendera Bintang Kejora untuk memperingati deklarasi kemerdekaan yang gagal pada 1971.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tak pernah mengakui atau membantah kejadian tersebut. Faktanya, konflik tak selalu harus menumpahkan darah. Dalam rentang sejarah Papua, konflik bisa juga berupa perampasan hak-hak hidup mereka, terutama atas tanah. Jauh sebelum tragedi Biak Berdarah 1998, masyarakat adat Biak sudah lebih dulu dihadapkan pada konflik tanah adat, ketika Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) - yang kini terintegrasi dengan BRIN - 'membeli' tanah seluas 100 hektare di Kampung Warbon dan Saukoby, Biak Utara pada 1980.

Tanah itu sejatinya diperuntukkan sebagai calon proyek bandar antariksa. Konflik muncul ketika masyarakat adat merasa tak pernah menyetujui pelepasan tanah tersebut. Akar Konflik Pada 2009, Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merumuskan konflik di Tanah Cenderawasih dilatarbelakangi oleh empat isu strategis yakni sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas politik orang Papua; kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia; gagalnya pembangunan di Papua dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi otonomi khusus; serta marjinalisasi orang Papua.

Berangkat dari empat sumber perkara itu, Tim Kajian menawarkan empat cara penyelesaian konflik seperti rekognisi berorientasi pemberdayaan orang asli Papua sebagai kompensasi atas marjinalisasi dan diskriminasi; pembangunan berparadigma baru dengan orientasi pemenuhan hak dasar rakyat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; dialog berlandaskan kepercayaan sebagai upaya berdamai dengan sejarah masa lalu dan untuk menyamakan persepsi masa depan; serta rekonsiliasi berorientasi pengungkapan kebenaran atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Papua dan kesediaan otoritas negara untuk mengakuinya sebagai kekeliruan masa lalu.

Dikaitkan dengan kasus tanah adat di Kampung Warbon dan Saukoby, Biak Utara, sebagai kandidat lokasi pembangunan bandar antariksa, Koordinator Jaringan Damai Papua Jakarta Adriana Elisabeth, menuturkan cara yang paling ampuh untuk meredam konflik ialah berkomunikasi.

Di Papua, di setiap wilayah adat ada cara tradisional untuk menyelesaikan konflik dan seharusnya pemerintah menempuh upaya serupa. "Seperti itu caranya, selama masyarakat Papua belum semuanya terjangkau dengan modernisasi. Ya, harus ditempuh cara-cara tradisional. Coba digali kearifan lokal mereka seperti apa, itu coba dikomunikasikan. Kalau masyarakat itu paham, mereka pasti akan dukung. Yang menolak, bisa (karena) dua (alasan), mereka tidak paham atau mereka punya pengalaman dibohongi. Kebanyakan itu," ujar Adriana kepada saya, (21/12/21).

Dia mencontohkan masyarakat di Manokwari Selatan, tanah warga mau dipergunakan untuk pembangunan, mereka sudah sepakat, semua suku marga menyetujuinya. Tiba-tiba lahan tersebut dialihkan untuk pelatihan Angkatan Darat. Jadi, kalau mau mengalihfungsikan peminjaman tanah juga harus dikomunikasikan.

"Intinya kekuatan komunikasi, itu salah satu proses perdamaian yang harus dilakukan supaya mengurangi konflik dan kekerasan."

Pemerintah pun harus bertanya seperti apa upaya yang tepat secara adat. Misalnya menjelaskan ihwal relokasi. Semua harus dibicarakan karena masyarakat Papua hidupnya sangat dekat dengan alam, mereka tidak punya bayangan akan

dipisahkan dari tanah leluhurnya; berpindah ke tempat lain.

Lantas perihal masyarakat adat lain yang tak mau menerima kedatangan masyarakat adat penjual tanah, ini bisa menjadi konflik baru. Adriana berpendapat, kasus-kasus tersebut kerap ada, dus proses-proses komunikasi secara tradisional perlu dibuka dan dijelaskan betul hingga masyarakat bisa menerima.

Kalau di Papua, karena mereka sistemnya kolektif dan sangat percaya dengan kepala suku, maka kepala sukunya harus diyakinkan supaya nanti ia bicara dengan masyarakat. Bila ada yang tidak setuju, maka ditanyakan penyebabnya. Bagaimana kalau mereka pindah ke tempat suku lain? Secara internal, masyarakat adat mengalami persoalan itu dan harus diselesaikan, terang Adriana.

Yang tak pernah dilihat oleh masyarakat di luar Papua, masyarakat adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik secara kekeluargaan atau berupa kompensasi. "Atau marga-marga itu anaknya banyak yang tidak bersekolah, kompensasi dapat (berupa) penyekolahan," terang Adriana.

"Macam-macam, sebetulnya ditanyakan kepada mereka kompensasi apa yang diperlukan. Tapi sekali lagi, jangan menipu. Karena banyak perusahaan menipu, banyak banget. Masyarakat kadang komplainnya sederhana: mereka dijanjikan sesuatu tapi tidak dikasih. Perusahaan banyak yang nakal."

Permasalahan adat pun bisa diselesaikan melalui pengadilan adat. Secara internal diselesaikan, kemudian orang luar juga harus mengerti pengadilan adat. Di Biak, apalagi kaitannya dengan aspek ketahanan dan keamanan, kata Adriana, biasanya isunya dikaitkan dengan soal hak asasi manusia.

Sehingga harus dipilah yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat secara adat, supaya tidak berbaur dengan isu politik. Ketika LAPAN membeli 100 hektare tanah Kampung Warbon, masyarakat adat diundang untuk menandatangani daftar hadir dan daftar terima uang ganti rugi beli tanaman Rp15 juta.

Warga adat tak pernah merasa menyepakati penjualan tanah, dan muncul dugaan LAPAN merekayasa berkas penandatanganan itu sebagai persetujuan pelepasan lahan adat. Apolos Sroyer, Manfun Kawasa Byak alias Kepala Dewan Adat Biak menyatakan dalam sebuah musyawarah adat di Biak Timur

para mananwir atau kepala keret berkumpul di Kampung Anggopi untuk membahas rencana pembangunan bandara antariksa di Kampung Warbon-Saukoby.

Hasil pembahasan ialah menolak rencana LAPAN. "Kami memutuskan tidak akan memberikan sebidang tanah itu kepada siapa pun. Bahkan kami tindak lanjuti pertemuan ini dengan mengadakan pleno khusus di (Kampung) Sorido KPS untuk lebih memperkuat keputusan sidang kami dan di situ kami umumkan melalui media tentang tanah yang diklaim oleh LAPAN. Karena waktu itu LAPAN hanya mengganti rugi Rp15 juta kepada marga Rumander," kata dia.

Hasil pleno itu juga bakal mengembalikan uang ganti rugi. Lembaga adat harus memperjuangkan hak dan harga diri si pemilik resmi tanah adat. Lahan tersebut tidak bisa dilepas sembarangan karena itu adalah kepunyaan turun temurun dari moyang. Di situ mereka bertahan hidup.

"Saya selalu sampaikan kepada mananwir bahwa kami ini adalah benteng terakhir penjaga dan pelestari hak-hak masyarakat adat. Kalau bukan kami maka siapa yang mau melindungi hak-hak masyarakat?"

Asimetri Informasi Di Papua terjadi asimetri informasi dari penentuan tata ruang. Kawasan hutan, sumber air dan pangan, dianggap tanah tak bertuan. Maka banyak pengakuan tanah yang dikuasai oleh negara, yang tidak terlegitimasi di masyarakat adat.

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri menyatakan pihaknya pun tak menolak pembangunan, namun apa pun pembangunan yang dilakukan di Tanah Papua seharusnya mendapat legitimasi dari masyarakat adat. Biasanya yang didengar oleh pihak Jakarta --orang Papua kerap menyebut pemerintah di tingkat pusat dengan sebutan ini--selalu mendapatkan kabar bahwa masyarakat adat menerima rencana pembangunan.

"Ada penyesian informasi yang terjadi terkait penggunaan atau pemanfaatan lahan di Papua. Ini yang kami selalu suarakan, bagaimana seharusnya pengelolaan ruang, tanah, hutan di Papua, informasinya disampaikan secara utuh. Yang terjadi saat ini, informasi masih setengah-setengah, dibelokkan. Baik itu informasi dari pusat ke Papua atau sebaliknya," ujar Mufti kepada saya, Rabu, 5 Januari 2022.

Contohnya, pembangunan bandar antariksa, di tingkat pusat publik merasa ide itu baik-baik saja. Tapi apakah rencana itu betul diterima secara utuh oleh masyarakat pemilik tanah adat? “Jangan-jangan, yang tahu detail rencana pembangunan itu malah pihak yang di Jakarta, sementara yang di Papua tak tahu apa-apa. Tiba-tiba sudah ada rencana, sudah dapat persetujuan menteri, sudah ada investor, itu yang kerap terjadi di Papua,” beber Mufti.

Asimetri informasi menyebabkan kurangnya ruang negosiasi pemerintah dan masyarakat, yang Mufti nyatakan jangan ada pembangunan semena-mena seperti yang terjadi di Tanah Mama seperti saat ini. Pemerintah harus transparan informasi apa pun, perkara warga menolak atau menerima, itu lain soal.

Mufti yakin, jika pembangunan murni dilakukan guna kepentingan masyarakat Papua, maka masyarakat tak menolak. Apalagi pembangunan memang menguntungkan bagi masyarakat di sana. Pada praktiknya selama ini pembangunan di Papua tidak pernah memperhatikan hal tersebut.

Masyarakat adat di Papua selalu belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi di daerah lain di Papua. Seperti hak tanah dan hutan dirampas, hak budaya hilang. Maka ketika ada rencana pembangunan yang tidak disampaikan secara utuh, tanggapan pertama warga adat pasti menolak.

Karena secara historis selalu merugikan masyarakat adat. Papua adalah daerah otonomi khusus yang pembangunannya berbasis budaya dan wilayah adat. Yang terjadi di Biak adalah salah satu potret bahwa penerapan Otonomi Khusus Papua tidak optimal alias setengah hati. Kenapa? Karena otonomi khusus, yang basisnya adalah masyarakat adat, pemerintah mestinya memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan masyarakat termasuk perihal wilayahnya.

“Sayangnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua jadi kurang bermakna bagi masyarakat di Papua karena intervensi dari undang-undang sektoral lainnya yang mestinya dikecualikan di sana. Karena Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu *lex specialis*, artinya undang-undang lain tidak sejauh itu cara kerjanya. Ada asas hukum bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Ketentuan khusus itu adalah Undang-Undang Otsus Papua,” terang Direktur

Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Muhammad Arman, 7 Januari.

Situasi terkini ialah Indonesia punya penyakit akut ihwal sektoralisme pengaturan hak masyarakat adat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Cara pandang pemerintah pusat adalah meskipun di sana ada otonomi khusus, tapi penerapan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan cum Undang-Undang Pokok Agraria, masih sangat dominan di Papua. Arman berpendapat ada faktor mendasar ihwal cara pandang. Bukan sekadar melihat wilayah adat dalam konteks masyarakat dan pemerintah.

“Pemerintah selalu berpandangan bahwa semua wilayah adat semata-mata perspektif ekonomi, sementara bagi masyarakat itu ruang hidup. Karena ruang hidup, maka di dalamnya ada ekososial sebagai satu perspektif, sebagai kosmologi kehidupan orang Papua. Kemudian, model-model pengakuan masyarakat masih bersyarat,” imbuh dia.

Syarat yang ia maksud seperti syarat politik, syarat sosial, dan syarat hukum. Syarat politik, misalnya, harus tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan hak masyarakat adat itu memang harus dalam bingkai negara Indonesia; kedua, syarat sosial. Undang-undang sektoral yang pemerintah pusat terapkan di Papua, dianalogikan seperti menyiapkan baju tapi seluruh ukuran baju itu sama. Padahal tidak semua orang ukuran bajunya serupa.

“Cara pandang begini yang keliru. Di Papua, pemegang tanah hak ulayat itu adalah marga. Saya tidak yakin jika proses pembangunan itu masyarakat baru tahu ketika ada penggusuran dan sebagainya. Celaknya, pemerintah hanya masuk dalam konteks sosialisasi. Sosialisasi dalam kerangka demokrasi itu sebenarnya berada pada tingkatan paling bawah. Artinya, masyarakat setiap ada proyek mesti diinformasikan terlebih dahulu, apa manfaatnya, kemudian masyarakat diberikan kesempatan untuk menyatakan iya atau tidak terhadap proses pembangunan itu,” tutur Arman.

“Tapi ada satu pandangan yang selalu jadi problem mendasar, yaitu hegemoni penguasaan negara. Padahal dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa hak menguasai negara dibatasi oleh hak ulayat. Ruang bertemu itu belum berjumpa dalam konteks yang

lebih setara dan harmonis, tapi selalu berjumpa dalam situasi konflik, karena perbedaan paradigma.”

Masyarakat tidak anti investasi, tapi mereka menginginkan ada proses-proses yang lebih manusiawi, lebih demokratis, dan tentu saja partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan merupakan demokrasi yang fundamental. Pembangunan dari dan bagi masyarakat, sama seperti prinsip demokrasi, namun itu yang tidak terealisasikan. Secara umum kehidupan masyarakat di bioregion Papua masih banyak bergantung dari alam. Rusaknya ekosistem akan membawa dampak ikutan berupa kerusakan di dasar sendi-sendi kehidupan dan peradaban mereka. Ciri khusus kehidupan tradisional masyarakat di Papua-Papua Barat adalah berlapisnya hubungan manusia dengan alam (sosial, ekonomi, ekologi, budaya, religi magis).

Manifestasi hariannya dapat diketahui dari jenis pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya yang umumnya masih berorientasi pada tujuan yang bersifat subsisten. Tujuan pemenuhan substansial harian, bukan komersial dan melayani pasar besar.

Alat dan teknologi yang dipakai juga memperhatikan batas-batas toleransi yang dapat mengancam ekosistem. Tentu saja selaras dengan kebutuhan bertahan hidup mereka di lanskap ekosistem mereka, di dataran tinggi, tengah, rendah-pesisir kelautan, serta pulau-pulau kecil. Ini berkaitan dengan tanah adat Warbon. Jika lahan mereka dijadikan bandar antariksa, maka ini memanjangkan daftar kehilangan hutan di Papua.

Berdasar data Forest Watch Indonesia dalam ‘Bioregion Papua, Hutan, dan Manusiannya’, per 2018, kondisi hutan dan deforestasi di Kabupaten Biak Numfor periode 2000-2018 pun terpampang jelas, Rinciannya, terdapat 91.269 hektare bukan hutan; 1.219 hektare deforestasi 2013-2018; 132.737 hektare hutan alam 2018; dan 225.225 hektare grand total. Sementara, hingga tahun 2013, luas hutan alam di wilayah bioregion Papua (Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru) mencapai 30 juta hektare atau 85 persen dari luas daratan wilayah tersebut. Keberadaan hutan terus mengalami tekanan.

Pada tahun 2013, 31 persen atau 11,2 juta hektare hutan alam berada di dalam konsesi perizinan (IUPHHK-HA/HPH,

IUPHHK-HT/HTI, perkebunan, dan pertambangan). Medio 2009-2013, 612.997 hektare hutan alam di Papua hilang atau 153.249 hektare/tahun, atau setara dengan lebih dari dua kali luas Jakarta. Hak Masyarakat Adat Arman melanjutkan, hukum saat ini gentayangan.

Undang-undang dibuat untuk mengatur sesuatu, tapi realitas masyarakatnya tidak terjawab dengan keberadaan regulasi tersebut. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 56, misalnya, disebutkan “Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Sialnya, sampai sekarang Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hak Milik. “kepemilikan secara adat itu sah dan berlaku secara hukum. Di mana ruang bertemunya? Ruang bertemunya kembali ke proses-proses awal, seperti bangun dialog. Pun pembangunan itu harus menggusur, misalnya, pastikan mereka (warga adat) tidak kehilangan entitas. Mungkin ada lokasi tertentu bagi masyarakat adat, yang tidak boleh dilakukan pembangunan di sana. Tapi ada juga yang boleh (dibangun). Ini perlu rembuk bersama dengan pemerintah,” kata Arman.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Emanuel Gobay berujar, dalam perkara ini, pemerintah tidak boleh melakukan hal-hal di luar undang-undang. “Masyarakat adat menolak? Itu hak masyarakat adat. Kalau dia menolak, maka kembali ke pemerintah sebagai mediator, melihat penolakan sebagai apa. Kalau pemerintah melihat itu sebagai alasan yang tidak masuk akal, saya pikir itu termasuk konteks pemaksaan. Pemerintah sedang mengabaikan Undang-Undang Otonomi Khusus,” tutur dia, Senin, 3 Januari 2022.

P e m a k s a a n tersebut termasuk tindakan pelanggaran hukum yakni menyalahi hak masyarakat adat. Dalam konteks ini salah satu aturan yang dilanggar pemerintah yakni Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Tak hanya itu, seandainya tanpa sepengetahuan masyarakat adat, LAPAN menyepakati kontrak yang tidak disetujui oleh pemilik tanah, maka upaya bisa dianggap sebagai tindak pidana penggelapan tanah seperti yang tertuang dalam Pasal 385 KUHP. “LAPAN atau BRIN adalah badan hukum, di hadapan hukum semua sama. Dia juga harus menghargai eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya. Ketika masyarakat memilih tidak, itu hak masyarakat menyampaikan pernyataan atas rencana. Badan hukum sebagai subjek hukum, dia juga harus tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa dapat melakukan semau dia,” kata Emanuel.

Masyarakat adat bisa melakukan dua upaya hukum jika sengketa tanah ini makin runyam. Kesatu, menggugat lewat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lantaran negara melalui pemerintah pusat/kabupaten/provinsi memberikan izin kepada perusahaan atau pihak pembangun. Kedua, menggunakan sistem tindak pidana penggelapan tanah adat. Pemilik lahan bisa melaporkan ke kepolisian. Kemudian, karena itu bagian dari hak masyarakat adat, mereka bisa melaporkan ke Komnas HAM.

Bukan hanya merusak alam dan membuat masyarakat adat kehilangan kehidupan, dalam hal area kandidat pembangunan, juga melahirkan masalah sesama orang Papua. “Dampaknya bukan hal kecil, bahkan sampai campur tangan memecah belah lembaga adat di Biak juga. Keterlibatan pemerintah, dalam hal ini Bupati, ada di dalam untuk memecah belah mananwir-mananwir Biak. Jadi, mana yang mendukung dia (Bupati), itu dia dorong. Kalau kita mau lihat, adat itu kan setingkat dengan dia. Tapi toh dia bisa ikut campur sampai ke dalam,” kata Simon Morin, Koordinator Program Yayasan Rumsram Biak, 28 Desember lalu.

Rumsram adalah pusat pengembangan sumber daya masyarakat kampung yang handal dan mandiri. Rumsram berasal dari bahasa Byak ‘Rum Sram’ yang berarti ‘Rumah Pemuda’. Dalam adat istiadat masyarakat Biak, anak lelaki yang tumbuh menjadi remaja dilatih untuk mandiri dengan ditempatkan dalam suatu rumah.

Simon menegaskan pihaknya harus hati-hati dalam

perkara ini karena intervensi pemerintah, terutama pemerintah daerah, terlalu besar untuk memaksakan rakyat melepas tanahnya. Ia tak ingin yayasan tersebut dianggap provokator.

Namun yang pasti, Rumsram setuju dengan penolakan warga adat. Mereka bekerja sama dengan mananwir Kainkain Karkara Byak untuk memberitahukan dampak dari pembangunan. “Karena kekuatannya di situ, keputusan ada di mereka (warga adat). Kalau mereka mengerti bahwa dampak tidak terlalu bermanfaat buat mereka sendiri, lalu menolak, lebih bagus.”

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib buka suara soal Kampung Warbon. Ia menyatakan September 2021, pihaknya sebagai lembaga kultural orang asli Papua, telah menjaring pendapat masyarakat adat di sana. Hasilnya sama saja dengan pleno Kainkain Karkara Byak: warga adat menolak pembangunan bandar antariksa. Berdasar penilaian Majelis Rakyat Papua, tanpa ada penjelasan lebih konkret dan lebih detail perihal pertanggungjawaban LAPAN, seakan-akan masyarakat adat meminta ganti rugi pelepasan tanah sebagai syarat menyetujui pembangunan, padahal tidak.

Timotius merencanakan pertemuan dengan LAPAN tahun ini guna menyampaikan konsekuensi pembangunan bandar antariksa. Setelah ada presentasi dari LAPAN, Majelis Rakyat akan berembuk. “Tapi sebelum itu, MRP pada prinsipnya tetap menolak pembangunan Antariksa di Biak, kami menolak.”

## 7.

# Terbenam dan (Terancam) Tersingkir di Saukobyé<sup>7</sup>

Oleh: Adi Briantika



*Ilustrasi HL Masyarakat Adat VS Rencana Bandar Antariksa. tirtoid/Sabit*

*Kampung adat Saukobyé di Biak Numfor menjadi salah satu kandidat untuk proyek bandar antariksa. Masyarakat adat jelas menolaknya.*

Jalan menuju Kampung Saukobyé di Biak Numfor, Papua tergolong sukar ditempuh bagi orang yang tak terbiasa. Perjalanan hanya bisa dilakukan melewati jalan setapak yang dikelilingi perkebunan dan rimbunnya pohon serai serta semak belukar.

---

<sup>7</sup>Tulisan ini terbit di *tirtoid* pada 25 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Kampung itu pertama kali dibangun pada akhir 1990-an, ketika tsunami menerjang bagian timur Pulau Biak pada 17 Februari 1996 yang memaksa masyarakat pesisir mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Ada 120 kepala keluarga yang kini tinggal di kampung itu.

Kampung Saukobyne berjarak sekira 36 km dari Kota Biak. Di kampung adat itu ada tanah ulayat milik suku Abrauw dan Rumander. Namun hak ulayat tersebut terancam direnggut ketika pemerintah lewat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berambisi membangun bandar antariksa untuk peluncuran satelit.

Kini LAPAN telah memiliki sekira 100 hektare tanah yang menyempil di antara tanah adat milik dua suku tadi. Marthen Abrauw tak bisa membayangkan seperti apa nasib kampungnya jika LAPAN membangun bandar antariksa di situ. Baginya, dan semua anggota masyarakat adat, tanah tersebut menjadi sumber penghidupan yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang.

“Kami pertahankan kami punya wilayah dan punya sejarah turun-temurun. Sejarah membuktikan dari moyang-moyang yang hidup di atas tanah ini, sejak pertama. Itu adalah warisan buat kami,” ujar Marthen yang juga seorang mananwir atau ketua marga Abrauw. Berdasar dokumen warga yang didapat Tirto, pada 1980 LAPAN menyurvei 100 hektare tanah tanpa pemberitahuan kepada marga Abrauw dan Rumander sebagai pemilik resmi tanah. Saat itu LAPAN bertemu dengan masyarakat Kampung Andey.

Pada satu pertemuan, camat kala itu, Alimudin Sabe, mewakili pemerintah meminta warga merelakan tanah adat untuk pembangunan. Tidak ada penjelasan dari pihak pemerintah terkait proyek bandar antariksa. Dalam ketidaktahuan, penduduk diminta pasrah.

### **‘Bahasa Gula-gula’**

Pemerintah mengiming-imingi warga dengan lapangan pekerjaan, rumah yang diisi dengan radio dan televisi, serta air bersih, apabila pembangunan bandar antariksa terealisasi. Para warga bergeming. Iming-iming tersebut, menurut mereka, tak lebih dari ‘bahasa gula-gula.’

Lantas terjadi negosiasi antara warga dan pemerintah.

Warga meminta Rp1 miliar untuk 100 hektare tanah tersebut, namun pemerintah menilai harga tersebut tak wajar. Pada 19 Juli 1980, pertemuan LAPAN dan warga kembali digelar. Kali ini LAPAN melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Dolf Faidiban, menyerahkan Rp15 juta kepada masyarakat adat sebagai uang ganti rugi 100 hektare tanah.

Setelah itulah LAPAN mengklaim telah mengantongi surat pelepasan tanah bertanggal 22 September 1980, sedangkan warga sama sekali tak pernah terlibat dalam penandatanganan maupun penyerahan surat pelepasan tanah. Warga dan LAPAN bertemu kembali pada 9 Februari 1994 dan 21 Agustus 2002. Namun tak ada perkembangan berarti terkait pemenuhan keadilan.

Warga adat meminta pemerintah menjelaskan dampak baik dan buruk dari pembangunan bandar antariksa, meminta LAPAN buka mulut sendiri ihwal rencananya, menginginkan tidak ada keterlibatan aparat keamanan dalam perkara ini, dan mendesak LAPAN mengembalikan tanah adat. Pada pertemuan itulah masyarakat adat Warbon baru melihat surat pelepasan tanah adat. Di surat tersebut terjadi perubahan luas tanah yang diklaim, dari 15 hektare berubah menjadi 100 hektare dalam sertifikat.

Warga Warbon merasa LAPAN telah menghina dan menyembunyikan berkas tersebut. Darius Abrauw, seorang warga, menyatakan pada tahun 1980 tidak ada penandatanganan dokumen apa pun ihwal pelepasan lahan; yang dia tahu adalah penandatanganan daftar hadir -nama mereka dipanggil dan diminta tanda tangan sesuai kolom--, dan daftar terima uang ganti rugi.

Darius menduga LAPAN merekayasa penandatanganan itu sebagai persetujuan pelepasan lahan adat. Berdasar data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Biak Numfor Tahun 2015 dalam bentuk Peta Wilayah Adat Marga Abrauw-Rumander, tanah yang dimiliki marga Abrauw-Rumander mencapai 2.142,2 hektare. Sekira 26 hektare di luar tanah itu digunakan untuk permukiman; 41 hektare dimiliki oleh marga Ampnir-Dimara; 56 hektare lahan LAPAN; 1,2 hektare untuk SMA; 0,4 hektare untuk Polsek Biak Utara; 0,2 hektare untuk Kantor Distrik; dan 2 hektare untuk SD Nermnu.

Sumber: Tim Riset Tirto  
TEG



# Masyarakat Adat VS Rencana Bandar Antariksa

- 1 Tanah adat Abrau & Rumander di Kampung Saukoby, Biak Numfor, Papua jadi salah satu kandidat lokasi pembangunan bandar antariksa oleh LAPAN
- 2 LAPAN butuh 1.000 hektare lahan untuk proyek tersebut, sementara baru 100 hektare yang dikuasai
- 3 Sejak tahun 1980, masyarakat adat dan pemerintah bersitegang. Warga tak ingin melepaskan tanahnya, penolakan terjadi sampai sekarang
- 4 Selain Biak Utara, LAPAN juga mengkaji tanah di Morotai, Maluku Utara untuk kepentingan keantariksaan
- 5 Kini LAPAN telah berintegrasi ke dalam BRIN & Pemerintah belum menetapkan lokasi pendirian bandar antariksa.



## Belum Ada Penetapan

Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang kini menaungi LAPAN, menyatakan pihaknya hingga kini belum menetapkan Biak sebagai lokasi pembangunan bandar antariksa. "Sampai saat ini kami belum melakukan penetapan. Biak hanya salah satu kandidat, belum ada penetapan. Di Biak dan Morotai, ada tanah LAPAN di kedua lokasi itu. Jadi, sebagai kandidat artinya dia memenuhi persyaratan secara teknis. Kami belum memilih," katanya kepada Tirta, (10/12). Plt. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Erna Sri Adiningsih menambahkan, Biak dan Morotai bukan pilihan terakhir. Terkait Biak, di sana sudah ada Stasiun Bumi untuk Telemetry, Tracking, and Command (TT&C), maka penganalisisan berlangsung.

"Kajian terkait bandar antariksa ini dilakukan sejak tahun 2007. (Menentukan) lokasi itu tidak mudah, tidak hanya persyaratan teknis harus dipenuhi. Tidak hanya (hal) teknis kalau dibangun menjadi bandar, tapi juga lingkungan, kondisi sosial budaya dan sebagainya juga jadi pertimbangan," ucap Erna.

Biak jadi daerah yang pertama kali dikaji lantaran sudah ada aktivitas terkait keantariksaan di sana yang sampai saat ini masih beroperasi. Selain Biak, LAPAN juga mengkaji di lokasi-lokasi lainnya yang memang cocok sebagai bandar antariksa ekuatorial atau dekat dengan ekuator.

Tidak semua daerah memenuhi syarat, terutama daerah yang dekat dengan permukiman. Perencanaan kegiatan keantariksaan tidak terbatas hanya untuk uji coba roket, tapi juga roket peluncur satelit. Selain Biak dan Morotai, BRIN juga mengkaji daerah di Sumatera sebagai kandidat.

"Itu sebagian dari lokasi-lokasi yang kemungkinan akan bisa ditetapkan. Kami mengkaji kemudian menyusun rekomendasi, hasil teknisnya seperti ini. Ini sesuai secara teknis, ini kurang sesuai. Hanya saja sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan dari lokasi-lokasi yang sudah dikaji kelayakannya sebagai lokasi bandar antariksa," jelas Erna.

Aspek yang dianalisis tidak sekadar letak geografis di sekitar ekuator, tapi juga kelayakan daerah untuk pendaratan, kondisi meteorologis dan topografis, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Sebagian besar bandar antariksa

di dunia ini, sambung Erna, cenderung dekat dengan laut demi meminimalisir risiko jatuhnya material roket ke permukiman. Sedangkan pemilihan daerah yang dekat dengan khatulistiwa semata demi efisiensi bahan bakar.

Kendati kajian kandidat telah rampung, pemerintah masih harus menyusun rencana induk dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). LAPAN telah menyelesaikan kajian teknis di Biak sejak dimulai pada 2007, dengan pembaruan terakhir pada 2018. Penolakan Terus Berlangsung Meski belum ada keputusan, masyarakat adat di Biak terus menyuarkan penolakan.



Pada 21 Oktober 2021, anggota masyarakat adat Warbon mengadakan rombongan BRIN yang hendak menuju ke hutan adat. Jalan yang dilalui rombongan tersebut diblokade menggunakan batang-batang pohon. Para warga turut membawa poster bernada protes dengan tulisan 'Ini Tanah Kami!' Kepala BRIN Handoko tak ambil pusing dengan penolakan tersebut. Menurutnya BRIN siap mencari tempat lain seandainya penolakan terus menggaung.

"Pokoknya kalau tidak mau, ya, sudah. Saya cari tempat lain. Kalau saya sesimpel itu. Kami bagi-bagi kerjaan, yang dapat

untung juga pemda dan masyarakat di situ. Wong tanah tak ada apa-apanya, sekarang hanya perdu-perdu saja. Jadi hutan juga tidak, sawah juga tidak, buat pertanian juga tidak bisa,” sambung dia.

Bagi Handoko hutan adat Warbon saat ini adalah lahan kosong tak berpenghuni. Handoko justru mendesak agar Pemkab Biak Numfor turut proaktif mendukung program pemerintah dengan memanfaatkan potensi lahan. Handoko memahami bahwa tanah ulayat tak gampang dilepas, maka Pemkab berperan besar untuk memuluskan proyek pemerintah pusat.

“Kalau untuk kasus Biak, bahkan pemda sudah (berdialog) dengan pemangku adat. Karena itu lahan di Biak Utara itu adalah tanah ulayat. Beda dengan Morotai, kami cukup dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi kalau Biak Utara, hampir keseluruhan adalah tanah ulayat, sehingga pemda yang memfasilitasi. Yang saya pahami, mereka sudah menyepakati,” kata Handoko.

Bagi BRIN proyek bandar antariksa membawa dampak positif bagi suatu daerah. Selain infrastruktur pendukung yang akan menguntungkan warga, bandar antariksa akan membawa dampak positif bagi sosial-ekonomi masyarakat. “Mau kami sinergikan begitu. Kalau jadi (menetapkan) di situ. Itu mampu memberikan dampak ekonomi yang konkret dan signifikan. Daripada kasihan, mereka tidak punya penghasilan apa-apa. Makanya [Pemkab] sangat ingin [dibangun bandar antariksa],” jelas Handoko.

Menurut Handoko, proyek bandar antariksa tersebut akan mendukung proyek satelit mandiri. Sebab menurutnya, Indonesia masih mengandalkan satelit milik negara lain yang memberatkan APBN. “Satelit juga bisnis, bagian dari bisnis global. Kalau Indonesia ada bandar antariksa akan sangat kompetitif, akan banyak yang mau meluncurkan di sini,” terang Handoko. “Memang, bahan bakar adalah biaya terbesar dari peluncuran satelit. Negara sebesar ini, ya, harus punya bandar antariksa. Tidak mungkin kami beli terus, terlalu mahal.”



Sebelum pulang ke Jakarta, saya mengingat lagi perjalanan menembus perkebunan dan hutan di bibir pantai di Saukoby. Cuitan nuri, ekor gunting, dan burung siang - yang merupakan satwa endemik Biak - terus menemani sejak pertama masuk hutan. Saya ditemani Aleks Abrauw saat itu.

Aleks adalah anak keempat Marthen, si mananwir marga Abrauw. "Kita mau ke mana?" tanya saya. "Ke pohon keluarga."

Kami tiba di sebuah hutan, dengan sebuah pohon Aisabau khas Biak yang miring sekira 45 derajat. Pohon itu hanya tumbuh di pantai saja, namun lantaran erosi populasi pohon tersebut terus berkurang. "Dahulu, nenek moyang kami tinggal di bawah pohon ini. Rumah pertama marga Abrauw dibuat di bawah pohon ini," tutur Aleks.

Agaknya sulit membayangkan jika kekayaan hutan tersebut terancam musnah demi peluncuran roket. Tentu ini bukan hanya perkara tanah, tapi juga kehidupan baik spiritual maupun jasmaniah. Aleks, dan mungkin banyak anggota masyarakat adat lain, jelas tak bisa membayangkan ruang hidup mereka yang terancam hilang. "Kalau pemerintah bersikeras mau ambil, kami mau ke mana?" kata Aleks.

## 8.

# Mereka yang Pro dan Kontra Bandar Antariksa Biak<sup>8</sup>

Oleh: Adi Briantika



Lapangan rumput Kampung Warbon, masih asri lantaran banyak pepohonan. Salah satu jalan masuk menuju dusun. Selasa, 14 Desember 2021. [tirto.id/Adi Briantika](https://tirto.id/Adi-Briantika).

LAPAN berencana memperluas lahan yang telah dimiliki dari 100 hektare menjadi 1.000 hektare. Masyarakat adat di Biak pun terbelah.

Permenas Sermumes menemui saya di teras rumahnya, di Kampung Andey, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Rumah Permenas begitu asri, dengan pepohonan rindang mengelilingi rumah serta pot bunga yang berjejer di terasnya.

---

<sup>8</sup> Tulisan ini terbit di *tirto.id* pada 27 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Permenas adalah seorang *mananwir* sekaligus tetua adat. Usianya 50-an tahun. Selain menjadi sosok yang dituakan, Permenas juga bertugas menjaga hak-hak ulayat masyarakat adat. “Di Biak ini setiap tanah itu punya tuan,” ucap dia.

Masalah tapal batas tanah adat pun mesti bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tambahnya. Setiap *mananwir* yang ada di setiap tempat harus bisa menjalankan fungsinya, seperti mengawasi masyarakat. Tapi secara organisasi, *mananwir* ditunjuk untuk memantau situasi secara umum.

Bila lahir konflik, *mananwir* kudu segera turun tangan. Dia mencontohkan, biasanya terjadi baku klaim lahan antar marga. Satu marga mengaku itu tanahnya, begitu juga pihak lainnya. Maka Permenas harus meluruskan kasus itu, dibicarakan dan diusahakan mencapai kesepakatan batas lahan.

“Saya panggil marga-marga yang bersama di tempat itu. Mari diatur bersama, mana (tanah milik) moyangmu, sampai di mana? Mari kami atur supaya jangan menjadi konflik untuk masyarakat sendiri,” kata dia. “Sungai, batu besar, gunung, bukit, atau tanjung bisa jadi batas tanpa plang. Tidak bisa ubah, kekal seperti itu.”

Tapi apa jadinya ketika pemerintah datang menguasai secuil wilayah adat mereka? Tugas Permenas adalah menjadi jembatan dalam konflik yang melibatkan hak atas tanah ulayat. Dialog jadi kunci para pihak, tapi pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga adat.

“Namun jika masyarakat adat tidak mau relakan tempatnya, itu hak mereka. Kami tidak bisa paksa. Jika dia rela, ya, silakan,” tutur pria yang juga berprofesi sebagai guru sekolah dasar itu. “Karena tanah itu adalah milik dia turun-temurun. Tidak bisa diambil karena itu haknya, di situ mereka makan dan minum,” tambahnya.

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) yang kini terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berencana memiliki 1.000 hektare tanah di Kampung Warbon dan Saukoby, Biak Numfor, yang menjadi salah satu calon kuat pembangunan bandar antariksa. Permenas menyatakan Kampung Andey, yang berada di seberang dua kampung kandidat, bisa terkena dampak pembangunan.

Pada 7 April 2021, ada pertemuan lima kelompok masyarakat membahas soal bandar antariksa tersebut. Hasil

pertemuan ialah para *mananwir* tetap bersepakat menolak ide LAPAN.

### **Masyarakat Terbelah**

Kendati BRIN dan pemerintah belum memutuskan lokasi untuk bandar antariksa, gaung rencana pembangunan tersebut telah nyaring terdengar sejak beberapa dekade lalu. Dan ini memunculkan intrik baru di tengah masyarakat adat: tak sedikit yang mendukung rencana pemerintah.

Pada 25 Oktober 2021, perwakilan masyarakat adat Byak datang ke Jakarta bersama Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap untuk bertemu dengan Kepala BRIN Tri Laksana Handoko. Mereka mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Kainkain Karkara Byak. Kainkain Karkara Byak adalah lembaga suku Byak yang dibentuk berdasarkan struktur sosial masyarakat setempat.

Suku Byak membagi wilayah adat menjadi sembilan area yang disebut 'Bar'. Ada sepuluh bar yang meliputi Padaido, Wamurem, Swapor Inggundi, KBS Sorido, Mani, Napa, Swandiwe, Supiori, Numfor dan Raja Ampat. Kesepuluh wilayah adat ini berada dalam tiga kabupaten. Ada empat orang dari suku Byak yang datang bersama sang bupati, mereka adalah Yosep Korwa, Yopis Mas, Moses Kafiar, serta Samuel Kapitarauw.

Kepergian keempat orang itu ke Jakarta untuk 'sowan' dengan Kepala BRIN membuat lembaga adat gerah. Akhirnya setelah musyawarah dengan tetua adat rampung, dewan adat sepakat mencopot mereka sebagai anggota Kainkain Karkara Byak.

Selisih pendapat antar anggota marga pun tak terhindarkan, menurut sekretaris Bar Napa Semuel Wurnares. Semuel menyatakan dalam pertemuan adat, Mananwir Kafiar tidak setuju dengan ide bandar antariksa. Selisih pendapat sesama anggota keluarga Kafiar pun muncul.

"Ini adik-kakak. Kakaknya ikut rombongan bupati, sedangkan adiknya di depan pertemuan itu tidak terima (rencana pembangunan). Bahkan marga Kafiar tidak setuju. Dorang tidak punya pikiran, yang satu ini bawa (ke Jakarta) untuk sampaikan ke sana. Itu hanya oknum saja," kata Semuel.

Semuel mengatakan hingga kini belum ada pertemuan

langsung antara pemerintah dan masyarakat adat. “Belum pernah. Upaya ini semua di luar. Belum ada pertemuan pemerintah dengan warga yang punya tempat.”

Berdasar data Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, penduduk Kecamatan Biak Utara mencapai 3.685 jiwa di tahun 2020, dengan laju perlambatan pertumbuhan penduduk 5,39 persen. Luas wilayah mencapai 143 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk di mencapai 25,77 jiwa per km<sup>2</sup>. Artinya, setiap 1 km<sup>2</sup> Kecamatan Biak Utara dihuni sekitar 25-26 jiwa.

Di sana terdapat beberapa fasilitas pendidikan yakni 10 SD negeri, 4 SD swasta, 4 SMP negeri dan 1 SMA negeri. Fasilitas kesehatan hanya puskesmas tanpa rawat inap yang terletak di Rosayendi; sedangkan rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, poliklinik, balai pengobatan dan apotek, belum dapat ditemui di seluruh wilayah Biak Utara.

Kepala Distrik Biak Utara Akwila Wabiser, adalah salah satu orang yang mendukung rencana bandar antariksa. Akwila menyatakan rencana pembangunan bandar antariksa bukan hal baru, bahkan sudah dibicarakan sejak dahulu. “Orang tua yang punya tanah sudah melakukan (pembuatan) berita acara. Sudah tanda tangan untuk proses pembangunan bandar antariksa, kalau tidak salah dari tahun 1980, awalnya dari situ,” aku dia.

Bahkan eksekusi pembangunan bakal ada dua tahap, namun ia tak tahu pasti kapan pemerintah pusat menetapkan daerah Saukobyte jadi bandar antariksa. Akwila berpendapat bandar antariksa ini adalah “pembangunan berskala kecil yang imbasnya tak seperti yang digembar-gemborkan.”

Pemerintah pun sudah mengkaji area dan mensosialisasikan dampak pembangunan kepada warga setempat. Meski masyarakat adat menentang rencana LAPAN, bagi Akwila itu adalah hal biasa. “Saya pikir, penolakan atau tidak, kondisi itu hal biasa. Penolakan-penolakan, demonstrasi, itu hal lumrah, sudah biasa. Bukan hanya di Biak saja,” ujarnya. Dia dan jajaran pemerintah telah melakukan pendekatan secara kedinasan dan kekeluargaan terhadap para pemilik tanah adat Warbon, tujuannya agar tak ada gesekan. Kapan pemerintah memutuskan pembangunan tersebut? Akwila katakan “kembali ke pemerintah pusat kapan dia mau lakukan, tapi rencananya, ya, tidak dalam waktu terlalu lama.”

Pertarungan Hukum Gerard Kafiari, Sekretaris Jenderal

Kainkain Karkara Byak yang merangkap sebagai Ketua Bar Napa, mengatakan pihaknya akan menggugat pemerintah dalam rencana bandar antariksa tersebut. Sebab, menurutnya, rencana tersebut melecehkan hak asasi manusia. “Pemaksaan kehendak oleh pemerintah untuk ngotot membangun bandar antariksa, kami anggap ini sebuah pelecehan terhadap hak asasi manusia. Kami nyatakan itu dalam sebuah pleno ketetapan,” ujar Gerard.

Dalam pertemuan tetua adat, Gerard mengatakan akan mempersiapkan tim advokat yang terdiri dari 25 pengacara untuk membantu di tingkat lokal dan nasional. Gerard mengatakan landasan hukum gugatan tersebut mengacu pada Pasal 1 huruf s Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Di situ dijelaskan soal hak ulayat yang merupakan hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gerard pun heran mengapa Pemkab Biak Numfor tak memahami aturan tersebut “Dia (bupati) belum tahu tentang aturan-aturan yang menjadi landasan hukum. Bupati pun sendiri bingung dengan aturan itu. (Penjelasan) Undang-Undang Nomor 21 (Tahun 2001), jelas,” ucap Gerard, sembari mengaku masih membuka ruang dialog antara pemerintah dan lembaga adat.

Kainkain Karkara Byak mengangkat dan mengesahkan Tim Hakim Adat Byak guna menyelesaikan perkara tanah sengketa, berdasar Surat Keputusan Nomor: 003/A/SEK-KKB/2021 bertanggal 7 Juni 2021. Relasi Alam-Manusia Hubungan manusia dan alamnya adalah relasi yang sederhana. Alam memberikan semua yang dibutuhkan, sedangkan manusia menjaga dan menghormati alam sebagaimana seorang anak yang menghormati ibu yang telah melahirkannya.

Relasi alam-manusia tersebut telah terjadi selama ribuan tahun, jauh sebelum keserakahan oligarki mencengkeram alam. Di Kampung Warbon, hubungan manusia-alam terus terjalin secara intim. Perempuan adat Warbon biasanya berkebun, hasilnya dijual untuk memenuhi keperluan.

Uang itu digunakan untuk memasak, menyekolahkan anak, membeli pakaian, dan pemenuhan kebutuhan keseharian lainnya. Elsa Sroyer, anggota Kainkain Karkara Byak, mengatakan tanah adalah sumber kehidupan adat. Elsa hingga kini menuntut transparansi kajian LAPAN perihal alasan pembangunan, dampaknya, kompensasi yang didapat jika masyarakat melepas lahannya.

Perempuan yang berdomisili di Sorido itu mengerti bahwa pembangunan itu untuk membangkitkan kabupaten dan bisa saja berdampak positif kepada penduduk. Umpama, masyarakat sekitar bisa mendapatkan lapangan pekerjaan lantaran ikut andil di tempat. Tapi pemerintah daerah tidak pernah sosialisasi langsung kepada pemilik hak ulayat. "Itu satu-satunya mereka punya kehidupan di situ, berkebun dan melaut, setiap hari. Kalau itu jadi dibangun, masyarakat pemilik mau ke mana? Mama-mama mengeluh karena itu tempatnya berkebun," ujar dia.

## 9.

# Pro dan Kontra Pembangunan Bandar Antariksa di Biak<sup>9</sup>

Oleh: Atamus Kepno



*Apolos Sroyer, ketua Dewan Adat Kainkain Karkara Biak. (Aptamus Kepno - Suara Papua)*

*LAPAN menyatakan Pulau Biak salah satu alternatif kandidat utama yang akan dijadikan lokasi pembangunan Bandar Antariksa karena LAPAN sudah memiliki aset lahan seluas 100 hektare yang berada di Desa Saukobyte, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor.*

---

<sup>9</sup> Tulisan ini terbit di [suarapapua.com](http://suarapapua.com) pada 31 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Tim LAPAN dan Tim China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) pada tahun 2015, Pulau Biak secara geografis dianggap sangat strategis untuk dibangun menjadi bandar antariksa. Hal ini karena lokasinya berada di pinggir laut menghadap Lautan Pasifik yang berarti memiliki akses langsung ke laut, kemudahan transportasi, dan tidak ada pulau penghalang, baik kecil maupun besar di dekatnya sehingga sangat sesuai jika akan dibangun bandar antariksa.

Rencana pembangunan bandar antariksa sudah dimulai sejak tahun 2010, namun hingga tahun 2017 keputusan penetapan lokasi pembangunan bandar antariksa belum dilakukan. Dalam Rencana Induk Keantariksaan Nasional tahun 2016–2040 telah direncanakan bahwa tahun 2017 LAPAN harus sudah melakukan *feasibility study*.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan penetapan, tetapi ia mengakui Biak hanya salah satu kandidat. Sebab selain Biak, di Morotai juga ada tanah LAPAN. “Sebagai kandidat artinya dia [Biak] memenuhi persyaratan secara teknis seperti dekat ekuator, laut bebas yang menghadap ke timur, lahannya cukup keras sehingga bisa jadi pondasi yang kuat untuk peluncuran roket. Saya masih buka kemungkinan (daerah) lain. Kami belum memilih,” ungkapnya kepada *Suara Papua* pada 10 Desember 2021 lalu.

Sekertaris umum LPAN, Prof. Erna Sri Adiningsih mengatakan, Biak dipilih sebagai lokasi untuk melakukan kajian, apakah cocok untuk membangun Bandar antariksa atau tidak. Karena di Biak sudah ada Stasiun Bumi dan ground station untuk Telemetry, Tracking, and Command (TT&C).

“Jadi satelit sudah ada kerja sama di sana [Biak]. Kajian terkait bandar antariksa ini memang sudah dilakukan sejak tahun 2007. Lokasi itu tidak mudah, tidak hanya persyaratan teknis harus dipenuhi, tapi juga hal lain yang perlu jadi pertimbangan. Tidak hanya teknis kalau dibangun menjadi bandar, tapi juga lingkungan, kondisi sosial budaya dan sebagainya juga jadi pertimbangan,” jelasnya.

Dia membeberkan, Biak menjadi lokasi yang pertama kali dikaji karena sudah ada aktivitas terkait keantariksaan yaitu Stasiun Bumi untuk TT&C yang sampai saat ini masih beroperasi

dan ke depan karena ada fasilitas yang dibangun, juga akan terus dilanjutkan.

Selain Biak, lanjut dia, LAPAN juga mengkaji di lokasi-lokasi lainnya yang memang (cocok) sebagai bandar antariksa ekuatorial atau dekat dengan ekuator [teknis peluncuran] sebab tidak semua lokasi/ pulau memenuhi syarat dengan berbekal kepada pengalaman mengoperasikan tempat peluncuran uji roket di Pameungpeh, Garut, itu sebagai gambaran awal.

Itu sebagian dari lokasi-lokasi yang memang kemungkinan akan bisa ditetapkan. "Kami pada saat itu mengkaji kemudian menyusun rekomendasi. Hanya saja sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan dari lokasi-lokasi yang sudah dikaji kelayakannya itu sebagai lokasi bandar antariksa," katanya.

Erna mengatakan, terbuka untuk calon lokasi yang lainnya. Kajian sangat detail karena tidak hanya mengkaji sekadar geografis sekitar ekuator, tapi juga drop zone dan sebagainya (bagaimana kondisi meterologis di tempat itu, kondisi di infrastruktur, kondisi sosbud dan ekonomi setempat).

Erna memaparkan, beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan melakukan analisis terkait bandar antariksa adalah dapat dilihat dari aspek drop zone, kondisi meteorologi dan topografi setempat. Satu lagi yang menjadi pertimbangan dalam konteks bandar antariksa adalah ketika roket diluncurkan ada tingkat.

"Biak menjadi salah satu kandidat karena ini sudah di Timur, TT&C pertama masih bisa di wilayah di Papua, tapi untuk yang berikutnya harus ada TT&C di lokasi lainnya. Kalau dari kajian, tidak hanya teknis saja. Ketika teknis digabungkan dengan ekososbud itu akan menjadikan penilaian kelayakan berubah. Tidak sederhana ketika melakukan kajian. Tapi kembali lagi, ketika sudah ada kajian, ada rekomendasi, yang memutuskan adalah pemerintah di mana ditetapkan lokasi yang akan dibangun," paparnya.

Kajian untuk Biak sudah selesai namun belum diputuskan oleh pemerintah. Setelah kajian, tahap selanjutnya adalah membuat masterplan dan studi amdal. Selain itu, untuk membangun Bandar antariksa perlu waktu dan tahapan.

"Ini berlaku di seluruh dunia, tidak hanya di Biak. Kajian untuk Biak awalnya dilakukan pada tahun 2007 dan

sudah diupdate pada tiga tahun lalu. Dalam kajian terakhir sudah ditambah dengan kajian social budaya.”

“Kajian dari segi teknis dan non teknis perlu dipertimbangkan. Untuk saat ini kajian sudah selesai untuk beberapa lokasi. Jadi kalau pemerintah memutuskan di man pun, harus diperbarui lagi datanya dan memuat masterplannya,” terang Erna.

### **Pro dan Kontra di Masyarakat**

Rencana LAPAN untuk membangun Bandar antariksa di Biak secara langsung membuat masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, yakni pro dan kontra. Kelompok yang menerima dan mendukung umumnya dari kalangan pemerintah dan masyarakat yang diduga sudah didekati secara personal dan bukan pemilik hak ulayat yang sesungguhnya.

Sementara suara-suara penolakan datang dari marga yang memiliki hak penuh atas lokasi yang rencananya akan dibangun Bandar antariksa dan para Mananwir sebagai pelindung adat dalam strata hidup orang Byak.

Kelompok pro beralasan bahwa Berdalil bahwa sudah ada tanda tangan untuk proses pembangunan Bandar antarksa pada tahun 1980. Pembicaraan untuk pembangunan Bandar antariksa sudah dibicarakan sejak lama sehingga bukan hal baru bagi pemilik lokasi.

Sedangkan kelompok yang kontra menyatakan penolakan pembangunan Bandar antariksa dengan alasan bahwa lokasinya adalah satu-satunya warisan leluhur dan nenek moyang yang sudah diwariskan turun temurun. Dan pemilik lokasi tidak punya tempat di tempat lain lagi. Selain itu, adanya dugaan pemalsuan dan dugaan penipuan yang dilakukan pemerintah pada tahun 1980 saat bertemu dengan masyarakat.

### **Kelompok Pendukung**

Kepala Distrik Biak Utara, Akwila Wabiser menyatakan Rencana pembangunan bandar antariksa sudah dibicarakan sejak tahun 1980 dengan para pemilik tempat. Selain itu dia juga berdalih bahwa ada tanda tangan pelepasan adat dengan para pemilik lokasi di Kampung Saukoby.

“Pembangunan bandar antariksa ini bukan hal baru [khususnya] di Korem. Bukan baru dibicarakan atau

direncanakan, tapi sudah dari dahulu. Orang tua yang punya tempat, lokasi, tanah sudah melakukan berita acara dan udah tanda tangan untuk proses pembangunan bandar antariksa. Kalau tidak salah dari 1980," jelasnya.



*Akwila Wabiser, Kepala Distrik Biak Utara di Rumahnya Kampung Korem Biak Utara, Rabu, 15/12/2021. (Atamus Kepno - Suara Papua)*

Akwila mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini sedang ada upaya untuk membicarakan rencana pembangunannya dengan pemerintah pusat di Jakarta. Sehingga sebagai Kepala distrik, yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah ia mendukung untuk bandar antariksa dibangun di Biak.

Sejumlah alasan pendukung pun diutarakan Akwila. Diantaranya, ia berdalih bahwa tahapan pengkajian sudah dilakukan dan sudah ada tanda tangan berita acara pelepasan tanah adat dari para pemilik lokasi

“Apa yang pemerintah lakukan, ya, tetap dibangun. Di pemerintahan ada hierarki kerja, ada atasan-atasan. Kalau sudah lalu beberapa tahapan seperti tanda tangan pelepasan adat dari pemilik hak ulayat, dan ada kajiannya. Sehingga selaku

pemerintah, saya mendukung agar proses pembangunan itu tetap dilaksanakan,” terangnya.

Akwila juga mengatakan, pemerintah tingkat distrik sudah lakukan pendekatan secara dinas atau keluarga pemilik hak ulayat yaitu marga Abrauw. Pemerintah distrik sampaikan penyampaian-penyampaian supaya hal ini tidak terjadi gesekan-gesekan keluarga, adat, dan pemerintah. Bahkan ia mengabaikan penolakan dari pemilik hak ulayat dan mengatakan bahwa penolakan itu hal biasa yang tidak perlu ditanggapi secara serius.

“Saya pikir penolakan atau tidak [di mana-mana] itu hal biasa. Penolakan-penolakan, demo, itu hal yang sudah lumrah, sudah biasa di berbagai tempat. Bukan di Biak saja,” katanya.

Para pihak yang belum berhasil diwawancarai dalam liputan ini adalah Bupati Kabupaten Biak Numfor dan para pihak yang diduga orang-orang yang didedekati secara personal oleh pemerintah serta orang-orang yang diduga bukan pemilik hak ulayat sebenarnya.

### **Kelompok Kontra**

Marthen Abrauw, Mananwir Keret Abrauw kepada [suarapapua.com](http://suarapapua.com) menegaskan, tanah leluhurnya yang sudah diwariskan secara turun temurun tidak akan pernah diberikan kepada pihak mana pun. Sebab lokasi itulah satu-satunya tempat yang mereka miliki.

“Moyang kami yang hidup di atas tanah ini. Maka itu kami tetap mempertahankannya. Ini adalah satu warisan nenek moyang diwariskan kepada kami. Jadi kami akan tetap mempertahankan tanah adat kami sampai saat ini,” ujar Marten kepada [suarapapua.com](http://suarapapua.com) di Kampung Warbon, Biak Numfor pada 14 Desember 2021 lalu.



*Marthen Abrauw, Mananwir Keret Abrauw. (Atamus Kepno - Suara Papua)*

Marthen bilang, tanah yang mereka punya itu adalah aset dimana keret Abrauw mencari makan, bercocok tanam dan hidup.

“Kalau sudah diambil orang lain, kami tidak bisa hidup. Karena tanah ini memberikan sumber kehidupan kepada kami. Ini satu-satunya yang kami punya unntuk hidup dari moyang kami sampai saat ini,” tegasnya.

Mananwir Marthen bilang dia memiliki dokumen sebagai bukti bahwa pihaknya adalah satu-satunya pemilik hak atas tanah itu. Dia mengungkapkan, secara administrasi, Kampung Korim terdapat enam kampung dan 9 keret, diantaranya Abrauw, Rumander, Dimara, Kapitarauw, Wabiser, Rumarauw, Obinaru, Oibus dan April.

Dengan tegas Mananwir Marthen mengatakan, untuk Antariksa Keret Abrauw tidak setuju. “Untuk LAPAN, kami memang tidak setuju. Kami menolak karena tempat kami akan habis. Kami tahu bahwa itu membutuhkan lapangan/lahan yang luas,” tegasnya.

Tokoh Pemuda Keret Abrauw, Alex Abrauw mengutarakan hal yang sama. Dia menegaskan agar tanah yang sudah diklaim sebagai milik LAPAN itu dikembalikan kepada Keret Abrauw. Bahkan pemerintah tidak pernah duduk bicara dengan Keret Abrauw tetapi bicara dengan Keret lain yang tidak

punya hak.

Menurutnya, yang dilawan adalah berita acara gati rugi tanaman kenapa sebesar 15 juta pada tahun 1980-an dipakai buat sertifikat tanah.

“Kami tidak jual tanah ini diklaim sepihak. Itulah sebabnya sampai saat ini kami pertanyakan pihak LAPAN. Pihak Lapan juga balik Tanya kami. Dalam kasus ini sama sekali tidak tahu. Kalau sertifikat itu atas nama LAPAN berarti LAPAN yang harus bertanggungjawab. Kami sebagai Generasi berikutnya untuk menjaga tanah adat kami tetap lawan dan kami minta kembali tanah itu. Ini tanah adat dan bukan tanah pemerintah,” tegas Alex memperkuat pernyataan Mananwir Marthen Abrauw.

Dalam catatan Alex maupun Mananwir Marthen yang disampaikan kepada Suara Papua, Keret Abrauw telah melepaskan sebagian besar tanah mereka untuk dibangun berbagai fasilitas, dan hibahkan kepada pemerintah. Diantaranya lepaskan lahan untuk bangun sekolah, Koramil, Kantor Distrik dan Polsek.



*Alex Abrauw (anak muda) dan Marthen Abrauw, Mananwir Keret Abrauw. (Atamus Kepno - Suara Papua)*

Alex menyatakan, penolakan terhadap pembangunan LAPAN di atas tanah adat mereka sudah dilakukan berulang

kali. Dari 2014 Keret Abrauw sudah melakukan protes dengan halangi dorang [LAPAN] berkali-kali di lokasi saat mereka survey didampingi anggota TNI dari Koramil dan polisi dari Polsek.

“Iya, kami kan halangi mereka kemudian kita kasih penjelasan mengenai tanah itu ini Tanah adat. Yang kami tahu uang 15 juta itu saya kembali tegaskan bahwa itu hanya untuk ganti rugi tanaman. Itu untuk ganti rugi tanaman itu saja. Dari Keret kami tidak ada yang pernah jual tanah ke LAPAN,” tegasnya.

Yubelina Abrauw Salah Satu Perempuan tolak Bangun Bandar Antariksa di Kampung Saukoby distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor itu. Pihaknya, menilai akan kehilangan tempat tinggal dan mencari makan.

“Itulah yang kami sangat harapkan untuk jangan membangun antariksa itu. kami keluarga besar Abrauw dan kami sebagai perempuan juga berusaha dengan sekeras mungkin untuk menolak pembangunan antariksa”. Katanya.

Yubelina, Sering mendengar Bandar Antariksa hanya bereskle kecil tapi pengaruhnya tidak tahu. “Jika kami setujukan paling berdampak pada lingkungan, lahan kebun, laut tempat mencari ikan, tempat tinggal kami,” katanya.

Kainkain Karkara Byak, Apolos Sroyer mengatakan berdasarkan laporan dan hasil investigasi, proses pengambilalihan tanah pada tahun 1980-an terjadi saat beberapa wilayah seperti Biak Utara dan Biak Barat sedang dalam kondisi Daerah Operasi Militer. Jadi tidak benar kalau ada kesepakatan untuk melepaskan tanah adat kepada LAPAN.

Dalam sebuah musyawarah Adat di Biak Timur para Mananwir berkumpul di Kampung Anggopi bersepakat laporan Mananwir dari Napa terkait dengan tanah yang saat ini menjadi masalah akan dibawa ke dalam sidang. Dari dalam sidang itu secara bulat para Mananwir memutuskan untuk tidak memberikan sebidang tanah pun kepada siapa pun.

“Bahkan kami tindaklanjuti pertemuan ini dengan mengadakan pleno khusus di Sorido KPS untuk lebih memperkuat keputusan sidang kami dan disitu kami umumkan melalui media tentang tanah yang diklaim oleh LAPAN itu uang ganti rugi sebesar 15 juta akan dikembalikan kepada LAPAN,” ungkapanya.

Sebagai Mananwir, Apolos dan Mananwir yang lain bertanggungjawab untuk menjaga hak-hak masyarakat, secha khusus dalam persoalan sengketa tanah. Apabila ada pihak-pihak yang mau menggunakan tanah maka dia harus melalui mekanisme yang ada di Kain-Kain Karkara Byak (KKB) Dewan Adat sehingga masyarakat harus diposisikan sebagai pemilik.

“Masyarakat bukan objek. Masyarakat pemilik tanah jangan disingkirkan menjadi objek lagi dengan mengambil tanahnya lalu memiskinkan mereka karena sampai saat ini kami belum ada pembicaraan di antara pihak kami dengan pihak yang mau berinvestasi. Kami akan berjuang dengan warga pemilik tanah,” bebernya.

Apolos mengatakan, mereka sudah membentuk tim Advokasi untuk membantu mengadvokasi masyarakat jika ada hal yang harus diadvokasi ke lembaga-lembaga hukum. “Kami sudah berikan kuasa hukum kepada Gustaf Kawer sebagai kuasa hukum. Kalau ada hal-hal yang mengancam masyarakat terkait dengan tanah Warbon yang ada di Biak Utara itu [Korem] kami sudah punya kuasa hukum dia akan membantu akan mewakili kami untuk itu,” ujarnya.

Kainkain Karkara Byak, kata Apolos, pada prinsipnya mendukung bersama masyarakat pemilik hak ulayat dan menolak LAPAN mengambil tanah adat Keret Abrawu di Biak Utara.

“Jadi kami tetap tolak karena dia [LAPAN] berpotensi menghancurkan ekosistem kehidupan kami masyarakat Adat. saya selalu bilang kami tidak pernah makan satelit baru kami hidup dari dulu moyang kami sampai kami dan anak cucu kami, kami akan pakai makan anak-anak kami dari hasil dari alami tanah kami,” tegasnya.

### **Pendekatan Tidak Tepat Sasaran**

Pada 21 Oktober, Kepala BRIN, Handoko Tri Laksono, bersama Sekertaris Utama LAPAN, Erna Sri Adiningsi datang ke Biak lalu mengadakan pertemuan dengan Bupati dan Tokoh adat. Tujuan ke Biak adalah untuk melihat dari dekat karena harus merencanakan program penerbangan dan antariksa nasional.

Pendekatan yang sudah dibangun sejauh ini menurut Tri Laksana adalah sejak awal bangun komunikasi pemda

Kabupaten Biak Numfor.

“Karena Pemda penguasa daerah Biak, kami perlu tahu juga ini status lahan punya siapa dan sebagainya, siapa saja yang terkait di situ dan seterusnya. Jadi, selalu dengan pemda dan pemangku adat karena tanah di Biak Utara adalah tanah ulayat. Dan yang saya pahami Pemda dan pemangku adat sudah menyepakati,” katanya.

Dari pertemuan itu untuk kasus Biak Pemda dan pemangku adat sangat bersemangat karena. “Mereka merasa itu bagian dari upaya membantu mengentaskan (masalah) ekonomi mereka juga. Bahkan datang ke kantor saya, Bupati dan pemangku adat/ketua marga, bulan Oktober. Ada 10 oranglah,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Distrik Biak Utara, Akwila Wabiser kepada Suara Papua mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif dari LAPAN sudah dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 2017 dan 2018.

“Sudah disampaikan ke masyarakat dan sudah menggelar sosialisasi empat kali, di kantor camat, kantor balai kampung Andei, kampung Saukobyte dan besar-besaran di Biak Numfor tentang dampak kepada masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti cekcok dan sebagainya,” ungkapnya.

Pernyataan berbeda disampaikan Ketua Dewan Adat Kainkain Karkara Byak, Apolos Sroyer. Menurut dia LAPAN tidak pernah ketemu dengan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat. “Saya tidak tahu. Mungkin pertemuan antara LAPAN dengan pemerintah daerah ada. Tetapi tidak pernah pertemuan dengan kami tidak,” ungkap Sroyer.

Kata Apolos, Dewan Adat Kainkain Karkara Byak akan memanggil LAPAN untuk menjelaskan kepada masyarakat adat. “Kalaupun dia [LAPAN] tidak datang juga ya, bukan ko punya tanah juga. Itu kami punya tanah. Ko yang datang mau pakai, Jangan balik logika ini. Ini tanah kami kau datang minta sama kami tapi cara minta dan cara bawah tanah itu tidak wajar,” tegas Apolos.

Lokasi yang sedang diincar untuk membangun Bandar antariksa di Biak adalah milik marga Abrauw, marga terkecil yang hanya ada di Saukobyte. “Jadi ini akan mengancam kehidupan mereka. Karena tidak ada tempat di kampung-

kampung seluruh Biak. Mereka hanya ada di kampung itu saja," terangnya.

Marthen Abrauw, Tokoh Adat Keret Abrauw menegaskan, mereka memang tidak setuju untuk bangun Bandar antariksa di atas tanah ulayat mereka. Alasannya, karena LAPAN akan membutuhkan lahan yang sangat besar dan dipastikan Keret Abraw tidak akan punya warinsa moyang lagi kalau benar-benar dibangun.

Untuk pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah, tidak pernah pemerintah dan LAPAN datang bertemu langsung.

"Bapa Bupati dorang sudah berkali-kali pertemuan dengan pihak LAPAN tapi kami banyak yang ditantan tapi kami abaikan. Kami juga kembali melihat sejarah dan kita mempertahankan kami punya sejarah atau tanah leluhur kami," tambahnya.

Sekretaris Dewan Adat Kainkain Karkara Byak, Gerard Kafiari mengatakan, meskipun pembangunan berskala besar atau berskala kecil seperti yang disampaikan Kepala Distrik Biak Utara, yang terpenting adalah penghormatan terhadap masyarakat adat pemilik hak ulayatlah yang paling penting.

"Penghormatan harga diri kami sebagai masyarakat pribumi yang kami tuntut, bukan masalah skala pembangunannya. Sebagai Sekjen Dewan Adat Kainkain Karkara Byak saya kecewa dengan pola pikirnya pemerintah daerah kami," ungkap Kafiari.

## 10.

# Proyek LAPAN di Biak Mengancam Marga Abrauw di Saukobyé<sup>10</sup>

oleh: Atamus Kepno

*Jika Pemerintah Pusat benar-benar merealisasikan pembangunan bandar antariksa di kampung Saukobyé, distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, maka dampaknya sangat mungkin terjadi adalah tanah ulayat Marga Abrauw terancam hilang. Generasi baru dari marga Abrauw tidak akan memiliki tanah warisan leluhur dan nenek moyang mereka.*

Dalam peta wilayah adat yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2015, wilayah adat marga Abrauw Rumander di Distrik Biak Utara, marga Abrauw memiliki total lahan seluas 2142,2 hektar yang terbagi dalam wilayah adat baru (1226,2 ha) dan wilayah adat lama (916 ha). Dari total luasan ini tanah milik LAPAN seluas 56 hektar.

Meski di dalam Peta BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, yang survei dan pengukurannya dilakukan pada tahun 2015, lahan milik LAPAN adalah seluas 59 hektar, Handoko Tri Laksono, Kepala Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan tanah milik LAPAN di Biak adalah 100 hektar.

Menurut Marthen Abrauw, pemilik ulayat tanah adat di Kampung Saukobyé, mereka menolak rencana pembangunan bandar antariksa di atas tanah adat mereka. Utamanya karena khawatir akan kehilangan tanah adat sebagai salah satu warisan leluhur dan moyang Marga Abrauw.

“Untuk pembangunan bandar antariksa ini kami memang tidak setuju dan menolak. Karena tempat [lahan] kami habis. Kami tahu bahwa itu membutuhkan lapangan yang luas.

---

<sup>10</sup> Tulisan ini terbit di [suarapapua.com](http://suarapapua.com) edisi 31 Januari 2022 dengan judul “Proyek Lapan di Biak Ancaman Serius Bagi Marga Abrauw di Saukobyé”.

Jadi kami tidak mau dibangun diatas tanah adat kami,” tegas Marthen kepada *Suara Papua*.

Janji untuk pemerintah menyediakan lokasi lain pernah ia dengar. Namun, tidak secara langsung dari pimpinan daerah janji-janji itu disampaikan oleh kepala desa. Marthen dan saudara-saudaranya menolak rencana tersebut karena mereka akan kehilangan tempat berburu, berkebun dan demi masa depan anak cucu mereka.

“Kalau janji untuk pindahkan ke lokasi lain pernah disampaikan oleh kepala desa. Tetapi kami menolak rencana itu. Kalau pemerintah pindahkan, kami tidak bisa hidup lagi karena kami bercocok tanam dan melaut. Dan yang paling penting adalah masa depan anak cucu kami suram. Jadi kami menolak rencana pemerintah untuk pindahkan ke lokasi lain,” kata Marthen.

Generasi muda Marga Abrauw juga menyatakan sikap menolak rencana pembangunan bandar antariksa di atas tanah adat mereka. Salah satunya diutarakan Alex Abrauw kepada *Suara Papua di Biak*.

“Sebagai generasi muda Abrauw di daerah ini [Saukoby], saya kira alam yang ada ini sudah cukup untuk jadi berkat bagi kami untuk mencari makan dan mendapatkan akses pendidikan itu sudah cukup. Kami tidak akan serahkan tanah adat kami karena ini sudah jadi komitmen dari turun temurun kami punya moyang yang masih hidup sampai sudah meninggal, kami yang ada lanjutkan kami tetap satu bahasa, pemerintah mau bangun model apapun kami tolak,” tegas Alex.

Jika pemerintah berwacana untuk memindahkan mereka ke tempat lain pun Alex menolak. Sebab dia berprinsip bahwa itu hanya gula-gula (jani manis) yang diberikan pemerintah dalam pertemuan-pertemuan. Misalnya, dia mengungkapkan, dalam pertemuan-pertemuan pemerintah selalu menjajikan uang miliaran rupiah sehingga bisa beli mobil dan lain-lain.

“Kami pikir itu hanya bahasa manis-mani saja. Kami tidak mau melepaskan tanah adat kami tapi kenapa pemerintah mau paksa kami supaya bisa melepaskan tanah adat kami. Pelepasan tanah adat pun kami tidak serahkan. Kalau memang pemerintah mau fasilitasi kami, mereka harus dengar apa yang kami sampaikan. Kalau kami tidak mau ya, pemerintah tidak perlu paksa karena sama contoh dengan daera-daerah lain.

Contoh Freeport saja sudah seperti begitu cukup kami lihat dari situ saja jangan kami lagi menderita,” tambah Alex.

Permenas Sermumes, Mananwir Adat wilayah Superior Amsendi mengatakan, jika pemerintah memaksakan kehendak untuk bangun Bandar antariksa, maka akan berdampak pada lingkungan dan budaya.

“Setiap tanah itu punya tuan tanah sehingga kita menghargai mereka [hak ulayat]. Jika mereka punya hak itu diambil, kami ini berfungsi untuk bisa membantu. Artinya kerjasama dengan pemerintah untuk bisa membantu keluhan mereka. Salah satunya tapal batas tanah adat, juga persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat supaya dampaknya bagus pada masyarakat itu, nyaman aman,” terang Permenas memperjelas peran serta fungsi mananwir dalam adat Byak.

Dia menyarankan agar pemerintah kerjasama dengan lembaga adat supaya melihat akar persoalan masyarakat adat itu dengan baik. Karena data tanah itu adalah milik masyarakat adat dari turun temurun dan tidak bisa kita ambil karena itu haknya makan dan minum dari moyangnya.

“Jika pemerintah mau ambil [tanah ulayat] ya tanya kepada pemilik apakah mereka?” ujarnya.

Permenas menilai Bandar Antariksa, ambil 100 hektar berarti akan berdampak di sekitaran tanah adat berseberangan Kampung Korem, Saukobyte dan Warbon. “Jadi pemerintah ambil lalu Mereka mau hidup di mana lagi. Itu yang kami pikir. Kalau pergeseran penduduk, ini tempat ini ada marga-marga punya,” tegasnya.

Dampak nyata bermanfaat untuk semua masyarakat umum bahkan negara. Tapi dampak negatifnya pada masyarakat akar rumput yang memakai lahan itu jadi persoalan. Pemilik tanah adat itu mau dikemanakan? Ini persoalan yang harus dipikirkan secara bijak.

Permenas menambahkan, jika pemerintah tetap ingin lanjutkan pembangunan bandara antariksa, pemilik hak ulayat yang hanya masyarakat kecil akan merana nasib hidupnya. “Kalau dia [Negara] dengarkan tangisan kami, ya, terima kasih. Kurang dari itu kami tidak punya apa-apa. Tapi kalau dipaksa, kami mau bikin apa, kami tinggal mencururkan air mata dengan hak kami. Kami tidak berdaya,” katanya.

## **Pandangan dan Sikap Gereja**

Gerson Abrauw, Ketua Klasis Biak Utara Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP) mengatakan, manusia dan alam semesta saling berhubungan dan erat kaitannya, demikian juga hubungan antara manusia dengan tanah.

“Ketika itu [saat penciptaan] tanah diberi roh oleh Allah lalu menjadikan manusia, kemudian Tuhan Allah menyediakan tanah lebih dulu dengan segala sumber dayanya lalu menempatkan manusia,” jelasnya.

Tuhan menciptakan Manusia dan memberikan tanah kepada masing-masing suku, bangsa serta marga untuk mengelolah dan memanfaatkannya dalam kelangsungan hidup manusia.

“Berkaitan dengan hal itu, kami merasa bahwa pembangunan dengan skala besar ini akan membuat manusia meninggalkan sumber hidupnya dan tanahnya. Pemilik hak ulayat tidak akan mungkin mengambil tanahnya kembali. Itu susah bagi pemilik hak ulayat.”

“Apalagi kalau dikaitkan dengan masyarakat adat Papua yang punya hak ulayat, batasan-batasan dan dia [pemilik ulayat] tidak mungkin pergi dan masuk di areal tanah adat orang lain. Itu sudah sama dengan bertindak sewenang-wenang, juga membuat orang lain merasa tidak nyaman,” katanya.

Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, lanjut Pdt. Gerson, tanah dipandang sebagai identitas. Tanah sangat erat dengan kehidupan orang asli Papua sebagai identitas, ibu yang memberikan sumber kehidupan.

“Kalau tanah adatnya sudah tidak ada, identitasnya sebagai orang adat sudah tidak ada.

Karena identitas diri orang-orang asli Papua adalah tanah. Jadi kalau ada tanah yang dilalihkan maka dia sendiri sebenarnya kehilangan identitasnya yang tidak mungkin punya tempat di situ. Dalam konteks ini marga Abrauw diperhadapkan dalam ancaman hilangnya identitas,” jelasnya.

Pdt. Gerson berpandangan, jika tanah diambil alih untuk kepentingan pembangunan Bandar antariksa, maka masyarakat lokal yang hidup turun-temurun disitu akan kehilangan sumber hidup, hak tanah, lokasi berkebun, tempat mencari dan sebagainya.

“Walaupun ada alasan bahwa tempat itu akan menjadi

lapangan kerja, itu artinya ada sumber pengganti. Tetapi kalau dilihat dari teknologi yang dibangun dengan keahlian yang dimiliki masyarakat, mereka sebenarnya tidak mungkin mereka bisa bekerja di situ sebagai tenaga kerja. Berapa banyak sumber daya kita yang saat ini yang punya pengetahuan luar angkasa dengan teknologi yang baik dan mereka tinggal di sini, sama sekali tidak ada," terangnya.

Gereja ikut prihatin kalau suara dan jeritan masyarakat yang terus ditekan dan tidak mau bersuara karena orang lain, dan memaksakan diri untuk menerima keadaan itu demi meninggalkan sumber hidup orang lain.

"Penderitaan masyarakat, bagi saya itu penderitaan Gereja karena dalam pemahaman Gereja kami, umat ini yang disebut Gereja bukan Organisasi Gereja. Tapi Umat yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, mereka itu yang dinamakan Gereja."

"Jadi kalau Gereja yang ada ini, umat yang ada ini merasa menderita, merasa tersingkir dan kehilangan sumber hidup sebetulnya itu adalah penderitaan Gereja. Karena itu Gereja ikut bersuara untuk menolong mereka menyampaikan keluh kesah dan kekhawatiran mereka. Itu yang ada pada Gereja," jelasnya.

Dalam konteks pembangunan Bandar Antariksa, lanjut dia, gereja sudah menyurati pemerintah, LAPAN dan negara karena menyalahi adat. Pihaknya sebagai Pimpinan Gereja juga sudah menyoroti Pemerintah Kabupaten Biak Numfor namun sejauh ini belum indahkan.

"Gereja sudah berusaha, tapi yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor ini soal orang bilang demokrasi, suara banyak didengar dibanding suara sedikit. Jadi yang yang mempunyai hak milik ini mereka sedikit, suara mereka kecil. Mereka kumpulkan begitu banyak orang mengatakan ia, dan yang suara kecil ini seperti tidak didengar," terangnya.

### **Pemerintah Abaikan Suara Gereja**

Pdt. Gerson mengatakan, gereja sudah berusaha untuk menyampaikan ini semua supaya dibicarakan dari awal dengan baik tetapi tidak pernah dihiraukan. Apalagi ketua klasisnya yang juga adalah pemilik hak ulayat di situ, akhirnya pandangan yang diberikan pemerintah pun negatif berkaitan dengan penyampaian yang tadi, atas nama gereja dan berbicara soal hak

hidup masyarakat. Lalu dinilai wah dia sama dengan mereka yang menolak, untuk apa berdiskusi soal ini.

Dia berharap, mendengar suara rakyat kecil tidak dituduh dengan opini negatif oleh pihak terkait. Pdt. Gerson meminta Pimpinan Pemerintah, Gereja, Dewan Adat serta Aparat keamanan bersatu menerima aspirasi masyarakat atau umat dan mendengarkan pemilik hak ulayat. Kalau mereka menolak, tidak boleh memaksa.

Gereja Kristen di Tanah Papua selalu mengingatkan para hamba Tuhan untuk menjaga manusia dan menjaga alam semesta, menjaga manusia dengan sumber-sumber hidupnya, menjaga tanah, hutan, dan sumber daya karena tidak ada tanah yang kosong di atas Tanah Papua. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi ini semua sumber daya ini telah disiapkan, baru Tuhan menempatkan manusia di atas tanahnya.

“Soal mau dipandang negatif atau obyektif atau positif, saya tidak perlu untuk menilainya. Tapi saya tetap bersuara untuk sesuatu yang benar. Karena di dalam Alkitab juga mengatakan, bela lah hak orang-orang kecil bela lah hak orang-orang tertindas, berarti tidak ada alasan bagi Gereja untuk bersuara bagi mereka yang merasa tertekan, yang merasa dirugikan dan itu harus. Itu keharusan yang ada dalam firman Allah,” tegasnya.

## 11.

# Sikap MRP dan Konsekuensi Hukum Pembangunan Bandar Antariksa di Biak<sup>11</sup>

Oleh: Atamus Kepno

*Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural orang asli Papua menyatakan menolak pembangunan Bandar Antariksa di Saukoby, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua.*

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan lembaga yang sedang ia pimpin tersebut secara lembaga menolak pembangunan Bandar Antariksa di Biak. Dia mengaku MRP telah melakukan pemantauan dan menjaring aspirasi di Biak pada September tahun 2021 yang berkaitan dengan rencana pembangunan Bandar Antariksa.

Hasil pemantauan itu, MRP menemukan bahwa masyarakat pemilik hak ulayat di lokasi pembangunan Bandar Antariksa menolak. Dari data yang MRP kumpulkan, sudah ada upaya negosiasi yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah Pusat untuk membicarakan tentang pelepasan kawasan.

Menurut Murib, MRP sedang agendakan untuk melakukan pertemuan dengan LAPAN supaya MRP mendapat penjelasan detail tentang dampak pembangunan satelit ini.

“Jadi MRP Tahun ini ketemu dengan Lembaga Antariksa untuk menyampaikan konsekuensi dari pada pembangunan ini dan peluncuran nantinya. Nanti ada persentasi dari Lembaga Antariksa baru MRP akan ambil keputusan,” jelasnya kepada *Suara Papua* pada 17 Januari 2022.

Dia menegaskan, sebelum ada pembicaraan dan mendapat penjelasan dari LAPAN, MRP pada prinsipnya tetap

---

<sup>11</sup> Tulisan ini terbit di *suarapapua.com* edisi 31 Januari 2022 dengan judul yang sama.

menolak pembangunan Antariksa di Biak. “MRP tetap menolak. Walaupun masyarakat adat itu sudah bicara dengan pihak pemerintah tentang proses pembangunan dan masyarakat adat juga bicara ganti rugi tanah tapi MRP tetap menolak karena MRP tahu contoh-contoh peluncuran di Benua lain kita kan sudah baca, jadi MRP pada prinsipnya menolak.”

“Karena pembangunan itu akan berdampak pada Orang Asli Papua pemilik hak ulayat yang sudah turun temurun tinggal, menetap dan hidup disitu. Jadi MRP secara lembaga menolak,” tegas Murib.

Apolos Sroyer, Ketua Dewan Adat Kainkain Kankara Byak kepada Suara Papua mengatakan, pihaknya mempunyai ide untuk ke depan tidak boleh ada investasi dengan skala besar di seluruh pulau Biak. Karena dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian dan kerusakan bagi masyarakat adat.

“Kami belajar dari beberapa tempat yang pernah meluncurkan satelit. Bukannya kami takut dan tidak tahu teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang sedang berkembang ini. Kami sudah tahu siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan dalam proyek pembangunan Bandar antariksa,” jelasnya.

Menurut konvensi internasional tahun 1972 tentang keantariksaan Perjanjian antariksa negara pengorbit atau peluncur negara peluncur ruang angkasa apabila terjadi kegagalan teknis maka dia tidak akan membayar kepada masyarakat ataupun negara yang dia luncurkan barang itu.

“Ini membuat kami khawatir apabila terjadi sesuatu di Biak nanti misalnya pada perusahaan ini peluncuran ini maka mereka tidak akan mengganti rugi karena ganti rugi mereka adalah tadi pajak dengan investasi bagi hasil usaha Negara,” ungkapnya.

Apolos dan masyarakat adat yang berada pada sikap menolak kuatir dengan dampak yang akan terjadi. Terlebih ketika tidak ada kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab jika pengorbitan gagal, lalu menimbulkan dampak buruk.

Dalam visi membangun Papua untuk lebih hijau kedepan, lanjut Apolos, masyarakat adat tidak mau teknologi itu dapat merusak lingkungan jadi apakah teknologi itu akan rama lingkungan kah atau tidak.

Yang terpenting menurut dia adalah masyarakat mendapat penjelasan yang detail tentang segala dampak baik

dan buruk dari proyek pembangunan Bandar antariksa itu dari ahlinya, bukan dari pemerintah kabupaten biak atau dari para peneliti di Jakarta.

“Kami tidak tahu mau pakai Pemerintah Kabupaten Jakarta Kami tidak mau jadi ini barang besar maka tidak bisa dihadapi dan pola pikir yang kecil. kita bicara Biak saja tidak cukup. Saya tidak akan mau bicara dengan orang-orang di pemerintah Biak Pemerintah Provinsi, karena saya itu bagian dari mereka sama-sama butuh penjelasan detail dari ahlinya,” urainya.

Dalam konteks ini ia menegaskan lagi, sebagai pemilik hak ulayat duduk harus bicara dengan pihak LAPAN agar dijelaskan oleh ahlinya, bukan dari pemprov atau pemerintah kabupaten.

“Kalau mau bicara orang-orang itu [Pemprov dan Pemkab Biak] saya kira itu bukan levelnya. Karena ini kita bicara nasib masa depan rumah orang Papua,” katanya.

Menurut Apolos, apa yang ia maksudkan adalah masyarakat adat harus beradab, harus dipandang sebagai subyek.

“Stop sudah masuk mengobjekan masyarakat. masyarakat harus didudukan melalui kepala adat ataupun pemiliknya harus duduk dan bicara, yang pemiliknya ini bicara bukan orang lain akhirnya nanti tidak sesuai dengan pemilik.”

“Kami tetap tolak karena dia berpotensi menghancurkan ekosistem kehidupan masyarakat adat. Kami hidup karena alam. Kami tidak pernah makan satelit baru hidup, dari dulu moyang kami sampai saat ini dan seterusnya akan pakai makanan hasil alami dari tanah kami,” tegas Apolos.

### **Harus Mengakui Hak Masyarakat Adat**

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel D. Gobay memberikan pandangan dari aspek hukum soal pembangunan Bandar antariksa di Biak. Menurut dia, hak masyarakat adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18D dan itu menjadi dasar konstitusional eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya. Juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

Hak-hak masyarakat adat secara tegas diatur dalam UU Otsus. Sehingga dalam hal pemanfaatan hak ulayat, pemerintah diwajibkan menjadi mendiator yang akan mempertemukan

masyarakat adat dan investor. “Itu perintah UU Otsus,” tegas Gobay.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh lakukan hal di luar UU. Pemerintah harus lakukan sesuai dengan UU sebagaimana diatur dalam UU Otsus yang di dalamnya mengakui eksistensi masyarakat adat dan petunjuk teknis bagi investor.

“Kalau masyarakat ada menolak, itu hak masyarakat ada yang tidak boleh dipaksa. Kalau yang terjadi adalah penolakan, maka kembali ke pemerintah sebagai mediator dan melihat penolakan sebagai apa. Kalau pemerintah melihat itu sebagai alasan yang tidak masuk akal, saya pikir itu masuk dalam konteks pemaksaan dan pemerintah menunjukkan sedang mengabaikan UU Otsus,” urainya.

Jika masyarakat telah menempuh lewat lembaga adat, ritual adat, tapi pemerintah tetap memilih Biak sebagai lokasi bandar antariksa maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pemaksaan. Maka harus dikritisi secara hukum karena masuk kategori tindakan pelanggaran hukum terhadap hak masyarakat adat.

Gobay memberikan penekanan pemerintah dalam konteks konstitusi. Secara tegas pada Pasal 28I ayat 4 (UUD 1945) menyampaikan bahwa penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM adalah tugas negara melalui pemerintah. “Berkaitan dengan penolakan masyarakat, ini lagi-lagi mempertanyakan sikap pemerintah dalam menjalankan amanah Pasal 28I ayat 4. Kalau kemudian pemaksaan yang terjadi, maka secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah melanggar pasal tersebut,” bebernya.

Sementara, LAPAN/BRIN adalah badan hukum. Sehingga sebagai badan hukum di hadapan hukum kita semua sama. LAPAN juga harus menghargai eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya.

Ketika masyarakat memilih tidak, itu hak masyarakat menyampaikan pernyataannya atas sikap terhadap rencana yang ada di atas wilayahnya. Kalau tanpa sepengetahuan masyarakat, pemerintah dan LAPAN melakukan kontrak, maka itu akan menjadi temuan pelanggaran tindak pidana penggelapan tanah adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP.

“Badan hukum sebagai subjek hukum, dia juga harus

tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. LAPAN tidak bisa dapat melakukan semau dia," katanya.

Gobay menyebutkan, ada beberapa langkah yang akan ditempuh jika pemerintah tetap merealisasikan rencana pembangunan Bandar antariksa dan ditemukan kejanggalan. Pertama, menggugat ke PTUN karena negara melalui pemerintah pusat/kabupaten/provinsi memberikan izin kepada perusahaan itu. Hanya saja waktunya 90 hari setelah izin dikeluarkan.

Kedua, menggunakan sistem tindak pidana yaitu soal penggelapan tanah adat. Pemilik tanah bisa melaporkan ke kepolisian. Karena itu bagian dari hak masyarakat adat, mereka bisa melaporkan ke Komnas HAM.

"Kami akan kaji dalam beberapa dasar hukum, fakta itu akan menunjukkan tindak pidana juga pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum administrasi negara. Masyarakat adat bisa melakukan dua upaya hukum," jelasnya.

### **Harus Transparan**

Direktur Forest Watch Indonesia (FWI), Mutfi Barri memberikan catatan kepada Pemerintah agar transparan dalam menggarap proyek pembangunan Bandar antariksa di Biak.

Menurutnya, hal yang menghambat adalah terjadinya misleading informasi. Dalam hal ini ia menekankan pada aspek komunikasi antara pusat dan daerah dan antara daerah dan pusat yang kurang baik.

"Ini yang kami selalu suarakan, bagaimana seharusnya pengelolaan ruang/tanah/hutan di Papua, informasinya disampaikan secara utuh. Yang terjadi saat ini, informasi masih setengah-setengah, diblokkan; baik itu informasi dari pusat ke Papua atau sebaliknya.

Begitu juga dengan informasi yang keluar dari Papua ke Pusat. Biasanya selalu ada asimetri informasi, artinya tak pernah tersampaikan ke Pusat, bahwa rupanya di tanah yang mau dibangun itu ada hak masyarakat adat.

"Ada hak yang harus diselesaikan, ada masyarakat yang dimintai persetujuan soal rencana tersebut. Seharusnya ada ruang negosiasi yang dibangun oleh pemerintah kalau memang ingin membangun di Papua. Jadi bukan pembangunan semena-mena seperti yang terjadi di Papua saat ini," tegasnya.

FWI tidak menolak pembangunan. Tapi apapun

pembangunan yang dilakukan di Tanah Papua seharusnya mendapat legitimasi dari masyarakat adat itu sendiri dan harus transparan.

Menolak atau mendukung pembangunan Bandar Antariksa adalah urusan lain. Yang wajib dilakukan menurut Barri adalah menyampaikan informasi secara utuh.

“Kalau memang itu murni dilakukan atas kepentingan masyarakat Papua, saya yakin tidak ada yang menolak. Apalagi pembangunan memang menguntungkan bagi masyarakat Papua. Tapi pada praktiknya, selama ini pembangunan di Papua tidak pernah memperhatikan itu.”

Untuk kasus Biak, ia mempertanyakan, apakah ini sudah terlegitimasi oleh masyarakat adat? Pertanyaan itu ia ajukan karena apa yang biasanya didengar di Jakarta selalu disampaikan bahwa masyarakat adat menerima. Faktanya ada misleading informasi yang terjadi terkait penggunaan/pemanfaatan lahan di Papua.

“Makanya masyarakat adat di Papua selalu belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi di tempat lain di Papua. Seperti hak tanah dan hutan dirampas, hak budayanya hilang. Maka ketika ada rencana pembangunan yang tidak disampaikan secara utuh, tanggapan pertama pasti menolak. Karena historis ke belakangnya selalu merugikan masyarakat adat Papua,” harap Barri.

### **UU Otsus yang Jalan Setengah Hati**

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB AMAN, Muhammad Arman mengatakan Papua adalah daerah otsus yang memang pembangunan berbasis budaya dan wilayah adat. Tetapi yang terjadi di Biak adalah salah satu potret, Otsus Papua itu tidak bekerja.

“Otsus Papua setengah hati, kenapa? Karena dengan otsus tersebut, yang basisnya adalah masyarakat adat, maka pemerintah mestinya memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan masyarakat adat, termasuk soal tanah, wilayah adat, air,” ungkap Arman.

Dia menyayangkan UU Otsus Papua jadi kurang bermakna bagi masyarakat di Papua karena intervensi dari UU sektoral lainnya, yang mestinya dikecualikan di Papua. Karena

UU Otsus Papua itu *lex specialis*, artinya UU lain tidak sejauh itu cara kerjanya.

“Ada asas hukum bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Ketentuan khusus itu adalah UU Otsus Papua,” bebernya.

Arman menerangkan, Indonesia punya penyakit akut terkait dengan sektoralisme pengaturan hak masyarakat adat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Cara pandang pemerintah pusat melihat bahwa meskipun di sana ada Otsus, tapi UU sektoral (UU Kehutanan, UU Pokok Agraria), masih bekerja dengan sangat dominan di sana, bukan Otsus Papatunya.

Menurut dia, sebenarnya masyarakat tidak anti investasi, tapi mereka menginginkan ada proses-proses yang lebih manusiawi, lebih demokratis, dan tentu saja partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan itu demokrasi yang fundamental. Pembangunan itu dari dan bagi masyarakat, sama seperti prinsip demokrasi. Itu yang tidak pernah terjadi.

PB AMAN berpandangan bahwa proses pembangunan bandar antariksa mesti dibangun ulang. Maksudnya dikondisikan ulang prosesnya, misalnya bangun dialog yang lebih humanis kepada masyarakat adat, dikonsultasikan, disampaikan maksud dan tujuannya, masyarakat adat diberikan kesempatan untuk menyatakan terhadap semua itu. Itu masalah yang dihadapi.

“Pandangan saya terkait UU Ciptaker dan pembangunan, LAPAN termasuk salah satu proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini pertanyaannya “strategis itu apa? Apa keuntungan bagi masyarakat?” Dan UU Ciptaker itu menyatakan bahwa semua boleh, apapun boleh ditabrak untuk kepentingan investasi dan proyek strategis nasional. Padahal UU Ciptaker pasca putusan MK, benar masih berlaku tapi tidak mengikat secara hukum,” katanya.

### **Sinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Negara**

Arman menjelaskan sinkronisasi hukum adat dan hukum Negara yang harus dilakukan. Menurutnya, hukum dalam konteks, dalam arti sempit, saat ini seperti gantangan. UUnya dibuat untuk mengatur apa, tapi realitas masyarakatnya tidak terjawab dengan UU itu.

“Saya kira, dalam UU Pokok Agraria Pasal 57 disebutkan bahwa sepanjang UU tentang Hak Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah kepemilikan dalam bentuk hukum adat. Tapi sampai sekarang kita tidak punya UU Hak Milik,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, artinya kepemilikan secara adat itu sah dan berlaku secara hukum. Ruang bertemunya kembali ke proses-proses awal, (seperti) bangun dialog. Pun pembangunan itu harus menggusur, misalnya, pastikan mereka (warga) tidak kehilangan entitas.

Mungkin ada lokasi tertentu bagi masyarakat adat, yang tidak boleh dilakukan pembangunan di sana. Tapi ada juga yang boleh (dibangun). “Ini menurut saya perlu dirembukkan bersama oleh pemerintah,” terangnya.

Dalam konteks Biak, ia menyarankan agar harus segera dicarikan jalan keluarnya untuk masyarakat yang menolak. Karena orang Papua bilang tanah dan hutan itu pasar sekaligus apotek, jadi itu yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Dalam proses pembangunan, yang selalu diutamakan adalah ganti rugi. Baginya, Ganti rugi adalah salah satu bentuk saja. Bisa dalam bentuk tanah ganti tanah, bisa dalam bentuk kepemilikan saham dalam satu proses pembangunan.

“Saya khawatir kalau kemudian, seperti yang lazim kita lihat, pemaksaan proses-proses pembangunan tanpa proses yang menghargai dan menghormati hak masyarakat adat. Itu sering terjadi di mana-mana, termasuk Papua. Apalagi kacamata pemerintah selalu melihat Papua dalam konteks yang lebih politis,” katanya.

Arman kembali menegaskan, masyarakat adat tidak anti terhadap pembangunan, tetapi masyarakat ingin agar dalam proses pembangunan itu harus menghargai dan menghormati mereka.

“Yang saya tegaskan sekali lagi, masyarakat tidak anti pembangunan sama sekali. Mereka hanya ingin proses pembangunan itu menghargai dan menghormati mereka. Memastikan bahwa itu memang untuk kebutuhan mereka,” pungkas Arman.

**Bagian III.**

**Ketimpangan Sosial  
dan Ekonomi**

---

# 1.

## Kondisi Ekonomi Orang Asli Papua di Balik Daya Tarik Mimika<sup>1</sup>

Oleh: Neno Karlina Paputungan

*Sudah sejak lama Timika menjadi tempat berkumpul, tidak hanya masyarakat dari Tanah Papua, namun juga dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Semakin banyak pendatang, kehidupan sosial dan ekonomi suku Amungme dan Kamoro, sebagai pemilik ulayat, kian tertinggal.*

Sorotan cahaya lampu memantul di terpal warna oranye, membuat pasar Sentral Timika terlihat lebih berwarna. Sebagai pasar utama di Kabupaten Mimika, aktifitas di pasar ini berlangsung 24 jam. Banyak pedagang melengkapi lapak dengan lampu membuat beberapa titik pasar terang benderang. Di lorong-lorong bagian dalam cahaya lampu perlahan meredup, lalu hilang di antara mama-mama Orang Asli Papua (OAP) yang kukuh berjualan mengandalkan pencahayaan dari langit.

Jika sedang beruntung, mama-mama Papua akan mendapatkan pantulan cahaya dari terpal lapak tetangga, sekaligus dari sinar bulan. Setidaknya, itu yang diceritakan Mama Rita Tiaro, (56), pedagang OAP dari suku Kamoro, asal Desa Pigapu, Distrik Iwaka.

Sambil melipat tangan di dada, Mama Rita bercerita bahwa ia telah berjualan di pasar Sentral Timika sejak anaknya baru dua. Sekarang Mama Rita sudah punya delapan anak dan tiga cucu. Sebagai penopang ekonomi keluarga, Mama Rita berkeyakinan, hanya di Timika-lah peluang hasil kebunnya dibeli akan jauh lebih besar.

“Timika kota to (ibu kota) jadi lebih ramai. Banyak orang pendatang datang belanja. Kalau di sana (Pigapu, Iwaka) orang-orang tidak beli salak, daun pisang, pakis, karena semua sudah

---

<sup>1</sup> Tulisan ini terbit di [zonautara.com](http://zonautara.com) pada 25 Januari 2022 dengan judul yang sama.

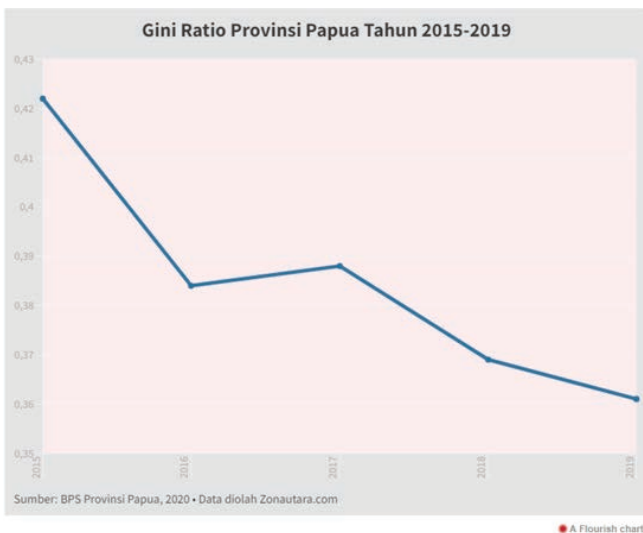
ada, kita tinggal ambil-ambil atau minta saja,” kata Mama Rita, saat ditemui di Pasar Sentral Timika, awal Desember 2021.

Sudah sejak lama Timika menjadi tempat berkumpul, tidak hanya dari dalam Papua, tetapi juga dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Terutama setelah kehadiran PT Freeport Indonesia.

“Bukan hanya Kamoro dan Amungme, banyak juga mama-mama (suku) Dani dari gunung (Wamena) yang turun, mama-mama Paniai, ada datang kumpul semua jualan di Timika. Biasa mereka datang siang hari,” jelas Mama Rita.

### Papua Butuh Pendekatan yang Tepat

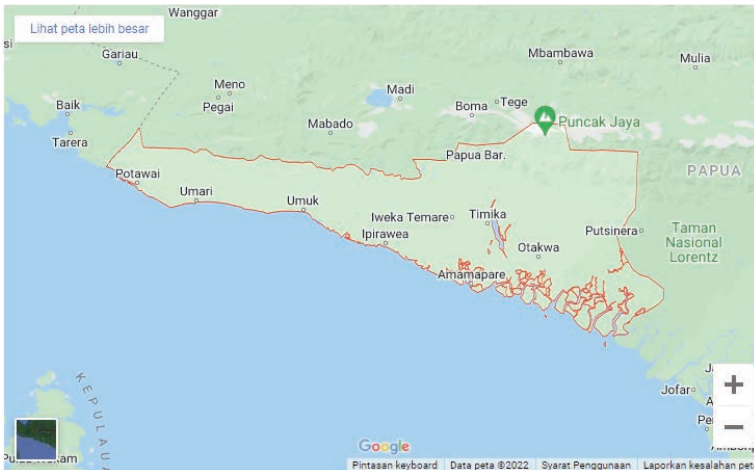
Sebagai ibu kota Kabupaten Mimika, Timika terbelang lebih maju dibanding distrik lain. Mimika terdiri dari 18 distrik (kecamatan), 19 kelurahan dan 133 kampung yang tersebar dari perkotaan, pegunungan, dan pesisir. Untuk skala lebih besar, meski secara keseluruhan pada Maret 2018, Papua masih tercatat sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bersama Kota Jayapura, Kabupaten Mimika termasuk kabupaten paling baik secara ekonomi. Ini terjadi karena tingkat pendidikan, infrastruktur kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dianggap lebih baik dibanding daerah lainnya di Papua.



Dari ukuran gini ratio, secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan di Papua mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dan cenderung mengalami perbaikan. Provinsi Papua masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Di Mimika, angka gini ratio juga terus membaik.

Kabupaten Mimika sendiri memiliki penduduk sebanyak 311.969 jiwa (Mimika Dalam Angka 2020), dengan laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun (2010-2020) sebesar 70,02 persen. Penduduk terbanyak berada di Distrik Mimika Baru (142.909), terendah di Distrik Agimuga. Selain Mimika Baru, distrik lainnya yang jumlah penduduknya di atas 10 ribu jiwa adalah adalah Distrik Iwaka (10.981), Distrik Kuala Kencana (27.774), Distrik Kwamki Narama (13.750), Distrik Mimika Timur (10.179), Distrik Tembagapura (23.022) dan Distrik Wania (58.904).

Sementara itu, kehadiran PT Freeport Indonesia di Mimika, turut mendorong Timika (ibukota Distrik Mimika Baru) menjadi kota yang berorientasi pada bidang industri dan jasa. Hal ini memicu beberapa perusahaan skala nasional masuk dan menarik orang luar untuk datang di Timika. Warga negara asing (WNA) yang bekerja di PT Freeport juga banyak terkonsentrasi di Timika.



Pemerintah baik daerah maupun pusat terus membangun akses dan infrastruktur di Mimika, terlihat dari penataan Distrik Kuala Kencana, Bandar Udara Mosez Kilangin, rumah sakit, jalan. Dan yang terakhir adalah fasilitas olahraga skala nasional sebagai penunjang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Papua XX.

Kabupaten Mimika juga mempunyai lanskap yang lengkap, yakni dimulai dari dataran tinggi Pegunungan Jayawijaya hingga dataran rendah di pesisir Selatan yang menghadap langsung ke laut Arafura.

Wilayah Mimika memiliki luas 21.693,51 km<sup>2</sup> didiami oleh dua suku asli Papua yaitu suku Amungme dan suku Kamoro. Selain dua suku asli tersebut, di Mimika juga ada lima suku kekerabatan lainnya (Mee, Dani, Damal, Nduga dan Moni). Suku-suku ini menempati dua jenis topografi yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agiuga, Hoya, Alama dan Killa. Selain kelima distrik tersebut, distrik lainnya berada di dataran rendah.



*Salah satu ekspresi tradisi orang Papua di Mimika. (Foto: Ronny A. Buol)*

Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agumiga dan Jila tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar dan Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut. Kondisi ini membuat OAP di Mimika memiliki keanekaragaman dan kebiasaan berbeda dalam memenuhi ekonomi mereka.



*Lanskap kampung di tepi pantai Pounako, Distrik Mimika Timur. (Foto: Ronny A. Buol)*

Mama Rita misalnya, sebagai seorang Kamoro, akan sulit berkebun karena terbiasa meramu, hidup dari hasil alam. Suku Kamoro dikenal hidup dengan 3S (sungai, sampan, sagu). Jadi sekeras apapun mencoba, Mama Rita percaya akan gagal saat berkebun. Berbeda dengan suku Amungme, yang bisa mengandalkan kreatifitas berkebun di gunung dengan kemiringan tertentu. Mereka mampu menggarap beberapa lahan secara bergantian.

“Kalau tidak ada hasil alam, Sa tanam salak lebih mudah, hanya tanam sekali saja, baru bisa panen-panen terus to. Kalau kangkung atau bayam bikin capek. Pinggang Sa retak semua saat mau bikin bedeng. Dulu Sa dengan pace coba tanam, tapi tidak pernah berhasil,” keluh Mama Rita.

Cara pandang terhadap tradisi dan budaya orang asli Papua (OAP) yang beragam berdasarkan suku, begitu berbeda dengan pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa lain di Indonesia. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu faktor OAP belum bisa sepenuhnya merasakan manfaat dari pembangunan. Sehingga kehidupan ekonomi OAP sebagai pemilik hak ulayat lebih terbelakang dibanding pendatang yang memiliki tradisi berbeda dan beragam serta sumber daya manusia mumpuni.

“Dasar atau praktek OAP berbeda, mereka kebanyakan masih berdasar pada sistem pertukaran, memberi dan menerima. Tanah itu bagi mereka tidak dibeli, tapi diserahkan. Dan mereka bersifat komunal, yang satu akan menanggung yang lain. Jadi mereka tidak mengenal keluarga inti yang harus diprioritaskan. Kalau ada uang, itu akan habis dipakai bersama, sebab untuk bertahan di alam, mereka terbiasa membangun sistem sosial yang erat. Selain karena mereka memang sangat dekat dengan alam, hidup dari alam. Jadi uang bukan ukuran kesejahteraan,” kata Prof. Dr. Cahyo Pamungkas, Ph.D., peneliti Sosiologi Etnisitas dan Multikulturalisme dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat diwawancarai lewat seluler, Selasa, (29/12/2021).

Cahyo menjelaskan, OAP tidak menolak pembangunan, hanya saja butuh pemahaman yang baik terutama dari sisi tradisi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan, sehingga OAP memang benar-benar bisa merasakan manfaatnya.

“Sebenarnya pembangunan di Mimika tidak jauh berbeda, rencana strategis pembangunan kampung, program dana kampung itu sama di seluruh Papua. Ada desa mandiri, distrik membangun, desa pintar, cuma berbagai program itu, sejauh ini bisa dikatakan belum berhasil,” jelas Cahyo.

### **Banyak Orang Asli Papua di Bawah Garis Kemiskinan**

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob tidak menampik hal tersebut. Johannes mengakui, angka ketimpangan yang terus membaik adalah angka yang terlihat dari luar saja. Hanya berdasar data BPS di Kota Timika, bukan keseluruhan Mimika.

“Bahkan jika dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita (Mimika), sekarang berada di urutan pertama atau ke dua, mungkin, di Papua. Tetapi kita harus jujur melihat, dilihat dari sisi mana dulu, apakah dari sisi pendidikan, kesehatan,

sisi pengembangan manusia, atau ekonomi,” ujar Johannes saat ditemui pada Rabu, (8/12/2021).

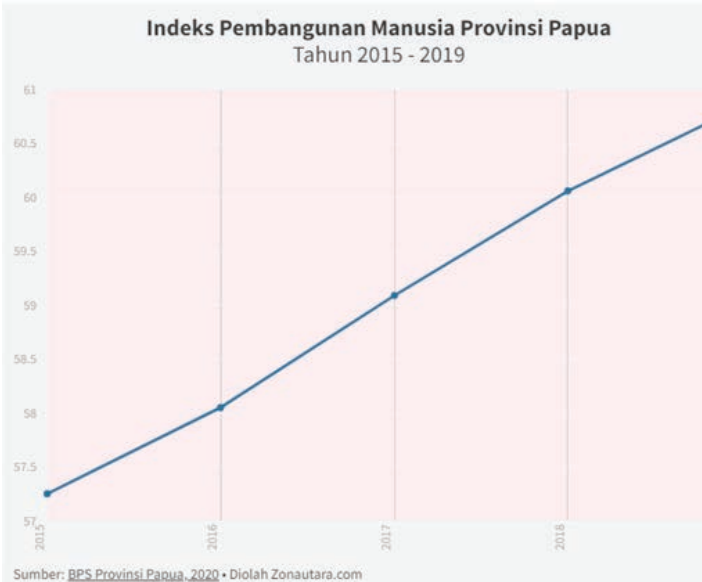


Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob. (Foto: Ronny A. Buol)

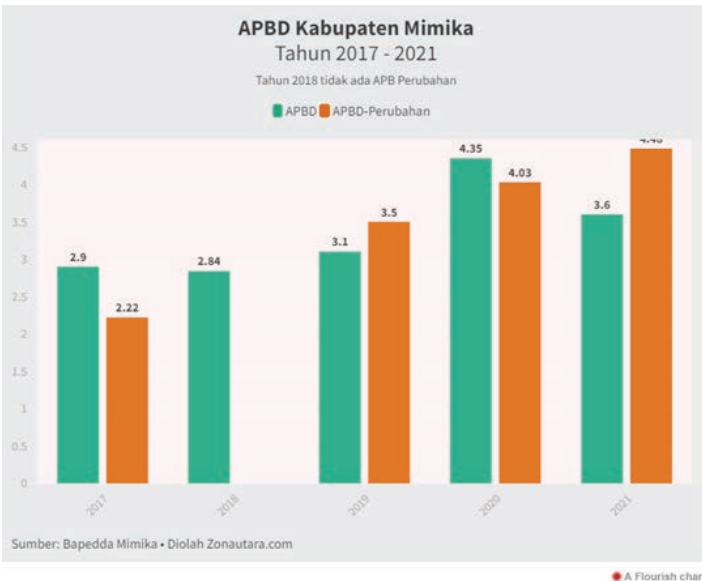
Sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Papua dan masuk 10 besar di Indonesia, Johannes menganggap, wajar jika Mimika menjadi daerah yang dinilai baik perekonomiannya. Namun, angka tersebut tidak menjadi jaminan, tidak ada lagi masyarakat miskin Mimika.

“Dalam sehari perputaran uang kita bisa sampai Rp7 miliar, APBD Mimika sekitar Rp4.4 triliun. Paling besar dari perusahaan (PTFI). Sementara Mimika ini begitu heterogen. Faktanya, masih banyak OAP hidup di bawah garis kemiskinan. Menjadi keluarga penerima manfaat (KPM bantuan sosial - red). Dari data Dinsos dan Kantor Pos, ada 30 ribu warga Timika menjadi KPM. Nah kan, kalau KPM-nya terus bertambah, berarti pemerintah gagal, sebab orang miskin justru semakin banyak,” kata Johannes.

Johannes juga mengakui bahwa kontrol pemerintah daerah secara spesifik terhadap pendatang masih lemah. Di samping ada fenomena lain, banyak orang yang datang langsung ke wilayah-wilayah tertentu, seperti wilayah pendulang (area Kali Kabur).



“Mungkin ada 10 atau 15 ribu pendatang di atas (area Kali Kabur), baik dari Papua pun dari luar Papua. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya,” kata Johannes.



Dari berbagai klaim masyarakat pendatang, jumlah pendatang di Mimika saat ini jauh lebih besar dari OAP. Namun sayang, hingga liputan ini tayang, Zonautara.com belum mendapatkan balasan surat permintaan data dari Distriaker Mimika, soal berapa komposisi masyarakat pendatang dan OAP. Sebelumnya, pihak Distriaker Mimika saat dikonfirmasi secara langsung, meminta surat permohonan data secara resmi dari Zonautara.com. Sementara BPS Mimika juga berkilah baru akan merilis jumlah pastinya pada Mei mendatang.

“Itu adalah program BPS Mimika tahun lalu. Tapi baru bisa merilisnya Mei 2022 mendatang,” singkat Kepala BPS Mimika, Trisno L Tamanampo.

## 2.

# Sejak Lama Pendetang dari Luar Papua Terus Mendatangi Mimika<sup>2</sup>

Oleh: Neno Karlina Paputungan

*Mimika, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah pertambangan menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari luar Papua.*

Sebagai orang asli Papua (OAP), Mama Rita tidak pernah tahu persis bagaimana sejarah awal kedatangan orang luar ke Timika. Mama Rita hanya tahu, bahwa salah satu lahan perkebunannya telah ditukar dengan sepeda motor keluaran tahun 2006 kepada kenalan anaknya yang merupakan pendatang.

“Karena biaya transportasi ke Timika itu sangat mahal e. Jadi kebun satu Sa tukar motor pada orang Manado. Dengan motor itu, tiap hari Sa bisa diantar-jemput anak saat jualan,” cerita Mama Rita.

Seperti Mama Rita, banyak juga pendatang tidak tahu sejarah awal kedatangan orang luar di Timika. Mereka datang dengan jalan dan cara yang berbeda-beda.

Hasanudin yang berasal dari Makassar salah satunya. Dia tidak ingat lagi kapan pertama ke Timika. Seingat Hasanudin, dia datang begitu saja ikut kapal. Awal-awal kedatangannya, Hasanudin bertemu Munawir Yakub (mantan anggota DPRD dan ketua Keluarga Bugis Sidrap Timika) dan beberapa orang dari Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Waktu itu, ada program sewa tanah dari kecamatan. Saya menyewa tanah dari camat dengan harga sewa Rp10 ribu. Di tanah itulah saya awalnya berjualan pisang goreng, hingga membangun usaha dan beranak pinak,” kisah Hasanudin, Senin, (13/12/2021).

Menurut Hasanudin, saat itu kompleks jalan Ahmad Yani Timika belum menjadi pusat toko-toko cenderamata. Masih

---

<sup>2</sup> Tulisan terbit di zonautara.com pada 26 Januari 2022 dengan judul yang sama.

belantara, ada pepohonan besar dan sebagiannya dipenuhi pohon pisang. Banyak buah pisang membusuk begitu saja di atas tanah.

“Di Makassar kita jarang sekali membiarkan makanan busuk, tapi di sini saking banyaknya pisang, tidak habis dimakan. Saya melihat orang-orang tidak mengolahnya. Jadi saya coba menggoreng. Sebenarnya untuk dimakan sendiri. Ternyata, setelah dirasa enak, orang-orang datang membeli, termasuk juga OAP. Mereka datang minta, atau menukar pisang goreng saya dengan buah pisang yang baru,” cerita Hasanudin.



*Hasanudin yang berasal dari Makassar dan kini merasa menjadi orang Papua sedang berada di toko cenderamatanya di Mimika. (Foto: Ronny A. Buol)*

Interaksi terjadi begitu lama seiring dengan berkembangnya usaha Hasanudin. Oleh OAP Hasanudin bahkan diangkat sebagai anak. Hasanudin sempat kembali ke Makassar untuk menikah. Setelahnya, ia kembali melanjutkan hidup di Timika bersama istri. Sekarang Hasanudin memiliki 4 orang anak, 1 perempuan dan 3 lelaki. Semuanya sudah lahir di Timika.

“Saya tidak lagi menggoreng pisang. Usaha sudah dilanjutkan anak perempuan. Dia menjadikan bekas tempat

gorengan saya menjadi toko cenderamata khas Papua. Timika ini tempat hidup. Kami orang Makassar, saat pulang ke kampung disebut orang Papua. Jadi kami begitu cinta dengan tanah ini. Ada orang yang usik Papua atau OAP, kami juga merasa ikut terusik, sebab kami Papua,” aku Hasanudin.

### Kehadiran Freeport di Papua

Mengutip riset Achmadi Jayaputra dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, bahwa pada tahun 1986, PT Freeport Indonesia Inc sebagai cabang dari perusahaan induk Freeport Mc Moran Inc atau PT Freeport Mc Moran (PTFM) di Amerika Serikat mulai beroperasi. Menjelang akhir tahun 1991, ketika Kontrak Karya II ditandatangani, PT Freeport Indonesia Inc berganti menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan wilayah eksplorasi di Distrik Tembagapura, diatas hutan tropis yang menyimpan cadangan bahan tambang terbesar ketiga di dunia, dimana 2,6 miliar ton berupa emas (terbesar di dunia) di areal seluas 202.950 Ha.



*Ban raksasa alat berat diletakkan di depan Bandar Udara (lama) Mozes Kilangin sebagai penanda hadirnya PT Freeport Indonesia. (Foto: Ronny A. Bual)*

Kehadiran PTFI di Kabupaten Mimika menjadikan Mimika sebagai kabupaten terkaya di Provinsi Papua, karena

membuka keterisolasian daerah yang dikelilingi hutan, perairan, dan pegunungan. Infrastruktur dibangun dengan kehadiran kota mandiri dan modern di Kuala Kencana, lapangan terbang, pelabuhan laut, dan fasilitas jalan. Lapangan kerja pun terbuka dan memberi kesempatan orang luar Papua datang ke Mimika.

Achmadi Jayaputra pun dalam risetnya menyebutkan kekuatan perekonomian Mimika hingga saat ini dan tahun-tahun mendatang akan sangat bergantungada sektor pertambangan.

### **Karakteristik Penduduk Mimika**

Penduduk di Mimika dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yakni penduduk asli atau OAP, dan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari dua kelompok besar. Pertama, kelompok masyarakat dari daerah pegunungan yaitu suku bangsa Amungme dan lima suku bangsa terdekatnya seperti Mee atau Ekari, Dani, Damal, Nduga dan Moni. Tingkah laku dan watak suku bangsa Amungme identik dengan alam pegunungan, sebagai penakluk dan pewaris alam. Kerasnya pegunungan menjadikan mereka keras, tidak mengenal kompromi, fair dan gentlemen dengan selalu melakukan tindakan preventif dalam semua kegiatannya.

Kelompok kedua dari penduduk asli adalah suku bangsa Kamoro sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di pantai selatan Papua. Merekalah yang mempunyai hak ulayat atas tanah rawa dan pantai serta aliran sungai di sekitarnya. Mata pencaharian pokoknya berburu dan meramu. Permukiman tidak menetap, sehingga kehidupannya tergantung alam seperti ketersediaan sagu, babi, ikan, udang, kepiting dan lain-lain.

Seiring dengan pembangunan yang berjalan, suku Kamoro merasa harus mengikuti keberadaan hidup yang semi nomaden, populasi mereka harus dihitung, anak-anak disekolahkan, dikenakan pajak dan dikontrol. Suku bangsa ini selama beberapa dekade telah memiliki hubungan dagang terbatas dengan suku bangsa lain yang berasal dari wilayah Indonesia bagian Barat seiring dengan keberadaan pemerintah kolonial Belanda dan penyebaran agama Nasrani.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1958 pemerintah memulai proyek permukiman dan pengembangan pertanian dengan membuka pos pemerintahan yang terdiri dari pamong praja, polisi, mantri kesehatan, bidan, penyuluh pertanian, guru dan tukang. Perpindahan ke Timika pun dilakukan dengan

alasan akan memperluas kota Tembagapura di Lembah Waa, dan alasan keamanan akibat konflik antara TNI dengan OPM. Kelompok pertama yang dipindahkan dimulai tahun 1960-an dari Lembah Tsinga dan Noema pindah ke daerah Agimuga. Kelompok kedua dimulai tahun 1973 dari Lembah Waa, Agimuga dan daerah lainnya ke wilayah Timika, terutama di Kwamki Lama dan Kwamki Baru.



*Ekspresi salah satu suku asli Papua saat perhelatan PON XX di Mimika. (Foto: Ronny A. Buol)*

Kelompok yang masuk ke wilayah Timika dipimpin oleh Yohanes Kapiyau. Perpindahan dilakukan lebih dikarenakan faktor alam dan penyakit. Faktor alam karena tempat tinggal suku bangsa tersebut di pegunungan yang menyulitkan dalam komunikasi dan pembinaan. Munculnya penyakit frambusia (yaws) yang menyerang sebagian besar penduduk setempat juga menjadi alasannya. Selain itu agar mendapat kemudahan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan perbaikan ekonomi.

### **Program Transmigrasi Pemerintah Pusat**

Program transmigrasi pemerintah pusat juga dilakukan di Mimika. Penempatan transmigrasi pertama terjadi pada 16

November 1986 di Satuan Permukiman (SP) 1 dengan jumlah penduduk 156 jiwa. Sekarang SP 1 telah menjadi Desa Kamoro Jaya. Setelah itu unit permukiman transmigrasi terus bertambah menjadi 13 SP. Mulai tahun 1986 hingga 1999 jumlah penduduk yang masuk melalui program ini mencapai 15.794 jiwa.

Pembagian kuota penempatan dilakukan dengan cara 80 persen dari daerah asal atau luar daerah dan 20 persen dari penduduk setempat. Kecuali dua SP yang ditempati penduduk setempat yaitu SP 8 Kaugapu ditempati suku bangsa Kamoro, dan SP 12 Utik ditempati suku bangsa Dani, Damal, Moni dan Mee atau Ekari.

“Jumlah penduduk Jawa di Mimika, belum selesai dihitung, sementara kita dalam proses kerjasama dengan Capil (kantor catatan sipil *-red*). Tapi, selama ini yang diklaim ada sekitar 20-30 ribu jiwa. Itu Jawa keseluruhan dari 6 provinsi. Tapi kalau perkiraan kami sudah ada. Sebab, awal-awal KKJB dibentuk, sudah ada 10.000 KTA terkumpul hanya setahun saja,” jelas Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB), Syaikuri saat ditemui di Sekretariat KKJB, Kamis, (9/12/2021).

Suku Jawa di Mimika datang dengan cara beragam, dari suka rela, ikut keluarga, hingga lewat program transmigrasi. Keinginan untuk silaturahmi dari komunitas ke komunitas, titik ke titik, SP ke SP, mendorong awal terbentuknya KKJB. KKJB merupakan induk 35 paguyuban komunitas kecil Jawa di Mimika. Menyebarkan hampir di semua sektor, dengan tujuan utama yaitu kerukunan.

“Jika diri sendiri rukun, maka dengan orang lain rukun. Dari sini toleransi terus kita bangun, hingga kita mulai mengawal gereja-gereja yang sedang melakukan ibadah saat natal. Kan kalau aman, pasti juga berdampak di ekonomi,” kata Syaikuri.

Syaikuri menjelaskan, tidak ada rekrutmen khusus untuk masuk jadi anggota KKJB. Persatuan dan semangat toleransi yang menjadi penyatu. Bahkan, beberapa anggota ada yang bukan dari suku Jawa.

“Ada yang namanya anggota luar biasa. Kami menyadari dengan organisasi lebih mempermudah koordinasi, baik koordinasi antar suku, maupun dengan pihak aparat keamanan, terkait dengan penyelesaian jika ada konflik,” jelas Syaikuri.

Kedatangan penduduk pendatang hanya diketahui dari

keterangan tokoh masyarakat. “Mungkin sekarang sudah ada hasil penelitian, atau buku-buku. Tapi, saya sendiri hanya tahu dari keterangan dan cerita-cerita tokoh masyarakat yang ada di sini,” kata Syaikuri.



*Pengurus Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu Kabupaten Mimika berfoto usai diwawancarai. (Foto: Neno Karlina Paputungan)*

Penduduk pendatang terbagi atas dua kelompok. Pertama, masyarakat Indonesia lainnya seperti pegawai pemerintahan dan pegawai swasta, anggota ABRI dan polisi, pedagang dan sebagainya. Kedatangan mereka karena pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan perusahaan dan penugasan sebagai pegawai negeri untuk instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagian dari masyarakat Indonesia lainnya ada yang datang secara spontan karena mengikuti saudaranya atau mencari peluang kerja. Kelompok kedua merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari negara asing.

Penduduk pendatang ini ada yang sudah menetap sejak lama berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan penyebaran agama Nasrani di daerah Papua bagian selatan. Mereka terdiri dari rombongan missionaris dan zending, kebanyakan berasal dari Eropa dengan pekerjaan antara lain; pendeta, penginjil, pekerja sosial dan sebagainya.

Sejak dibukanya pertambangan makin banyak orang asing yang datang sebagai pekerja di PTFI dan di berbagai perusahaan kontraktornya. Mereka berasal antara lain dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Filipina dan sebagainya. Kedatangannya bersifat temporer biasanya berdasarkan ikatan kerja atau kontrak kerja. Pertambahan penduduk asing selalu menunjukkan peningkatan karena jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pergantian tenaga asing secara berkala.

Sejauh ini interaksi penduduk asli dan penduduk pendatang hanya berdasarkan kepentingan ekonomi. Seperti suku Makassar dan Bugis yang bergerak di sektor perdagangan, melayani pembelian barang dagangan dari seluruh suku bangsa yang ada di Mimika. Sedangkan suku lainnya juga mengambil bagian dalam aktivitas perekonomian.

“Bisa dibilang yang membuka sektor ekonomi di Timika ini termasuk orang Bugis Makassar, kemudian datang orang Cina yang saling menopang. Tapi, kalau bicara ekonomi strukturnya, ya 95 persen uangnya dari PTFI,” ucap mantan anggota DPRD Mimika sekaligus Ketua Keluarga Bugis Sidrap, Munawir Yakub, saat ditemui di kediamannya, Kamis, (9/12/2021).



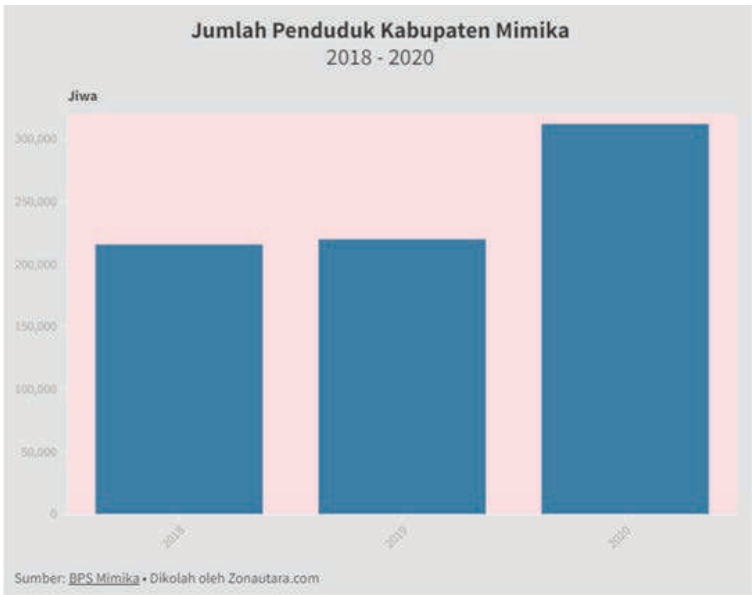
*Ketua Keluarga Bugis Sidrap, Munawir Yakub saat diwawancarai. (Foto: Neno Karlina Paputungan)*

Munawir bercerita, pertama kali datang ke tanah Papua tahun 1988, tapi saat itu masih menetap di Jayapura karena ikut orangtua. Lalu kemudian pulang kuliah ke Makassar. Tahun 1993 balik lagi ke Jayapura dan memutuskan pindah ke Timika.

“Waktu itu, Timika masih berstatus sebagai desa. Saya memilih Timika karena ikut kakak yang sudah lebih dulu membuka usaha di sini. Setelah saya mendapat pengalaman, saya mencoba hidup mandiri,” kenang Munawir.

Munawir yang juga Ketua 1 Kerukunan Keluarga Sulsel (KKSS) ini, membangun usaha sendiri sejak 1999, dan pada tahun 2000 ikut partai politik. Ia menjadi sekertaris partai dan pada tahun 2004 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mimika sampai tahun 2009.

“Saya tidak tahu, saya terpilih karena sudah banyak orang Sulsel di Mimika atau bagaimana. Tapi bagi saya itulah kesempatan membangun Mimika. Setelah itu saya tidak lagi mencalonkan diri, tapi pada tahun ini (2021) saya masuk lagi, saya sudah menjadi ketua partai di partai baru,” jelas Munawir.



Berbeda dengan Munawir, Matuis Sedan, Sekertaris Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Mimika mengisahkan, dirinya baru berada di Timika sejak tahun 1997. Pada saat itu, Matius mengatakan orang Toraja masih masih sangat sedikit. Pendatang yang banyak hanya orang-orang yang bekerja di Tembagapura (PTFI).

“Kita baru beberapa keluarga saja,” kata Matius.

Sekarang jumlah masyarakat Toraja di Mimika sudah sekitar 15 ribu jiwa, dan sudah bekerja lintas sektor. “Ada yang PNS, pengusaha, petani, tukang, peternak. Tapi mayoritas Toraja di sini adalah pengusaha babi,” ucap Matius.

Selain suku Jawa, Makassar dan Toraja, kini berbagai suku lainnya seperti suku Minahasa dan Ambon juga berdatangan ke Mimika dengan berbagai alasan, terutama mencari peluang kerja. Mimika, terutama wilayah perkotaan dan daerah pertambangan menjadi daya tarik yang kuat bagi pencari kerja dan pedagangan.

### 3.

## Ketimpangan di Kota Dolar<sup>3</sup>

Oleh: Kristina N. Rejang



RUMAH - Kondisi rumah keliuarga longginus Ainiu di Pomako. Foto: Kristin Rejang/ Seputarpapua

*Awal Desember, langit Mimika cerah padahal beberapa hari sebelumnya terus diguyur hujan. Seorang pria dengan rambut sedikit memutih, sibuk memperbaiki atap rumah berbahan seng dan daun sagu yang sudah mulai bocor karena bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.*

Pria tersebut adalah Longginus Ainiu (50) Putra asli Kamoro yang merupakan warga RT9 Kampung Pomako. Tahun 2002, ia bersama istri dan dua anaknya keluar dari kampung halamannya, Timika Pantai mencoba mengubah hidupnya di Kota Mimika.

Terhitung sudah 19 tahun Longginus tinggal di Pomako.

---

<sup>3</sup> Tulisan ini terbit di seputarpapua.com pada 25 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Hingga Longginus memiliki lima cucu dari dua anaknya mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah panggung bertiang kayu mangrove, berdinding tripleks, dan terpal. Rumah tersebut dibuat Longginus di atas tanah milik salah satu pengusaha dari luar Papua.

Di Timika, ada dua suku besar yakni suku Kamoro yang mendiami pesisir pantai sementara Amungme yang mendiami pegunungan.

Mata pencarian suku Kamoro adalah menjadi nelayan dan pangkur sagu, dengan semboyan 3S (Sagu, Sampan, dan Sungai) yang juga ditekuni oleh Longginus saat masih tinggal di Timika Pantai.

Namun saat pindah di kota, mata pencahariannya tidak ada yang berubah. Ia masih berjuang menjadi peramu tradisional mencari ikan, karaka, udang dan hasilnya dijual ke pengusaha dari luar Papua. Dengan pendapatan Rp100.000 perhari hanya mampu membeli beras. Bahkan untuk membeli sayur dan lauk pauk saja dia kesulitan.

Meski begitu, Longginus mengatakan “Lebih baik tinggal di kota, di kampung tidak bisa pegang uang, di kampung kami sudah tidak ada rumah, ini juga kami tinggal di tanahnya orang, kalau mereka bilang kami pindah ya kami pindah,” ujarnya.

Perdagangan dengan sistem tradisional hingga kini masih terus dipercaya Longginus bisa menghadirkan pendapatan yang mumpuni.

“Ana-ana (Anak-anak) kota dolar dorang,” begitu yang sering dibanggakan oleh anak muda Timika dengan khas dialek Papua, sebab Timika merupakan kota yang kaya akan emas yang dikelola oleh perusahaan asing.

Namun kebanggaan itu tidak dirasakan, dalam kenyataan ketika melihat keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat asli Kabupaten Mimika yang tinggal di Pomako. Mereka tertinggal di tengah pertumbuhan kota Timika yang pesat.

Ibu kota Timika terbilang lebih maju dibanding distrik lain. Mimika terdiri dari 18 distrik, 19 kelurahan dan 133 kampung tersebar dari perkotaan, pegunungan, dan pesisir. Untuk skala lebih besar, meski secara keseluruhan pada Maret 2018, Papua masih tercatat sebagai provinsi dengan angka

kemiskinan tertinggi di Indonesia, namun berdasarkan data BPS, bersama kota Jayapura, kabupaten Mimika termasuk sebagai kabupaten paling baik secara ekonomi. Ini terjadi karena tingkat pendidikan, infrastruktur kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dianggap lebih baik dibanding daerah lainnya di Papua.

Dari ukuran Gini Ratio (angka ketimpangan) pada 2018, Papua mengalami penurunan sebesar 0,013 poin menjadi 0,384. Angka ketimpangan Papua sedikit di bawah angka ketimpangan nasional yang mencapai 0,389. Sementara, di Mimika Gini Ratio justru terus membaik dari 0,33 tahun 2015 menjadi 0,29 pada tahun 2016.

Seiring perkembangan, masyarakat Amungme dan Kamoro harus berjuang untuk melawan zaman.

Di Kota Timika ada 5.647 sarana perdagangan di luar pasar yang rata-rata kepunyaan pendatang dari luar Papua. Untuk di Pasar Sentral, dari 1.908 pedagang hanya 384 orang pedagang Papua, notabene kaum perempuan.

Dari 384 pedagang, hanya 3 pedagang yang menjual bumbu dan sayuran dengan menggunakan lapak yang beratap dan dilengkapi meja. Memang ada juga yang menjual di lapak modern, lapak itu khusus menjual sagu yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sebagian besar berjualan di blok yang disediakan khusus untuk Mama Papua dan ada juga blok khusus penjualan noken.

Mama-mama Papua menjual hasil kebun seperti pakis, daun pepaya, daun petatas, nangka sayur, umbi-umbian (singkong, keladi dan petatas), sagu, noken, buah nanas, lengkuas, sereh, dan daun gatal. Mereka rata-rata berjualan di bawah lantai.

Berjualan di bawah lantai hanya bealaskan karung ini, dipercaya dan memiliki filosofi tradisi dari masyarakat pribumi sebagai bentuk cinta mereka terhadap ibunya yang dipercaya bisa membawa keberuntungan.

Selain itu, semua barang dagangan tidak bisa diletakkan di atas meja lapak. Mereka membutuhkan tempat yang luas. Berjualan pun tidak bisa di tempat yang tersembunyi harus dilihat orang. Sehingga Mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan besar seperti di Budi Utomo, Cenderawasih, SP4 dan beberapa lokasi lainnya.

“Kalau jual di pinggir jalan, orang lihat langsung bisa laku, di pasar itu laku tapi hanya petatas saja, daun gatal orang tidak beli padahal kalau taruh di pinggir jalan begini paling laku,” kata Oni Magai (21) perempuan Amungme dari Kampung Jila.



*Oni Magai sedang menata jualannya di pinggir jalan SP4*

Ada lapak modern yang sudah dibagikan pemerintah, dijual dan disewa kepada pedagang pendatang dari luar Papua.

Namun ada juga pedagang Orang Asli Papua (OAP) yang mampu mempertahankan lapaknya. “Saya tidak mau jual lapak ini, banyak yang jual, saya mau jualan disini juga,” kata Mama Rina Pei asal Paniai, yang saat itu berjualan sayuran sawi, kangkung dan markisa.

Mama Rita Tayaro memilih berjualan hasil perkebunan yang sekali tanam dan terus dipanen, salah satunya salak yang merupakan salah satu buah yang cukup melimpah di daerah Mapurujaya.

“Waktu itu suami masih ada, kami coba taman kangkung, sawi tapi capek bikin bedeng, jadi jual salak saja, sudah satu kali tanam tapi tinggal ambil setiap hari,” kata Rita Tayaro.

Di sana juga sudah tidak terlihat suku Kamoro yang berjejer berjualan sagu dengan khas tumangnya. Tahun 1993

pedagang sagu masih membeli di suku Kamoro dengan harga pertumang Rp400.000.

Kini, pedagang sagu bahkan pedagang asli Papua mau menjual sagu harus membeli di pabrik olahan sagu yang dikelola oleh seorang pengusaha berdarah Jawa. “Sekarang kami beli sagu hanya Rp100 ribu per karung ukuran 20 kilo baru kami jual lagi di Pasar,” Kata Mama Yohana Beide seorang pedagang asal Sarmi-Biak.

Bahkan, buah pinang yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua kini jarang dijual oleh mereka sendiri. Untuk menjual pinang, pedagang OAP juga membeli pinang di beberapa distributor, salah satunya distributor pinang yang beralamat di Pasar Lama milik seorang pengusaha asal Buton yang juga biasa menerima kiriman pinang dari Jayapura.

Meski kini banyak persaingan saat menjual pinang karena sudah banyak pedagang asal luar Papua yang berjualan pinang, namun mereka tetap optimis. “Menurut saya pedagang pendatang ada disini mereka tujuan utama berbisnis, banyak hal baik yang kami belajar dari mereka khususnya dalam berdagang,” kata Henny Kambuaya.

Di Jalan Ahmad Yani Timika, tampak beberapa toko milik pedagang pendatang yang menjual cenderamata khas Papua ada pula yang menjual ukiran ukiran khas Kamoro.

Bayangkan, Kampung Iwaka dicanangkan sebagai Kampung Adat dan Budaya oleh Pemda Mimika namun tidak memiliki makna bagi warga Kampung Iwaka. Pasalnya 150 orang pengukir di Iwaka yang merupakan suku Asli Kamoro sudah mengukir dan menganyam berbagai kerajinan namun ‘bingung’ hendak dipasarkan kemana, akhirnya untuk mengukir, mereka harus memikirkan secara matang.

“Masyarakat sudah semangat ukir tapi tidak tau mau jual kemana, tidak ada galeri khusus untuk masyarakat Kamoro,” kata sekretaris Kampung Iwaka, Yoppy Pattikawa.

Modal pun menjadi kendala dari pedagang Papua, memang mereka menabung, namun Mama Yohana Beide lebih memilih menabung di celengan. Ia juga percaya apa yang laris dihari ini dihabiskan asalkan cukup untuk makan, dan memberikan persepuluhan di gereja, esok bisa dicari lagi.

“Mama mau kalau dapat kesempatan dan dikasih modal berjualan bumbu-bumbu dan sayuran lain yang ambil dari luar

daerah, karena kita mau tapi kendalanya modal,” kata Yohana. Kadang hasil jualan hanya laku Rp150 ribu harus berbagi juga dengan mahalnnya ongkos transportasi yang perhari bisa habis Rp60 ribu perhari, belum harus dibagi dengan untuk makan sehari-hari.

Di Timika, kendaraan umum dalam kota hanya ojek, ada juga layanan taksi SP2-3, Mapurujaya.

Rita Tayaro berpikir dari pada harus bagi hasil dengan mahalnnya ongkos ojek, ia memilih memenuhi kebutuhan transportasi dengan cara menukar sebidang tanah dengan sebuah motor bekas.

“Ada tanah di SP5, kecil saja, saya tukar dengan orang Timur, dia kasih sa motor, sa kasih dia tanah,” katanya.

## Masa Lalu

Keadaan sekarang sangat berbeda dengan kehidupan sebelum tahun 1960 saat belum adanya jalur transportasi. Sebelum masuknya pendatang dan hadirnya PT.Freeport Indonesia, masyarakat Amungme dan Kamoro pernah merasakan merdeka secara ekonomi yang berasal dari alam.

Suku Amungme, suku asli Mimika merupakan suku ‘penakluk’ karena bekerja keras dengan berkebun dan mampu hidup di atas gunung sekitar 2000 – 4000 dpl dengan kemiringan lereng bisa sampai 45 – 50 derajat.

Kala itu, mereka bertahan hidup dari tanaman seperti tebu juga umbi-umbian. Alat berkebun terbuat dari batu khusus yang diambil dari Ugimba (Intan Jaya). Untuk mendapatkan batu tersebut harus melewati gunung dengan berjalan kaki.

Tradisi dari Suku Amungme tidak sepenuhnya nomaden. Mereka punya rumah permanen, namun lahan garapan yang berpindah-pindah. Untuk mencari daging demi memenuhi kebutuhan lauk pauk, masyarakat Amungme biasanya berburu, bukan saja di dataran tinggi namun di dataran rendah.

Hasil buruan juga menjadi barang dagangan mereka, yang dijual kemudian di tukar dengan alat tukar di zaman itu yakni kulit bia (cangkang kerang) yang sulit didapatkan dan tidak mudah ditiru sehingga menjadi berharga. Karena orang Amungme yang lingkungannya tidak ada pantai atau danau, sehingga kulit bia diperoleh dari Danau Paniai.

Untuk mendapatkan kulit bia, mereka harus berdagang,

membantu membangun rumah. Ada juga berdasarkan kesepakatan membuat kebun lalu ditukar dengan kulit bia. Kulit bia juga digunakan untuk membayar harta perempuan

Mereka juga menjalankan bisnis tembakau, melakukan transaksi di Nawaripi dan Manasari dengan masyarakat suku Kamoro. Dari suku Kamoro, suku Amungme menukarkan tembakau dengan kampak, parang dan beberapa alat keterampilan.

Perdagangan lainnya yaitu garam yang didapatkan dari Ugimba yang uniknya ditemukan diatas gunung, garam tersebut digunakan sebagai bumbu masakan hingga kini.

“Kalau kampung saya di Tsinga, harus naik ke Cartenz dibawah gunung Cartenz persis di bawah bibir kolam Grasberg itu mereka lewat disitu baru turun ke Ugimba,” jelas tokoh Amungme dengan latar belakang Sarjana Ekonomi, Menuel John Magal.

Lainnya adalah berdagang busur panah, dibuat di lembah Duma Dama terletak diantara daerah Adminitrasi Kabupaten Mimika, Deiyai dan Paniai, juga gelang dan noken yang dari dulu merupakan barang tradisional bahkan dari Paniai terkenal sehingga noken bagi orang Amungme merupakan makna kehidupan sosial.

“Semua mereka jangkau dengan jalan kaki, alat hitung waktu saat itu menggunakan tali, setiap tidur mereka hitung satu, keluarga di rumah juga bisa ikut hitung, jadi luar biasa perekonomian mereka,” ujarnya.

Saat itu, suku Amungme hidup merdeka dengan alam, tidak ada persaingan, tidak ada ketakutan, juga hal yang menghambat ekonomi. Mereka tidak mengenal raja atau kepala suku semua keputusan adalah kolektif, dan demokratis.

Kehidupan Suku Amungme sedikit berbeda dengan suku Kamoro yang tinggal di pesisir pantai selatan Mimika. Sejak dulu, orang Kamoro menjalani kehidupan nomaden (berpindah-pindah) dengan berperahu serta pangkur sagu, dengan semboyan 3S (sungai, sampan dan sagu).

Suku Kamoro mengenal perdagangan menggunakan uang, saat orang luar Papua masuk sebelum tahun 1940-an dimana alat tukar pada zaman itu menggunakan uang Indiae Batav (IB).

Masyarakat Kamoro saat itu berdagang tali rotan,

kayu masohi dan damar yang diambil dari kali Kamora yang dijual pada pedagang asal China. Mereka juga berdagang kopra (kelapa). Transaksi dilakukan di Namatota, Kaimana dan Kokonao.

Selain orang China, Kamoro juga mengenal berdagang hasil laut dan kebun ketika guru-guru injil mulai datang dan membeli akhirnya bisa menopang kehidupan ekonomi saat itu. “Bagi masyarakat Kamoro alam sudah sediakan semua jadi tidak ada pengaruh misalnya orang bilang ekonomi global, mereka tidak prinsip itu, yang penting bisa makan. Sehingga tentang perdagangan sudah dilakukan sejak dulu jadi tidak kaget lagi dengan perkembangan jaman,” kata Tokoh Kamoro, Marianus Maknaipeku.

## Merantau

Peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan, sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, di Kaimana dan Kokonao mulai menjalin perdagangan yang berpusat di Namatota. Banyak pedagang yang berasal dari suku China, Seram, Buton, Bugis sebenarnya sudah mulai datang namun tidak menetap.

“Bahkan kira-kira tahun 1963 juga sudah ada tentara yang mulai datang ke Mimika, sementara guru-guru injil, perawat misalnya dari Kei, Ambon sudah datang sebelum 1963 ke pesisir Mimika,” kata Cahyo.

Pada tahun 1967 Freeport Indonesia mulai masuk. Memang hingga tahun 1974 masyarakat Amungme yang mendiami pegunungan yang dijadikan areal pertambangan masih merasa asing.

“Jadi awalnya mereka (Amungme) masih menentang, karena ini adalah tanah mereka,” Kata Veronika Kusumaryanti, seorang Antropolog lulusan Harvard AS.

Dalam sejarah terlihat tahun 1974-1977 orang Amungme terus melawan kehadiran Freeport. Namun saat itu, masyarakat tidak bisa berbuat banyak.

Dari kejadian-kejadian tersebut ada keterkejutan budaya (*culture shock*) yang bisa terlihat misalnya sekarang masyarakat Amungme terutama laki-laki sudah banyak meninggalkan pertanian. Sekarang yang bertani justru banyak perempuan,

sementara laki-laki lebih banyak di kota mencari pekerjaan.

Suku Kamoro, reaksi budayanya lebih banyak memilih menjauh dari pusat kota. Kali Ajikwa yang menjadi tempat pembuangan tailing saat ini menjadi tempat pendulangan emas, namun orang Kamoro tidak terlibat sama sekali.

“Jadi culture shock yang diekspresikan oleh orang Kamoro adalah menjauh, jadi orang Kamoro kan kebanyakan tinggal agak jauh dari perkotaan justru mungkin di Pomako ada beberapa komunitas Kamoro. Jadi ekspresinya berbeda beda antara suku Kamoro dengan suku pegunungan seperti Amungme, Nduga dan sebagainya,” kata Veronika.

Dijelaskan masyarakat Suku Kamoro mengambil dari dusun sagu, juga sungai. Jadi, untuk berdagang perempuan Kamoro sudah mulai ikut, tapi untuk laki laki agak susah untuk ikut terlibat dalam usaha usaha yang dilakukan oleh para pendatang dari luar.

“Jadi ini memang model budaya yang sangat berbeda jadi kalau dipaksakan juga untuk orang Kamoro disuruh bertani yah tidak bisa karena tradisinya bukan disitu,” ujarnya.

Juga banyaknya uang membuat orang orang Papua maupun pendatang luar Papua sangat termotivasi. “Jadi semua orang kalau biasa hidup di Timika yah bicaranya uang terus, dan itu berbeda sekali dengan daerah lain,” katanya.

Selain kehadiran Freeport, ada juga program penetapan transmigrasi pertama tahun 1986 di Satuan Pemukiman (SP1). Jumlah penduduk pendatang saat itu adalah 156 jiwa. Kedatangan masyarakat transmigran terus berkembang hingga tahun 1999 jumlah transmigran dengan program pemerintah menjadi 15.794 jiwa hingga tersebar di 13 SP. Memang sudah banyak yang kembali ke daerah asalnya namun ada pula yang masih menetap hingga saat ini.

Banyak pula masyarakat yang datang tanpa program pemerintah dan hingga kini jumlah pendatang diperkirakan 60 persen dari 311.969 jiwa.

Bekerja keras dan berusaha di tanah rantauan memang sudah menjadi asam garam bagi para pendatang. Hartaty Anamofa (47) yang berasal dari Dobo, Maluku, sudah ada di Timika sejak tahun 1997 bersama orang tua yang adalah pebisnis

sembako.

**Tabel Data Jumlah Penduduk Mimika**

Tahun	Jumlah
2015	201.677
2016	205.591
2017	210.413
2018	215.493
2019	219.689
2020	311.969

*Sumber: Bps Mimika*

Tahun 2000 setelah selesaikan study di Makassar, Hartaty kembali ke Timika, berjuang dengan ilmu bisnis dari orang tua, Hartaty yang juga berdarah China ini, berusaha dari nol karena orang tua mengalami sakit. Bermula dari berjualan kue juga ice cream hingga mulai berjualan barang elektronik, namun tak bertahan lama. Tahun 2002 ia mencoba menjadi pemasok sembako ke Agats sambil mencoba berbisnis sirip ikan hiu.

Tantangan, kapal terbakar hingga menimbulkan korban jiwa, rumah habis terlap api. Namun ia teru bangkit dari nol dengan ilmu bisnisnya berawal dari berjualan kue, hingga akhirnya tahun 2010 mulai fokus untuk mencari ikan, kepiting, udang dan hasil laut lainnya di perairan Mimika. Bahkan kini ia menjadi salah satu pengusaha ekspor hasil laut hingga ke Singapura dan China yang sudah mempekerjakan 15 karyawan, juga memiliki beberapa usaha salah satunya rumah makan seafood dan usaha air galon di Pomako.

Hartaty yang dulunya adalah lulusan Teologia, juga mengaku kini ingin mendedikasikan dirinya melayani anak-anak di Pomako. Karena sejak tahun 2010 ia sudah hidup bersama dengan masyarakat Kamoro.

“Saya juga jatuh bangun karena keuangan, cuman pada

dasarnya kita harus menjaga kepercayaan. Hidup sederhana, makan apa adanya, pakai apa adanya, harus tetap bersyukur,” ujarnya.



*Hartaty saat mengajar anak-anak Pomako*

Lainnya adalah Supri asal Lamongan, Jawa Timur yang sudah ikut dengan orang tua tahun 1995 ke Timika dan berdagang. Sempat balik ke Jawa untuk mencari keuntungan disana, namun banyak saingan akhirnya tahun 2018 ia kembali ke Timika mencoba buat usaha warung lalapan hingga tahun 2021 masih tetap berjalan.

“Di Jawa ladangnya banyak, jadi banyak saingan juga makanya mendingan kesini dari pada bertani disana belum ada hasilnya,” ujarnya.

Andi sedikit berbeda, sejak tahun 1995 menjadi Karyawan PT.Freeport Indonesia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan bersama kakaknya membangun warung bakso Aneka Rasa. Awalnya hanya kontrak kini sudah memiliki tempat usaha sendiri bersama dengan sang kakak dengan penghasilan kotor bisa sampai Rp8 juta perhari dan mampu mempekerjakan kurang lebih 10 karyawan.

“Pernah kasih anak Papua gabung kerja, tapi dia keluar sendiri kadang datang kadang tidak. Tapi selama usaha disini masyarakat Papua sangat baik, mereka ramah terhadap kami,” katanya.

Melihat peluang di Papua kebutuhan akan pinang tidak pernah berhenti, Arnia yang merupakan wanita asal Buton menjual pinang sudah 15 tahun. Karena potensi pinang yang begitu menggiurkan, sang suami juga memilih berhenti bekerja sebagai tukang ojek dan bersama Arnia berjualan pinang.

“Dulu saya meskipun perempuan, saya juga pernah ojek. Sekarang jualan pinang, Alhamdulillah penghasilan bersih bisa 3 jutaan perbulan, bisa makan buat rumah dan sekolahkan anak,” ungkapnya.

## 4.

# Kota Bisnis Menjadi Tujuan<sup>4</sup>

Oleh: Kristina N. Rejang



*Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob*

*Mimika yang dijuluki kota 'bisnis' membuat banyak orang datang untuk mencari pekerjaan, selain berbisnis. Timika juga biasa disebut sebagai miniaturnya Indonesia, sebab berbagai suku ada di sini, bahkan suku-suku yang menguasai ekonomi perdagangan di Mimika terbilang cukup banyak.*

Misalnya suku Toraja, yang banyak bergerak di bidang kontraktor, tukang, petani, dan yang paling menonjol adalah kegigihan dalam beternak babi.

“Kami mayoritas pengusaha babi, dan di Timika sesuai dengan pendataan jumlah kami sekitar 15 ribu jiwa,” kata Sekertaris Ikatan kerukunan Toraja (IKT), Matius Sedan.

---

<sup>4</sup> Tulisan terbit di *seputarpapua.com* pada 26 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Matus menjelaskan ia sendiri datang pada tahun 1997. Saat itu masyarakat Toraja masih sedikit, dan lebih banyak bekerja sebagai karyawan Freeport.

Berbeda dengan suku Toraja, suku Jawa di Timika kebanyakan bekerja sebagai distributor ikan, nelayan, pengadaan barang dan jasa, barang konsumsi seperti ice cream, warung makan, penjual ayam, distributor buah-buahan, peternakan sapi, juga terbilang paling sukses dibidang pertanian termasuk menjadi distributor pertanian.

Suku Jawa di Mimika tergabung dalam Kerukungan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB) yang kini sesuai dengan database mereka berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa yang berkumpul menjadi satu. KKJB juga merupakan organisasi Inklusif sehingga terbuka untuk suku mana saja.

Selama KKJB berdiri ada beberapa program yang diterapkan dan diajarkan kepada masyarakat asli Papua namun masih sebatas individu dan lebih banyak di daerah transmigrasi (Satuan Pemukiman) terkait dengan pelatihan menjadi petani, atau peternak.

“KKJB turut membantu pihak keamanan menciptakan ketertiban dan keamanan kota Timika, KKJB juga selalu turun ke jalan menciptakan toleransi dengan berjaga di gereja saat umat Nasrani beribadah,” kata Ketua KKJB Hj. Syaekuri.

Sementara itu, orang Sulawesi Selatan, jumlah mereka di Mimika rata-rata sekitar 100 ribuan yang bergerak di berbagai bidang usaha, misalnya Suku Bugis banyak yang menggeluti usaha jasa kontraktor, bengkel, juga perdagangan misalnya pakaian, dan properti.

Munawir Yakub, ketua harian Badang Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang juga Ketua Bugis Sidrap menjelaskan dirinya sudah ada di Mimika sejak tahun 1999.

Ia datang dengan tangan kosong, belajar menjadi pengusaha hingga akhirnya bisa mandiri dan membuat usaha di bidang jasa kontraktor.

Menjadi pengusaha memang sudah mendarah daging bagi Suku Bugis sehingga tidak ada kesulitan yang berarti ketika merintis usaha di Mimika.

“Kita datang disini hanya membawa bekal pakaian satu atau dua lembar tapi karena ulet membaca situasi membaca

peluang akhirnya Allah kasih kita jalan sedikit sedikit. Banyak disini datang tanpa modal tapi akhirnya bisa kaya,” katanya.

Munawir mengatakan, perhatian dari pihak pendatang untuk masyarakat asli memang masih terbilang secara alamiah atau individual dilakukan sejak dulu, hanya saja secara organisasi belum masuk pada program pemberdayaan untuk ekonomi orang asli Papua (OAP).

“Kalau secara alamiah itu sudah terjadi, secara individual secara pribadi sudah lakukan dari dulu. Dari organisasi kita baru mau masukan program itu,” ucapnya.

## Sinergi

Menurut pihak KKJB, peran pemerintah untuk mengajak kerukunan dalam membantu perekonomian masyarakat asli belum maksimal. Pemerintah harus lebih bersinergi dengan pihak kerukunan misalnya memberikan edukasi bagaimana menjadi petani yang bisa maju.

“Mimika itu tanahnya bagus dan lapang, kalau dikelola dengan baik, bisa ditanami apa saja. Itu belum terpikir oleh pemerintah dengan baik,” jelas Syaekuri.

Banyak peluang usaha di Mimika, pemerintah belum mengelola sesuai dengan kekuatan masyarakat Papua seperti semboyan 3S belum maksimal.

“Itu adalah tugas kita semua untuk mengubah peramu menjadi produsen, anak-anak dari pegunungan memiliki potensi untuk bercocok tanam, pemda harus memiliki big data apa saja potensi yang berkaitan dengan masyarakat Papua,” ungkapnya.

Munawir Yakub, ketua harian Badang Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) mengatakan pemerintah pun sampai saat ini tidak memberikan pekerjaan yang besar kepada masyarakat pemilik tanah Papua.

“Pemerintah belum memberikan kesempatan kepada mereka. Harusnya bisa menunjuk anak Papua sebagai agen distribusi lalu gandeng dengan masyarakat pendatang luar Papua. Kasih masyarakat asli modal, lalu kerjasama dengan pendatang untuk saling membantu memberikan pelatihan misalnya membuat batako atau mebel, jangan memadamkan api dengan cara menyiram saja, sehingga tidak ada pembinaan yang serius,”

“Prinsipnya, kalau mau maju bareng bareng. Saya

berharap pemerintah bisa buat semua masyarakat Papua bisa ambil alih usaha yang selama ini menjadi kekuatan terbesar kaum urban," lanjutnya.

### **Pendapatan Daerah Lebih Dari Empat Triliun**

Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah sama seperti daerah lainnya ada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, PAD lain lain yang sah. Pajak daerah di Timika ada 10 jenis pajak meskipun di undang-undang harusnya 11 jenis namun di Timika tidak ada sarana burung walet. Pajak daerah terdiri dari antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kemudian untuk retribusi di Mimika ada 32 pungutan yang tersebar di beberapa OPD, di antaranya retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, tera ulang, dan persampahan.

Jasa usaha seperti retribusi tempat khusus parkir, kemudian rumah potong hewan, pelelangan ikan, pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pariwisata. Retribusi perizinan tertentu seperti IMB, retribusi ijin trayek, usaha perikanan, tenaga kerja, mempekerjakan tenaga kerja asing.

Itu masih dalam rananya PAD, Pajak, retribusi kemudian PAD lain lain yang sah seperti penerimaan jasa giro, penjualan aset Daerah yang tidak bisa dipisahkan, kemudian pendapatan denda pajak, denda retribusi dan deposito pendapatan dari pengembalian. Kemudian masuk pada dana perimbangan, dana perimbangan dana penerimaan bukan pajak dan Penerimaan bukan pajak.

Diantaranya adalah bagi hasil pajak bumi dan bangunan yang banyak dari Freeport, bagi hasil PPH pun dari Freeport, bagi hasil bukan pajak yakni royalty Freeport kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dan otsus.

Semua pendapatan daerah Kabupaten Mimika, yang terbanyak adalah dari dana perimbangan khususnya dari

PT.Freeport Indonesia.

“Memang karakter daerah tambang seperti itu nggak mungkin daerah tambang PAD nya lebih besar. Daerah tambang itu biasanya di perkotaan itu dana perimbangan yang besar, kita dapat dari royalti, PBB pertambangannya apalagi kita berubah KK menjadi IUPK naik lagi pendapatan sehingga presentase pendapatan untuk dana perimbangan sekitar 80-90 persen, sementara lainnya adalah murni dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi,” jelas Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa.

Pendapatan Pemda Mimika setiap tahun terus naik. Tahun 2021 Pemda Mimika berhasil mengumpulkan pendapatan sebanyak Rp4.368.311.355.196,50 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3.529.549.232.316,50.

Pendapatan yang sudah cukup tinggi, namun Dwi mengatakan pendapatan akan semakin naik jika ada perkembangan kota dimana salah satunya harus ada investor yang masuk ke Mimika.

“Misalnya orang bangun pabrik ini kan di tanah, pengadaan tanahnya jangan dipersulit, misalnya di Eks Pasar lama, kalau ada hotel berbintang yang masuk misalnya bangun hotel berbintang kan kita bisa dapat (PAD) dari situ, tapi ini bukan Bapenda saja yang bergerak harus ada stakeholder lainnya juga,” katanya.

Selain itu harus lebih intensif mengenai tunggakan, pemeriksaan pajak, monitoring juga untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bayar pajak dengan sosialisasi dan tatap muka. Karena kondisi Covid 19, sosialisasi tersebut hanya bisa dilakukan melalui media sosial.

Diakui memang para pendatang khususnya dari luar Papua juga turut serta dalam pembangunan ekonomi di Mimika karena banyak usaha yang dominan dijalankan oleh mereka. Namun di samping itu juga ada masyarakat Papua juga memiliki kontribusi dan andil melalui usaha kontraktor.

“Intinya kewajiban membayar pajak ini tidak melihat pendatang dan lainnya. Semuanya wajib. Makanya kesadaran wajib pajak itu yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Saat ini pihaknya belum melihat potensi pendapatan langsung di daerah pesisir karena semua harus diperhitungkan dengan baik. “Semua harus hitung hitungan, Kalau hitung

hitungannya mines semua yah mines, karena harus dilihat transportasinya, peluang apa yang ada disana,” katanya

Untuk itu ia mengatakan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan bagi Pemda Mimika membutuhkan banyak stakeholder.

### Ekonomi Masih Fokus Satu Harga

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yohana Paliling menjelaskan di tahun 2022 ini, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah pemulihan ekonomi pasca Covid.

“Itu kita serius jadi untuk 2022 anggaran disitu cukup besar terutama dari dana otsus karena memang itu dikhususkan untuk masyarakat OAP yang ada di pesisir dan pegunungan, Bagaimana supaya masyarakat yang jauh dari kota mendapatkan akses yang baik terutama untuk bahan pokok,” katanya.

Sehingga tahun ini Yohana mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa sektor ekonomi yang ada, misalnya Dinas Koperasi dan Disperindag juga Perhubungan. “Paling tidak kita satu harga. Kita subsidilah untuk masyarakat pesisir dan pegunungan. Ini yang sedang diupayakan,” katanya.

“Memang dengan adanya Covid pengaruh sebenarnya di masyarakat pesisir dan gunung tidak ada Covid tapi berdampak diharga dan aktifitas masyarakat terbatas,” lanjutnya.

**Tabel Distribusi Presentase Produk Domestik Bruto Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha**

Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	6.29	2.76	0.70	0.10	-2.22
B Pertambangan dan Pengalihan/Mining and Quarrying	14.42	3.44	11.07	-44.64	15.84
C Industri Pengolahan/Manufacturing	7.69	8.01	6.48	-5.62	-0.46
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	3.14	4.38	4.22	5.52	0.29

E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2.42	2.50	0.57	-2.15	-0.79
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	12.10	7.20	6.88	13.30	-4.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7.20	6.54	5.23	4.97	-1.81
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7.59	7.19	5.18	5.41	-37.91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6.19	6.54	5.73	4.92	-17.33
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4.65	4.93	4.06	1.67	3.20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5.62	2.65	-2.46	0.81	1.19

Sumber: Data BPS (Mimika dalam angka)

Harmonisasi kegiatan di bidang ekonomi memang sudah ada seperti Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan dan lainnya yang membidangi ekonomi, namun masih akan dirubah polanya agar kegiatan yang dilakukan tidak bertumpuk pada satu daerah atau kampung saja.

“Jadi urusan kegiatan tidak bersinggungan sehingga pelayanan ke masyarakat lebih merata dari sisi pembangunan bidang ekonomi,” kata Yohana.

Dikatakan, saat ini ekonomi tetap berjalan, begitupun infrastruktur karena menurutnya, infrastruktur menyerap tenaga kerja, dimana saat pembangunan semua aktif, maka pekerja akan mendapatkan upah, otomatis kegiatan ekonomi berjalan.

“Harga di Mimika sekarang fluktuatif mengikuti harga dari luar Timika jika diluar mahal, disini juga akan mahal, sehingga kami berupaya agar orang tidak bawa uangnya keluar dan sekarang sudah bagus, tapi sekarang kita mau cari apa saja di Timika ada, dulu kan tidak, rata-rata sekarang harganya juga tidak jauh berbeda,” ujarnya.

## **Pemerintah Tidak Maksimal**

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan Ekonomi di Mimika hanya kebetulan karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) besar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, APBD hanya mencapai Rp1,8 triliun. Tahun 2017 naik menjadi Rp2,9 triliun, memasuki 2019 naik ke angka kurang lebih Rp3,1 triliun dan di tahun 2022 sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) adalah sebesar Rp4.4 triliun Lebih.

Menuru Wabup, dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Mimika sudah pasti baik. Namun pada kenyataannya belum maksimal. Karena Mimika sangat heterogen semua budaya, suku, agama semua ada di Mimika.

Ia pun mengakui di Mimika masih banyak orang yang belum sejahtera. APBD Mimika 80 persen dari bidang pertambangan. Dengan adanya APBD yang besar, jika dilihat didalam kota memang pembangunannya sudah luar biasa, bahkan peredaran uang dalam satu hari bisa Rp7 Miliar.

“Jika dilihat dari faktor tersebut memang ekonomi di Mimika cukup tinggi,” katanya.

Johannes mengatakan masyarakat asli Papua di Mimika belum sejahtera dari sisi ekonomi. Masih banyak masyarakat yang hidupnya sebagai nelayan, petani yang dengan konsep ekonomi hari ini jualan dapat hasil habiskan lalu besoknya akan dicari lagi. Sehingga ia mengatakan belum ada keseimbangan antara APBD Mimika dengan kehidupan ekonomi masyarakat asli Mimika.

Ada banyak hal yang membuat tidak adanya keseimbangan hal ini karena masyarakat pribumi belum bisa diperhatikan dengan baik.

“Jika dilihat dengan kasat mata di dalam kota yang memiliki toko besar dan ruko, hanya sebagian kecil karyawan Papua yang bekerja di toko. Sementara mama-mama hanya berjualan di pinggir jalan. Tapi bukan berarti orang Papua tidak ada yang maju, banyak yang maju namun itu jika dilihat didalam kota Timika saja,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah sudah berupaya namun belum dilakukan secara berkesinambungan, misalnya hingga kini nelayan tradisional asli Mimika belum bisa menjadi nelayan modern. Upaya pemerintah hanya sebatas memberikan

perlengkapan alat tangkap, lalu dibiarkan tanpa dibina.

“Masih ada PR besar yang pemerintah perlu mencari solusi, mengenai mental agar bisa bersaing dengan nelayan pendatang, harus ada pendampingan yang luar biasa. Kita belum melakukan itu. Pemerintah harus punya hati, jangan mudah kalah,” kata Wabup.

Menurut Wabup, banyak pola yang harus dibentuk, saat ini mental dan kepercayaan masih melekat pada OAP sehingga solusi dari pemerintah harusnya mengikuti pola dari OAP agar bisa sama-sama maju dan berkembang.

Dengan kata lain pihaknya harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Harus tau mental dari masyarakat pesisir adalah meramu sementara masyarakat gunung sudah biasa kerja keras dengan berkebudun.

Mengenai pendidikan, baik pemerintah, PTFI dan YPMAK sudah memberikan hal pendidikan penuh kepada masyarakat baik Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan. Sisanya adalah pendidikan vokasi.

Banyak teori dan studi yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa ahli, namun pemerintah belum menjalankan. Bukan saja mental masyarakatnya namun mental pemerintah juga perlu untuk diubah.

Sistem yang dilakukan pemerintah saat ini adalah *top down* bukan *bottom up*. Menurut Wabup, sistem *top down* memang bisa dilaksanakan namun tidak dalam konteks kepentingan individu.

“Struktur anggaran kita belum menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga kalau begitu terus masyarakat akan terus begini,” ungkapnya. “Keadilan ekonomi. Mental dari pemerintah dan masyarakat yang memang harus sama sama dibangun. Menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat bukan menganggarkan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah. Sehingga penganggaran masih belum tepat sasaran,” lanjutnya.

Dikatakan ekonomi di Mimika bagus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan angka yang baik dimana sesuai dengan data BPS Kabupaten Mimika selama periode 2017–2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Mimika sebesar 72,42, secara perlahan

bergerak naik hingga IPM Kabupaten Mimika mencapai 74,48 pada tahun 2021.

**Tabel Nilai Komponen IPM Kabupaten Mimika 2017-2021**

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	71,93	9,54	11,48	11.591	72,42
2018	72,06	9,76	11,77	11.700	73,15
2019	72,27	9,91	12,17	12.035	74,13
2020	72,32	10,17	12,4	11.431	74,19
2021	72,36	10,18	12,69	11.400	74,48

Sumber: BPS Kabupaten Mimika

Namun, kata Wabup pemerintah belum maksimal melihat kebutuhan 18 distrik yang ada di Mimika, dengan kondisi topografi dan geografinya. Bahkan sampai saat ini transportasi umum di dalam kota saja tidak ada, apalagi ke pesisir. Untuk di pegunungan memang lapangan terbang di beberapa daerah sudah ada.

Satu visi misi Bupati bersama Wakil Bupati yang menjadi program prioritas adalah aksesibilitas menumbuhkan ekonomi baru yang ternyata belum dilaksanakan yang kemudian berujung orang di kampung semua harus datang ke kota untuk mencari kehidupan.

Untuk keterwakilan OAP di pemerintahan Wabup menjelaskan komposisinya masih 30 : 70 persen, 70 persen adalah pendatang. Untuk struktur orang yang memiliki jabatan 80 persen adalah pendatang luar Papua sementara 20 persennya adalah OAP.

Dalam mengontrol pendatang masuk ke Mimika secara spesifik, pemerintah tidak melakukan itu. Namun menunggu jika sudah masuk lalu nantinya akan didata.

Pendatang dari luar Papua, mereka datang sebagai pengusaha yang tadinya tidak punya apa apa, akhirnya bisa berkembang sehingga kata Wabup dalam hal ini, tidak bisa salahkan masyarakat pendatang karena mereka juga berjuang mencari hidup dengan inovasi dan kreativitas. Sementara Masyarakat OAP belum bisa bersaing di bidang perdagangan.

“Apakah kita mau biarkan masyarakat kita terus tergeser dia punya hidup di lumbung padi yang besar ini tapi dia tidak bisa punya apa apa,” lanjutnya.

Hingga kini juga untuk regulasi yang mengatur mengenai perekonomian OAP juga belum ada.

“Ekonomi kita saat ini dengan uang banyak kita belum sejahtera khususnya masyarakat asli. APBD kita tidak mampu ada dana otsus bagaimana masyarakat diperdayakan, dididik, dibina supaya kalau bisa jadi pengusaha bahkan bisa jadi eksportir. Penuhi kebutuhan bukan mendiskriminasi mereka,” pungkasnya.

Catatan-catatan tersebut kata Wakil Bupati, masih sementara diperjuangkan sehingga nantinya ia berharap pihaknya bisa bekerja lebih keras untuk mencapai kekurangan-kekurangan tersebut.

### **Ironi Freeport**

Berdasarkan data Kantor Bea Cukai Amamapare Mimika, pada tahun 2019 penerimaan negara dari hasil ekspor tambang sebesar Rp1.156.842.924.000, tahun 2020 angkanya naik Rp1.694.394.548.716, dan pada tahun 2021 bea cukai berhasil mengumpulkan pundi-pundi penghasilan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebesar Rp3.107.207.243.818.

Vice President Industrial Relations PTFI, Demi Magai menjelaskan memang produksi tambang di Freeport semakin meningkat. Namun dari tahun 2016, 2017 kemudian masuk ke tahun 2018 ada penurunan sebab berkaitan dengan Kontrak Karya (KK) dan IUPK.

“Target produksi saat ini adalah tembaga yang lebih banyak sekitar 22 ton per hari, sementara emas masih dibawahnya, tahun 2018 bonus produktifitas tembaga (untuk karyawan) sama dengan emas karena sekarang emas dibawah produksi tembaga,” jelasnya.

Demi mengatakan tembaga di Freeport merupakan tembaga terbaik kelas dunia. Saat ini operasi tambang terbuka sudah ditutup pihak Freeport sementara melakukan pengelolaan lingkungan dan penghijauan kembali.

“Tambang DOZ juga sudah tutup, sekarang yang beroperasi adalah tambang underground GBC, DMLZ dan Kucing Liar,” jelasnya.

Demi mengungkapkan, di Mimika termasuk Provinsi Papua, Freeport berperan sebagai penyumbang terbanyak. “Kehadiran Freeport positif sekali tentu memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” kata Demi.

Dijelaskan untuk keterwakilan karyawan asli Papua, Demi mengatakan dari 7.700 karyawan Freeport permanen diluar kontraktor ada 40 persen adalah karyawan asli Papua. Angka tersebut sudah dikurangi dengan 1.200 karyawan Papua yang ikut dalam mogok kerja beberapa tahun lalu.

Sementara yang duduk di posisi strategis ada 9 orang senior manajemen asli Papua termasuk Demi Magai, satu orang adalah Direktur yakni Claus Wamafma.

Sebagai putra Papua yang termasuk dalam 7 suku ia berharap pendapatan daerah khususnya yang diperoleh dari Freeport bisa bermanfaat bagi semua stakeholder khususnya bagi Kabupaten Mimika.

“Putra daerah harus punya planing yang jelas, harus tau arah pembangunan kelolanya kemana. Dan kepemimpinan harus terus kerjasama dengan Freeport, mungkin selama ini masih belum maksimal namun Freeport terus berkomitmen untuk bisa menjalin kerjasama dengan Pemda karena sudah mejadi kewajiban Freeport harus memberikan kontribusi,” ujarnya.

Ia berharap pemimpin daerah bisa menjadi pemimpin yang transparan dan memiliki komitmen untuk membangun Mimika.

## 5.

# Sumur Minyak Untuk Negara, Air Sungai untuk Masyarakat<sup>5</sup>

Oleh: Reiner Brabar



*Pompa minyak di Klamono. (Reiner Brabar - SP)*

*Masyarakat adat suku Moi terabaikan di atas kekayaan alam negerinya. Meskipun Sorong merupakan daerah pengasilan minyak bumi di ujung timur Indonesia, namun realita kehidupan masyarakat adat selaku pemilik negeri masih jauh dari kata sejahtera.*

---

<sup>5</sup> Tulisan ini terbit di [suarapapua.com](http://suarapapua.com) pada 28 Januari 2022 dengan judul "Perusahaan Hancurkan Sumber Kehidupan Masyarakat Moi"

Seiring waktu, berbagai perusahaan kelapa sawit mulai beroperasi di wilayah kepala burung Tanah Papua dengan dalil mensejahterahkan masyarakat, namun kenyataan justru tanah adat mereka rusak serta masyarakat adat itu sendiri diabaikan pihak-pihak perusahaan.

Silas Ongge Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang di temui *suarapapua.com* pada Sabtu (8/1/2022) di rumahnya mengatakan, Sekitar tahun 2000-an perusahaan kelapa sawit mulai beroperasi di beberapa wilayah seperti Distrik Klamono, Salawati, Segun dan Klawak.

Menurutnya, empat perusahaan yang beroperasi itu yakni PT Papua Lestari Abadi di Distrik Segun dengan luas lahan 15.631 ha, PT Cipta Papua Plantation di Distrik Mariat dan Sayosa dengan luas lahan 15.671 ha, PT Sorong Agrisawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono dengan luas lahan 40.000 ha, serta PT Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun dengan luas lahan 34.400 ha.

“Di tahun 2000-an ada empat perusahaan yang masuk tanpa ijin yang jelas di wilayah adat suku Moi,” ungkap Silas Ongge Kalami kepada *suarapapua.com* pada Kamis (27/1/2022)

Di sejumlah wilayah, menurut pengalaman Silas Ongge Kalami, masyarakat adat mengaku tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pelepasan lahan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Proses ini jelas tidak demokratis.

Perubahan dilakukan, khususnya di Sorong saat ini, karena mereka memiliki Perda 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Moi. Aturan lokal ini mengakomodasi prinsip-prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan.

“Pemerintah daerah, perusahaan atau investor yang membutuhkan tanah, harus memberikan penjelasan kepada masyarakat adat, mereka mau atau tidak menerima sebuah program pembangunan. Masyarakat adat berhak menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain,” jelas Silas.

Oktovianus Kolin, kepala distrik Klamono mengatakan air bersih merupakan salah satu tingkat kesulitan yang di rasakan masyarakat di Klamono sendiri. “Masyarakat selama ini hanya andalkan air hujan, Dalam tahun ini masyarakat sudah

harus menikmati air bersih,selama ini hanya lewat di program pamsismas tetapi saya rasa itu hanya program jangka pendek. Sebagai anak yang lahir di Klamono saya tegaskan kepada pihak Pertamina agar secepatnya membangun air bersih di Klamono,” tegas Kepala Distrik Klamono, Selasa (11/1/2022).

Sementara itu, Manase Fadan, tokoh adat Suku Moi menambahkan, sejak 1935 perusahaan penjajah Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NGPPM) memasuki wilayah Kepala Burung Tanah Papua, yakni wilayah Sorong. Sejak saat itu kehidupan masyarakat adat Suku Moi dengan hutan adat mereka di daerah Klamono mulai terabaikan. Janji-janji yang di sampaikan kepada masyarakat adat hingga sampai saat tidak terwujudkan.

“Dulu perusahaan berjanji akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Klamono namun kenyataan hanya mimpi. Karyawan pertamina dapat menggunakan air bersih namun kami masyarakat menggunakan air kali (sungai) untuk masak dan minum hingga saat ini,” kata Manase Fadan kepada suarapapua.com saat jumpa di kampung Klawana distrik Klamono.

Manase Fadan juga mengakui masyarakat di Klamono sangat bersyukur meskipun menggunakan air sungai dari sejak dahulu untuk kebutuhan mereka sehari-hari, namun tidak ada yang menderita penyakit berbahaya. “Kami sangat bersyukur dari dulu kalau sakit paling hanya malaria, demam biasa, untuk penyakit lainnya tidak ada,” jelasnya.



*Sungai Klamono. Airnya sering digunakan untuk keperluan rumah tangga oleh warga (Reiner Brabar - SP)*

Selain itu Manase Fadan juga menjelaskan, air sungai Klasafe yang sering digunakan harus disaring terlebih dahulu sebelum digunakan karena keruh. “Kalau hujan masyarakat bisa menampungnya, jika punya uang bisa beli mesin (messin pompa air/Sanyo) dengan harga sekitar Rp.300.00-750.00 guna untuk sedot air dari sungai, kalau tidak biasa masyarakat menggunakan ember untuk menggangkutnya dan di tampung dalam drum atau loyang-loyang. Kemudian disaring dengan cara manual agar jernih dan bisa di gunakan. Jarak sungai hanya sekitar 5-10 meter dari perumahan masyarakat.

Esau Klagilit, kordinator Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) wilayah Moi Sigin menjelaskan, hutan mulai ditebang dengan skala besar untuk pemukiman warga transmigrasi. Perusahaan kayu ilegal logging masuk dan menjual kayu Merbau sebagai ciri khas hutan di wilayah tersebut. Tahun demi tahun kian habis dijual ke luar.

“Coba lihat itu lahan di sepanjang jalan ketika masuk hingga kedalam, tidak ada lagi pohon atau hutan seperti yang kamu lihat. Kayu merbau habis, penambangan liar marak. Sangat sulit menjumpai pohon-pohon kayu yang besar. Yang ada semak belukar dan gersang,” ujarnya menjelaskan wilayah di Distrik Moi Seigin.

Pada tahun 2006, iming-iming pendirian kebun untuk tanam sawit dikatakan sebagai solusi bagi warga untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layakpun masuk. Dimana perluasan penebangan hutan makin marak di tahun 2008, yang diberikan oleh 4 marga yang ada. Hal ini kemudian untuk setiap tahunnya diikuti oleh marga lainnya, karena tergiur dengan harapan yang dijanjikan dari hasil sawit dan semacamnya.

“Awalnya, sosialisasi pertemuan dilakukan oleh 4 marga, kemudian 12 marga dan seterusnya demikian diikuti oleh marga-marga lainnya,” papar Esau.

Pengambilan lahan adat tersebut dilakukan dengan upacara adat dan pembayaran, pembangunan rumah sebagai perjanjian yang belakangan membawa petaka bagi kehidupan warga itu sendiri. Ketika itu, 1 hektar lahan digantikan rumah 4x5 meter semi permanen dengan bangunan ala kadarnya (tanpa cor yang kuat).

“Sebab, kenyataannya realisasi semua hal itu tidak lagi sesuai dengan perjanjian itu sendiri,” ujarnya.

“Hingga kini dampak lingkungan tersebut belum pernah ada solusi. Warga tidak bisa mengadu dan mengekspresikan penderitaannya kepada pihak manapun apa lagi kepada perusahaan,” ujarnya.

Sementara hal lainnya yang tak kalah menambah mirisnya penderitaan warga adat. Keberadaan kebun sawit dimana tanah mereka sendiri, warga adat banyak yang menjadi buruh kebun sawit. Dua tahun terakhir sebanyak 500 buruh di PHK yang hingga kini asih menyisakan persoalan yang belum tuntas.

“PT Inti Kebun Sejaterah belum membayarkan hak mereka,” imbuh Esau.

Sebagai penerus dan warga adat ia dan barisan pemuda lainnya serta pihak-pihak yang mendukung kini sedang menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak mereka. “Kini kami sedang pengumpulan data untuk menuntut PT IKS,” katanya.

Berdasarkan hasil advokasi yang mereka lakukan, Esau menjelaskan pihak perusahaan lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar tanah Papua seperti dari Jawa, NTT dan beberapa wilayah lainnya di luar tanah Papua. “Orang Moi di sini hanya jadi buruh kasar. Kebanyakan karyawan kelapa sawit itu orang luar semua,” katanya.

Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya, kemakmuran di setiap zaman itu tak pernah mampir ke komunitas masyarakat Adat sebagai, pemilik kawasan/wilayah adat tempat semua industri itu berdiri.

“Berapa banyak orang Moi yang menjadi pilot, dokter bahkan profesor, adakah pendidikan dan kesehatan gratis bagi pemilik hak ulayat,” tanya Feki Wilson Mobalen.

Lanjut Feki Mobalen, perlindungan terhadap masyarakat adat juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2).

“Perusahaan Sawit tidak pernah patuh terhadap undang-undang,” katanya.



*Feki Wilson Mobalen, Ketua AMAN Sorong Raya. (Reiner Brabar - Suara Papua)*

Kendati telah diakui oleh negara, namun AMAN menjelaskan bahwa masyarakat adat Suku Moi di Sorong masih menjadi korban di kawasan hutan adat. Kawasan-kawasan ini adalah wilayah yang memiliki alas hukum yang kokoh dikuasi turun temurun sebelum adanya negara hingga kelahiran negara.

“Namun, pengakuan atas hak masyarakat Adat hanya selesai secara teori hukum. implementasinya di lapangan lain cerita. Industri alih-alih membuat komunitas adat dan warga sejahtera, malah jadi sengsara di wilayah adat mereka sendiri,” tegas Feki Wilson Mobalen.

Terpisah Frangky Samperante, Direktur eksekutif Yayasan Pusaka mengatakan, ada dua jenis konflik tanah adat di Papua, termasuk dialami masyarakat adat Moi, pertama, konflik saling klaim dan rebutan penguasaan pemilikan atas tanah antara masyarakat adat, dengan kepentingan pribadi dan kelompok; kedua, konflik struktural, pemerintah menerbitkan izin-izin usaha pada tanah dan hutan adat, dengan motif ekonomi, pengembangan proyek-proyek usaha skala luas.

“Saling klaim menyebabkan masyarakat sendiri menjadi korban. Keterlibat Pusaka dalam upaya advokasi bersama masyarakat adat Moi dari beberapa wilayah distrik yang sedang bersengketa dengan perusahaan yang sedang dan telah mengambil tanah dan hutan adatnya; strategi dan aksi pusaka melalui tiga jalur, memperkuat dan mendampingi masyarakat adat, mengupayakan adanya pengakuan negara terhadap hak masyarakat, membuat perusahaan menerima dan patuh pada peraturan dan standat terbaik untuk melindungi masyarakat dan lingkungan,” kata Frangky.

## 6.

# Masyarakat Adat Anggai di Tengah Koneksi Sawit<sup>6</sup>

Oleh: Dwi Reinjani

*Iming-iming kesejahteraan tak terealisasi, hutan terus terdegradasi*

Sejak matahari terbit, Fara dan ratusan buruh lain sibuk membersihkan buah sawit matang. Perkakas seperti balok kayu dan arit jadi andalannya saban hari. Pekerjaan ini dilakoninya selama 8 tahun terakhir.

“Pembersihan saja, hanya itu, tidak ada lagi (tugas) yang lain,” kata perempuan 27 tahun ini.

Fara adalah buruh harian di lahan konsesi milik PT Megakarya Jaya Raya yang berada di Kampung Anggai, Distrik Jair, Boven Digoel, Papua. Upahnya Rp140 ribu per hari.

Beberapa bulan lalu, ia kehilangan anak ketiganya saat melahirkan. Proses persalinan dilakukan di rumah karena fasilitas klinik yang disediakan perusahaan dianggap tak memadai.

Opsi ke rumah sakit juga memberatkan karena biayanya mahal dan harus menempuh perjalanan jauh ke kota selama beberapa jam.



Perkebunan sawit di lahan konsesi PT Megakarya Jaya Raya (MJR) seluas hampir 40 hektar, berada di Kampung Anggai, Distrik Jair, Papua. (Foto: KBR/Rei)

---

<sup>6</sup> Tulisan ini disiarkan di jaringan KBR pada 28 Januari 2022

“Di rumah, dibantu ibu kader, bukan (bidan). Tidak ada (bantuan perusahaan),” ungkapnya.

Ketersediaan faskes yang layak merupakan salah satu dari banyak janji perusahaan yang belum terpenuhi. Padahal, risiko kecelakaan kerja cukup tinggi, misalnya serangan binatang buas.

“Ada babi mengamuk, babi itu menggigit. Kasihan ada satu pekerja meninggal. Babi dan ular sama (berbahaya),” ujar Ema yang juga buruh harian.

Hal ini diperparah dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang berstatus non-aktif, meski gaji mereka saban bulan dipotong untuk iuran.

“Kalau diobati di sini (klinik) tidak bayar. Kalau dirujuk ke Boven Digoel bayar sendiri. Jadi waktu kita gajian kan potong BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Tapi BPJS Kesehatan-nya sudah mati,” lanjut Ema.

### **Tenaga Kerja dan Kesejahteraan**

Pada 2012 silam, PT Megakarya Jaya Raya datang ke kampung Anggai dengan menjanjikan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan.

Janji-janji ini yang mendorong sebagian warga melepaskan lahannya. Total hutan adat yang sudah dialihfungsikan oleh perusahaan mencapai 40 ribu hektare.

“Dia (perusahaan) datang dengan gula-gula (janji manis), kasih kita uang minyak, 7 miliar, anggaplah sebagai ucapan permisi. Selain uang, mereka juga siapkan perempuan cantik di rumah kita,” kata Ketua Marga Mabo.

Sebagian janji perusahaan kepada Marga Mabo dipenuhi. Di antaranya, kompensasi pelepasan lahan sebesar Rp7 miliar, gaji ketua adat Rp1,7 juta per bulan serta mempekerjakan warga lokal.

Namun, janji soal kesejahteraan belum terbukti. Ketua Marga Mabo mengatakan, baru pada 2020 buruh harian lepas beralih menjadi buruh harian tetap dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“Kita maunya ada perjanjian kerja yang jelas, tapi sampai sekarang tidak ada. Sementara pimpinan kampung juga tidak bisa bersikap pada perusahaan. Memang perusahaan datang dengan tujuan membantu kami, tapi perjanjian kerja saja

tidak ada,” ujar Ketua Marga Mabo.

Perusahaan juga diduga melakukan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Sebab, warga lokal menempati posisi buruh, sedangkan jabatan lebih tinggi banyak diisi pendatang. Bang Muh, operator alat berat asal Maluku mengakui ketimpangan ini kerap memicu konflik.

“Seringlah (konflik). Sesama kita, operator juga ada rasa iri soal pekerjaan. Misal, anak ya operator gajinya lumayan. Seperti operator buldozer dan excavator itu dapat premi (tambahan) kalau dulu. Mereka bisa dapat gaji dan premi sampai 10 juta,” kata Bang Muh.

Sulitnya akses lapangan kerja bagi warga lokal juga dikonfirmasi melalui riset Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2019. Warga pendatang lebih berpeluang mendapat posisi strategis, kata Peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Rasela Melinda.

“Ke anak kampung satu-satunya yang kerja di kantor, saya tanya, ‘kenapa sesulit itu?’ Dia bilang karena ada penilaian dari mandor atau supervisornya. Biasanya penilaian itu diajukan ke perusahaan, nanti mereka yang evaluasi,” tutur Rasela.



*Seorang anak tengah mencuci kaki di Sungai Kiobo, Desa Anggai yang terlihat keruh. Warga sering memanfaatkan sungai untuk mandi dan mencari ikan. (Foto: KBR/Rei)*

### **Lingkungan Rusak**

Sebagian marga enggan melepas hutan adat karena melihat perusahaan ingkar janji. Salah satunya marga Meanggi.

“Kalau seperti ini ya saya tidak kasih. Kalau nanti dijanjikan lagi? Ya tidak saya kasih. Tetap,” kata ketua marga Meanggi.

Ketua Marga Meanggi menegaskan ingin tetap mempertahankan hutan dan melestarikannya demi anak cucu. Hutan adalah bagian dari identitas masyarakat adat Meanggi, tempat mereka beraktivitas dan menggantungkan hidup.

“(Hewan apa saja yang biasa diburu?) babi, kaswari, tuban, biawak dan ikan. Ada juga pohon sagukan, nah ada ulat sagu, ulat kayu juga. (Jadi hutan itu ibarat pasarnya masyarakat?) iya,” lanjut ketua marga Meanggi.

Sayangnya deforestasi sudah terjadi dan merusak lingkungan. Sejak banyak hutan dibabat, warga kesulitan mendapatkan air bersih, sayur dan sagu. Jarak tempuh ke hutan terdekat pun makin jauh. Menurut Antonia, warga Meanggi, kondisi ini memaksa banyak perempuan beralih menjadi buruh sawit.

“Dulu telaga bagaikan cermin kaca muka, bening sekali. Kita duduk dalam perahu kita lihat ikan udang jalan di bawah sana. Ada kura-kura dan buaya. Tapi sekarang, sayang sudah kabur sama sekali. Jangankan lihat, kita gantung pancing saja, umpan tinggal putih di mata kail,” tutur dia.



*Robertus, Koordinator Humas Ikatan Mahasiswa Boven Digoel. (Foto: KBR/Rei)*

### **Geliat Pemuda dan Perempuan Adat**

Degradasi tanah ulayat yang makin cepat menggugah generasi muda adat. Mereka yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Boven Digoel (IMADI) sudah mulai berkeliling Distrik Jair guna melakukan edukasi. Mediana lewat pemutaran film dan dialog.

“Ada beberapa film yang kita angkat terkait dengan lingkungan dan dampak juga ketika food estate atau perusahaan besar masuk. Tidak hanya tanah saja yang hilang tapi bahan pangan lokal dan juga budaya sosial,” ujar anggota IMADI Robertus yang juga pemuda Kampung Anggai.

Program lumbung pangan (food estate) di Papua juga menjadi perhatian karena berpotensi merugikan masyarakat adat.

Selain pemuda, kalangan perempuan pun diajak untuk ikut berperan dalam pelestarian tanah adat. Terlebih, aktivitas sosial ekonomi masyarakat adat banyak digerakkan oleh perempuan.

Peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Rasela Melinda menyebut mereka butuh edukasi dan peningkatan kapasitas agar optimal berkontribusi dalam perjuangan masyarakat adat.

“Perempuan maupun laki-laki beberapa marga yang belum melepaskan tanahnya diundang, biasanya ke acara pendidikan, pelatihan, penyadaran atau peningkatan kapasitas,” kata Rasela.

Prodcast I:



Prodcast II:



## 7.

# Nasib Petani di Kebun Sawit Tua Keerom<sup>7</sup>

Oleh: Mukhamad Qistiyanto



*Nampak perkebunan sawit Arso, Kabupaten Keerom, Papua. sebagian kecil yang bisa dipanen, namun sebagian besar sudah tidak bisa lagi dan perlu peremajaan.*

*Pagi itu saat melintasi wilayah Kabupaten Keerom, nampak banyak perkebunan sawit sepanjang jalan tapi ironisnya semua tanamannya nampak jelas tidak terawat hanya sebagian kecil yang produktif kala itu beberapa buruh perempuan sedang bekerja mengangkut brondol sawit,*

---

<sup>7</sup>Tulisan ini terbit di papuaterkini.com pada 24 Januari 2022 dengan judul "Nasib Petani di Kebun Sawit Tua di Keerom: Komoditas Andalan yang Makin Jadi Beban"

Dua orang mama Papua sedang memungut buah sawit yang habis dipetik dari pohon, selanjutnya dimasukan ke dalam karung dan diangkat menuju jalan raya yang jaraknya sekitar 500 - 700 meter dengan berjalan kaki. Salah seorang bernama Mama Delila asal dari Serui. Dia sudah sepuluh tahun bekerja sebagai buruh lepas pengangkut brondol sawit di area perkebunan sawit Arso 10, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Dengan bekerja sebagai buruh sawit tersebut Mama Delila dan rekan-rekan yang lain sehari mendapatkan upah kisaran Rp 80.000 - 100.000 rupiah per hari dengan perhitungan kerja sistem borongan.

"Saya bekerja di ladang sawit sebagai buruh pengangkut buah sawit, sudah bekerja selama 10 tahun, puji Tuhan dengan hasil Rp 80.000 - 100.000 per hari dapat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

"Ini saya bekerja di kebun milik bapak kepala kampung jadi kerjanya borongan hasilnya di dapat dari berapa kilo jumlah brondolan sawit yang dapat saya angkut dari kebun menuju jalan raya dimana kendaraan truk pengangkut dapat masuk, pekerjaan ini memang berat apa lagi jalanya susah dilalui dan kesulitan lain di ladang banyak nyamuk bahkan ular juga sering saya temui," tambahnya.

Dia salah satu buruh yang masih dapat upah dari perkebunan sawit sejak sepuluh tahun lalu. Ketika sawit mulai tua dan butuh peremajaan, sawit yang dulu dapat menopang kehidupan yang layak sekarang sudah tidak bisa jadi tumpuhan hidup orang harus kerja serabutan.



*Dua orang mama-mama sebagai buruh sawit usai bekerja harian lepas mengangkut sawit menuju ke jalan.*

Suparno, anggota DPRD Kabupaten Keerom ketika ditemui di rumah pribadinya Arso II, Kabupaten Keerom, menceritakan awal mula sawit hadir di Kabupaten Keerom, yang merupakan perkebunan sawit tertua di Papua. Wilayah ini dulu bagian dari kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 Keerom menjadi Kabupaten tersendiri.

“Kabupaten Keerom adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura berdasarkan UU Nomer 26 Tahun 2002, Keerom mempunyai nilai strategis karena berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea,” tuturnya.

Sekitar tahun 1980, Perseroan Terbatas Perusahaan Nusantara II ( PTPN) mulai membangun perkebunan sawit di Arso Kabupaten Keerom yang meliputi tiga distrik, yaitu Distrik Arso, Arso Timur dan Skamto. Sedangkan pabrik sawit pertama dibangun didekat Kali Tami.

“Jadi pertama kali sekitar tahun 1980an melalui Perseroan Terbatas Perusahaan Nusantara ( PTPN) II mulai membangun perkebunan sawit di Arso yang meliputi Distrik Arso, Arso Timur dan Skamto, seingat saya pabrik yang pertama dibangun didekat Kali Tami,” Kata Suparno.

Menurut cerita Suparno yang juga merupakan warga transmigrasi yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kepemilikan sawit terdiri dari Plasma yang merupakan masyarakat asli dan transmigrasi dari luar Provinsi Papua dan kebun inti milik PTPN II.

Pada awalnya panen sawit sangat menjanjikan banyak warga yang bisa memperbaiki rumah ataupun membeli sepeda motor. Namun awal tahun 2000 harga sawit mulai menurun sehingga banyak petani sawit tidak mampu mengurus ladangnya. Situasi ini makin parah manakala memasuki tahun 2005, sehingga biaya untuk memelihara dan memanen buah sawit jauh lebih besar dari hasil penjualan jadi banyak lahan sawit yang diterlantarkan warga.

“Semua aktifitas memerlukan biaya yang tidak sedikit seperti merawat, memupuk, memetik, mengumpulkan dan mengangkut ke jalan utama sampai ke pabrik, sementara hasil jualnya tidak sebanding sehingga banyak warga yang tidak lagi menggarap kebun sawitnya, “ pungkasnya.

Mengutip Lembaga Studi Pusaka dalam kajiannya

“Atlas Sawit Papua” (2015, Kabupaten Keerom berada di sisi garis perbatasan dengan Papua Nugini. Pada Awal 1980 an, dikembangkan rencana untuk menjadikan Distrik Arso sebagai wilayah transmigrasi. Sebagaimana halnya yang terjadi di Manokwari, salah satu kunci untuk membuka lahan transmigrasi adalah dengan menyediakan perkebunan kelapa sawit untuk dioperasikan oleh badan usaha milik Negara PTPN II.

Umumnya lahan kelapa sawit ini akan dibagikan dan digarap oleh para transmigran dalam program yang dikenal sebagai PIR atau perkebunan inti plasma. Begitu banyak tanah ulayat milik masyarakat adat setempat dirampas untuk kepentingan perkebunan. Masyarakat lokal tidak bisa membuat apa-apa.

Hal senada juga dituturkan oleh Latifah Anum Siregar Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP). Menurutnya, permasalahan sawit di Kabupaten Keerom sangat kompleks, imbasnya para pekerja buruh sawit dan petani sawit yang mengalami penderitaan berkepanjangan. Sementara itu, PTPN II berargumentasi mereka mengalami kesulitan untuk menaikkan harga sawit karena rantai produksi dan transportasi yang panjang antara Papua hingga ke luar Papua. Selain itu, kualitas sawit di Papua dikatakan tidak terlalu bagus, ditambah lagi terjadi beberapa kali pemalangan kebun inti dan pabrik, terutama ditahun 2016 dan 2017.

Hal ini memunculkan implikasi terhadap petani sawit. Para petani sawit merugi karena sawit mereka tidak terolah, sementara para buruh yang berstatus karyawan harian lepas ( KHL) terpaksa mencari pekerjaan lain dengan dalih tersebut.

Perusahaan semakin memiliki alasan untuk tidak bertanggungjawab dengan kesejahteraan karyawan dan petani sawit. Akibatnya banyak buruh yang beralih profesi sebagai tukang ojek, pekerja bangunan dan petani palawija. Situasi lebih mengesankan lagi para buruh perempuan yang sangat terimbas, sehingga mereka terpaksa berjualan pinang atau sayur hasil bumi di pinggir jalan. “Imbas dari perkebunan sawit yang tidak terolah berdampak besar terhadap perekonomian keluarga, terpaksa para mama-mama yang tadinya menjadi buruh sawit mencari penghidupan lain misalnya berjualan pinang, sayur-mayur dan membuka kios kecil di rumahnya, namun semua itu tidak dapat menutupi kehidupan mereka sehari-hari, termasuk

untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka,” tuturnya

Perempuan asli Keerom pada dasarnya pekerja keras, dulu sebelum ada perkebunan sawit, mereka pergi ke hutan mengambil bahan makanan mentah, memasak dan mengurus rumah tangga. Sementara itu kaum lelaki mencari binatang di hutan, seperti babi hutan, kuskus dan burung kasuari, atau mencari ikan di sungai-sungai kecil.

Demianus Fatagur tokoh masyarakat asli Suku Workwana yang juga memiliki ladang sawit tua di PIR 2 menceritakan, dulu ia tidak mengerjakan secara langsung ladang sawitnya. Namun, lahan itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Iamenerima hasil bersih rata-rata per hektar per bilan sebesar Rp. 500.000. “Hasilnya tidak maksimal karena kebetulan ladang sawit punya saya letaknya di belakang, jauh, jadi akses untuk melansir hasil panen sangat jauh belum lagi tidak ada sarana jalan yang kendaraan bisa masuk, berimbas pada mahalnya ongkos panen dan perawatan,” ujarnya.



*Nampak perkebunan sawit yang sudah tua, tidak terawat dan tidak bisa di petik hasilnya lokasi di PIR II Kabupaten Keerom, Papua.*

Saat ini ladang sawit tuanya tidak bisa menghasilkan sama sekali atau nol rupiah karena umur sawit sudah tua. Setelah ladang sawit tua tidak bisa dipanen ia merasa sangat susah.

Akhirnya dia terpaksa mengandalkan pendapatan keluarga dengan berkebun. Itu pun sangat tidak mencukupi.

Demianus memiliki lahan sawit tua seluas dua hektar dan selama ini tidak bisa dipanen, lebih sedih lagi beliau tidak bisa memberikan pekerjaan pada buruh yang biasa merawat sawit tuanya.

Demianus berharap kepada pemerintah untuk mendapat bantuan dari pemerintah agar sawit tua ini bisa produktif dengan peremajaan pohon sawit tua. Dulu Perusahaan Sawit PTPN II berjanji pada orang asli bakal membangun jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi, juga akan membangun rumah buat orang asli "Tetapi sampai sekarang itu tidak ada," ujarnya.

Kami bermaksud menemui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Keerom di Jalan Trans Irian, Arso Kota, Provinsi Papua untuk mengonfirmasi masalah ini. Karena Kepala dinas tidak ditempat maka stafnya, Wagiso, yang memberikan keterangan.

Menurut Wagiso, dulu ada beberapa pelaporan dan keluhan dari warga mengenai perkerkebunan sawit baik dari buruh pabrik PTPN II ataupun petani. Akan, tetapi karena Kantor Dinas Tenaga Kerja mengalami musibah kebakaran sehingga data-data dan filenya hilang semua, Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 01 Oktober 2020.

Mengenai konflik antara petani sawit Orang Asli Papua ( OAP) dan petani sawit pendatang (transmigrasi), menurut dia, selama ini tidak pernah terjadi. "Tidak pernah ada laporan yang kami terima tentang konflik antara petani sawit Orang Asli Papua dan petani sawit transmigrasi. Yang ada justru pelaporan dari buruh sawit ke Perusahaan sawit tapi maaf untuk datanya kita tidak ada imbas dari kebakaran tahun lalu," ujarnya.

Dari catatan Redaksi Papua terikini.com Kebakaran Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terjadi pada hari Kamis pagi ( 01/10/2020 ) kebakaran tersebut dipicu oleh aksi massa yang kecewa dengan hasil seleksi tes Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS), namun aksi massa tidak terkendali dan seluruh bangunan Kantor Disnaker Kabupaten Keerom Ludes di lalap api.

## 8.

# Hidup Segan Matipun Tak Mau<sup>8</sup>

Oleh: Mukhamad Qistiyanto



*Para buruh sawit yang terpaksa berjualan pinang dan sayur mayur di sepanjang jalan perkebunan sawit yang sudah tua di PIR II Kabupaten Keerom, Papua.*

*Masuk wilayah Kampung Yamta PIR II Kabupaten Keerom disini Juga banyak perkebunan sawit yang terlantar, banyak pohon sawit yang tidak dipetik. Untuk menggali informasi lebih dalam kami menemui tokoh perempuan Keerom sekaligus pegawai Dinas Sosial Kabupaten Keerom yang sudah puluhan tahun mendedikasikan ilmunya di Keerom, Mudrikah.*

Menurut Mudrikah, keberadaan perkebunan sawit membantu masyarakat. Hal ini karena menambah pendapatan

---

<sup>8</sup> Tulisan ini terbit di *papuaterkini.com* pada 24 Januari 2022 dengan judul "Nasib Petani Sawit di Keerom, Hidup Segan Matipun Tak Mau"

keluarga dan membantu perekonomian keluarga dan biaya pendidikan anak sekolah. “Awalnya Perkebunan sawit ini hasilnya sangat menjanjikan terbukti dengan saya membuka toko sembako di rumah waktu itu bisa meraih omset Rp 8 - 10 juta per hari. Artinya daya beli masyarakat petani itu ada, tapi untuk saat ini tokopun saya tutup, karena biarpun masyarakat butuh barang tapi tidak mampu untuk membeli,” tuturnya.

Lebih lanjut Mudrikah menceritakan banyak warga PIR II yang dulu mengandalkan hasil sawit kemudian mengambil kredit mobil. Naasnya perkebunan sawit macet, angsuran pun jadi tidak lancar dan mobil ditarik. Di sisi lain, cicilan lain di bank jalan terus. Pada banyak yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Banyak cerita miris lainnya yang tidak bisa di ungkapkan satu persatu. “Memang saat ini para petani sawit umurnya sudah berusia lanjut tapi realitanya anak dan cucu kita kehidupannya masih panjang. Kebun sawit sudah terlantar tidak bisa menghasilkan apa-apa, terus kedepannya bagai mana nasib generasi penerus bangsa ini? Mereka masih butuh banyak biaya hidup dan pendidikan untuk kedepannya,” keluhnya.

Senasib dengan Warga Petani PIR II lainnya, Lissa Heipon, mama orang asli Papua (OAP) ini juga sangat sedih dengan keadaan kebun sawit milik keluarganya. “Dulu keluarga kami mengandalkan sawit untuk perekonomian keluarga tapi sejak sawit jatuh kami tidak bisa berbuat banyak terpaksa suami cari kerja lain dan saya buka kios kecil-kecilan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah dari perusahaan sawit PTPN II memberi solusi tentang kelangsungan nasib petani sawit di Arso dan di PIR II, Lissa Heipon mengatakan, tidak ada informasi dan bantuan sama sekali sampai saat ini. “Kami masyarakat asli belum pernah mendapat informasi atau bantuan dari perusahaan PTPN II tentang nasib kita selanjutnya,” ujarnya.



*Ketua Koperasi Tani Sawit 'Ngakawa' Lambertus Y Wellyp (Berbaju Merah) dan Bendahara Koperasi, M Udrikah SE bersama pengurus yang terus memperjuangkan program peremajaan kebun sawit di Kabupaten Keerom, Papua.*

Nasib miris petani sawit ini sudah terjadi sangat lama. Belum lagi kebanyakan mereka terlilit utang di bank. Program peremajaan kelapa sawit di Keerom adalah satu-satunya harapan petani. Saat ini usia pohon sawit sudah 35 tahun lebih, sedang usia produktif untuk tanaman ini 25 tahun.

Untuk mengetahui progres program peremajaan sawit di Arso, kami menemui Lambertus Y Wellyp, orang asli Arso dari Workwana, yang juga Ketua Koperasi Tani Sawit Ngakawa, Kampung Yamta PIR II, Kabupaten Keerom. Didasari keprihatinan melihat nasib petani dan lahan sawit di Keerom, Lambertus bersama teman-temannya melalui wadah koperasi petani sawit, sedang memperjuangkan program peremajaan lahan sawit, terutama petani plasma eks PTPN II di Arso.

Mereka sedang berjuang bersama dengan kelompok-kelompok tani yang lain dan Pemilik ladang sawit untuk mendapat bantuan program peremajaan sawit rakyat (PSR) melalui Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah menetapkan sekitar 3.600 hektare lahan peremajaan di Keerom. Namun setelah 10 tahun belum ada kejelasannya.

“Kami tidak patah semangat berjuang dengan rekan-rekan pengurus koperasi yang lain dan petani sawit untuk maju terus, walaupun banyak warga yang pro dan kontra dengan program tersebut,” tuturnya.

Harapan Lambertus sebagai Orang Asli Papua juga mewakili jeritan hati petani sawit eks Petani Plasma PTPN II Arso, agar Pemerintah Kabupaten Keerom dan Pemerintah Pusat khususnya membantu program peremajaan sawit di daerah mereka.

Sore itu kami juga menemui pengurus Koperasi Tani Sawit Ngakawa yang lain, Mudrikah. Kebetulan, dia baru selesai melihat area pembibitan sawit untuk peremajaan sawit. Lokasi pembibitan sawit terletak di Kampung Yamta PIR II. Dia bercerita lika-liku perjuangan mendapat program peremajaan sawit.

Masalah utamanya, menurut dia, ketidakpercayaan petani hingga pandangan miring orang tentang koperasi untuk menjalankan program peremajaan. Akan tetapi, menurut Mudrikah, semua itu sebagai cambuk untuk membuatnya tetap semangat.

Mudrikah yang juga sebagai bendahara Koperasi Ngkawa sampai harus *door to door* ke rumah petani guna meyakinkan petani ikut memperjuangkan program peremajaan sawit. “Setiap usaha dan perjuangan pasti ada hambatan dan rintangannya, ketika kami hanya punya aset dua hektar tidak bisa di manfaatkan, lalu apa yang bisa kita perbuat untuk membiayai keluarga kita? Menghidupi keluarga kita? Itu yang menjadi penyemangat saya,” kata Mudrikah

Pada tahun 2015, Mudrikah mulai intens berkomunikasi dengan organisasi petani perkebunan terkait kondisi eks PTPN II. Dari hasil komunikasi itu, ada pelatihan peremajaan sawit pada bulan Juni 2016. BPDPKS yang membiayai program tersebut dan 100 petani yang ikut serta.

“Seratus orang inilah yang pertama kali mengumpulkan persyaratan untuk program peremajaan sawit,” tuturnya.

Tahun 2016, petani mulai mengajukan program tersebut, kendalanya dengan masyarakat adat dan respon pemerintah yang kurang sehingga prosesnya berjalan lamban. Tahun 2017, Mudrikah ke Ibukota Negara Jakarta menemui Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Hasil pertemuan

tersebut, Dirjenbun datang ke Arso, Kabupaten Keerom. Dia melihat kondisi riil kebun sawit dan hasilnya ada informasi akan mendapatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun 2018.

Berdasarkan informasi tersebut koperasi pun makin gencar mensosialisasikan ke petani dan masyarakat adat, sebagian petani mulai dilatih cara menggunakan aplikasi PSR. Dari Dinas Pertanian pun menunjuk pendamping-pendamping program peremajaan di kampung-kampung. Mereka dibantu staf Dinas Pertanian sehingga usulan peremajaan diverifikasi di Kabupaten dan Provinsi.

Program peremajaan ini rencananya akan berlangsung hingga tahun 2023 dengan target 3.600 hektare yang ditetapkan. Dalam perjanjian Koperasi Ngawa, PT Sutran Ina Perkasa (PT-SIP) adalah sebagai perusahaan yang nantinya mengolah hasil sawit petani.

“Kami berpendapat, Bapak Andi Sutran, sebagai Direktur PT Sutran Ina Perkasa memiliki pengalaman mendirikan pabrik sawit di beberapa perkebunan di Jayapura, jadi hal itu yang menjadi landasan bagi koperasi berkerja sama dengan PT Sutran Ina Perkasa,” ujarnya.

“Pekerjaan utuh dari Program PO - P3 tanaman menghasilkan, itu memang di kerjakan mitra (PT - SIP), dengan catatan, mitra menyiapkan hilirisasi yaitu membangun satu pabrik, jadi pabrik di sediakan oleh mitra, Perjanjian kerja sama jual beli tandan diatur nanti,” tambah Mudrikah.

Koperasi Ngkawa juga masih harus bekerja keras mencapai target 3.000 hektar dan memastikan mendapat pinjaman dana untuk peremajaan, terlebih banyak petani sedang menjaminkan sertifikat tanahnya di bank atau sudah berganti pemilik. Selain itu Koperasi juga harus mengurus kredit baru bagi petani di bank untuk membiayai kebutuhan peremajaan mulai pembersihan hingga panen kira - kira Rp 75 juta per hektar

Dengan perhitungan satu petani memiliki 2 hektar, total kebutuhan Rp 150 juta. Pemerintah membantu dana peremajaan Rp 30 juta per hektar atau Rp 60 juta per petani. “Itu sampai di penanaman *tok*, nanti untuk pupuk, merawat, pengendalian gulma dan lain - lain, itu masih kita berhutang, masih kita cari pembiayaan dari bank,” katanya.

“Jadi petani masih memerlukan dana 90.000.000 dari

bank. Pinjaman ini untuk dipakai perawatan, pemupukan hingga pengendalian gulma sampai masa panen, Pinjaman ini akan di kembalikan petani pada saat sawit sudah mulai panen,” ujarnya.



*Lokasi pembibitan sawit di PIR II Kabupaten Keerom, Papua. Program peremajaan kebun kelapa sawit sangat diharapkan para petani.*

Pengurus koperasi masih berkordinasi dengan pihak bank untuk mendapatkan kredit, mengingat sebagian sertifikat lahan masih menjadi jaminan bank. Hanya berupa hasil *scan*, maka sistem kredit yang diajukan adalah sistem tanggung renteng.

“Dengan sistem kredit tanggung renteng, kredit diajukan atas nama kelompok dengan memakai jaminan sertifikat asli yang sudah ada. Beberapa bank pemerintah sudah ada yang setuju dengan sistem ini, untuk proses pengajuan kredit dari sekarang hingga setelah penanaman.” ujarnya.

Dalam Perjanjian antara Koperasi Ngkawa dengan Bank, PT SIP akan berperan sebagai Penjamin (Avalis). “Ia menjadi penjamin bahwa sawit pasti akan berhasil dengan baik dan pasti akan dapat melunasi utang itu,” katanya.

Terpisah Fince F. Fautngilyanan . SP selaku Kepala Bidang Perkebunan , Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Keerom menyayangkan selama ini perkebunan sawit milik masyarakat

Keerom terbengkalai. Hal ini menyebabkan perekonomian petani menurun, banyak juga yang beralih profesi atau merantau ke kota.

“Kendala terbesar Petani sawit di Keerom adalah tanaman sawit mereka sudah tidak produktif dan harus diremajakan, pemerintah sendiri sangat mendukung program peremajaan sawit rakyat tersebut,” ujarnya.

Pemerintah bertugas memfasilitasi petani seperti inventarisasi dan verifikasi data dan lahan “Berapa luas yang sudah terverifikasi dan memenuhi syarat itu nanti dari kementerian, dari BPDPKS yang mengeluarkan rekomendasi,” katanya.

Di sini yang sudah berjalan dengan baik adalah Koperasi Ngakawa bersama kelompok - kelompok tani dan mitra. “Untuk petani sawit di Keerom sendiri terdiri dari Warga asli Orang Papua ( OAP) dan Warga Pendatang Transmigrasi dari luar Provinsi Papua dan selama ini mereka tidak pernah ada konflik sesama petani sawit, Harapan kami program peremajaan sawit berjalan lancar dan petani mendapatkan manfaat dan hasil dari pertanian sawit,” pungkasnya.

## 9.

## Mengintip Vaksinasi Di Merauke (Bagian I)<sup>9</sup>

Oleh: Jekson Simanjuntak

*“Jadi buat apa kita vaksin. Vaksin bagi orang yang keluar daerah terlalu banyak. Kalo masyarakat sini mereka jarang keluar. Mereka cuma keluar cari ikan, kembali makan di rumah,”*

Vaksinasi di Kabupaten Merauke – Papua dibayangi sejumlah persoalan meskipun dikenal sebagai wilayah dengan cakupan vaksinasi tertinggi di Papua. Tingginya cakupan vaksinasi didominasi oleh warga pendatang ketimbang Orang Asli Papua (OAP).

Temuan di lapangan juga membuktikan, kurangnya sosialisasi dan pola kerja vaksinasi telah berdampak terhadap penduduk lokal. Banyak diantara mereka yang belum mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan tak sedikit yang gagal mengikuti vaksinasi dosis kedua.

Salah satunya dialami Paustina Itariop Korai (55), warga RT 01/ RW 01 Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua. Hingga saat ini, Paustina hanya mendapatkan vaksinasi tahap pertama.

Di bulan Juni yang hangat, bersama anak perempuannya, Paustina mendatangi balai kampung yang berjarak 1 Km dari rumahnya. Di tempat itu, vaksinasi dosis pertama dilakukan. “Total warga yang sudah vaksin ada 10 orang, dan kalau dari lingkungan RT.01 ada enam orang,” katanya.

Vaksinasi tahap pertama dilakukan pada 10 Juni 2021. Sesuai jadwal, vaksinasi tahap kedua direncanakan pada 8 Juli 2021 atau tiga minggu setelahnya. Namun hingga tulisan ini dibuat, vaksinasi tersebut tak kunjung terlaksana.

---

<sup>9</sup> Tulisan terbit di *MediaJakarta.com* pada 17 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Paustina yang akrab disapa “Mama Tina” menuturkan, pihak Puskesmas Tanah Miring telah membatalkan vaksinasi secara sepihak. Alasan yang disampaikan selalu berubah-ubah, mulai dari dokter sedang sakit hingga alasan lain yang sulit diterima akal.

Akibatnya Mama Tina kecewa karena penundaan berlangsung hingga tiga kali. “Karena tanggal berikut lagi kami datang. Dari petugas kesehatan, ini masih libur, atau apakah. Tunda! Nanti tanggal sekian, tunda lagi. Maksudnya, tunda-tunda sampai 3 kali, mama tidak mau ikut vaksin lagi. Sudah malas,” ujar Mama Tina yang juga kader Posyandu.

Dia menambahkan, “Tunda yang tiga kali itu, kita *su* tidak mau ikut lagi. Setelah itu tidak ada informasi lagi soal vaksin.”

Belakangan, beredar informasi yang menyebutkan kegiatan vaksinasi dipusatkan di distrik (kecamatan), atau di kampung-kampung terdekat pada waktu tertentu. Masyarakat dipersilahkan datang.

Bagi Mama Tina, hal itu merepotkan karena ia tidak memiliki kendaraan. Jarak yang jauh disertai tidak adanya angkutan umum menjadi penghalang utama. Kendati demikian, ia yakin, petugas puskesmas pasti kembali ke kampungnya untuk merampungkan vaksinasi. Alasannya, masih banyak warga yang belum divaksin.

“Nanti juga ada petugas datang. Jika datang, kami mungkin bisa ikut. Sementara di tempat lain ada vaksin, tapi mama *su* tidak mau ikut,” ujar perempuan dari suku Mandobo itu.

Kaur Umum Desa Tambat Samuel Keremba (41) mengamini pernyataan Mama Tina. Menurutnya, masyarakat sempat berharap akan vaksinasi tahap kedua, karena menyadari pentingnya pembentukan antibodi untuk menangkal Covid-19.



*Kaur Umum Desa Tambat Samuel Keremba (41) mengakui jika warga Kampung Tambat banyak yang belum mengikuti vaksinasi. (Foto: Jekson Simanjuntak)*

“Vaksin pertama sudah. Vaksin kedua ini ada. Jadwal yang mereka kasih kenapa diundurkan?” tanyanya.

Seharusnya, kata Samuel, di tanggal yang ditentukan, vaksinasi dilakukan. “Adanya kendala-kendala seperti itu, akhirnya masyarakat, ‘ah ini kenapa?’” ungkapnya.

Samuel Keremba yang dikenal dengan panggilan “Pak Sam” menegaskan bahwa penundaan dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas Tanah Miring. “Karena kita bukan salahkan petugas, tapi kita tidak tahu kendalanya seperti apa. Kami juga belum pasti mereka seperti itu,” ucapnya.

Akibatnya, masyarakat yang telah menerima vaksin dosis pertama patah arang. Mereka mundur. “Mereka takut diri, *toh!* Mengapa vaksin ini tidak sesuai tanggal, mengapa bisa mundur. Itu kan pertanyaan,” jelas Pak Sam.

Sementara merujuk kampung-kampung tetangga (kampung transmigran dengan dominasi suku Jawa) telah melaksanakan vaksinasi secara lancar. Tidak terjadi penundaan, meskipun yang menolak tetap ada.

“Kalo vaksin yang tidak ada, saya pikir tidak. Karena kampung-kampung lain, kita punya jatah. Pasti sudah ada,” ujarnya.

Tak ingin menyalahkan siapaun, Pak Sam menyampaikan, “Kita di kampung hanya tolong dijelaskan,

apakah tidak bisa berfungsi, apakah ada kaitannya dengan kekebalan yang berkurang atau tidak?”

### Vaksinasi Minimal 10 Orang

Untuk mengonfirmasi kebenaran peristiwa tersebut, penulis mendatangi Puskesmas Distrik Tanah Miring. Disana, Siti Musriani (29) petugas puskesmas menjelaskan bahwa pihaknya pernah ke Kampung Tambat untuk melakukan vaksinasi.

“Kita yang kesana, bukan masyarakatnya yang kesini. Tapi itu sudah. Kita dengan berbagai cara. Bahkan kepala distrik sendiri yang jemput, orangnya tetap tidak datang,” katanya.



*Puskesmas Tanah Miring membawahi 14 kampung. Dari jumlah itu, hanya 10 kampung yang mengikuti kegiatan vaksinasi, dan sisanya merupakan kampung lokal. (Foto: Jekson Simanjuntak)*

Sementara terkait jadwal vaksin tahap kedua yang berubah-ubah, Siti beralih, jumlah peserta tidak mencapai 10 orang. Termasuk ketika dilakukan penjadwalan ulang, penduduk kampung yang merupakan Orang Papua Asli (OAP) tidak memenuhi syarat jumlah minimal.

Jika peserta tidak sampai 10 orang berakibat mubazir terhadap vaksin yang telah dibuka. “Pas vaksin kedua yang mau cuma 5 orang. Kan, kita harus memperhatikan, karena 1

vial untuk 10 orang. Kecuali ada mendesak, baru boleh buka untuk 8 orang. Tapi, kan, sayang itu,” ungkap Siti.

Pengakuan tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas sejak 2016 itu, hal serupa kembali terjadi. Saat dilakukan penjadwalan ulang, pesertanya tidak mencapai 10 orang.

“Karena anggaran pemerintah untuk 1 ampul sebesar Rp2 juta, itu sama saja merugikan uang negara, jika dibuka cuma-cuma dengan peserta tak sampai 10 orang,” terangnya.

Seandainya Siti memberikan vaksin meskipun jumlah peserta terbatas, “Itu sama saja buang-buang vaksin.” Tidak mungkin ia melaporkan penggunaan vaksin dengan metode demikian dan dipastikan akan ditegur atasan.

“Jadi daripada merugikan yang lain, sekalian tidak usah dulu. Mending yang dari Tambat mencari di kampung mana yang ada kegiatan vaksin. Kan otomatis tetap dilayani,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Catarina Timung (38), tenaga medis yang bertugas di puskesmas sejak 2008. Menurutnya, banyak warga yang menolak vaksin, meskipun puskesmas telah melakukan pola ‘jemput bola’.

“Kemarin itu, memang mereka susah. Kita kesana, kita tunggu berjam-jam juga masyarakatnya tidak datang,” katanya.

Dia juga menjelaskan, perlakuan yang sama diterapkan untuk semua warga, baik warga lokal (OAP) maupun pendatang. Meskipun tidak ada perbedaan, ternyata antusiasme warga transmigran cenderung lebih tinggi. Mereka bersedia divaksin secara sukarela.

“Itu kita lakukan di setiap kampung begitu. Untuk masyarakat Distrik Tanah Miring, khususnya kampung-kampung transmigran, mereka antusiasnya bagus untuk vaksin,” tegasnya.

Jika warga yang berkumpul mencapai minimal 10 orang, vaksinasi bisa dimulai dengan *screening*. Mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, bisa langsung divaksin, sementara yang memiliki penyakit bawaan disarankan menunda vaksinasi.

Ini juga erat hubungannya dengan ketersediaan vaksin. “Itu kan, 1 vial isinya 10 dosis. Jadi sayang kalau cuma kurang yang dipakai,” terang Catarina.

Soal penjatahan vaksin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Neville Muskita menjelaskan bahwa jenis vaksin yang diberikan adalah *Sinovac* yang dalam setiap vialnya diperuntukkan bagi 10 orang. Setelah melihat efektivitas di lapangan selama ini, ia sedang mengusulkan ke Pemprov Papua agar disediakan vaksin ukuran 1 vial untuk 2 dosis (orang).

“Memang kita lagi mintakan yang 1 vial untuk 2 dosis. Selama ini yang dipakai adalah ukuran 1 vial untuk 10 orang,” katanya. Akibatnya, vaksinasi dimulai ketika pesertanya minimal berjumlah 10 orang.

Jika vaksin dibuka, sementara pesertanya kurang dari 10 orang berpotensi menyebabkan kerusakan vaksin. Karena itu Neville beranggapan, vaksin dengan 2 dosis sangat diperlukan, utamanya di kampung-kampung lokal.

“Sehingga 2 orang datang bisa langsung disuntik, tidak perlu tunggu 10 orang. Karena untuk vaksin 10 orang terkadang nunggunya lama,” terangnya.

## Belum Divaksin



*Bruno Kimbinaka (65) Warga RT.01/RW.01 Kampung Tambat, Distrik Tanah Merah menolak vaksinasi karena alasan kesehatan. (Foto: Jekson Simanjuntak)*

Bruno Kimbinaka (65) Warga RT.01/RW.01 Kampung Tambat, Distrik Tanah Merah sedang bersantai di teras

rumahnya. Siang itu, ia baru selesai beres-beres. Bruno merupakan salah satu warga yang menolak vaksin karena alasan kesehatan dan kepercayaan.

Riwayat Asma yang dideritanya dalam 12 tahun terakhir, membuat Bruno sulit bernafas. Masyarakat setempat menyebutnya “nafas pendek”. Penyakit itu membuatnya tidak bersedia divaksin.

“Itu sakit tahunan dan termasuk budaya punya. Jangan sampai, saya punya sakit sudah lama ini takut lagi. Jangan sampai vaksin malah memusnahkan kita,” katanya.

Bruno menegaskan, penolakan vaksin dilakukan atas kesadaran sendiri. Tidak ada yang mempengaruhi. Dia beranggapan, takdir seseorang ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh vaksin.

“Dan saya punya kesukaan sendiri. Jangan sampai, dari vaksin dia tambah, Tuhan tarik kita pulang kah. Saya takut. Bukan ada orang paksa. Tidak,” tegasnya.

Keteguhan hatinya diperkuat pemahaman bahwa vaksin berbahaya bagi penderita Asma. Itu sebabnya, ia tidak ingin coba-coba.

“Tidak ada yang orang omong, apalagi pendeta, karena mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Karena itu sampai dibatas mana dengan penyakit ini, sampai dimana, sudah. Tidak boleh tambah-tambah sampai saya cepat begitu. Itu saya yang tidak mau,” terang pria asal suku Mandobo itu.

Berbeda dengan Bruno, Ketua RT 01 Kampung Tambat Nicolaus Bunoujo mengaku tertarik untuk divaksin. Namun sayang, ia lupa jadwalnya, sehingga batal divaksin “Memang ada, sudah terlambat. Itu bersamaan dengan ibu Paustina, tetapi waktu itu saya tidak datang,” katanya.

Pagi itu, Nicolaus terlalu asik bekerja di kebun sehingga lupa tanggal vaksinasi. Ia lalu mencari tahu tentang kemungkinan vaksinasi susulan. Oleh aparat kampung, ia disarankan mengikutinya di kampung sebelah (kampung transmigran). Jika belum sempat, ia diminta bergegas ke kantor Distrik Tanah Miring.

“Sempat hari itu, saya jalan ke atas (balai kampung), ternyata vaksinnya di kantor distrik. Saya mau bagaimana, saya tidak punya kendaraan. Akhirnya saya kembali,” paparnya.

Sejak saat itu, dia tidak mendapatkan informasi apapun soal jadwal vaksinasi. “Saya keinginan ada untuk vaksin. Setelah itu tidak ada informasi sama sekali sampai sekarang,” ujarnya lirih.

Nicolaus berpandangan vaksin baik untuk kesehatan. Itu sebabnya, jika vaksinasi kembali diadakan di kampung, dipastikan ia akan ikut. Ia ingin menjadi panutan bagi warganya. “Tapi itu sudah, memang kan belum ada informasi, karena kalau mau vaksin biasanya ada jadwal, baru bisa ikut. Bahkan di distrik, saya belum dengar infonya. Mungkin belum ada,” ucapnya.

Beberapa minggu kemudian, Nicolaus dan ketua-ketua RT dipanggil oleh kepala kampung. Mereka dikumpulkan terkait pelaksanaan vaksinasi.

“Hari itu kami dipanggil, suruh ikut vaksin. Tahu-tahu kita kesana ditunda. Itu diadakan di kantor kampung sekitar Juni – Juli,” katanya.

### **Hoaks & Minimnya Sosialisasi**

Dalam perjalanan pulang ke rumah, Nicolaus bercerita tentang pemahamannya tentang vaksinasi. “Yang saya tahu soal vaksin, saya juga kurang banyak tahu,” ungkapnya. Informasi tentang warga yang meninggal usai divaksin berkembang luas di masyarakat. Bahkan di Kampung Tambat yang jaraknya 58 Km dari pusat kota Merauke, informasi itu berkemang cepat. Peredarannya dari mulut ke mulut.

“Soal ada yang meninggal karena vaksin itu juga cerita ke cerita. Akhirnya banyak warga yang awalnya mau ikut, tapi karena mereka itu dengar, ya sudah, tidak ikut,” ujar Nicolaus yang baru menjabat Ketua RT 01 dalam setahun terakhir.

“Dari pada kita sebentar pulang, kita langsung mati. Itu akhirnya warga jadi ragu. Ah tidak usah ikut.”

Cerita itu menurut Nicolaus, berkembang hingga ke kampung-kampung tetangga. Untuk menangkal kabar tersebut, ia berharap pemerintah bergerak cepat melakukan sosialisasi dan turun ke kampung-kampung.



*Nicolaus Bunoujo saat diwawancara wartawan. Menurutnya, akses transportasi membuatnya tidak bisa leluasa bergerak ke Distrik atau Puskesmas Tanah Miring untuk mengikuti vaksinasi. (Foto: Jekson Simanjuntak)*

“Selama ini tidak ada (sosialisasi). Jadi murni inisiatif kampung saja,” ucapnya.

Infomasi hoaks soal vaksin, diakui oleh Samuel Keremba. Menurut Kepala Kampung Tambat terpilih itu, warga memilih tidak ikut vaksin, karena terpengaruh kabar bohong.

“Seperti itu juga terjadi di kampung-kampung tetangga. Mereka yang merupakan kampung trans, ada yang mau ikut dan tidak juga. Tidak semua,” katanya.

Sementara bagi penduduk lokal, Samuel mengatakan, “Macam kita di Papua, mereka berpikir begini, kami kan tidak keluar. Tetap di kampung saja.”

Penduduk lokal yang lebih banyak beraktivitas di dalam kampung, memunculkan kesadaran komunal bahwa mereka tidak membutuhkan vaksin. Fakta juga menunjukkan, warga yang terpapar Covid-19 kebanyakan pendatang, bukan penduduk asli Papua.

“Jadi buat apa kita vaksin. Vaksin bagi orang yang keluar daerah terlalu banyak. Kalo masyarakat sini mereka jarang keluar. Mereka cuma keluar cari ikan, kembali makan di rumah,” terangnya.



*Kantor Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua tempat dilakukannya vaksinasi tahap pertama. (Foto: Jekson Simanjuntak)*

Samuel juga mengamini, sosialisasi tentang vaksin belum diketahui secara baik oleh warga. Meskipun pernah dikumpulkan oleh kepala distrik, mereka tidak memahami dampak buruk vaksinasi.

“Kami disini, pernah didatangi oleh gugus covid-19. Mereka cuma arahkan saja bahwa besok vaksin. Jadi tidak dijelaskan dampaknya bagaimana. Tidak,” tegasnya.

Metode sosialisasi yang dilakukan hanya bermodalkan mobil keliling. “Tim itu datang pakai radio. Itu hanya sebatas informasi, terus mereka keluar.”

Padahal bagi penduduk lokal yang jauh dari kota, mereka sangat membutuhkan informasi detil, seperti tujuan vaksinasi dan siapa saja yang boleh mengikuti. Termasuk, apakah penderita Asma dilarang vaksin.

“Namanya kita orang lokal, kita belum terlalu paham kesitu. Kita mungkin sering ke dukun, tapi yang seperti ini kami belum terlalu. Jadi masyarakat yang tertarik, kita ajak ikut. Tapi orang-orang tua, mereka tidak,” ujarnya.

Bahkan ketika aparat desa berkunjung ke Distrik Tanah Miring, Samuel mengaku, belum mendapatkan jawaban yang diinginkan. Akhirnya, informasi tambahan mereka cari sendiri, baik melalui media sosial ataupun dari cerita ke cerita.

“Kita tahu vaksin, tapi penjelasannya, kita cari tahu

sendiri. Karena sebagai aparat kampung harus memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau divaksin,” kata Samuel.

Minimnya sosialisasi juga dikeluhkan oleh Mama Tina. Sebagai penggerak PKK, ia tidak mendapatkan informasi lengkap tentang vaksinasi, baik dari tim gugus Covid-19 maupun dari petugas puskesmas. Bahkan pemerintah distrik tidak pernah datang ke kampung. Yang muncul justru inisiatif dari masing-masing kepala kampung.

“Sebelum vaksin, tidak ada sosialisasi dari kesehatan pemerintah (distrik). Kalo dari kampung ada dan itu inisiatif mereka,” jelasnya.

Sosialisasi menurut Mama Tina sangat penting, karena dengan begitu warga bisa paham tentang vaksinasi. Uniknya, peran itu justru diambil alih oleh aparat kampung.

Aparat kampung sengaja melakukannya, “Karena dengar dari distrik waktu mereka mendapatkan vaksin, terus disampaikan lagi ke masyarakat. Itu inisiatif murni kampung.”

### **Alasan Menolak Vaksin**

Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke Joseph Albin Gebze mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan besar. Salah satunya terkait vaksinasi. Hal itu berdampak luas di Papua, ketika semua warga diwajibkan ikut.

Khusus di Merauke, Joseph melihat, program vaksinasi lebih didominasi oleh pendatang. Itu didasarkan atas kebutuhan agar bisa melakukan perjalanan keluar daerah. Jangan heran jika menyaksikan pendatang ramai-ramai ke sentra vaksinasi.

Pun, sudah rahasia umum, kehadiran pendatang di Merauke dengan beragam bidang pekerjaan memiliki proporsi yang lebih besar ketimbang penduduk lokal.

“Sebagian besar itu kalangan ASN, pelaku usaha, penerbangan, transportasi, itu harus wajib vaksin. Mereka mengikuti aturan, jadi harus ada sertifikasi vaksin,” katanya.

Sementara bagi masyarakat asli Merauke yang dikenal sebagai suku Malind tidak demikian. Mereka yang tersebar di wilayah seluas 46.791,63 Km persegi dengan luas perairan 5.089,71 Km persegi itu enggan divaksin.

“Kami ini Animha atau manusia sejati. Itu yang nomenklatur resminya disebut Malind,” jelas Joseph.

Malind merupakan suku yang menjadi tuan rumah di tanah datar Papua. Mereka menghuni empat penjuror mata angin dengan tujuh marga besar, yakni Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Bragaize, dan Basik-basik.

Keberadaan suku Malind masih ditemukan di sejumlah lokasi di Merauke. Mereka tersebar di beberapa kampung lokal, seperti Kampung Duti, Kampung Masem, Kampung Waso. Juga sebagian besar di Gudang Arang, Basis Mangga Dua hingga kampung wilayah Kuda Mati. “Lokasinya masih masuk Merauke, tetapi sudah di sudut-sudut pinggiran kota,” katanya.

Joseph menjelaskan, sebagian besar masyarakat lokal tidak mengikuti vaksinasi. “Karena mungkin, faktor mereka tidak beraktivitas keluar daerah. Lalu isu-isu yang mengganggu konsentrasi masyarakat bahwa harus vaksin atau tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kita lihat di media sosial banyak tentang vaksin ini, vaksin itu. Karena ada sampai yang terburuk itu meninggal. Itu isu berjangkit di masyarakat. Jadi muncul shock therapy.”

Akhirnya, penduduk lokal lebih berpedoman kepada ajaran agama. Mereka mengutamakan berdoa ketimbang di vaksin. Ditambah lagi, mereka terpapar kabar bohong yang beredar cepat.

“Apalagi kita di Papua, khususnya di Merauke, orang lebih dengar baku cerita. Itu lebih didengarkan daripada kita ikut aturan. Aturan memang mengharuskan. Apalagi mereka melihat bukti, isu kejadian jatuh begitu, orang sudah tidak mau,” terangnya.

Atas dasar itu, LMA Kabupaten Merauke mencoba mengambil peran, ketika Dinas Kesehatan Kab. Merauke mengajak mereka. Di beberapa kesempatan, seperti seminar dan pertemuan, Joseph menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi.

“Kami memberikan applause dan dukungan, bahwa ini wajib. Ini kan sama dengan imunisasi campak atau polio. Cuma mungkin karena derasnya Covid-19 saat itu, so terlanjur disebut vaksin, ini dibawa sampai dijadikan hoaks,” papar Joseph.

Saat ini, populasi penduduk lokal di Merauke (suku Malin) sebanyak 65 ribu jiwa. Jumlahnya kalah jauh dengan pendatang yang mencapai 150 ribu orang. Dengan demikian bisa dipastikan angka vaksinasi terhadap penduduk lokal sangat sedikit. “Jadi jika ditotal, orang asli Papua yang sudah divaksin sekitar 30 ribuan dari pesatnya vaksin sejak tahun pertama,” katanya.

Imam dari kantor keuskupan di Merauke Pius Cornelis Mano membenarkan adanya penolakan vaksin. Menurutnya, penduduk lokal tidak ikut vaksinasi disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, mereka beranggapan Covid-19 bukan untuk mereka, karena itu tak perlu divaksin. Terbukti, jumlah warga yang meninggal akibat Covid-19 kebanyakan pendatang.

“Kami punya daya tahan tubuh kuat. Sehingga yang tergerak hati untuk vaksin dari orang asli Papua (OAP) sedikit orang. Tetapi menurut saya, ketika diberi penjelasan yang betul, mereka pasti tersadar untuk vaksin,” kata Pastor Paroki St. Mikhael Kudamati itu.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan pengamatan Pastor Pius di tempat permakaman umum (TPU) saat melayani penguburan jemaat atau sekedar mengadakan refleksi tentang kehidupan.

“Disitulah saya liat nama-nama. Sebagai orang asli papua, saya tahu orang papua dan pendatang. Dari situ saya bisa perkiraan bahwa yang lebih banyak meninggal bukan orang asli papua,” ujarnya.

Ia tidak menampik adanya penduduk lokal yang meninggal akibat Covid-19, tetapi perbandingannya sangat sedikit. “Hanya saya tidak bisa prosentasekan secara pasti, namun saya lihat nama asli papua itu jauh lebih sedikit ketimbang pendatang,” katanya.

Kedua, munculnya berita simpang siur, baik dari media sosial maupun dari mulut ke mulut. “Ini saya kira tidak bisa dipisahkan, bahwa dari media sosial pasti berdampak pada mereka bercerita kesana kemari,” tegas Pastor Pius.

Contoh nyata terjadi di Kampung Mopalama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Ditemukan kasus orang meninggal, setelah divaksin dua hari sebelumnya. Korban meninggal usai minum kopi.

“Dia itu pendatang, orang Makassar. Nafasnya terganggu setelah minum kopi dan kemudian meninggal. Sebelumnya dia baik-baik saja,” katanya.

Pagi sebelumnya, korban masih membajak sawah. “Setelah itu meninggal karena minum kopi tua (kental) sekali. Menurut saya, dia mungkin meninggal karena kopi, bukan karena vaksin,” ujarnya.

Pastor Pius beranggapan, korban minum kopi sebelum perutnya terisi dengan makanan. Akibatnya penyakit maag (Gerd)-nya kambuh. “Mungkin dia meninggal karena itu.”

Informasi model begitu gampang menyebar di Merauke. Dimulai dari mulut ke mulut, lalu berkembang hingga beragam versi yang sulit diverifikasi kebenarannya “Itu bisa terjadi seperti itu,” ucapnya.

Kisah lainnya, ada warga yang meninggal usai divaksin. Usut punya usut, korban diketahui memiliki riwayat Malaria. Orang banyak tidak mengetahui hal itu, namun terlanjur menyebar, meninggal karena vaksin.

Merauke sendiri merupakan wilayah dengan penyebaran penyakit malaria tertinggi. Menurut Pastor Pius, seharusnya ada pemeriksaan (*screening*) terkait penyakit bawaan seperti Malaria. “Kira-kira mereka yang akan divaksin ini, apakah sudah bebas malaria. Nah itu, Hal itu dilakukan, tapi yang ini, mungkin tidak,”

Ketiga, ada kaitannya dengan tujuan tertentu. Tujuan menyebarkan hoaks yang tidak disadari masyarakat dan sengaja dihembuskan secara sistematis. Hal itu tentu sangat menyesatkan.

“Tapi ada juga yang sifatnya menipu. Lagi mereka membuat cerita-cerita yang sebenarnya karangan. Maka cerita itu pun beredar dari mulut ke mulut,” terangnya.

Pastor Pius kemudian mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati, termasuk bijak dalam bermedia sosial. Khusus penduduk lokal, ia bisa memahami mengapa informasi dari mulut ke mulut cenderung porsinya lebih besar.

“Jadi ada banyak penyebab yang membuat orang tidak tertarik vaksinasi. Selain itu, orang disini juga sering bersikap malas tahu atau acuh tak acuh,” katanya.

## Penjelasan Pemerintah

Nevile Muskita menjelaskan, cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Merauke untuk dosis pertama telah mencapai 101 ribu lebih atau setara 81%. Sementara tahap kedua sebanyak 77ribu orang atau 61%, sebagaimana data masuk per 13 Desember 2021.



*Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Nevile Muskita menjelaskan bahwa vaksin yang digunakan adalah Sinovac yang dalam setiap vialnya diperuntukkan untuk 10 orang. (Foto: Jekson Simanjuntak)*

Mereka yang divaksin kebanyakan warga pendatang. “Jika kita lihat proporsi penduduk Merauke kebanyakan pendatang, angkanya sekitar 40% untuk lokal dan 60% pendatang,” katanya.

Saat ini, cakupan vaksinasi tertinggi ada di Kota Merauke, karena jumlah penduduknya paling banyak. Sementara di distrik-distrik dengan mayoritas penduduk lokal, cakupannya sangat rendah.

“Angka vaksinasinya minim karena banyak yang menolak. Misalnya di Distrik Okaba dan sekitarnya. Kampung-kampung lokal itu masih termakan isu-isu negatif terkait vaksinasi,” terangnya.

Untuk mengatasi hal itu, Nevile mendorong hadirnya keteladanan di masing-masing kampung. Hal itu terbukti di sejumlah kampung di Distrik Muting. Setelah kepala kampung

divaksin, banyak warga lokal yang mengikuti.

“Makanya kemarin di Muting saya bilang, yang penting selain sosialisasi adalah keteladanan. Jika kepala kampung belum divaksin, maka menjadi sulit dan masyarakat tidak mengikuti. Demikian juga dengan tokoh adat dan tokoh geraja,” paparnya.

“Seharusnya ada peran dari tokoh-tokoh kunci untuk bisa menjadi contoh. Karena dampaknya menurut saya lebih luas dari sekedar sosialisasi,” imbuhnya.

Terkait munculnya keluhan yang menyebut minimnya sosialisasi ke masyarakat lokal, Nevile membantahnya. Menurutnya hal itu merupakan alasan klise, karena petugas kesehatan selalu standby di puskesmas dan bisa digerakkan kapan saja.

“Tidak adanya sosialisasi merupakan alasan yang dibuat-buat, karena petugas pasti siap saja. Siapa warga yang mau vaksin, mereka siap melayani. Tapi yang terjadi, kebanyakan warga tidak berani vaksin karena termakan hoaks,” jelasnya.

Bahkan hingga distrik terjauh, petugas kesehatan selalu setia melayani, setelah kepala kampung mengumpulkan warganya. “Semua tetap melalui kampung dan teman-teman puskesmas turun ke kampung-kampung itu,” kata Nevile.

Sementara terkait maraknya hoaks, Nevile berpendapat, semua itu tergantung dari masyarakat. Mereka bebas memilih akses berita yang positif atau negatif.

“Kan begitu. Dimana-mana berita tentang vaksin yang positif ada. Tapi jika dia termakan berita negatif, maka susah. Justru hoaks ini adanya di medsos,” ujarnya.

Media sosial (medsos) sifatnya sangat personal. Itu sebabnya, yang memiliki otoritas yang seharusnya memilih. “Jika disuruh memilih, kita tidak punya otoritas. Paling hanya kita bisa counter. Itu tergantung orang mau percaya yang mana,” terang Nevile.

Jika masyarakatnya cerdas, mereka akan mencari tahu kebenaran sebuah peristiwa melalui kanal kanal resmi. Melalui laman <https://www.kemkes.go.id/> misalnya.

“Di Kemkes ada informasi soal hoaks, seharusnya bisa diakses masyarakat. Itu tinggal dibuka saja websitenya,” katanya.

Khusus Kampung Tambat yang belum menerima

vaksinasi tahap dua, Nevile berjanji akan menyelidikinya. Ia tidak akan percaya begitu saja terhadap informasi yang diterima.

“Nanti saya akan konfirmasi ke puskesmas terdekat. Kalo saya orang tidak pernah hanya dengar berita dari satu pihak. Makanya tetap saya harus konfirmasi dulu ke Puskesmas,” paparnya.

Oleh sebab itu, Ia memastikan pemerintah sangat peduli terhadap warganya. Pemerintah telah berusaha agar pandemi ini segera berlalu, sehingga bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya.

“Pemerintah tidak akan mungkin menyengsarakan rakyatnya. Itu saya kira prinsip. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, jika banyak yang belum divaksin, maka dia akan sangat rentan untuk tertular dan berisiko menghadapi level yang berat, karena belum punya anti bodi,” paparnya.

Dengan semakin tinggi mobilitas seseorang, maka semakin rentan dan besar risikonya untuk tertular. “Itu prinsip sederhana saja sebenarnya,” kata Nevile

## 10.

# Mengintip Vaksinasi Di Merauke (Bagian II)<sup>10</sup>

Oleh: Jekson Simanjuntak

*“Kebanyakan yang mau berangkat ke daerah lain. Malah besok mau berangkat, hari ini datang minta divaksin buru-buru”*

Antrean sudah mengular, saat Nurman (30), seorang awak kapal tiba di Klinik Pratama Polres Merauke. Bersama temannya ia rela menunggu demi mendapatkan sertifikat vaksin.

Pagi itu, Selasa (14/12/2021), dia sengaja mendatangi klinik Polres yang terletak di Jalan Trikora No. 25 Kab. Merauke untuk menuntaskan vaksinasi tahap kedua. Tanpa vaksinasi lengkap, Norman tidak diperbolehkan bekerja dan tidak diizinkan berlayar.

“Contohnya kemarin saya ikut kapal dan disuruh vaksin lengkap. Jika tidak punya sertifikat tidak bisa kembali kerja ke kapal,” ungkap Norman, pemuda asal Makassar. Jika merujuk pada tanggal yang ditentukan, Norman seharusnya divaksin di bulan November. Namun ia terlambat, karena *keburu* berlayar ke Merauke. Di Merauke ia bertekad menuntaskan vaksinasi.

“Saya kemarin vaksin pertama di Sulawesi. Dosis kedua saya sudah lewat tanggalnya. Sampai disini, terus langsung vaksin, karena disini buka setiap hari,” katanya.

---

<sup>10</sup>Tulisan terbit di *MediaJakarta.com* pada 18 Januari 2022 dengan judul yang sama.



*Antrean untuk mengikuti vaksinasi di Klinik Pratama Polres Merauke. Saat ini jumlah warga pendatang dan penduduk asli Papua (OAP) yang mengikuti vaksinasi hampir berimbang. (Foto: Jekson Simanjatak)*

Usai mendapatkan vaksinasi lengkap, ia akan melanjutkan pelayaran menuju Senggo, sebuah wilayah yang terletak di Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi, Papua. Jaraknya cukup jauh dari Merauke, selama 4 hari 4 malam menggunakan kapal.

“Saya ingin berangkat ke Senggo, pedalaman Papua. Jika tidak ada sertifikat tidak bisa berangkat,” ujarnya.

Sama seperti Norman, Timotius Warba (16) juga mendatangi klinik Polres Merauke. Tujuannya, agar bisa pulang ke kampung halaman di Kimam, Distrik Ilwayab, Merauke, pada momen Natal 2021. Ia ingin bertemu dengan kedua orang tua dan saudara-saudarinya.

“Saya mau Natalan di kampung. Ntar balik lagi ke sini,” jelasnya.

Ini merupakan pengalaman vaksin pertama Timotius, karenanya ia was-was. Banyaknya informasi hoaks juga membebani pikirannya. Meski sempat ragu, ia merelakan lengan kirinya disuntik. Sekejap berlalu, rasa takutnya hilang, hanya menyisakan sedikit pegal.



*Timotius Warba (16) menjalani vaksinasi dosis pertama di Klinik Pratama Polres Merauke agar bisa pulang ke kampung halaman di Kimam, Distrik Ilwuyab. (foto: Jekson Simanjuntak)*

“Sebelumnya gak ikut vaksin massal karena belum berani. Juga karena media sosial,” ujarnya.

Norman berubah pikiran, “Ketika sudah banyak yang vaksin, maka kita bilang, di vaksin tidak apa apa. Akhirnya kita juga ikut.”

Usai menjalani vaksinasi, Timotius berencana mengajak teman-temannya. Ia akan bercerita tentang pengalaman divaksin. “Saya ada rencana ajak teman. Saya akan bilang, kalo kita vaksin tidak apa apa. Tidak masalah,” katanya.

Sebelum divaksin, Timotius sempat membeli tiket. Namun ia ditolak, dan disarankan segera divaksin karena aturannya memang demikian. “Pernah nyoba naik kapal pas belum vaksin. Terus disuruh pulang. Petugas tiket bilang, *dong* harus vaksin dulu, baru bisa beli tiket,” ujarnya. “Setelah ada surat vaksin baru bisa dilayani untuk naik ke kapal.”

### **Vaksinasi di Klinik Pratama Polres Merauke**

Kasie Dokkes Polres Merauke Rahmadani menjelaskan, kegiatan vaksinasi di Klinik Pratama telah dimulai pada Agustus 2021. Saat itu, untuk membantu kelancaran vaksinasi, 36 relawan didatangkan yang biayanya ditanggung oleh Mabes Polri.

“Kami membentuk 8 tim. Tujuh tim yang *mobile* keluar dan 1 tim statis di klinik Polres,” ujarnya.

Setelah kontrak relawan usai di bulan September, pelayanan vaksinasi tetap berjalan. “Waktu itu sempat Senin sampai Jumat saja dan Sabtu – Minggu tidak. Cuma kemarin diperintahkan tiap hari untuk pelayanan vaksinasi. Jadinya kita buka setiap hari,” terang Rahmadani.

Hingga 13 Desember 2021, sebanyak 20 ribu dosis vaksin tahap pertama telah disalurkan dan untuk dosis kedua sebanyak 10 ribu lebih. Artinya, sudah lebih dari 30 ribu orang datang ke klinik Polres untuk di vaksin. Mereka berasal tidak hanya dari wilayah Merauke, tetapi juga dari luar daerah.

“Jenis vaksin yang digunakan *Sinovac. Moderna* hanya untuk kalangan nakes sebagai *booster* vaksin ketiga,” ungkapnya.

Menurut Rahmadani, metode yang digunakan untuk menyukseskan vaksinasi melalui pelibatan *babinkamtibmas* dan anggota *polres*. Mereka yang mengajak masyarakat untuk divaksin. “Jadi itu metode pertama, selain pelibatan tim medis yang ada disini,” ujarnya.

Kedua, memberikan bantuan *sembako*. “Mungkin pernah dengar waktu Agustus – September, kita menggalakkan vaksin menggunakan *sembako*. Diberikan beras, telur bahkan yang sudah vaksin dikasih duit Rp50 ribu,” jelas Rahmadani.

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi tetap ada. Di benak masyarakat tertanam pandangan bahwa mereka mengidap penyakit tertentu. “Saya tidak bisa divaksin, lalu kita jelaskan berulang ulang. Jika tidak bisa juga, ujung-ujungnya dirujuk ke dokter spesialis,” ucapnya.

Selain itu, banyak yang datang hanya untuk mendapatkan surat keterangan tidak bisa divaksin. Padahal jika dilihat dari aspek medisnya, ia layak divaksin. “Cuma memang dari pribadinya sendiri yang menganggap, bahwa ini bahaya, sehingga dia gak mau.”

Fenomena ingin mendapatkan surat tidak bisa vaksin diamini oleh Asnianti (37), vaksinator dan petugas kesehatan di klinik Polres. Menurutnya, warga enggan divaksin karena sejumlah hal.

Hanya saja, permintaan itu bukan perkara mudah. Klinik Polres tidak akan memberikannya tanpa alasan yang

jelas. Seseorang harus diperiksa terlebih dahulu untuk membuktikan layak atau tidaknya divaksin. “Tapi kita gak kasih keluar, yang kasih keluar hanya rumah sakit, jadi kita arahkan ke sana,” katanya.

Uniknya, ketika tidak mendapatkan yang diinginkan, warga biasanya pasrah. Mereka rela divaksin. “Yang tidak bisa ke rumah sakit, mereka akhirnya, oke lah, vaksin saja,” ujar Asnianti.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Neville Muskita menjelaskan, seseorang tidak divaksin karena alasan tertentu. Umumnya yang memiliki penyakit berkaitan dengan autoimun, penyakit penyerta yang tidak terkontrol, wanita hamil atau menyusui, baru sembuh dari Covid-19 kurang dari 3 bulan dan sedang sakit.

“Kemudian ada penyakit-penyakit Diabetes dengan kadar gula yang tidak terkontrol hingga Hipertensi,” katanya.

Khusus mereka yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke memiliki datanya. Data tersebut juga dilaporkan ke provinsi. “Datanya ada *by system* untuk ditarik jika sewaktu-waktu diperlukan. Tapi jumlahnya tidak banyak,” tegas Neville.

### **Prinsip Dasar Vaksinasi**

Setiap warga yang hendak divaksin, harus melewati serangkaian tahapan. Dimulai dari pemeriksaan tekanan darah dan suhu. Jika suhunya di atas 37.5 derajat C, vaksinasi akan ditunda.

“Begitu juga jika tekanan darah di atas 180 per 110, kita tunda. Biasanya kita kasih resep. Pulang dulu. Tiga hari kemudian balik lagi untuk divaksin,” jelas Rahmadani.

Hal yang sama dilakukan ketika menemukan warga dengan riwayat Diabetes. “Kita periksa gulanya dulu. Jika di atas 250 biasanya tidak divaksin, tapi ditunda. Ditunggu sampai stabil,” ujarnya.

Senada dengan itu, Neville menjelaskan prinsip dasar sebelum divaksin adalah penapisan (*screening*) yakni proses menjalani berbagai tes dan prosedur yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan tertentu pada tahap dini.

Cara itu juga digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan yang berbeda, termasuk kanker, penyakit jantung,

diabetes, penyakit kronis lainnya dan masalah kesuburan. Tergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan dan faktor risiko.

“Jadi prinsipnya, sebelum vaksinasi sudah harus melewati proses *screening*. Setelah itu dinyatakan layak divaksin,” katanya.

Summary		data monitor vaksinasi 202109...	target_kab kategori
Showing first 29 rows.			
<a href="#">Download all rows as a text file</a>			
Kab/kota	Provinsi	Summary AGG(Achievement % Vaksin1)	SUM(Divaksin 1)
Kota Jayapura	Papua	77.90%	180,626
Kab. Yalimo	Papua	1.80%	1,126
Kab. Yahukimo	Papua	1.81%	4,398
Kab. Waropen	Papua	26.61%	4,541
Kab. Tolikara	Papua	1.59%	2,621
Kab. Supiori	Papua	30.03%	3,463
Kab. Sarmi	Papua	50.55%	10,962
Kab. Puncak Jaya	Papua	2.28%	3,508
Kab. Puncak	Papua	2.62%	1,976
Kab. Paniai	Papua	3.57%	5,055
Kab. Nduga	Papua	2.79%	1,924
Kab. Nabire	Papua	52.65%	48,103
Kab. Mimika	Papua	71.80%	123,637
Kab. Merauke	Papua	84.51%	105,519
Kab. Mappi	Papua	48.94%	25,931
Kab. Mamberamo Tengah	Papua	6.80%	2,006
Kab. Mamberamo Raya	Papua	17.58%	3,583
Kab. Lanny Jaya	Papua	1.32%	1,716
Kab. Kepulauan Yapen	Papua	26.05%	16,111
Kab. Keerom	Papua	74.73%	24,281
Kab. Jayawijaya	Papua	14.74%	24,434
Kab. Jayapura	Papua	73.25%	63,895
Kab. Intan Jaya	Papua	2.68%	2,399
Kab. Dogiyai	Papua	2.05%	1,455
Kab. Delyai	Papua	2.90%	1,736
Kab. Boven Digoel	Papua	70.51%	22,012
Kab. Blak Numfor	Papua	52.38%	39,437
Kab. Asmat	Papua	62.14%	31,254
Kab Pegunungan Bintang	Papua	9.38%	4,211
Showing first 29 rows.			

Vaksinasi COVID-19 Tahap Pertama Berdasarkan Kabupaten/ Kota Di Papua. Data per Tanggal 18 Januari 2022 Pukul 18.00 WIB. (sumber: <https://vaksin.kemkes.go.id>)

Summary	data monitor vaksinasi_202109...	target_kab_kategori
---------	----------------------------------	---------------------

Showing first 29 rows.  
[Download all rows as a text file](#)

Summary			
Kab/kota	Provinsi	AGG(Achievement % Vaksin2)	SUM(Divaksin 2)
Kota Jayapura	Papua	56.62%	131,289
Kab. Yalimo	Papua	1.31%	821
Kab. Yahukimo	Papua	1.36%	3,305
Kab. Waropen	Papua	15.07%	2,572
Kab. Tolikara	Papua	1.42%	2,345
Kab. Supiori	Papua	18.26%	2,106
Kab. Sarmi	Papua	34.02%	7,377
Kab. Puncak Jaya	Papua	2.02%	3,114
Kab. Puncak	Papua	2.31%	1,742
Kab. Paniai	Papua	2.96%	4,190
Kab. Nduga	Papua	2.24%	1,548
Kab. Nabire	Papua	40.38%	36,895
Kab. Mimika	Papua	57.97%	99,813
Kab. Merauke	Papua	64.38%	80,387
Kab. Mappi	Papua	30.99%	16,420
Kab. Mamberamo Tengah	Papua	3.03%	895
Kab. Mamberamo Raya	Papua	10.33%	2,106
Kab. Lanny Jaya	Papua	0.98%	1,267
Kab. Kepulauan Yapen	Papua	17.02%	10,523
Kab. Keerom	Papua	56.80%	18,455
Kab. Jayawijaya	Papua	11.27%	18,682
Kab. Jayapura	Papua	51.75%	45,142
Kab. Intan Jaya	Papua	2.20%	1,972
Kab. Dogiyai	Papua	1.84%	1,303
Kab. Deiyai	Papua	2.26%	1,352
Kab. Boven Digoel	Papua	55.15%	17,218
Kab. Biak Numfor	Papua	35.59%	26,801
Kab. Asmat	Papua	22.93%	11,533
Kab Pegunungan Bintang	Papua	6.89%	3,095

Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua Berdasarkan Kabupaten/ Kota Di Papua. Data per Tanggal 18 Januari 2022 Pukul 18.00 WIB. (sumber: <https://vaksin.kemkes.go.id>)

Lebih jauh Nevile menyebut soal target vaksinasi di Merauke, “Mudah-mudahan akhir tahun (2021) ini bisa mencapai 80%. Sekarang sudah tercapai. Sedapat mungkin itu yang kita lakukan. Tetapi target minimal harus ada.”

Vaksinasi dilakukan untuk memunculkan *herd*

*immunity* (kekebalan kelompok) di masyarakat. Syaratnya, angka vaksinasi minimal telah mencapai 70% dari populasi total. “Kita itu sudah tercapai. Dan semakin banyak yang divaksin semakin baik,” ujarnya.

“Karena sudah 80%, maka kita stop disitu. Tidak begitu. Kita tetap jalan. Jika masih ada yang mau vaksin, maka tetap divaksin,” imbuhnya.

### **Berangkat ke luar Daerah**

Sepengamatan Rahmadani, banyak warga Merauke yang tiba-tiba bersedia divaksin, karena ingin melakukan perjalanan ke luar daerah. Baik perjalanan antar kabupaten, atau pun antar pulau dengan menggunakan mobil, kapal atau pesawat terbang.

“Kebanyakan yang mau berangkat ke daerah lain. Malah besok mau berangkat, hari ini datang minta divaksin buru-buru,” katanya.

Pun, tak sedikit yang tertahan di bandara, karena belum divaksin. “Kita komunikasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), diarahkan kesini. Baru divaksin dulu sebelum berangkat”

Menurutnya, dari aspek medis hal itu kurang baik, apalagi jika belum divaksin dosis pertama. Saat penyuntikan tahap pertama, antibodi belum terbentuk sempurna, sehingga risiko terpapar Covid-19 sangat besar.

“Dia bisa terkena, karena antibodinya belum terbentuk, dia sudah berangkat kesana – kemari. Untuk pembentukan antibodi biasanya 2 minggu keatas,” terang Rahmadani.

Seperti halnya Rahmadani, Asnianti juga menyaksikan, keberangkatan ke luar daerah merupakan alasan untuk mengikuti vaksinasi. Utamanya dilakukan oleh penduduk lokal.

“Kebanyakan orang lokal yang kesini karena mau berangkat ke luar kota. Karena itu mereka vaksin. Kalo warga pendatang karena kesadaran pentingnya vaksinasi,” paparnya.

“Dan yang vaksin karena mau berangkat. Itu yang paling banyak,” imbuh Asnianti.

Bahkan tak sedikit yang siangnya selesai vaksinasi, sorenya langsung berangkat. “Istirahatnya kurang. Akibatnya badan jadi lemah. Harusnya minimal vaksin 3

hari sebelum berangkat, biar antibodi terbentuk dulu,” jelas Asnianti.

Kebutuhan sertifikat vaksin diakui Joseph Albin Gebze, Sekretaris LMA Kabupaten Merauke sebagai syarat yang tidak bisa ditawar. Semua warga harus mematuhiinya agar bisa melakukan perjalanan ke luar daerah.

Harus ada surat vaksin untuk lintas daerah dan biasanya di titik-titik strategis ada pemeriksaan. “Misalnya di perbatasan, pasti di *sweeping* disitu,” katanya.

Jika tidak memilikinya, tidak ada cara lain selain kembali. “Harus kembali ke kota. Itu kewajiban jika ingin bepergian antar kabupaten,” ujar Joseph.

### **Pengalaman PON XX**

Saat ini, rata-rata warga yang divaksin di klinik Polres setiap harinya mencapai 100 orang. Jumlah itu menurun drastis jika dibandingkan saat PON XX yang digelar pada 2-15 Oktober 2021.

“Waktu itu, pernah 2 ribu orang dalam sehari. Karena kita kan ada 8 tim, maka tidak ada masalah,” kata Rahmadani.

Warga yang datang vaksin berasal dari beragam wilayah. Ada yang dari Distrik Kurik atau pun daerah lain demi menyaksikan atlet daerah berlaga. “Karena disana (distrik) tidak buka vaksin, mereka datang kesini,” tegasnya.

Asnianti juga punya pengalaman menarik saat PON. Dalam sehari ia menyuntik 300 - 500 orang. “Pernah juga 500. Itu masih konsen. Cuma agak pegal angkat tangan,” katanya.



Warga lokal menunggu angkutan kota usai mengikuti vaksinasi di Klinik Pratama Polres Merauke. Pada saat gelaran PON XX lalu, klinik melayani ribuan warga yang ingin divaksin. (Foto: Jekson Simanjuntak)

Dibandingkan saat ini, Asnianti menilai jumlahnya terbilang rendah, karena idealnya mereka harus menyuntik 200 – 300 orang per hari. “100 orang itu cepat saja vaksinnya.” Sejak bertugas di klinik Polres selama 7 tahun, baru kali ini Asnianti menyaksikan animo warga yang begitu besar. Meskipun banyak yang takut jarum suntik, demi menonton PON mereka rela divaksin.

“Kita menangani vaksin aman-aman saja. Cuma masyarakat agak takut. Takut jarum suntik,” katanya.

Untuk mengatasi hal itu, Asnianti dan rekannya memberikan pengertian, bahwa disuntik vaksin tidaklah sakit. “Cepat aja kok. Cuma efek sampingnya mungkin ada. Beda-beda tiap orang yang terima.”

Wakil Bupati Kabupaten Merauke Riduwan membenarkan jika momen PON XX, banyak warga yang menonton. Sebagai langkahantisipasi penyebaran Covid-19, penonton diwajibkan memiliki sertifikat vaksin.

“Sesungguhnya memang betul, karena di dalam PON juga berdesak-desakan, dan kita belum tahu apakah ada yang tertular. Karena yang terpapar ini kan tidak kelihatan,” katanya.

Atau, bisa juga ada yang tanpa gejala (OTG) dan terlihat sehat karena imunnya kuat. Namun tetap bisa menularkan. Ketika warga yang menonton telah divaksin, penyebarannya bisa ditekan.

“Walaupun vaksin tidak menjamin untuk tidak tertular, tetapi vaksin bisa membuat imun lebih kuat terhadap serangan Covid-19,” tegasnya.

Itu sebabnya, Riduwan mengimbau masyarakat Merauke untuk menyelesaikan semua tahapan vaksinasi. Pasalnya, banyak warga yang tidak melanjutkan vaksinasi tahap kedua.

“Saya berharap yang belum vaksin mari kita vaksin. Karena itu penting untuk diri kita sendiri. Sekaligus untuk mereka yang baru vaksin dosis I bisa ditingkatkan ke dosis II dan seterusnya,” terangnya.

Situasi ini semakin genting, seiring munculnya varian Covid-19 terbaru, yakni Omicron dengan penyebaran yang sangat cepat. “Kita bisa melindungi masyarakat dari Covid-19 dan seluruh variannya, tentu yang pertama melalui

protokol kesehatan, kemudian dengan vaksin itu sendiri,” ujar Riduwan.

Tokoh Agama Katolik Pius Cornelis Manu tidak menampik fakta bahwa banyak orang rela divaksin mendadak agar bisa menyaksikan PON dari dekat. Padahal tadinya mereka takut vaksin.

“Bagi orang Papua, olah raga itu merupakan gaya hidup. Apalagi yang namanya sepak bola, pasti mereka vaksin ramai-ramai. Apalagi ada tim Papua Putri yang masuk final,” terangnya.

Saking ramainya, jalanan di Merauke dipadati kendaraan dan warga yang berkerumun. “Tidak dapat tempat pun, mereka kelilingi itu stadion dan duduk diatas tembok. Tembok dipenuhi manusia. Tembok berbuah manusia,” kata Pastor Pius.

Uniknya, ketika PON berlalu, banyak yang tidak melanjutkan dosis kedua. Padahal vaksin tahap kedua sama pentingnya untuk membangkitkan antibodi dan membentuk kekebalan kelompok (*Herd Immunity*).

“Vaksinasi kedua tidak lanjut. Itu demi supaya bisa nonton dan ramai-ramai,” ucapnya.

### **Warga Tanpa NIK Boleh Divaksin**

Dari semua jenis layanan yang ditawarkan, terobosan terbaru klinik Polres adalah melayani masyarakat yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

“Kita tetap vaksin, dan akan keluar surat keterangan yang menyebutkan bahwa ia telah divaksin,” terang Rahmadani. Sertifikat yang dikeluarkan tidak terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Hanya saja, warga tersebut akan didata dan dimasukkan ke dalam sistem khusus yang bersifat manual. Ini dilakukan agar siapa pun bisa melakukan perjalanan dan tidak terbebani dengan sertifikat vaksin.

“Jadi kalo dia mau berangkat kapal atau pesawat, nanti kita koordinasi dengan KKP. Tinggal dilihat nama dan tanggal lahir, untuk memastikan bahwa dia sudah divaksin,” jelasnya. Kebijakan itu, dijalankan oleh Bid Dokkes Polres Merauke berdasarkan perintah dari Polda Papua. “Tapi sebenarnya itu instruksi presiden, bahwa tidak boleh membatasi

masyarakat,” papar Rahmadani.

Diskresi itu dipilih, karena Papua memiliki wilayah luas dan tidak semua penduduk lokal memiliki KTP. Ini juga erat hubungannya dengan menyukseskan vaksinasi.

“Kita tahu sendiri di Papua yang punya KTP tidak semua. Jangan menghalangi mereka yang mau vaksin,” katanya.

Rahmadani menuturkan, “Awalnya memang sulit, karena dari dinas kesehatan tidak boleh, karena tidak terdata. Tapi takutnya mereka susah jika ingin berangkat.”

Nevile Muskita tidak membantah diskresi itu. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menggenjot vaksinasi meskipun faktanya banyak penduduk lokal tidak memiliki NIK.

“Masyarakat lokal juga banyak yang mau divaksin, tapi terkendala administrasi kependudukan. Makanya saya bilang, dalam sistem dibuatkan diskresi,” ujarnya. Kemudian dibuat fitur khusus untuk mengakses warga yang belum memiliki NIK.

Ide itu mencuat, pasca monitoring dan evaluasi bersama pemerintah provinsi. “Mereka tanya persoalan di daerah dan kita sampaikan bahwa ada kendala besar terkait NIK. Kita mau vaksin, tapi mereka belum punya,” ujarnya.

Selanjutnya warga tanpa NIK tetap divaksin dan datanya dicatat, namun tidak terekam di sistem Peduli Lindungi. “Ini jadi solusi, karena tujuan vaksin adalah untuk semua masyarakat,” ungkap Nevile.

### **Dilema Bansos**

Pastor Pius mengkritisi pemberian bansos untuk menyukseskan vaksinasi. Menurutnya pola-pola seperti itu tidak mencerdaskan masyarakat. Yang harus dibangun adalah kesadaran bersama bahwa vaksin itu perlu dan baik untuk kesehatan.

“Bahwa kita ingin memberi kesadaran pada orang banyak untuk ikut vaksin harus dibayar segala. Harus diberi bantuan seperti ini. Saya hanya bertanya-tanya mengapa itu terjadi,” ujarnya.



Setiap hari Klinik Pratama Polres Merauke melayani 100-150 warga yang hendak mengikuti vaksinasi. Di tahap-tahap awal untuk menggenjot vaksinasi, warga yang datang diberikan bantuan sosial. (Foto: Jekson Simanjuntak)

Jika bantuan diberikan dalam kondisi kedaruratan, Pastor Pius bisa memakluminya. Pada situasi itu, masyarakat biasanya tidak bisa melakukan apa-apa, selain menanti bantuan dari semua pihak.

“Bantuan dalam rangka kondisi darurat dan masyarakat tidak bisa lakukan aktivitas apapun, maka silahkan. Tetapi yang kaitan dengan vaksinasi, betul-betul bagi saya ini konyol,” terang pastor Paroki St Michael Kudamati Merauke itu.

Jika dibiarkan, “Itu semacam, akan banyak hal yang muncul. Misalnya nantinya orang dimanja. Orang tidak punya kepekaan diri.”

Setiap orang harus memahami mengapa vaksin itu penting. “Jangan sampai, kalo saya ikut vaksin, kasih saya dulu. Pas dia kesana dia tidak mau vaksin, karena tidak ada uangnya,” ungkap Pastor Pius.

Selain itu, dia juga mempertanyakan sumber dana bansos, “Ini saya tidak tahu, apakah ini masuk dalam program negara. Jadi saya jadi bingung juga hal seperti itu terjadi.”

Lebih jauh Pastor Pius ingin mendalami urgensi dari pemberian tersebut. Apakah untuk menyukseskan vaksinasi, lalu sejauh mana kepentingannya. “Kan mereka harus refleksi dulu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pastor Pius juga menyarankan agar peran kepala pemerintahan terkecil di kota, seperti ketua

RW ditingkatkan. Mereka seharusnya ada di garda terdepan untuk melakukan sosialisasi kepada warga.

“Dalam hal ini kurang berperan banyak. Seolah-olah semua menjadi tanggungjawab para medis atau petugas medis saja,” katanya.

### **Keterlibatan TNI/Polri**

Wakil Bupati Riduwan sangat mengapresiasi pelibatan TNI/Polri dalam kegiatan vaksinasi di Merauke. Menurutnya, Klinik Pratama Polres Merauke sangat membantu, karena mampu bergerak secara sistematis dan kompak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya apresiasi terhadap TNI/Polri. Sangat bagus sekali,” katanya.

Masyarakat menjadi sangat terbantu, karena TNI/Polri mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Peran mereka diperlukan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. “NKRI itu harga mati,” tegasnya.

Ketika vaksinasi berjalan lancar dan aman, Riduwan mengatakan, itulah bukti nyata kehadiran TNI/Polri, meskipun secara tupoksi kedua institusi itu berbeda dan tidak bisa disamakan.

“TNI punya fungsi sendiri. Polri juga begitu. Buktinya, Merauke bisa tenteram, rukun, damai dan aman, itu bukti peran dari TNI/Polri,” kata Riduwan.

Sependapat dengan Wakil Bupati, Nevile Muskita menegaskan bahwa TNI/Polri sangat diperlukan, karena mereka memiliki tim khusus kesehatan. Tim itu yang membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan vaksinasi.

“Misalnya detasemen kesehatan di TNI dan Dokkes Polri. Jadi kesehatan disini bukan hanya kesehatan milik pemerintah pusat atau daerah. Tidak. Semua ikut terlibat,” katanya.

**Himbauan Bupati Kabupaten Merauke**  
Dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Merauke.



**Drs. ROMANUS MBARAKA, MT**  
BUPATI MERAUKE

1. Agar tetap tenang, jangan resah dan tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya
2. Masyarakat dihimbau untuk tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas
3. Terus menjaga kesehatan dengan perbanyak makan buah dan sayur
4. Jaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan aktivitas fisik
5. Kalau sakit, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat

*Himbauan Bupati Kabupaten Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT dalam menghadapi pandemi Covid-19. (sumber: <http://covid19.merauke.go.id>)*

Pelibatan bahkan dilakukan sejak awal. Termasuk dengan pendirian sentra vaksinasi di Klinik pratama Polres Merauke, Aula Kodim 1707 Merauke, dan Lapangan apel Mapolres Merauke. Selain itu, vaksinasi puskesmas juga tidak dilupakan.

“Tidak hanya rumah sakit atau puskesmas saja. Tidak. Semua klinik-klinik dari awal kita libatkan,” ungkap Neville.

Setuju dengan pelibatan TNI/Polri, Pastor Pius menilai dalam program vaksinasi sebaiknya hanya melibatkan tim kesehatan dari dua institusi tersebut.

“Jika di dalam tentara ada kesatuan dokter, biarkan mereka yang terlibat. Mereka yang seharusnya bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat,” katanya.

Pasalnya, ketika melibatkan TNI/Polri dengan seragam lengkap, Pastor Pius menilai, hal itu kurang elok. “Namanya di seluruh dunia, manusia berloreng itu, orang sudah punya pikiran lain-lain. Apalagi maaf, Papua ini daerah konflik,” ujarnya.

Belum lagi, trauma sosial terhadap militer terus

terjadi. Turun temurun diwariskan dan hampir merata di seluruh Papua, termasuk Merauke. Meskipun di Merauke konfliknya cenderung kecil, bukan berarti potensinya tidak ada.

Karena itu, Pastor Pius berpandangan, pelibatan TNI/Polri dalam jumlah besar sangat berpengaruh, khususnya di wilayah-wilayah dengan pengalaman konflik yang berkepanjangan. Tak heran jika di wilayah-wilayah tersebut, capaian vaksinasinya minim. Jika pun ada, kebanyakan dilakukan oleh pendatang.

“Di Merauke ini, pelanggaran HAM seperti yang terjadi di pegunungan tengah, atau kepala burung, sementara ini belum terjadi. Cuma ada rasa takut terhadap aparat akhirnya muncul,” katanya.



Update terakhir di Kabupaten Merauke yang di-publish di website <http://covid19.merauke.go.id/>. Data tersebut merupakan temuan yang diinput pada tanggal 10 Agustus 2021.

Di satu sisi, minimnya konflik menjadikan Kabupaten Merauke mampu menggenjot vaksinasi, bahkan dianggap sebagai wilayah dengan capaian vaksinasi tertinggi di Papua. Hanya saja, pelibatan TNI/Polri tetap dikeluhkan, karena Merauke merupakan wilayah yang aman.

“Jadi menurut saya, keterlibatan mereka penting, tetapi komisi-komisi yang seharusnya dilibatkan. Saya juga tidak menutup diri untuk keterlibatan mereka, tidak,” tutur Pastor Pius.

Dia menambahkan, “Kami memerlukan mereka. Tetapi kan, ada bidang-bidang yang harus mereka libatkan diri. Jangan sampai itu menjadi euforia seluruh kesatuan.”

Karena begitu truk-truk TNI/Polri datang untuk mengangkut warga yang akan divaksin, Pastor Pius khawatir, warga merasa tidak nyaman.

“Maaf, saya juga ada anggota keluarga yang tentara loh. Ada polisi, dan saya terbiasa bicara langsung begini.”

Lebih jauh dia menyarankan agar TNI/Polri menanggalkan seragamnya saat berada di tengah masyarakat. Dengan begitu rasa percaya masyarakat akan timbul untuk menyelesaikan vaksinasi

“Sebaiknya seorang dokter atau perawat tentara atau polisi menggunakan atribut umum, putih putih. Jangan seragam. Orang nanti rasa kurang nyaman,” pungkasnya.

## 11.

# Mengintip Vaksinasi Di Merauke (Bagian III)<sup>11</sup>

Oleh: Jekson Simanjuntak



*“Memang banyak yang mau vaksin, tapi karena jalannya yang kurang baik dan kendaraan juga minim. Bahkan sampai sekarang kendaraan umum penumpang saja belum ada.”*

Tingkat vaksinasi Covid-19 di tanah Papua secara umum tergolong rendah jika dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kendati demikian, sejumlah kabupaten di Papua memiliki cakupan vaksinasi diatas 70 persen. Merauke salah satunya. Meskipun terbilang tinggi, ternyata jumlah penduduk lokal (Orang Papua Asli) yang divaksinasi sangat rendah.

---

<sup>11</sup>Tulisan terbit di *MediaJakarta.com* pada 19 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Kondisi itu, salah satunya ditengarai akibat pelibatan TNI/Polri.

Terbukti, Jumat (17/12/2021) tidak banyak warga yang mendatangi posko vaksinasi yang dibangun Polsek Kurik di kawasan Dermaga Kumbe, berjarak 93 Km dari Kota Merauke. Padahal, beberapa hari sebelumnya sosialisasi telah dilakukan oleh aparat Polsek.



*Kapolsek Kurik AKP Marlina Kaimu ikut membantu menenangkan warga lanjut usia yang akan mengikuti vaksinasi. (Foto: Jekson Simanjuntak)*

Kapolsek Kurik AKP Marlina Kaimu yang sejak pukul 8.30 WIT tiba di lokasi berharap banyak warga yang datang. Pasalnya, Dermaga Kumbe yang merupakan wilayah Distrik Malind dianggap strategis untuk menjangkau warga dari dua distrik, yakni Kurik dan Malind.

Kumbe juga menghubungkan antara dua daratan Kabupaten Merauke yang dipisahkan oleh Sungai Kumbe. Sepanjang waktu muara Sungai Kumbe dimanfaatkan oleh kapal-kapal kayu untuk berlindung dari gelombang.

“Kawasan Kumbe dipilih agar para pelaut dan ABK yang bersandar bisa ikut vaksinasi,” ujarnya. Setiap hari, puluhan kapal bersandar. Itu sebabnya kawasan Kumbe tak pernah sepi.

Selain dibantu tenaga kesehatan dari Polres Merauke, AKP Marlina dan timnya didukung oleh Puskesmas Kumbe

dalam melaksanakan vaksinasi. “Hari ini kita membuka vaksinasi bekerjasama dengan Puskesmas Kumbe dengan target 500 orang,” ungkapnya

Sejatinya, pelaksanaannya digelar dua hari, sesuai arahan Kapolres. Vaksinasi menargetkan 1000 orang, berasal dari beragam kampung di kawasan itu, termasuk para ABK.

“Tapi jika melihat situasi dan kondisi, kami punya inisiatif bahwa target untuk 2 hari bisa dapat 500 orang saja,” kata AKP Marlina bersemangat.

Sebelumnya, ia sempat berkoordinasi dengan Humas Polres Merauke agar dibuatkan iklan vaksinasi yang akan disebarakan kepada masyarakat sebelum hari H.

“Iklan itu Humas Polres terbitkan, saya langsung sampaikan kepada kepala distrik yang ada di wilayah sini. Kebetulan membawahi 3 distrik, dan saya utamakan adalah Distrik Kurik dan Distrik Malin,” terangnya.

Poster dan selebaran kemudian disebarluaskan oleh para kepala kampung dan ketua RT/RW di dua distrik tersebut. “Mungkin hari pertama ini, kami lihat, masih berdatangan masyarakat satu-dua, tapi di hari kedua kami harapan lebih meningkat lagi,” ujarnya.

Kegiatan vaksinasi direncanakan sejak pagi hingga sore hari, tergantung dari banyaknya warga yang datang. “Kami lihat situasi. Kalau memang masyarakat datang, tetap kami layani,” jelasnya.

Untuk menghargai kerelaan dan kesediaan mengikuti vaksinasi, warga akan mendapatkan bantuan sosial. “Mereka yang telah vaksin ada pemberian sembako berupa beras 5 Kg,” katanya. Jika ditotal beras yang disalurkan berjumlah dua ton.

Jika vaksinasi di Dermaga Kumbe berjalan lancar, selanjutnya akan digelar di lokasi lain, tergantung kebutuhan masyarakat. Jika dirasa sulit, halaman Polsek Kurik bisa digunakan sebagai solusi alternatif.

“Atau saya buka di distrik Animha, saya akan lihat dari situasi dan cuaca yang suka berubah karena angin dan hujan ini,” ungkapnya.

### **Rajin ke Kampung Lokal**

AKP Marlina menjelaskan, tidak semua penduduk lokal enggan divaksin. Namun tidak sedikit yang terpengaruh

informasi di media sosial atau pun menonton berita di televisi. “Mungkin mereka lihat berita-berita yang buat mereka takut. Kalo niat divaksin mereka ada. Mereka mau agar bisa sehat juga,” katanya.

Hal itu merupakan tantangan terberat yang dihadapi AKP Marlina. Ia tak ingin saudaranya sesama orang asli Papua (OAP) tertinggal dalam vaksinasi.

“Saya datangi mereka dan rata-rata menolak, karena itu sudah. Mereka lebih mempercayai hoaks yang berkembang,” terangnya.

Namun dia tidak mudah menyerah. AKP Marlina rutin memberikan pengertian kepada penduduk lokal yang ditemuinya. Semua kesempatan ia manfaatkan. “Toh mereka ada yang langsung mengerti dan paham tentang vaksin ini dan membawa keluarga,” katanya.

Bahkan ada juga yang berkata, “Ibu kami mau vaksin dan kami sudah siap. Ternyata vaksin itu baik untuk kami. Hoaks yang selama ini berkembang tidak benar.”

Jika demikian, AKP Marlina akan berkoordinasi dengan para kepala kampung untuk melakukan penjemputan. “Memang banyak yang mau vaksin, tapi karena jalannya yang kurang baik dan kendaraan juga minim. Bahkan sampai sekarang kendaraan umum penumpang saja belum ada,” ungkapnya.

Kedepannya, AKP Marlina berencana meminjam kendaraan angkut milik Polres Merauke. “Itu bisa digunakan atau bisa juga meminjam kendaraan masyarakat disini. Itu pun harus ada koordinasi dari aparat kampung.” katanya.

Selama ini, salah satu hambatan terbesar adalah munculnya anggapan bahwa penduduk lokal tidak keluar daerah, sehingga tidak perlu divaksin. Vaksin hanya untuk pendatang.

“Memang rata-rata saudara saya mengatakan, kami tidak kemana-mana. Kami disini saja. Kami di kampung, kami sehat. Kami makan makanan yang ada disini, kami sehat,” ujarnya.

Atas dasar itu, AKP Marlina rajin masuk ke kampung-kampung lokal untuk memberikan pengertian tentang vaksinasi. “Vaksin bukan untuk membunuh mereka tetapi untuk kami sehat,” ucapnya.

## Vaksin Syarat Keberangkatan

Parto Suwito (84) warga Kampung Salor Indah tertunduk lesu usai dilarang mengikuti vaksinasi tahap pertama. Petugas yang memeriksanya menemukan tekanan darah yang tinggi dan berisiko terhadap kesehatannya jika vaksinasi dilanjutkan.

“Tadi saya tidak dikasih vaksin karena tekanan darah yang tinggi, dan jika divaksin saya tidak kuat,” paparnya.

Parto sengaja datang ke Kumba, karena Senin (20/12/2021) akan terbang ke Jayapura bersama sang istri untuk sebuah urusan keluarga. Sejak sertifikat vaksin disyaratkan agar bisa melakukan perjalanan ke luar daerah, Parto berniat ingin divaksin. Kebetulan ia mendapat kabar dari anggota keluarganya jika Polsek Kurik melakukan vaksinasi di Kampung Kumba.

“Kalau bisa divaksin sekarang (Jumat, 17/12/2021), soalnya Senin mau terbang ke Jayapura. Saya ikut vaksin biar bisa naik pesawat,” ungkapinya.

Di hadapan petugas medis, Parto mengaku mengidap Asma dalam tiga tahun terakhir. Jika penyakitnya kambuh, ia mengalami kesulitan bernafas. Dan malam sebelum vaksinasi, ia minum obat untuk meredakan penyakitnya.

Hal itu diamini Ika Suci Lestari (22), cucu Parto yang mendampingi. Menurutnya, penyakit sang kakek kambuh berdampak pada tekanan darahnya. “Tadi pas dicek tekanannya tinggi sekali,” ujarnya.

Bagi Parto, kondisi itu tidak menggoyahkan niatnya untuk tetap berangkat. Pasalnya, ia sudah lama tidak bertemu anak dan cucunya. Ia bahkan rela membayar, jika hal itu memungkinkan.

“Surat keterangan dikasih. Bayar uang ya, saya mau. Yang penting sudah ikut vaksin toh,” katanya.

Parto mengubur keinginannya itu, karena vaksinator malah merujuknya ke RSUD Merauke. Ia tidak tahu, apakah disana bisa mendapatkan surat keterangan tidak boleh divaksin. “Setelah ini mau minta surat keterangan dari rumah sakit, bahwa tidak bisa divaksin. Jika surat itu ada, maka bisa terbang,” ujar Parto.

Saat ditanya kemungkinan tetap tidak diizinkan berangkat, Parto justru berharap sebaliknya. Ia ingin hal

itu bisa diselesaikan di Dermaga Kumbe dan tidak berlanjut ke rumah sakit.

“Kalo bayar uang ya, mau berapa bayarnya. Inginnya selesai disini. Kalau di kota tidak ada jaminan,” tuturnya.

Sementara Wakiyem (75), istri Parto Suwito bisa bernafas lega. Ia dinyatakan sehat dan diperbolehkan mengikuti vaksinasi. Tiga puluh menit kemudian, sertifikat vaksin ia terima.

“Saya senang bisa ikut vaksin, karena butuh pegangan ini, karena mau berangkat ke Jayapura hari Senin (20/12/2021),” katanya.

Saat divaksin Wakiyem tidak merasakan sakit. Semua terjadi dengan cepat, berkat bantuan tenaga medis yang ramah dan cekatan.

“Tidak rasa apa-apa. Enak sekali. Saya tidak lihat pas divaksin. Kalo liat jarumnya sih takut,” ungkapnya. Selanjutnya, Wakiyem harus mengikuti vaksinasi tahap kedua pada tanggal 14 Januari 2022.

Wajahnya yang semula ceria berubah mendung, begitu mengetahui suaminya gagal divaksin. Ia kurang bersemangat jika harus berangkat sendirian. Ia membutuhkan Parto disampingnya.

“Sekarang sudah senang saya karena punya sertifikat vaksin. Tapi bapaknya belum bisa vaksin. Pikiran saya ya masih berat toh, terhadap suami,” jelasnya.

Menurut Wakiyem, “Tadi malam si bapak sempat batuk-batuk, dan setelah itu minum obat. Mungkin itu penyebabnya.”

Bagi Yulianus Gepse (58), penduduk lokal Marin Kumbe, mendapatkan sertifikat vaksin sungguh anugerah terbesar. Ia tidak menyangka pagi itu bisa divaksin, setelah sebelumnya sempat khawatir dengan maraknya kabar bohong yang beredar.

“Saya sebenarnya takut dengan hoaks yang berkembang, tapi semua Tuhan yang mengatur. Kamu boleh bilang begini-begini, tetapi kesembuhan yang mengatur Tuhan,” terangnya.

“Itu *su* kita percaya masih ada Tuhan. Kita tidak usah terlalu banyak pikir yang macam-macam,” imbuhnya.

Ini merupakan pengalaman pertama Yulianus. Karena itu ia tidak akan lupa. Saat ditanya seperti apa rasanya,

Yulianus mengatakan, “Tadi setelah disuntik, macam ada sesuatu disini. Sebentar tapi. Sekarang sudah enak.”

Usai divaksin ia disarankan menunggu selama 30 menit untuk diobservasi. “Sejauh ini, saya belum rasakan aneh-aneh,” terangnya.

Yulianus memberanikan diri divaksin karena akan berangkat ke Jayapura. Ia berangkat setelah tahun baru 2022, sehingga masih ada waktu untuk vaksin.

“Sekarang tidak diizinkan terbang jika tidak ada surat vaksin. Apapun yang terjadi saya harus ikut aturan,” katanya.

Berdasarkan pengakuannya, keinginan divaksin berasal dari diri sendiri. Tidak ada yang mempengaruhi. “Memang sebenarnya dari bulan lalu, tapi karena kebetulan kerja, saya harus istirahat dulu jika mau vaksin,” ujar Yulianus.

Begitu mengetahui vaksin aman untuk kesehatan, ia akan mengajak saudara-saudaranya. Ini sekaligus membantah kabar bohong yang dilihatnya di televisi, termasuk informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut.

“Nanti saya pulang, saya akan bilang, sudah mari, tidak usah pikir takut lagi. Tapi kalo kita sehat sehat saja, yang penting kita berdoa dan beristirahat untuk bisa ikut suntik covid,” jelasnya.

Lebih jauh, Yulianus menuturkan, “Namanya ini wabah. Ini penyakit, jadi kita harus berobat. Kita tidak tahu, mungkin besok kita mau urus apa-apa, kita tidak ada surat Covid, kan susah. Kita musti cari lagi kembali.”

### **Catatan Peneliti**

Peneliti BRIN dari satuan kerja Pusat Penelitian Kewilayahan Cahyo Pamungkas mengungkapkan, fenomena vaksin di Papua identik untuk masyarakat perkotaan. Sementara penduduk lokal beranggapan mereka adalah manusia yang sehat. Temuan itu ia dapatkan setelah melakukan penelitian mendalam di Papua beberapa waktu lalu.

“Disana orang yang memakai masker justru orang sakit. Orang yang tubuhnya lemah. Itu mendekonstruksi pengetahuan selama ini,” katanya.

Penduduk lokal tidak memakai masker karena ingin mengatakan, “Kami ini orang yang lebih sehat dari kamu

pendatang. Covid-19, vaksin dan antigen identik dengan mereka.”

Bahkan dalam pertemuan Dewan Adat Papua di Kaimana beberapa waktu lalu yang membawahi tujuh wilayah adat, salah satu klausulnya adalah menolak vaksin.

“Pertama, mereka membagi pengetahuan bahwa vaksin adalah antiKristus. AntiKristus itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya divaksin akan mati,” terang Cahyo.

Kedua, vaksin dicurigai sebagai rekayasa genetik untuk memusnahkan orang Papua. Seharusnya vaksin untuk orang Papua diteliti dan dikaji khusus. “Diidentifikasi orang Papua itu, cocoknya vaksin yang mana?”

Ketiga, program vaksinasi dianggap tidak demokratis. “Makanya benar, ketika melibatkan TNI/Polri, tetapi tidak melibatkan tenaga kesehatan lokal. Ada apa dibalik itu?”

Keempat, kurangnya komunikasi dan promosi kesehatan. “Yang terjadi, duit itu tidak digunakan untuk sosialisasi, akibatnya orang Papua lebih percaya kepada hoaks di media sosial, karena tidak ada sosialisasi,” ungkap Cahyo.

Kelima, terkait pengalaman empiris warga. Banyak yang tidak ditanya penyakitnya apa, sehingga ada yang meninggal. “Jadi ada *miss* atau pengalaman pahit orang divaksin, tidak ditanya sehingga beberapa meninggal, sehingga menjadi berita,” terangnya.

Keenam, memang ada *distrust* terhadap pemerintah. Apapun program dari pemerintah pasti ditolak, karena rasa tidak percaya. “Pemerintah tidak percaya kepada orang Papua dan orang Papua tidak percaya pemerintah. Sehingga vaksin yang seharusnya menjaga keberlangsungan hidup orang Papua menjadi variabel yang tidak dipercaya,” katanya.

Ketujuh, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam vaksinasi, padahal mereka yang paling tahu kebutuhan penduduk lokal. Lalu ada pelibatan gereja, namun banyak dari pendeta yang justru menolak divaksin.

“Gara-gara itu, orang Papua cerdas. Mereka mengetahui dampak vaksin dan lain-lain. Mereka menuntut vaksin itu harus sesuai dengan genetika mereka,” ucapnya.



Sejak pagi warga yang datang mengikuti vaksinasi di Pelabuhan Kumbe kebanyakan pendatang. Mereka berasal dari kampung-kampung transmigran yang memang banyak terdapat di Distrik Kurik dan Malind. (Foto: Jekson Simanjuntak)

Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di Papua, Cahyo mengamati munculnya pandangan (*culture of knowledge*) bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang didisain dan Indonesia menunggangi Covid-19.

“Indonesia menunggangi Covid-19 untuk menguasai Papua. Ini pandangan cukup kuat, apalagi jika vaksin dilakukan oleh tentara dan polisi,” jelasnya.

Sehingga tidak mengherankan, jika pelaksanaan vaksinasi didominasi oleh pendatang. Ini juga dikuatkan dengan data bahwa kasus positif Covid-19 kebanyakan dialami para pendatang.

“Yang banyak terkena dan melakukan perjalanan dinas itu adalah pendatang. Jadi wajar jika orang Papua menolak,” tegasnya.

### Ada Banyak Solusi

Pius Kornelis Manu, imam di Kantor Keuskupan Merauke menilai pelibatan TNI/Polri dalam vaksinasi di Merauke menunjukkan adanya kepentingan tertentu. Salah satunya untuk meningkatkan angka vaksinasi jelang PON XX.

“Mereka melakukan itu, jelas ada kepentingan-kepentingan tertentu, supaya dana itu cair. Itu pasti ada. Itu

pasti saling terkait,” katanya.

Pius Kornelis Manu, akrab disapa Pastor Pius menyaksikan banyak anggota keluarganya yang divaksin, setibanya di Merauke. Padahal sebelumnya, vaksinasi berjalan lambat. “Pulang dari Jakarta, keluarga saya banyak yang divaksin mendadak. Artinya, yang tadi takut vaksin, supaya bisa nonton PON,” ujarnya.

Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah sedang kejar target. Namun disayangkan peristiwa setelahnya, “Orang ramai-ramai divaksin, tapi tahap kedua tidak lanjut,” ungkapnya.

Ada kesan vaksinasi tahap kedua diabaikan, ketika banyak warga tidak mengikutinya. “Vaksinasi tahap kedua tidak jalan. Apakah dananya habis, saya juga tidak tahu,” katanya.

Akhirnya Pastor Pius tiba pada sebuah kesimpulan, “Sifatnya mungkin sementara hanya untuk PON saja.”

Keikutsertaan TNI/Polri yang berseragam lengkap juga disoroti Pastor Pius. Menurutnya, akan lebih baik jika mereka tidak menggunakannya. “Kami amat membutuhkan mereka, tetapi bukan dengan penampilan begitu. Salah satu penilaian saya adalah seolah-olah mau mengekspose kehebatan dan kekuatan militer,” katanya.

Sementara terkait dengan maraknya pengorganisasian warga di sejumlah daerah untuk mengikuti vaksinasi, dia menilai hal itu justru memunculkan ketakutan di masyarakat. “Kemudian orang juga takut bersuara secara bebas. Ketika orang tidak bisa menyalurkan ekspresi secara bebas, itu juga masuk pelanggaran HAM,” ujarnya.

Hal-hal seperti itu menurut Pastor Pius tidak perlu, karena yang terpenting adalah penyadaran dan sosialisasi bahwa vaksin baik untuk kesehatan, termasuk untuk melindungi orang-orang terdekat.

“Kadang kala saya lihat itu berlebih-lebihan yang sebenarnya tidak perlu. Karena itu saya berasumsi, bahwa mungkin dengan hal seperti itu, terbawa pada mereka ingin mensukseskan vaksinasi ini,” jelasnya.

Pastor Pius juga menyaksikan sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Alasannya, metode yang dipilih tidak berhasil menjangkau masyarakat yang kebanyakan

tinggal jauh dari jalan-jalan protokol.

“Saya lihat sosialisasi itu kurang sekali, lebih banyak mobil itu di jalan-jalan protokol dengan beri penjelasan pakai toa. Tidak masuk ke gang-gang,” katanya.

Kendati demikian, dia bisa dimaklumi bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Termasuk untuk menjangkau penduduk lokal yang kebanyakan tinggal di pinggiran kota.

“Saya harus akui keterbatasan petugas kesehatan dan tenaga tim pengendali Covid-19, mereka tidak mampu masuk hingga ke yang kecil-kecil seperti itu.”

Atas dasar itu, dia mengusulkan adanya koordinasi kerja antara petugas kesehatan dengan pemerintahan terkecil di tingkat kampung. “Itu perlu diperbaiki. Sehingga dengan demikian, sosialisasi lebih merata dan lebih mengena.”

Pastor Pius menambahkan, “Ini yang bagi saya tidak dibangun, seharusnya tidak seperti itu. Petugas medis jangan dibiarkan sendiri.”

Senada dengan Pastor Pius, Cahyo menilai TNI/Polri dilibatkan dengan tujuan menyukseskan percepatan vaksinasi di Papua. Percepatan yang ditengarai melibatkan dana besar.

“Kegiatan vaksinasi yang dilakukan TNI-Polri itu proyek aja. Mereka membutuhkan uang. Mereka dilibatkan karena akan memberikan mereka pekerjaan,” ujarnya.

Hal itu didasarkan pada kekhawatiran, “Untuk sosialisasi vaksin akan ribut, ricuh maka kemudian dikirim lah TNI/Polri.”

Menurut Cahyo, pendekatan model begitu hanya akan memunculkan ketidakpercayaan di masyarakat dan tidak terlalu efektif. Seharusnya dewan adat, gereja, tokoh perempuan dan pemuda yang dirangkul untuk menyukseskan vaksinasi.

“Itu yang tidak dilakukan. Bupati melalui dinas kesehatan jalan sendiri,” katanya.

Belakangan ada yang berubah. Gereja dilibatkan, karena dianggap memiliki lahan yang luas dan bisa digunakan sebagai lokasi vaksinasi. “Sehingga warga bisa berkumpul. Tetapi beberapa saya lihat banyak juga pendeta yang menolak,” papar Cahyo.

Mereka yang menolak punya alasan tertentu. “Saya pendeta. Tapi karena menuruti pemerintah, saya katakan,

silahkan bagi yang ingin. Tapi saya menolak divaksin,” ujarnya.

Pada situasi demikian, Cahyo menilai, semua dinas-dinas harus ditingkatkan partisipasinya. Selama ini ada kesan, fokus penanganan Covid-19 hanya pada dinas kesehatan saja. “Dinas lain tidak dilibatkan. Jadi perlu duduk bersama diantara mereka,” katanya.

Selanjutnya, dewan adat, gereja dan dinas kesehatan perlu berbagi peran. Mereka harus berdialog dan memberikan akses kepada masyarakat adat untuk melakukan sosialisasi dan transparansi terkait penanganan Covid-19 dan vaksinasi.

Untuk itu, Cahyo mengusulkan dihidupkannya kembali falsafah “Satu Tungku Tiga Batu” yang merupakan simbol kerukunan di Papua. Tungku adalah lambang kehidupan, sedangkan tiga batu adalah simbol dari perbedaan yang diikat dalam wadah persaudaraan.

Caranya dengan merangkul, gereja, dewan adat, perempuan dan pemuda untuk menyukseskan vaksinasi. Masing-masing pihak dilibatkan melakukan penyadaran di tengah-tengah masyarakat.

“Saya kira, solusi terbaik adalah duduk bersama antara pemerintah daerah bersama dengan dewan adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda,” tegasnya.

Solusi lainnya dengan penggunaan bahasa daerah. “Anehnya, kadis kesehatan banyak dipegang oleh pendatang yang tidak bisa berbahasa daerah,” ungkap Cahyo.

Dia mencontohkan di Biak, Kadis Kesehatannya orang Papua, tapi para juru kampanye dan kepala kepala bidang berasal dari luar daerah.

Contoh lainnya, orang Sorong yang bekerja di Kab. Tambrau. “Saat sosialisasi, dia hanya bisa bahasa Sorong dan tidak bisa bahasa Tambrau,” katanya.

Itu menjadi alasan mengapa sosialisasi vaksin sebaiknya menggunakan bahasa lokal. Untuk itu diperlukan penerjemahan materi kampanye kedalam setiap bahasa daerah. Jika Papua memiliki 300 ratus suku, maka ada 300 ratus bahasa. Dengan demikian, sosialisasi vaksin harus diterjemahkan ke dalam 300 bahasa. “Ini yang tidak dilakukan,” pungkasnya.

## 12.

# Problematik dan Tingginya Cakupan Vaksinasi Di Ujung Timur Indonesia (Bagian I)<sup>12</sup>

Oleh: Dwi Bobby Kurniawan



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Neville Muskita. Ketika memberikan keterangan di ruang kerjanya.

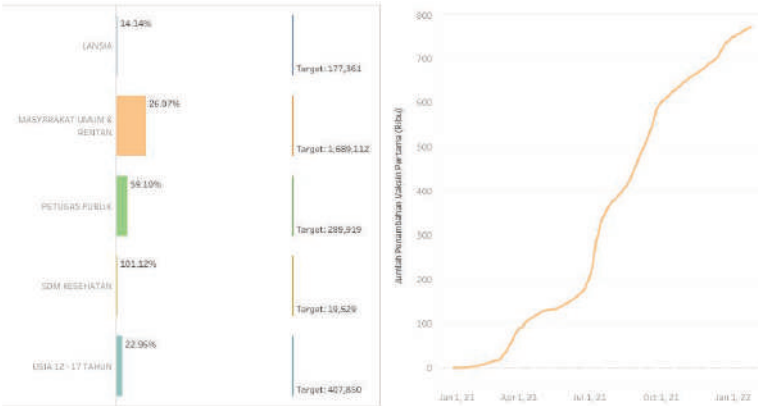
*Merauke merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki cakupan vaksinasi covid-19 tertinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan vaksinasi per 24 Januari 2022 untuk Kabupaten Merauke mencapai 85,11%. Namun demikian, banyak daerah lain di Papua yang memiliki cakupan vaksinasi sangat rendah.*

Selain Merauke, Kabupaten lain yang masuk 5 besar cakupan vaksinasi disusul Kota Jayapura 78,35%, Kabupaten

---

<sup>12</sup> Tulisan terbit di *tiffanews.com* pada 26 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Keroom 75,62%, Kabupaten Jayapura 74,17%, dan Kabupaten Mimika 74,17%. Sementara itu, untuk kabupaten dengan cakupan paling terendah, yakni Kabupaten Tolikara 1,59% dan Lani Jaya 1,34%.



Grafik Divaksin Pertama Per Kab/Kota

Provinsi	Kab. Jayapura	Kab. Merauke	Kab. Mimika	Kab. Nabire	Kab. Paniai	Kab. Puncak Jaya	Kab. Sarmi	Kab. Supiori	Kab. Tanimbar	Kab. Tolikara	Kab. Waropen	Kab. Wamena
Papua	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Jayapura	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi	75,11% dari target provinsi
Kab. Merauke	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Mimika	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Nabire	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Paniai	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Puncak Jaya	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Sarmi	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Supiori	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Tanimbar	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Tolikara	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Waropen	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267
Kab. Wamena	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267	136.267

Data statistik cakupan vaksinasi covid-19 Provinsi Papua 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Neville Muskita menjelaskan. Hal itu bisa tercapai berkat kerjasama Pemerintah, TNI dan Polri di daerah, yang gencar melaksanakan vaksinasi massal sejak awal.

“Tidak hanya kami, mereka (TNI-Polri) kan turun juga sampai ke kampung-kampung. jadi saya rasa kolaborasi dan peran serta mereka sangat baik, sangat mendukung pencapaian target vaksinasi kita,” tutur Neville saat ditemui di ruang kerjanya.

Dijelaskan, jenis vaksin yang berikan ke masyarakat umumnya Sinovac, dengan cakupan untuk dosis pertama mencapai 101 ribu lebih atau sekitar 81%. Sedangkan dosis kedua sebanyak 77 ribu jiwa atau 61%, sesuai data per 13 Desember 2021.

Dari data tersebut, jika diuraikan lebih detil, maka cakupan tertinggi ada di kota Merauke. Kondisinya berbeda dengan distrik yang mayoritas penduduk lokal, dimana cakupannya sangat rendah.

“Angkanya sekitar 40% untuk lokal dan 60% pendatang,” ungkap Nevil saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, minimnya vaksinasi bagi penduduk lokal, karena maraknya penolakan. Di Distrik Okaba dan sekitarnya, misalnya, banyak dari warga kampung-kampung lokal masih percaya isu-isu negatif terkait vaksinasi.

Untuk itu, dia menawarkan solusi bahwa tokoh-tokoh kampung harus divaksin terlebih dahulu. “Contoh beberapa kampung di Distrik Muting yang masyarakatnya mau di vaksin setelah diawali kepala kampungnya,” ujarnya.

Untuk menjawab berbagai tantangan khususnya penduduk lokal, kata Neville kemudian, “Penting selain sosialisasi adalah keteladanan. Jika kepala kampung belum divaksin, maka sulit bagi masyarakat mengikutinya. Demikian juga dengan tokoh adat dan tokoh geraja.”

Oleh sebab itu, pelibatan tokoh-tokoh kunci di masyarakat menjadi penting. Mereka menjadi contoh nyata bagi masyarakat. “Karena dampaknya menurut saya jauh lebih luas dari sekedar sosialisasi,” ucap Neville.

Jika dilihat dari angka tersebut, masih ada sekitar 14,89% masyarakat yang belum bahkan menolak untuk di vaksin. Hal itu terlihat dari hasil penelusuran pada perkampungan masyarakat lokal, tepatnya di Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Salah satu warga RT.01/RW.01 Kampung Tambat, Paustina Itarop Korai (55) yang ditemui di kediamannya,

menceritakan pengalamannya divaksin. Sejak awal dia dan anaknya sudah mempunyai keinginan untuk menyelesaikan vaksin tahap kedua, karena dinilai memiliki manfaat positif bagi keluarganya.

“Saya memang mau vaksin, jadi pas dorang (petugas) datang yang pertama di balai kampung saya dengan anak perempuan langsung ikut,” ujar Paustina yang akrab di panggil Mama Tina.

Menurutnya, warga yang mengikuti vaksinasi tahap pertama tidak banyak. “Jadi kalau RT kita itu ada sekitar 6 orang yang sudah vaksin pertama, sisanya dari RT lain,” paparnya.

Warga yang hadir saat itu cukup banyak. Hanya saja seiring proses skrining banyak yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga warga yang bisa divaksinasi hanya 10 orang.

Menurut ibu dua anak itu, vaksinasi tahap pertama dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021. Lalu saat mereka datang untuk menyelesaikan vaksinasi tahap kedua, penundaan selalu terjadi. Akibatnya dia kecewa dan memutuskan berhenti mengikutinya.

“Karena begini, hari berikut tanggal 8 Juli 2020 kami datang, dari petugas kesehatan tunda, terus tanggal berikutnya kami datang lagi, *dorang* tunda lagi. Maksudnya tunda-tunda sampai 3 kali, sudah!! Mama tidak mau vaksin lagi. Sudah malas,” untkapnya dengan wajah kesal.

Setelah itu, beredar informasi yang menyebutkan pelayanan vaksinasi di terus digelar di sejumlah lokasi seperti kantor bupati dan Distrik (kecamatan) Tanah Miring. Karena itu, Paustina disarankan untuk pergi kesana.

Dia menolak hadir lantaran jarak yang jauh, serta tidak memiliki kendaraan. “*Dong* bilang ikut di kota (kabupaten) sana, tapi saya bilang ah tidak. Terlalu jauh tidak ada motor. Jadi harus petugas yang datang ke kampung boleh,” terangnya.

Berbeda dengan Mama Tina yang menolak vaksinasi karena terjadinya penundaan, seorang kakek berusia 65 tahun, Bruno Kimbinaka, warga RT.01 menolak vaksin secara tegas karena ia menderita penyakit sesak nafas (Asma).

“Seperti itu pernah disampaikan, tapi saya tolak!! Jangan sampai saya punya sakit sudah lama ini, kalau vaksin masuk (disuntikan) jangan sampai musnahkan kita,” tegasnya dengan

nafas terengah-engah.

Menurut kakek dengan 11 cucu itu, pemahaman bahwa vaksinasi dapat membahakan jiwanya ia yakini kebenarannya. Ia menolak mengakui saat ditanya kemungkinan adanya informasi hoaks yang beredar di masyarakat, ataupun informasi menyesatkan di televisi.

“Tidak, tidak, tidak. Tidak ada yang kasih tahu saya. Itu menurut pemikiran saya bukan dari siapa-siapa. Jadi saya tolak. Sebab hidup dan mati Tuhan yang punya,” katanya.

Dengan suara lirih, Bruno juga menjelaskan bahwa penyakit Asma yang di deritanya sudah menahun, dan penyakit itu bukan hal baru bagi penduduk lokal. Banyak orang asli Papua (OAP) yang menderita penyakit yang dikenal sebagai ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan).



*Ekspresi Bruno saat menyebutkan tidak mau divaksin karena sakit*

“Biasa, biasa itu di sini sakit Asma dan kita itu di Papua begitu sudah,” tuturnya.

Lebih jauh Bruno juga menjelaskan soal metode sosialisasi dan penyuluhan vaksin yang dilakukan. Menurutnya, peran penting aparat kampung layak diapresiasi. Pasalnya, mereka yang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara dari tim gugus tugas pengendali Covid-19, menurut Bruno telah hadir beberapa kali. Mereka data menggunakan mobil keliling, sembari menyerukan imbauan

tentang pentingnya vaksinasi dan meminta warga untuk mengikutinya. Namun Bruno menolak untuk mengikuti anjuran tersebut

“Ada juga dari kampung. Dinas Kesehatan juga ada, tapi mereka ajak secara umum, pakai suara-suara,” ucapnya.

Terjadinya perubahan jadwal serta pengalihan tempat vaksinasi di Kantor Distrik Tanah Miring menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang batal mengikuti vaksinasi. Salah satunya dialami oleh Ketua RT.01/RW.01, Nicalaus Bonaujop. Hingga kini ia tak kunjung divaksin.

“Informasi itu memang saya tahu, tapi hanya dari jadwalnya itu yang saya tidak tahu. Pas waktu itu saya ke balai kampung cek, ada yang bilang buatnya di kantor distrik. Saya mau jalan bagaimana tidak ada kendaraan, terus sudah, saya balik,” jelasnya.

Ketika vaksinasi tahap pertama dilakukan di balai kampung, Nicalaus tidak hadir karena sedang sibuk bekerja di ladang. Ia lupa jika hari itu vaksinasi tengah berlangsung.

“Bapa tidak sengaja karena sibuk di kebun. Itu sudah bersamaan dengan mama Tina. Memang ada informasi sebelumnya, tapi sudah terlambat,” sesalnya.

Meskipun gagal divaksin, Nicalaus tetap menyambangi kantor kampung untuk menanyakan waktu pelaksanaan vaksinasi susulan. Ia berharap kegiatan tersebut kembali digelar. “Iya mau ikut, tapi ya itu sudah. Sekarang kan belum ada informasi. Nah kalau mau vaksin, biasanya kan ada jadwal,” katanya.

Nicalaus juga berharap, petugas kesehatan kembali datang ke kampung untuk melakukan sosialisasi serta pelayanan vaksinasi. Pasalnya, sebagian besar warga Kampung Tambat belum mengikuti vaksinasi, sementara serbuan kabar bohong terkait vaksinasi terus beredar.

“Sebenarnya, banyak warga yang mau ikut, tetapi karena *dong* dengar itu, akhirnya. Ah, sudah tidak usah, dari pada kita ikut, kita pulang lego (meninggal). Nah itu, mereka harus memberikan sosialisasi, harus turun ke masyarakat di kampung. Tapi belakangan ini tidak ada,” ujar Nicalaus.



*Kepala Tata Usaha dan Umum Kampung Tambat Samuel Heremba saat ditemui di Kantor Kampung Tambat*

Kepala Tata Usaha dan Umum Kampung Tambat Samuel Heremba membenarkan jika pelaksanaan vasinasi di wilayahnya hanya berlangsung sekali. Selanjutnya jadwal pelayanan yang sudah diinformasikan sebelumnya selalu ditunda.

“Vaksin dosis satu sudah di sini, yang dosis kedua tidak ada, tapi kenapa mereka tunda?,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kampung Tambat.

Sejauh ini, aparat kampung selalu mengimbau warga agar ikut menyukseskan vaksinasi. Hanya saja, penundaan itu semakin menguatkan kecurigaan masyarakat untuk menolak vaksin. Di saat yang bersamaan, sosialisasi dari Distrik Tanah Miring juga jarang dilakukan.

“Adanya kendala-kendala seperti itu, akhirnya masyarakat, ‘ah ini kenapa?’”

Sementara itu, ada pemandangan berbeda di kampung-kampung sebelah, khususnya kampung transmigran yang mayoritas penduduknya berasal dari luar Papua. Meskipun tetap ada penolakan, pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan lancar dengan tingkat antusiasme warga cukup tinggi. Sebuah kondisi yang berbeda dengan Kampung Tambat.

“Kalo vaksin tidak ada, saya pikir tidak. Karena di kampung-kampung lain ada, jadi kita punya jatah pasti ada,”

Meskipun demikian, Samuel tidak ingin menyalahkan

siapapun. Ia hanya berharap agar pihak Puskesmas Tanah Miring tidak melupakan kampung - kampung lokal.

“Karena kita bukan salahkan petugas, tapi kita tidak tahu kendalanya seperti apa. Kami juga belum pasti mereka seperti itu,” ujarnya.

## 13.

# Problematik dan Tingginya Cakupan Vaksinasi Di Ujung Timur Indonesia (Bagian II)<sup>13</sup>

Oleh: Dwi Bobby Kurniawan



*Katarina Timung, Vaksinator Puskesmas Tanah Miring*

*Untuk membuktikan kebenaran terkait kendala vaksinasi di Kampung Tambat, penulis melakukan penelusuran ke Puskesmas Tanah Miring. Disana, salah seorang vaksinator, Katarina Timung (38) menjelaskan, pembatalan mereka lakukan karena jumlah warga yang hadir tidak memenuhi jumlah kuota minimum, yakni 10 orang.*

---

<sup>13</sup> Tulisan terbit di tiffanews.com pada 26 Januari 2022 dengan judul yang sama.

“Sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan dengan Distrik juga, tapi mereka memang susah. Maksudnya kita kesana, tunggu berjam-jam, masyarakat tidak datang,” katanya.

Ketika dilakukan penjadwalan ulang, ternyata yang hadir hanya 5 orang. “Nah, vaksin itu 1 vial isi 10 dosis, kan sayang kalau cuma 1-2 orang yang pakai. Jadi kita kumpul dulu masyarakatnya, terus kita skrining. Misalnya sudah sampai 10 orang baru kita buka vaksinya,” jelas Katarina.

Selain itu, Katarina menilai rendahnya partisipasi masyarakat di sebabkan karena kurangnya literasi masyarakat terhadap vaksin. Akibatnya banyak dari mereka yang lebih percaya hoaks ketimbang informasi dari pemerintah.

“Kita juga tidak tahu, dipikiran mereka kan vaksin itu hanya mau kasih mati orang, jadi sering ada bahasa jangan paksa kami kalau kami tidak mau,” ungkap petugas medis yang sudah bekerja di puskesmas sejak 2008 silam.

Selama ini, Katarina menemukan fakta bahwa kesadaran dan antusiasme warga transmigrasi lebih tinggi di banding kampung lokal. Seperti, Kampung Yasa Mulya, Sumber Harapan, Waninggap Sai, Waninggap Miraf, Hidup Baru, Sermayam 1 dan 2, Isanumbias, Yaba Maru, serta Amun Kai

“Kan kita satu distrik ada 14 kampung, tapi untuk masyarakat transmigrasi di distrik Tanah Miring lebih banyak hadir dengan sukarela,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia merasa peran pemerintah, termasuk pelibatan TNI-Polri sudah cukup optimal. Sejumlah terobosan telah dilakukan, termasuk dengan pola-pola jemput bola hingga pemberian stimulus berupa sembako.

“Sudah banyak pak, seperti waktu di kegiatan gebyar vaksin massal mereka sampai di kasih sembako, itu tetap ada yang mau ada yang tidak. Memang tidak semua menolak,”

Sementara itu, rekan sekerja Katarina, Siti Musriani (29) menjelaskan jika vaksinasi dilakukan dengan sangat hati-hati. Harga vaksin yang relatif mahal juga jadi pertimbangan.

“Jika dikaitkan dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembelian 1 ampul (10 dosis) harganya 2 juta. Jadi sama saja kita kita merugikan negara, kalau kita buang cuma-cuma,”

Selama ini, setiap vaksin yang telah dibuka, diusahakan agar habis terpakai. Jika ternyata jumlah warga yang datang

tidak memenuhi kuota minimum, maka warga diimbau untuk mengikuti vaksinasi di kampung sekitarnya.

“Oleh kerennya, warga Tambat yang ingin vaksin bisa mendatangi kampung-kampung terdekat,” tegasnya.

Menyinggung pelaksanaan vaksinasi yang menyaratkan jumlah minimal sebanyak 10 peserta, Kepala Dinas Kesehatan dr. Neville Muskita mengatakan. Melihat hal itu perlu adanya pendekatan yang berbeda. Selama ini, ketersediaan vaksin, dimana 1 vial berisi 10 dosis, ternyata menimbulkan kendala tersendiri.

“Akibatnya, vaksinasi akan dimulai ketika pesertanya minimal berjumlah 10 orang.”

Ketika vaksin dilakukan, sementara pesertanya kurang dari 10 orang, hal itu berpotensi terhadap kerusakan vaksin. Karena itu Neville meminta agar Pemprov Papua mampu menyediakan vaksin dengan ukuran 1 vial untuk dua orang.

“Memang kita lagi mintakan yang 1 vial untuk 2 dosis (orang),” katanya.

Selain itu, Neville memastikan bahwa penjatahan vaksin dilakukan *by sistem*. Baik di level provinsi maupun pusat akan selalu memantau ketersediaan vaksin di masing-masing daerah. “Termasuk kemungkinan vaksin sisa,” katanya.



Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Jalan Garuda Mopah Lama, Kabupaten Merauke

Menanggapi temuan adanya warga Kampung Tambat yang belum divaksin. Neville mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Nanti saya akan konfirmasi ke puskesmas terdekat. Kalo saya orang tidak pernah hanya dengar berita dari satu pihak. Makanya tetap saya harus konfirmasi dulu ke Puskesmas,” ujarnya.

Sementara terkait minimnya sosialisasi, menurut Neville, hal itu sangat mengada-ngada. “Karena petugas pasti siap saja. Siapa warga yang mau vaksin, mereka siap melayani. Tapi yang terjadi, kebanyakan warga tidak berani vaksin karena termakan hoaks,” katanya.

Bahkan hingga di distrik terjauh, petugas kesehatan selalu turun untuk melakukan vaksinasi, setelah kepala kampung mengumpulkan warganya. “Semua tetap melalui kampung dan teman-teman puskesmas turun ke kampung-kampung itu,” terang Neville.

Oleh sebab itu, dia memastikan bahwa pemerintah sangat peduli terhadap warganya. Pemerintah telah berusaha agar pandemi ini segera berlalu, sehingga bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya.

“Pemerintah tidak akan mungkin menyengsarakan rakyatnya. Itu saya kira prinsip. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, jika banyak yang belum divaksin, maka dia akan sangat rentan untuk tertular dan berisiko menghadapi level yang berat, karena belum punya antibodi,” tandasnya.

Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Merauke juga mendapat sorotan dari Pastur Paroki St. Mikhael Kudamati, Pius Cornelis Mano. Dirinya pun membenarkan warga yang menolak di vaksin tergolong banyak, terlebih penduduk lokal.

Menurut Imam dari kantor keuskupan ini, Salah satu faktor penyebab terjadinya penolakan adalah, masyarakat lebih banyak mempercayai informasi dampak negatifnya.

“Karena ada kekhawatiran, ada ketakutan, atau ada yang merasa vaksin tidak perlu. Lalu mereka membuat cerita-cerita yang sebenarnya cerita karangan. Maka cerita itu pun beredar dari mulut ke mulut,” tutur Imam paroki yang berdarah Papua.

Tak sampai disitu. Sejumlah peristiwa kematian pun dikaitkan akibat vaksin, yang terjadi di daerah-daerah pastinya mempengaruhi secara psikologis. “contoh ada kabar seorang warga di Mopah Lama, kelurahan Rimba Jaya, yang meninggal

2 hari setelah di vaksin,” kata Pastur Pius.

Menurut sumber lain yang dia ketahui. Sebelum meninggal pria itu masih berkafititas seperti biasanya di kebun. “Dia itu penderitang. Nafasnya terganggu setelah minum kopi dan kemudian meninggal, padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Menurut saya, dia mungkin meninggal karena kopi, bukan karena vaksin,” terangnya.

Pastur Pius menambahkan, “Informasi model begitu gampang menyebar di sini. Baik dari media sosial maupun dari mulut ke mulut, lalu berkembang hingga beragam versi yang sulit diverifikasi kebenarannya.”

Kegiatan vaksinasi di Merauke, menurutnya, ada petugas kesehatan yang juga tidak mau vaksin sampai sekarang. “Saya ada kenal beberapa. Karena mereka atau oknum itu terbawa oleh kekhawatiran seperti itu. Sebagai manusia mereka terbawa juga meskipun mereka adalah petugas medis,” paparnya.

Dia menilai, prosedur vaksin tidak sepenuhnya diikuti, artinya tidak sedikit juga masyarakat yang ikut vaksin hanya dosis pertama saja. Hal itu mereka lakukan karena untuk memenuhi persyaratan keluar kota.

“Juga ada banyak orang yang sudah vaksin hanya sekali saja, dan selanjutnya tidak ada lanjut lagi. Terutama masyarakat di pinggiran. Mereka ramai-ramai itu, waktu PON itu. Supaya terlibat dalam PON dan bisa saksikan PON. Setelah itu, waktu yang seharusnya vaksin kedua, waktunya lewat. Mereka tidak vaksin lagi,” katanya. “Vaksin seperti itu gagal toh. Tidak lengkap. Ini yang saya rasa,” imbuhnya.

Selain kabar miring, pemberlakuan vaksin sebagai syarat perjalanan ke luar kota, sama sekali tidak berpengaruh terhadap penduduk lokal. Pasalnya, mereka yang berada di kampung-kampung lebih banyak beraktifitas di hutan.

“Kami punya daya tahan tubuh kuat. Sehingga yang tergerak hati untuk vaksin dari orang asli Papua (OAP) sedikit orang. Tetapi menurut saya, ketika diberi penjelasan yang betul, mereka pasti tersadar untuk vaksin,” kata itu.

Untuk itu sebagai pemuka agama, Ia mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial. Khusus penduduk lokal, ia bisa memahami mengapa informasi dari mulut ke mulut cenderung porsinya lebih besar. Dampaknya sama-sama berbahaya.

“Jadi ada banyak penyebab yang membuat orang tidak tertarik vaksinasi. Selain itu, orang disini juga sering bersikap malas tahu atau acuh tak acuh,” katanya.

Mengamati keterlibatan TNI-Polri mulai dari penjarangan warga hingga pelaksanaan vasinasi, menurut Pastur Pius, Sebaiknya tidak mengenakan seragam lengkap, sebab keikutsertaan masyarakat bukan didasari keinginan sendiri.

“Kami memang sangat membutuhkan mereka, tapi bukan dengan penampilan begitu. Seolah-oleh mau mengekspos kehebatan dan kekuatan militer, yang kemudian orang juga takut bersuara dengan bebas,” tandasnya.



*Pelayanan gerai vaksinasi Polres Merauke kepada masyarakat Kampung Kumbe dan sekitarnya*

Hal-hal seperti itu menurut Pastur Pius tidak perlu, karena yang terpenting adalah kesadaran dan sosialisasi bahwa vaksin baik untuk kesehatan, termasuk untuk melindungi orang-orang terdekat.

“Kadang kala saya lihat itu berlebih-lebihan yang sebenarnya tidak perlu. Karena itu saya berasumsi, bahwa mungkin dengan hal seperti itu, terbawa pada mereka ingin mensukseskan vaksinasi ini,” terangnya.

Untuk menjawab itu semua. Perlu adanya peran aktif dari tokoh agama, adat serta elemen lainnya dalam memberikan edukasi, dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

“Hal itu jadi tanggung jawab bersama, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi,” tutupnya.

Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke Joseph Albin gebze menjelaskan bahwa Suku Marind merupakan penduduk asli yang berada di selatan Papua, dengan cakupan wilayah seluas 46.791,63 Km persegi.

“Kami ini Animha atau manusia sejati. Itu yang nomenklatur resminya disebut Malind,” katanya

Merauke sendiri merupakan kabupaten terluas sekaligus kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini, karena itu menurut pria bermarga Gebze itu, kehadiran penduduk lokal tetap harus diperhatikan.

Uniknya, jumlah populasi warga pendatang (nusantara) kini mencapai 150 ribu jiwa. Adapun, penduduk lokal hanya berkisar 65 ribu jiwa. Itupun, sebagian besar terserak di kampung-kampung yang letaknya jauh dari kota.

“Lokasinya masih masuk Merauke, tetapi sudah di sudut-sudut pinggiran kota,” katanya.

Selama ini, Joseph melihat, pelibatan penduduk lokal untuk mengikuti vaksinasi sangat rendah. Ini erat hubungannya dengan jumlah populasi yang memang lebih sedikit dibandingkan pendatang.

“Jika ditotal, orang asli Papua yang sudah vaksin baru sekitar 30 ribuan sejak tahun pertama,” katanya.

Hal itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya, vaksin dianggap hanya sebagai syarat bagi pelaku perjalanan. “Karena mungkin, faktor mereka tidak beraktivitas keluar daerah,” ujar Joseph.

Selain itu, merebaknya informasi menyesatkan melalui media maupun omongan dari mulut ke mulut, mengakibatkan banyak penduduk lokal enggan divaksin. “Apalagi kita di Papua, khususnya di Merauke, orang lebih dengar baku cerita. Itu lebih didengarkan daripada kita ikut aturan,” terangnya.

“Akhirnya, penduduk lokal lebih berpedoman kepada ajaran agama. Mereka lebih memilih berdoa ketimbang di vaksin. Ditambah lagi, mereka terpapar kabar bohong yang beredar cepat,” imbuhnya.

Melihat kondisi yang ada, sebagai lembaga masyarakat turut berperan aktif dalam berbagai kesempatan, memberikan

edukasi serta pemahaman akan pentingnya vaksin bagi masyarakatnya.

“Ini kan sama dengan imunisasi campak atau polio. Cuma mungkin karena terlanjur disebut vaksin, terus dibawa sampai dijadikan hoaks,” katanya.

Dikatakan, kondisi di Merauke tentu berbeda dengan daerah konflik yang cakupan vaksinasi sangat rendah. Hal itu terjadi disebabkan situasi yang tidak kondusif sehingga pelaksanaan tidak bisa maksimal.

“Di daerah konflik itu kita rawan, karena masyarakat yang ada di lapangan di kampung-kampung lokal orang sudah malas akibat ketakutan. Situasi terkini, seperti di pegunungan tengah dan beberapa lainnya,” jelasnya.

Menurut Joseph, langkah lain agar pelaksanaan vaksin di daerah konflik bisa berjalan, perlu adanya pendekatan secara kultural dengan melibatkan para tokoh maupun maupun kelompok tertentu.

“Memang kondisi daerah konflik itu kita memang perlu perhitung yang sangat sistematis karena sangat sulit. Palingan ada komunitas atau kelompok tertentu yang bisa membantu,” ungkapnya.

**Bagian IV.**

**Harapan dari Tanah Papua**

---

# 1.

## “Kami Harus Bisa Pulang ke Kampung Halaman Kami”<sup>1</sup>

Oleh: Hengky Yeimo



*Sejumlah warga yang mengungsi di sekitar Kantor Bupati Intan Jaya menerima bantuan bahan makanan pada Minggu (14/11/2021). - Dok. Bernadus Kobogau*

*Dari hasil penelitian LIPI, konflik kekerasan yang terjadi di tanah papua sejak tahun 1965 dan hingga saat ini belum juga menunjukkan tanda tanda akan berakhir. Bahkan, ditambah dengan diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua.*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini terbit di [jubi.co.id](http://jubi.co.id) edisi 26 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Seiring konflik yang terjadi di Papua, pemerintah kerap menanganinya dengan mengirimkan pasukan non-organik yang didatangkan dari luar Papua dengan jumlah mencapai ribuan. Penambahan pasukan yang dilakukan pemerintah itu bukan membuat situasi menjadi kondusif, dan malah menimbulkan konflik baru di berbagai wilayah di Papua, terutama daerah pegunungan tengah Papua.

Pasukan non-organik dari luar Papua tidak memahami situasi Papua, membuat mereka acap salah bertindak, menembak warga sipil, bahkan membuat pendeta atau petugas gereja terbunuh. Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki trauma panjang terhadap kehadiran aparat keamanan pun memilih menghindar, mengungsi demi menghindari nasib sial menjadi korban salah sasaran.

Mereka memilih lari ke hutan lalu bertahan hidup dengan makanan yang ada di hutan. Ribuan warga sipil dari dari konflik seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo bahkan sampai pergi ke kabupaten tetangga yang dianggap lebih aman, tinggal di pengusian dengan segala keterbatasannya. Warga sipil Kabupaten Pegunungan Bintang bahkan mengungsi hingga ke Papua Nugini. Mereka kehilangan akses pelayanan publik, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan, mengungsi dengan menanggung beban trauma dan rasa ketakutan.

### **Hilangnya Damai di Intan Jaya**

Salah seorang ibu yang juga warga pengungsi dari Intan Jaya yang mengungsi ke Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, menceritakan pengalamannya dan warga lain yang kehilangan rasa damai di kampungnya sendiri. “Sebelum ada konflik di Kabupaten Intan Jaya, kami bisa hidup tenang, aman dan damai. Bahkan anak-anak kami bisa bersekolah, masyarakat bisa berkebun. Setelah ada konflik itu, kami seperti menghadapi mimpi buruk,” katanya.

Ibu tersebut mengatakan, lokasi kontak tembak antara pasukan TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terjadi di Dusun Songandogo, Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya. “TPNPB bermarkas di lokasi dekat Songandogo. Songandogo adalah tempat beternak babi. Sementara tempat tinggal saya di Kampung Titigi,” katanya.

Ia menuturkan, di Kampung Titigi aparat keamanan membangun sebuah pos penjagaan. Pos penjagaan itu membuat warga tidak bisa bergerak bebas, bahkan warga takut keluar dari rumah mereka.

“Saat aparat TNI/Polri melakukan kontak tembak dengan TPNPB yang berada di Songandogo, kami memilih untuk menghindari. Kami berlindung di Pastoran Titigi, kalau tidak, di dalam gereja katolik,” katanya.

Ia bercerita, pekerjaan sehari-harinya adalah ibu rumah tangga, sekaligus pelayan di Gereja Katolik Titigi. Di kampung halamannya, ia juga berkebun dan beternak babi.

“Ternak babi milik saya, dan [milik warga yang] lain, juga ikut terkena peluru dari aparat kewananan yang ditujukan kepada TPNPB. Saya hitung-hitung, induk babi betina yang saya punya ada tiga ekor. Anak babi sekitar 30 ekor, sekarang semua mati, habis karena terkena peluru yang ditembak oleh pasukan TNI/Polri. Bahkan satu kandang babi saya juga hancur,” kenangnya.

Ia menyebut, tak hanya dirinya yang mengalami kisah pilu tersebut. Mama-mama Papua yang lain juga mengalami peristiwa yang sama, dengan beragam kerugian.

“Saya punya teman-teman juga menjadi korban. Tetangga saya, masyarakat yang lain, juga kehilangan ternak, rumah, kebun, semua menjadi korban oleh aparat kewananan,” katanya.

Namun lebih dari itu, ia merasa setiap Orang Asli Papua di Intan Jaya dicurigai aparat kewananan. Di Intan Jaya, sejumlah warga sipil asli Papua yang telah menjadi korban dari kecurigaan itu – terkena tembakan, diculik, dibunuh.

“Kami mau lari ke mana? Kalau kami tinggal di Titigi, juga dicurigai oleh aparat TNI/Polri, dan bisa terkena peluru nyasar dari TPNPB juga. Kami merasa tidak aman tinggal di tanah kami sendiri, sehingga kami meninggalkan kampung halaman kami,” katanya.

Anak-anaknya pun hidup dalam ketakutan, karena tembakan demi tembakan selalu terdengar di Titigi. “Anak-anak kami sudah tidak bisa bersekolah lagi karena penembakan yang terjadi di Intan Jaya. Selama di Intan Jaya, kami bersama masyarakat merasa ketakutan karena ada bunyi penembakan,” katanya.

Dia menuturkan bagaimana konflik bersenjata di Titigi itu membuat warga tak bisa beraktivitas. Warga sipil yang telah mengungsi di gereja pun dicurigai kedua belah pihak yang bertikai, TNI/Polri maupun TPNPB.

“Kami mau pergi ke kebun *ka*, ke kandang babi, tidak bisa, sebab TNI/Polri dan TPNPB saling berjaga. Kami merasa tidak aman. Kalau kami bergerak, kami bisa saja dicurigai oleh kedua belah pihak,” katanya.

Dia juga kecewa karena saudaranya yang juga seorang dengan gangguan kejiwaan terbunuh dalam konflik bersenjata itu. Ia merasa tak punya pilihan selain merelakan adiknya itu, merasa tak punya harapan untuk melihat para pelaku pembunuhan itu bakal diadili.

“Meski kecewa, dengan besar hati dan buka hati kami sudah menyerahkan adik kami sebagai seorang pahlawan untuk Papua. Dia meninggal dan dibunuh oleh aparat keamanan dengan cara yang biadab. Dengan adanya keterlibatan aparat keamanan yang banyak dan membunuh warga sipil yang tidak berdosa, termasuk adik saya yang memiliki gangguan jiwa, kami merasa takut,” katanya.

Langkah aparat keamanan merespon konflik bersenjata di Intan Jaya kerap kali tak menenangkan warga. Misalnya, pasukan TNI/Polri mendirikan pos pengamanan di salah satu paroki yang dipimpin Pastor Yance Wadogoubi Yogi. Pos itu justru membuat warga sipil yang mengungsi ke sana merasa takut, sehingga membuat mereka justru mengungsi ke tempat yang lebih jauh.

“Kenapa lagi aparat TNI/Polri membangun pos di situ? Di situ tempat masyarakat kami beribadah. Kami merasa tidak aman, jadi kami mengungsi,” kata sumber Jubi yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Sumber itu bercerita, awalnya jemaat di Titigi itu berencana membangun Pastoran, namun rencana itu terhenti karena konflik bersenjata di sana. Apalagi, kini semakin banyak jemaat di Titigi yang memilih mengungsi ke tempat lain.

“Yang tersisa hanya Pastur dan beberapa umat saja yang ada di Titigi. Jika kami dari Dusun Songandogo mau datang ke gereja di Kampung Titigi, kami selalu ditanya-tanya oleh aparat keamanan yang ada di situ. ‘Kalian dari mana mau ke mana?’ Mereka hampir setiap Minggu tanya kami. [Bagi] kami yang

sudah biasa dilihat oleh mereka, itu aman. Tetapi, kalau wajah baru yang datang di Titigi, itu dalam ancaman bahaya,” katanya.

Ia juga bersedih lantaran rumah hancur terkena kena tembakan aparat keamanan maupun TPNPB. “TNI yang bertugas di kampung-kampung itu biasa meminta buah-buahan. Alpukat, markisa, dan saya biasa kasih ke mereka. Tetapi perlakuan mereka terhadap kami, rumah kami ditembak, itu membuat kami sakit hati,” katanya.

### **Mencari Keselamatan ke Nabire**

Banyak di antara warga Intan Jaya mengungsi ke Nabire, ibu kota Kabupaten Nabire yang merupakan “gerbang” menuju sejumlah kabupaten di Wilayah Adat Meepago yang tengah memanas karena konflik bersenjata di sana. Para pengungsi yang ditemui Jubi di Nabire menuturkan kehidupan mereka yang penuh keterbatasan, lantaran jauh dari kampung halamannya.

Mengungsi ke Nabire pun tak sepenuhnya memberi rasa aman bagi mereka, karena mereka merasa aktivitasnya selalu dipantau aparat intelijen. “Ruang gerakan kami di kota ini juga agak susah. Meskipun kami berada di pengungsian, banyak intel yang menyamar menjadi tukang ojek, atau penjual sayur, sering memata-matai kami,” katanya.

Situasi itu membuat para warga yang mengungsi merasa mengalami kekerasan berganda. Mereka warga yang tidak terlibat konflik bersenjata, tidak tahu apa-apa, namun setelah mengungsi pun selalu dicurigai.

“Desember ini, kami sudah tinggal satu tahun di Nabire Papua. Kehidupan di Nabire itu berbeda jauh dengan saat kami berada di kampung dulu. Tantangan hidup di kota ini jauh lebih berat daripada di kampung,” katanya

Jauh dari kebunnya, para pengungsi dipaksa bertahan hidup di kota, tanpa memiliki sumber penghidupan. “Di kota ini, kami mau pergi ibadah Mingguan juga harus mengeluarkan transportasi, gerejanya juga jauh jaraknya, sehingga membutuhkan biaya hidup yang besar. Berbeda dengan di kampung. Di tempat pengungsi, di Nabire, [jika terus] berada di tempat pengungsian itu, kami bosan. [Kami] mau pulang ke kampung halaman, tapi tidak aman. Dengan keadaan terpaksa, kami tinggal di sini,” katanya.

Berada di Nabire juga tidak membuat para pengungsi

terlepas dari beban memikirkan nasib saudara-saudara mereka yang masih berada di Intan Jaya, ataupun mengungsi ke berbagai kabupaten tetangga lainnya. Konflik bersenjata di Intan Jaya benar-benar menceraikan-beraikan warga sipil yang mengungsi secara terpisah-pisah, di Nabire, di Timika, atau masuk ke hutan. “Kami merayakan Natal 2021 apa adanya, dengan keluarga kami yang ada di Nabire. Kami juga terpikir dengan kondisi pengungsi yang ada bersama dengan kami, dan [saudara-saudara kami yang mengungsi] di daerah lain. Perayaan Natal di pengungsian tidak sama seperti kami merayakan Pesta Natal di kampung halaman kami sendiri. Saat kami berada di kampung, kami punya kebun [yang] kami kerjakan, bisa pergi ke gereja mengikuti ibadah dengan tenang dan aman,” kata seorang ibu yang berlatarbelakang petani.

Kebanyakan warga sipil Intan Jaya yang mengungsi itu menggantungkan penghidupannya dari bertani dan berkebun. Di Nabire, mereka tidak bisa begitu saja membuka lahan dan berkebun, karena bisa berselisih paham dengan warga setempat. Masalahnya, kebanyakan dari mereka tidak memiliki keahlian selain berkebun.

“Kami mau bertani juga agak susah, sebab kami tidak punya tanah di Nabire. Syukur-syukur kalau ada keluarga yang memunyai tanah di Nabire. Mereka bisa mengelola tanah untuk mendapatkan makan, dan sebagian berjualan di pasar. Kalau di kampung, sebagian panen hasil kebun kami jual untuk beli kebutuhan dapur [seperti] beras, garam, minyak [goreng], atau gula, teh, kopi. Tetapi di sini, kepada siapa kami mau bergantung hidup?”

Para pengungsi Intan Jaya di Nabire tinggal terpecah-pecah, ada dalam kelompok kecil yang terserak di berbagai tempat, sebagian tinggal menumpang sanak saudaranya. Kondisi itu membuat mereka kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Pengungsi berharap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Pemerintah Kabupaten Nabire bisa mencarikan solusi atas persoalan itu. “Tidak ada juga sekolah sekolah alternatif yang bisa membantu anak-anak kami untuk bersekolah,” kata salah satu pengungsi.

Karena saling berpecah, kondisi kesehatan para

pengungsi tidak terpantau, bahkan tidak ada yang bisa mendata berapa jumlah warga pengungsi yang sakit atau meninggal. “Kami belum bisa mendata mereka yang sudah meninggal dunia, karena kami tinggal berpencar, tidak satu tempat. Rata-rata pengungsi meninggal dunia karena sakit malaria, sebab di Nabire itu berbeda dengan dengan Intan Jaya sana. Mereka susah menyesuaikan, sehingga mereka meninggal dunia,” katanya.

Berbagai kalangan warga sudah berupaya membantu para pengungsi Intan Jaya di Nabire. Bantuan itu biasanya dikumpulkan para mahasiswa, gereja, ataupun organisasi lainnya. Salah satu pengungsi menuturkan, terkadang ada orang datang menawarkan bantuan, dengan syarat para pengungsi mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Permintaan itu selalu ditolak para pengungsi.

“Kemarin ada bantuan dari Paroki Bumi Raya di Wonorejo. Kami sudah salurkan kepada warga pengungsi yang ada di Satuan Pemukiman C. Kalau ada orang yang datang kepada kami untuk meminta KTP [sebagai syarat] menyerahkan bantuan, kami tidak akan terima, kami tidak akan memberikan KTP kami,” katanya.

### **Anak-anak di Pengungsian**

Selain perempuan dan orang lanjut usia, kebanyakan pengungsi Intan Jaya di Nabire adalah anak-anak, termasuk anak usia sekolah. Para pengungsi Intan Jaya sangat berharap anak-anak mereka bisa bersekolah di tempat mereka mengungsi, namun rasa takut selalu mengikuti mereka.

“Kami mau agar anak-anak kami bisa bersekolah di Nabire, Jayapura, Timika. Tapi kami khawatir, siapa yang akan memerhatikan mereka di sana? Kami khawatir anak-anak kami dapat ancaman teror, sehingga membuat kami tidak aman dan berada dalam ketakutan. [Kalau] kami memasukkan anak-anak kami bersekolah di kota ini, kami juga takut mereka mendapatkan diskriminasi [karena mereka] anak-anak pengungsian. Kami juga takut anak-anak kami akan dipantau oleh intelijen,” katanya.

Itu sebabnya hasrat terbesar para pengungsi adalah kembali ke kampung halamannya. Mereka lelah dengan situasi mereka sebagai pengungsi, dan ingin segera menjalani aktivitas normal, sebagaimana orang yang tidak hidup di daerah konflik.

Mereka juga ingin anak-anak mereka tumbuh dengan normal sebagaimana anak yang tidak berasal dari daerah konflik.

Akan tetapi, selama pasukan TNI/Polri belum ditarik dari Intan Jaya, mereka juga tak berani kembali ke kampungnya. Tanpa itu, para pengungsi takut bakal menjadi korban kekerasan yang terus terjadi di Intan Jaya.

“Anak-anak kami tidak cocok bersekolah di Nabire ataupun di tempat pengungsian lain. Supaya anak-anak ini bisa sehat dan bisa mendapatkan pendidikan yang baik, pemerintah bisa memulangkan anak-anak dan masyarakat ke Intan Jaya.

Saat pengungsi Intan Jaya masih terkonsentrasi di Jayanti, sejumlah pengungsi berinisiatif untuk menghadirkan sekolah alternatif bagi anak-anak pengungsi Intan Jaya di Nabire. Akan tetapi, upaya itu terkendala kondisi para pengungsi yang berpencaran.

“Kami berencana mendirikan sekolah alternatif untuk membina anak-anak dari pengungsian. Tetapi tidak sempat, karena pengungsi yang semula tinggal di Jayanti sudah berpencar ke Wadio, Kali Pepaya, SP C, dan di beberapa tempat lainnya. Agak susah kami mengontrol mereka,” kata salah satu pengungsi.

Salah satu Mama dari Intan Jaya menuturkan ia berupaya membimbing anak-anaknya untuk rajin berdoa kepada Tuhan, tidak nakal, dan belajar menghargai orang lain. Ia juga berupaya menghapus trauma sang anak, agar tak berkembang menjadi dendam. “Saya menasehati agar anak saya tidak lagi nakal atau membunuh orang sembarang, sebab itu melanggar perintah Tuhan, sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab,” tuturnya.

Ia mengaku sedih dengan konflik bersenjata di Intan Jaya yang tak kunjung berakhir. Konflik ini terjadi di depan anak-anak. Mereka hidup di bawah tekanan militer, intimidasi, teror. Bahkan, saat berada di Intan Jaya, rumah masyarakat ditembak, sementara masyarakat berada dalam honai bersama dengan anak-anak mereka,”katanya.

Ia cemas lantaran di pengungsian anak-anak tidak belajar, tidak mendapatkan pelayanan dan pendidikan agama yang memadai. Sehari-hari anak-anak pengungsi hanya bermain-main, terkadang mereka ikut bapak atau mama pergi ke kebun untuk bikin kebun.

“Saat kami masak bersama, duduk berkumpul bersama, kami selalu menyampaikan pesan-pesan positif kepada anak-anak. ‘Kalian harus rajin ibadah di gereja, sekolah minggu agar supaya kalian bisa bertumbuh dalam iman’,” katanya.

Para Mama yang menjadi korban konflik bersenjata itu tidak mau anak-anak mereka mewarisi dendam. Mereka juga tidak mau anak-anak mereka terbelenggu dalam meraih cita-citanya, entah itu menjadi Pegawai Negeri Sipil, Camat, atau cita-cita lainnya.

“Kami tidak mengajarkan kebencian kepada anak-anak di pengungsi. Kami biarkan mereka bermain dengan teman teman mereka, sebab selain ke kebun, itu hiburan bagi mereka di tempat pengungsi. Kami hanya menanti, kapan daerah kami damai, dan anak-anak kami mereka bisa kembali melakukan aktivitas sekolah mereka. Kami harus pulang, tetapi jalan satu satunya kami berdoa untuk mengakhiri konflik, [agar] tidak ada lagi bunyi tembakan yang membuat kami ketakutan dan anak-anak kehilangan masa depan,” kata salah satu Mama.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar mengatakan pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan pengungsi, khususnya anak-anak yang terdampak konflik bersenjata di Papua. Jika trauma anak-anak itu tidak tertangani dengan baik, mereka akan tumbuh dengan luka yang mendalam, yang bisa membawa mereka bergabung dalam gerakan perlawanan bersenjata di Papua.

“Karena, mereka melihat pemerintah tidak menangani mereka selama berada di lokasi pengungsian, di tengah hutan. Cepat atau lambat, itu akan terjadi, sehingga [trauma para anak terdampak konflik] itu harus ditangani,” katanya.

Siregar mengkritik pemerintah yang sibuk membangun infrastruktur di Papua, namun mengabaikan pentingnya upaya pemulihan para korban konflik Papua. “Orang Papua sudah berada dalam trauma yang berkepanjangan. Jika dibiarkan terus, mereka akan mengalami dan menjadi korban bertubi-tubi. Saat mereka [kemudian] berontak lagi, Negara Indonesia mau salahkan siapa?” tanya Siregar.

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengatakan profil para aktor kekerasan di Papua hari ini

berkaitan langsung dengan berbagai praktik kekerasan dan pelanggaran HAM aparat keamanan pada era 1970 - 1990-an. Ia menyebut tokoh gerakan Papua merdeka seperti Benny Wenda dan tokoh TPNPB Egianus Kogoya adalah korban kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa lalu itu.

Cahya menilai trauma mereka menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM itulah yang membuat mereka melakukan gerakan memperjuangkan kemerdekaan Papua. "Sewaktu kecil keluarga mereka banyak yang terbunuh akibat operasi militer di pegunungan tengah pada tahun 1977 - 1978. Yang lain juga demikian. Pemimpin politik saat ini, mereka pada masa kecilnya menjadi korban dari suatu operasi militer pendekatan keamanan," kata Cahyo.

Entah mengapa, pemerintah belum juga menunjukkan upaya seriusnya untuk menangani nasib warga sipil Papua yang mengungsi karena konflik bersenjata. Yang terjadi justru konflik bersenjata itu semakin meluas, terjadi di berbagai wilayah yang dahulu damai dan jauh dari bunyi tembakan.

## 2.

# Menanti Jalan Damai di Papua<sup>2</sup>

Oleh: Hengky Yeimo



*Para warga Intan Jaya yang mengungsi ke halaman Gereja Katolik St Misael di Bilogai, Sugapa, Intan Jaya. - IST*

*Papua negeri bertajuk surga kecil yang jatuh ke bumi. Namun faktanya Papua tidak tampak lagi seperti surga kecil yang didambakan oleh orang Papua.*

Konflik, penembakan, serta kekerasan terus melingkari kehidupan Orang Asli Papua (OAP). Sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia, kekerasan terus terjadi. Belum lagi kontak

---

<sup>2</sup> Tulisan ini diterbitkan di *Jubi.co.id* pada 24 Januari 2022 dengan judul: *Menanti Konsistensi Pemerintah Menempuh Jalan Damai di Papua*

tembak antara pasukan TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) yang justru kian kerap terjadi akhir-akhir ini.

Imbasnya bukan hanya kematian pihak yang bertikai, tapi juga warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Pola kekerasan yang sama selalu berulang, bahkan menjadi siklus kekerasan dan perlawanan yang terus terjadi dari masa ke masa.

Orang Papua terus menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengalami diskriminasi dan intimidasi. Warga sipil—terutama mereka yang mengalami korban pelanggaran HAM, para anak keturunantahanan atau narapidana politik dan para anak kombatan TPNPB/OPM—tidak pernah mendapatkan keadilan dari Negara. Berulang kali, ribuan warga sipil asli Papua harus mengungsi, karena takut menjadi korban salah sasaran dalam konflik bersenjata yang kian memanas.

Konflik yang berkepanjangan membuat orang Papua mengalami trauma. Trauma itu menyebabkan anak keturunan para aktivis OPM dan korban pelanggaran HAM untuk memilih melawan atas apa yang dilakukan aparat terhadap keluarga mereka.

Dilain sisi, Negara tidak pernah memenuhi permintaan dialog dari berbagai pihak. Berbagai upaya dilakukan orang Papua untuk mencari solusi dan berdialog. Namun solusi untuk menjadikan Papua tanah damai tak kunjung terjadi. Padahal konflik panjang di Tanah Papua telah mengorbankan hak-hak dasar orang Papua sebagai umat manusia selayaknya.

Konflik terbuka antara aparat dan TPNPB kerap kali terjadi di tengah ruang bermain anak-anak. Di daerah pegunungan tengah Papua, seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Paniai, Pegunungan Bintang dan Nduga, konflik baru terus terjadi, membuat trauma baru bagi warga setempat, terutama anak-anak yang menyaksikan orangtua mereka dibunuh.

Siapa sutradara kekerasan di Tanah Papua? Seperti apa evaluasi pemerintah atas pengiriman pasukan non organik TNI/Polri ke Papua? Mengapa berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua tak kunjung diselesaikan? Mengapa pula desakan agar pemerintah menarik pasukan TNI/Polri selalu diabaikan pemerintah?

## **Korban Semakin Banyak**

Laporan Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) yang kelima mendokumentasikan kekerasan yang terjadi sepanjang Januari 2015 sampai dengan Desember 2016. Laporan itu menyebutkan ada 16 kasus pembunuhan diluar hukum yang terjadi selama tahun 2015 - 2016. Laporan yang sama menyebutkan hanya satu kasus pembunuhan yang diproses secara hukum di pengadilan militer.

Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen untuk mengadili berbagai kasus kekerasan yang dilakukan aparat keamanannya. Kekerasan di Papua hanya dibalas dengan kekerasan, tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Negara misalnya, tidak menunjukkan upaya menyembuhkan trauma dari para korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Laporan ketujuh ICP memberikan analisis pelanggaran dan kekerasan yang terjadi sejak Januari 2019 hingga Desember 2020. Laporan itu juga menyajikan data yang disusun ICP dan West Papua-Netzwerk terkait jumlah konflik bersenjata di Papua Barat antara 2017 dan 2020.

Dokumen itu menyebutkan antara 2017 dan 2020 terjadi banyak kekerasan di Tanah Papua. Jumlah bentrokan bersenjata pada tahun 2017 sebanyak 24 kasus, dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 44 kasus. Tahun 2019, terjadi sebanyak 33 kasus bentrokan, dan tahun 2020 sebanyak 64 kasus.

Jumlah aparat TNI/Polri pun semakin bertambah. Tahun 2017 sebanyak 3 orang, lalu bertambah menjadi 8 orang pada tahun 2018. Tahun 2019, jumlah itu bertambah menjadi 18 orang, dan tahun 2020 sebanyak 11 orang. Jumlah aparat keamanan yang terluka pada 2017 sebanyak 8 orang, dan bertambah menjadi 15 orang pada tahun 2018. Tahun 2019 sebanyak 12 aparat keamanan terluka, dan tahun 2020 ada 10 orang aparat keamanan terluka.

Jumlah korban jiwa dari pihak TPNPB pada tahun 2017 sebanyak 2 orang, dan bertambah menjadi 12 orang pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sebanyak 14 kombatan TPNPB tewas, dan pada tahun 2020 juga ada 14 orang personil TPNPB yang tewas. Jumlah kombatan TPNPB yang terluka pada tahun 2017 sebanyak 2 orang, dan bertambah menjadi 4 orang pada tahun

2018. Tidak tercatat ada personil TPNPB yang terluka pada tahun 2019, namun pada 2020 ada seorang personil TPNPB yang terluka.

Akan tetapi, jumlah korban jiwa dari pihak warga sipil justru berlipat ganda dibandingkan jumlah korban dari para pihak yang bertikai. Data ICP merinci data korban jiwa yang diakibatkan konflik bersenjata di Papua, baik para korban kekerasan maupun korban yang meninggal karena berbagai keterbatasan saat mengungsi atau berada di pengungsian.

Pada 2017 ada tiga warga sipil yang tewas, dan semuanya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB. Pada tahun 2018, jumlah itu melonjak hingga mencapai 62 korban. Sejumlah 25 orang korban jiwa merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB, sementara 17 orang lainnya adalah korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Selain itu, ada 20 warga yang meninggal karena hidup dalam pengungsian.

Pada tahun 2019, ada 216 kasus warga sipil meninggal akibat konflik bersenjata di Papua. Dari jumlah itu, ada 7 warga yang meninggal merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB, dan ada 13 warga yang meninggal karena menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Selain itu, ada 196 warga sipil yang meninggal saat hidup dalam pengungsian.

Sepanjang 2020, ada 213 warga sipil yang meninggal dunia karena konflik di Papua. Sejumlah 7 warga sipil tewas karena menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB. Ada pula 20 warga sipil yang tewas karena menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Selain itu, ada 186 warga sipil yang meninggal saat hidup dalam pengungsian.

Data ICP menyebut pada 2017 ada 12 warga sipil yang terluka karena konflik Papua, 3 orang merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan kombatan TPNPB, dan 9 orang lainnya adalah korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Pada tahun 2018, ada 15 warga sipil yang terluka, 7 orang merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan, dan 8 orang lainnya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan.

Pada 2019, ada 9 warga sipil yang terluka karena

konflik Papua, kesemuanya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Pada 2020, ada 26 warga sipil terluka, 16 diantaranya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB, dan 10 lainnya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan.

Sindonews.com pada 17 Januari 2020 melansir pernyataan Kepala Biro Dukungan Penegakan Komnas HAM Gatot Ristanto yang menyebut ada 53 peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang 2021. Berbagai peristiwa itu menimbulkan 47 korban jiwa, dan 24 orang korban diantaranya meninggal dunia. Gatot menyatakan kekerasan itu dilakukan TPNPB maupun aparat gabungan TNI/Polri, dengan bentuk kekerasan seperti penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, serta pembakaran atau perusakan bangunan.

Tribunnews.com melansir pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda) Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri yang menyatakan ada 46 orang meninggal akibat konflik di Papua. Fakhiri menyatakan pada 2021 ada 29 kasus kekerasan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Kabupaten Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Fakhiri merinci, korban tewas dari kalangan warga sipil sebanyak 19 orang, prajurit TNI 11 orang, anggota Polri empat orang dan kelompok bersenjata 12 orang.

### **Siklus Kekerasan di Papua**

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar mengatakan intensitas kontak tembak dalam konflik di Tanah Papua dari waktu waktu terus meningkat. "Konflik yang berkepanjangan itu adalah bagian dari siklus yang harus dihentikan. Negara memunyai peran penting dalam menyelesaikan persoalan konflik di Tanah Papua," katanya.

Siregar mengatakan bahwa, konflik di Papua ini merupakan konflik ideologi dimana TPNPB/OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia, sementara TNI/Polri mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Biasa disebutkan dengan 'NKRI harga mati' dan 'Papua merdeka harga mati'. Persoalan ideologi itu apabila dibiarkan akan menghambat eksistensi Orang Asli Papua atau OAP," katanya.

Siregar mengingatkan Negara harus kembali mengacu

usulan Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama dengan Jaringan Damai Papua yang merumuskan empat akar masalah konflik Papua. Keempat akar masalah itu adalah kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi Orang Asli Papua, kekerasan negara dan dugaan pelanggaran HAM, serta kontroversi sejarah dan status politik wilayah Papua.

“Imbas dari konflik empat akar masalah itulah yang kemudian membuat Papua seperti paradokspelik. Persoalan di Papua itu beragam, yakni pelanggaran terhadap Hak Sipil dan Politik [maupun] hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Persoalan itu harus dibicarakan dengan meninjau rekomendasi dari orang Papua untuk berdialog,” katanya.

Siregar menyebut kompleksitas konflik di Tanah Papua hanya dapat diurai jika pemerintah mau membuat jeda kemanusiaan untuk menghentikan rantai kekerasan di Papua. Pemerintah juga harus bertanggungjawab untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi Orang Asli Papua.

“Pemerintah Indonesia jangan berpikir dengan membangun jembatan, membangun infrastruktur yang besar. Bukan itu yang [seharusnya] disuguhkan kepada masyarakat. Kalau penanganan berdasarkan pendekatan pembangunan infrastruktur, atau rencana perusahaan besar masuk [berinvestasi] ke Papua, konflik tidak akan pernah selesai. Konflik akan gagal terselesaikan karena [langkah pemerintah] tidak menyentuh persoalan mendasarnya,” kata Siregar.

Siregar mengatakan kejahatan dan kekerasan di Papua terus berlanjut karena ada praktik pembiaran kepada para pelaku kekerasan, dan hal itu sudah menjadi sorotan banyak pakar. “Aksi-aksi kekerasan itu harus diselesaikan secara hukum, sehingga masyarakat percaya pada pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki perspektif “A Non-Zero-Sum Game” untuk mengakhiri konflik di Papua, di mana kemenangan satu pihak tidak seharusnya dianggap sebagai kekalahan pihak yang lain. “Jika tidak dihentikan, konflik itu akan panjang dan masyarakat sipil akan jadi korban. Perlindungan dan pemenuhan hak [warga negara] itu tanggungjawab negara. Jadi negara harus segera menyelesaikan konflik di Papua,” kata Siregar.

Direktur            Eksekutif            Amnesty            International

Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah di Jakarta tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan agenda reformasi di Papua. Ia mencontohkan inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua.

“Otsus adalah jalan tengah yang pernah disepakati pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri. [Otsus diberikan] untuk menengahi keinginan merdeka dari Papua dan keinginan pemerintah Jakarta agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.

Usman mengatakan Otsus Papua memandatkan berbagai hal yang sangat penting, seperti pemberian kekuasaan yang otonom secara politik kepada Orang Asli Papua, perlindungan hak tradisional Orang Asli Papua. Otsus juga memandatkan pemberian otoritas kultural melalui Majelis Rakyat Papua (MRP), agar seluruh kekayaan alam Papua dan kebijakan strategis menyangkut Papua ditempuh dengan persetujuan MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua.

“Dalam Otsus Papua juga terdapat beberapa kewajiban mendasar pemerintah untuk menyelesaikan kasus kasus HAM, salah satunya dengan mendirikan Komisi HAM di Papua, mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, mendirikan Pengadilan HAM yang berkedudukan di Papua. Seluruh agenda reformasi yang dituangkan dalam Otsus Papua tidak berjalan, salah satu sebab utamanya inkonsistensi pemerintah,” kata Usman.

Usman juga menyatakan inkonsistensi pemerintah bisa terlihat dari pemekaran Provinsi Papua yang dilakukan sebelum MRP terbentuk pada tahun 2003. MRP sendiri baru dibentuk pada akhir 2004, dan pembentukan Provinsi Papua Barat sempat menjadi kontroversi diantara para pemangku kepentingan politik di Papua.

Usman menyatakan inkonsisten itu juga terlihat dalam langkah sepihak pemerintah pusat merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Pada 19 Juli 2021, pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Perubahan Kedua UU Otsus Papua)

“Pemerintah sekarang justru mengambil kembali otonomi politik Papua melalui UU Otsus yang direvisi kedua kali. [Pemerintah] membentuk badan yang terpusat, misalnya badan khusus dibawah Kantor Wakil Presiden, sampai dengan menghapuskan ketentuan pasal di UU Otsus mengenai pendirian partai politik di Papua,” kata Usman.

Usman menegaskan pemerintah juga menunjukkan inkonsistensi dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyatakan seluruh janji dan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua tidak ada yang terpenuhi.

“Impunitas itu terjadi selama ini dari mulai Papua masih berada pada era Orde Baru, hingga Papua berada pada era reformasi. Impunitas artinya ketiadaan penghukuman, tidak adanya orang yang dihukum karena kejahatan yang terjadi di Papua, khususnya kejahatan pelanggaran HAM,” katanya.

Usman mengatakan hingga saat ini pembunuhan yang tidak sah, pembunuhan di luar proses hukum, penculikan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, pemindahan paksa, masih terjadi di Papua. Seluruh pelanggaran HAM itu terus berulang, tanpa ada satupun pelaku yang dihukum secara adil.

“Disisi lain, beberapa pejabat militer yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua justru mendapatkan promosi tanpa adanya penghukuman. Janji pemerintah Indonesia pada tahun 2015 [yang disampaikan] di depan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa kasus Wamena dan kasus Wasior ke pengadilan juga tidak terpenuhi,” kata Usman.

### **Seperti Diberi Kayu Bakar Baru**

Moderator Dewan Gereja Papua (WPCC), Pdt Benny Giay mengatakan Gereja memiliki peran kunci dalam upaya advokasi berbagai persoalan dalam konflik Papua. Menurutnya, Sinode Gereja Kingmi Tanah Papua sempat terkooptasi alam pikir pemerintah Indonesia pada tahun 1964, hingga para tokoh gereja berhasil membangkitkan peran Gereja mengadvokasi kepentingan Orang Asli Papua. Gereja pun memiliki penilaian yang tajam atas situasi konflik Papua.

Mantan Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua

itu menyitir arsip Sinode Gereja Kingmi yang menunjukkan bagaimana Gereja terpengaruh cara pikir pemerintah, dan hal itu mempengaruhi bagaimana Gereja menangani konflik di Tanah Papua. "Pada tahun 1964 Gereja GKI, Kingmi Papua, dan Gereja Katolik telah melakukan penandatanganan bersama dan menyerahkan kepada Presiden Soekarno," katanya.

Giay mengatakan pada masa itu gereja di Papua memandang Indonesia sebagai pelayan Allah yang akan menyejahterakan masyarakat, dan hal itu terpatrit dalam pemikiran para pendeta. "Gereja Kingmi Papua sendiri khususnya. Tapi saya tidak tahu dengan Gereja GKI dan denominasi gereja lain," katanya.

Giay mengatakan pada pertengahan April sampai bulan Juni-Juli tahun 1964, para tokoh gereja serta pimpinan sinode di Tanah Papua dibawa ke Bogor, mengikuti indoktrinasi selama 1 bulan. "Setelah itu, mereka membuat pernyataan Gereja mendukung Indonesia menduduki Tanah Papua. Hal itu berpengaruh kepada bagaimana peran gereja dalam mengani orang Papua pada masa itu, kini, dan nanti," katanya.

Ia menjelaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tragedi kemanusiaan pada 1977 sampai 1978 menjadi semacam momentum kebangkitan Orang Asli Papua. "Hal itu mencerminkan bahwa ada yang salah dengan Indonesia. Lama-lama, generasi muda itu muncul dan bangkit melawan sejak tahun 1977. Ada semacam gerakan, hingga sampai ke [kelompok musik] Mambesak, [kelompok] mahasiswa, [kelompok] perempuan, [kelompok] akademisi—itu yang mengganggu [cara pandang lama] Gereja. Gereja [akhirnya] merasa bahwa pemerintah ini bukan pelayan Tuhan lagi," kata Giay.

Giay menyebut Gereja kini memandang ada yang salah dengan pemerintah. Ia menyebut inkonsistensi pemerintah itu dengan 'bicara lain, dan main lain', sebuah perumpamaan tentang bagaimana tindakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan pemerintah. Berbagai denominasi Gereja melihat penderitaan dari jemaatnya di Papua, sehingga Gereja mendirikan berbagai perangkat organisasi Gereja atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengadvokasi persoalan HAM di Papua.

"Kesadaran kita itu mendorong kami untuk turut

menghadirkan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Cabang Papua atau Elsham Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Papua, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, dan sebagainya. Sinode Gereja Kingmi Tanah Papua juga terlibat mendirikan LSM, karena salah seorang pendeta Kingmi dibunuh pada tahun 1984," kata Giay.

Berbagai perangkat organisasi maupun LSM advokasi pelanggaran HAM yang dimotori Gereja memiliki sejarah kerja panjang dalam mengangkat persoalan konflik Papua. Sayangnya, demikian menurut Giay, persoalan konflik di Papua tak kunjung terselesaikan, dan eskalasi konflik malah terjadi.

"Kami melihat bahwa persoalan umat semakin serius. Itu satu perkembangan baru, dan kami menilai bahwa ada permasalahan yang terjadi di pemerintahan. Itu sangat memprihatinkan. LSM dan Gereja [mencoba] mengurus [persoalan konflik di Papua] tetapi Gereja juga [memiliki] keterbatasan sumber daya manusia untuk mengumpulkan laporan-laporan pelanggaran HAM," kata Giay.

Dewan Gereja Papua yang beranggotakan para pimpinan Sinode Gereja di Tanah Papua duduk bertemu dua bulan sekali untuk membahas berbagai persoalan Orang Asli Papua yang terdampak konflik bersenjata di sana, termasuk masalah pelanggaran HAM yang terjadi. "Dan kami mengeluarkan laporan melalui Suara Gembala," kata Giay.

Terus berulangnya berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua menurut Giay telah membuat Dewan Gereja Papua menilai bahwa konflik itu berlanjut karena ada pembiaran yang dilakukan oleh Negara dan apaturnya. "Konflik di Papua kerap kali dijadikan semacam proyek oleh Negara," katanya.

Giay menyerukan agar aparat keamanan terlibat perdagangan senjata api di Tanah Papua agar berhenti melakukan praktek jual-beli senjata dan amunisi kepada TPNPB ataupun OPM. "Tentara yang melanggar hukum harus dihukum. [Pemerintah] bicara membasmi teroris OPM, Kelompok Kriminal Bersenjata, [tetapi] pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan lain di lapangan. Kalau begitu, siapa tipu siapa? Indonesia bermuka dua," katanya.

Giay mengatakan bahwa selama ini pos TNI/Polri

diserang, dan selalu disebut bahwa menyerangnya Kelompok Kriminal Bersenjata, namun oknum anggota TNI/Polri justru terlibat menjual senjata kepada kelompok bersenjata di Papua. “Saya tidak temukan dalam kamus politik atau ideologi apapun, tentang TNI/Polri yang jual-beli senjata ke KKB untuk serang pos [mereka sendiri]. [Persoalan] jual-beli senjata itu sudah sangat terkenal di Papua. Saya sudah pernah sampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo, namun tidak ada pernyataan yang disampaikan Jokowi hingga saat ini,” katanya.

Kendati sudah ada beberapa anggota TNI/Polri yang ditangkap dan diadili karena menjual senjata dan amunisi kepada kelompok bersenjata di Papua, Giay menilai pemerintah tidak menunjukkan upaya nyata untuk menghentikan perdagangan senjata itu. Giay menilai itu bentuk pembiaran pemerintah, dan pembiaran itu seperti menyorong kayu bakar baru agar api konflik Papua terus menyala.

“Saya pernah menyampaikan kepada Presiden agar dapat membentuk tim independen yang turun untuk meneliti dan menginvestigasi jaringan mana atau [oknum] dalam tubuh TNI/Polri [mana yang] membuat bisnis jual-beli senjata di Tanah Papua,” katanya.

### **Sentimen Anti-Indonesia**

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengatakan berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi konflik Papua gagal karena upaya itu tidak menyelesaikan masalah mendasar di Papua. Hal itu membuat Cahyo khawatir, karena justru membuat sentimen anti Indonesia semakin meluas di kalangan generasi muda Papua.

“Saya umpamakan [strategi itu] sebagai burung onta, karena kalau ada bahaya kepalanya sembunyi di tanah. Artinya, pemerintah menetapkan solusi yang tidak menyelesaikan masalah,” katanya.

Cahyo mengatakan pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Papua dengan pembangunan, pemekaran, Otsus Jilid 2, hingga mengirim pasukan TNI-Polri ke Papua. “Pemerintah ingin menyelesaikan konflik, tapi tidak menyelesaikan masalah. Masalah tetap dibiarkan, dan itu mengawatirkan karena secara terus menerus memperkuat perasaan sentiment anti Indonesia

[di Papua],” katanya.

Cahyo mengingatkan, jika sentimen anti Indonesia dibiarkan terus berkembang, maka kehendak rakyat Papua untuk merdeka juga akan semakin meningkat. Kekecewaan rakyat Papua terhadap negara juga akan meningkat.

“Konsekuensinya, keinginan untuk merdeka. Walaupun tidak diekspresikan secara terbuka, tetapi dalam hati orang Papua ingin lepas karena di dalam negara Indonesia tidak ada ruang, tidak ada kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk hidup yang lebih baik,” ujar Cahyo.

Cahyo menyatakan sentimen yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia itu bukan pemerintah Orang Asli Papua, melainkan pemerintah kolonial, telah nyata ada. Ia mengatakan anggapan bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah kolonial itu semakin kuat pada sanubari para korban dan keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, seperti Benny Wenda dan Egianus Kogoya dan yang lainnya. Keluarga mereka adalah korban kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa lalu, dan trauma itulah yang membuat mereka melakukan gerakan memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Sewaktu kecil keluarga mereka banyak yang terbunuh akibat operasi militer di pegunungan tengah pada tahun 1977 – 1978. Yang lain juga demikian. Pemimpin politik saat ini, mereka pada masa kecilnya menjadi korban dari suatu operasi militer pendekatan keamanan,” kata Cahyo.

Cahyo menyatakan konflik Papua hanya bisa didamaikan jika aspirasi Papua merdeka ditempatkan dalam kerangka keindonesiaan, caranya dengan membuka diri berdialog. “Yang ditagih orang Papua saat ini adalah pengakuan harkat martabat manusia papua, hak hidup. Itulah yang menjadi aspirasi Orang Asli Papua, itu yang tidak dipenuhi oleh Indonesia,” katanya.

Cahyo juga mengingatkan labelisasi kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris maupun penambahan komando teritorial seperti Komando Distrik Militer atau Komando Resor Militer tidak akan menyelesaikan masalah konflik di Papua. Ia menegaskan cara yang dianggap pemerintah Indonesia sebagai solusi itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah, dan justru menambah masalah.

“Pendekatan keamanan yang dilakukan menimbulkan luka, korban jiwa, dan trauma korban yang hidup belum

tersembuhkan. Anak mereka, cucu mereka akan ikut bergabung dalam gerakan itu. Indonesia secara langsung atau secara tidak langsung turut membesarkan OPM dengan cara [menggelar] operasi militer [yang justru membuat] masyarakat sipil menjadi korban,” kata Cahyo.

Di pihak lain, aparat keamanan menyatakan mereka telah mengubah pendekatan yang mereka gunakan untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua. Kapolda Papua, Irijen Mathius DFakhiri misalnya, mengatakanselama masa kepemimpinannya polisi melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua.

Menurutnya, pendekatan humanis itu digunakan untuk mengedukasi masyarakat agar penegakan hukum dapat diterapkan. “Saya sebagai Kapolda melihat warga masyarakat di Tanah Papua sebagai Warga Negara Indonesia yang harus dilayani dari sisi kepolisian. Saya tidak pernah melihat masyarakat dari sisi lain,” katanya.

Fakhiri menegaskan pendekatan humanis itu akan dilanjutkan. “Kami dalam langkah-langkah kedepan, dalam penanganan Papua, malah mengarah ke sana. Saya meminta garda terdepan di Polres melakukan komunikasi yang aktif dengan semua pihak, tokoh adat, tokoh masyarakat lebih khusus, [agar] mereka yang berseberangan kembali untuk bersatu dalam NKRI,” katanya.

Fakhiri pun meyakini upaya pemerintah mempercepat pembangunan di Papua akan diterima masyarakat sebagai langkah pemerintah untuk memberikan sentuhan pelayanan kepada warga di Papua. Seiring upaya pemerintah itu, jajaran Polri terus berusaha menurunkan ketegangan di antara pihak yang bertikai.

“Kami aparat kepolisian mengurangi langkah atau tindakan yang merugikan kebijakan pemerintah. Kami berusaha lebih sabar, berusaha membuka diri untuk memaksimalkan pendekatan dialogis, pendekatan kesejahteraan. Kami komunikasi aktif, supaya semua elemen masyarakat – baik dia yang terpengaruh ataupun mereka yang masih berada di hutan – bisa keluar [dan] kembali membangun kampungnya,” ujar Fakhiri.

### 3.

## Menyeru Dialog dan Demiliterisasi, Merawat Asa Damai untuk Papua<sup>3</sup>

Oleh: Hengky Yeimo



*Pendaratan pasukan TNI menggunakan helikopter di lapangan terbang Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Desember 2019 - Jubi/IST*

*Seruan dialog damai untuk menyelesaikan persoalan Papua telah digaungkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sejak 2006, dan meraih dukungan dari banyak kalangan di Papua. Akan tetapi, pemerintah belum juga mau mengikuti rekomendasi LIPI itu. Setiap kali konflik baru terjadi, pemerintah memilih mengirim pasukan tambahan ke Papua, yang berulang kali terbukti justru menimbulkan masalah baru.*

---

<sup>3</sup> Tulisan terbit di [jubi.co.id](http://jubi.co.id) edisi 28 Januari 2022 dengan judul yang sama.

Seorang ibu yang juga warga Intan Jaya dan tengah mengungsi ke Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sangat merindukan damai tercipta di Papua. “Selama ini kami terus berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon agar konflik reda, [berharap pemerintah] tarik pasukan [dan] mengakhiri konflik juga. Hingga saat ini, Tuhan belum juga mengabulkan doa kami, hingga detik ini,” katanya.

Dia meminta pemerintah di Jakarta tidak menutup mata dengan penderitaan warga asli Papua yang berada di pengungsian gara-gara konflik bersenjata di sejumlah kabupaten. Ia bahkan bertanya, apakah para pemimpin negeri masih punya nurani dan nilai kemanusiaan kepada Orang Asli Papua.

“Kalau aparat keamanan TNI dan Polri tidak ditarik, kami tidak akan berani untuk kembali ke kampung halaman kami. [Kalau] kami pulang ke kampung, kami akan tetap mengungsi lagi, karena [masih] ada kontak tembak,” katanya.

Ia pun berharap pemerintah batal menambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya. Baginya, imbas rencana penambangan Blok Wabu membuat masyarakat kecil menjadi korban demi kepentingan segelintir orang.

“Kami bukan binatang buruan yang harus dibantai oleh Negara ini. Kami punya hak yang sama dengan [mereka yang] berkulit putih di Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Timur. Stop, jangan membunuh kami,” katanya.

### **Trauma Mendalam**

Anak kandung mantan narapidana politik (Napol) Linus Hiluka, Jimmy Hilsom Hiluka baru berumur 16 tahun saat ayahnya ditangkap dengan tuduhan terlibat peristiwa pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 3 April 2003. “Saya bertumbuh dan besar tanpa bapak di Wamena. Sejak usia saya masih 16 tahun, selama bapak ditangkap oleh aparat kepolisian [dan ditahan] di Lembaga Pemasyarakatan sejak tahun 2003, hingga pada tahun 2015 ia diberi grasi oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.

Jimmy tahu, peristiwa yang dialami itu jamak terjadi di Papua. Ia juga tahu, jamaknya peristiwa seperti itulah yang

membuat Orang Asli Papua memiliki trauma yang mendalam atas kehadiran Indonesia di Papua.

Jimmy mengatakan pihak manapun tidak bisa menghilangkan rasa trauma itu, karena banya Orang Asli Papua bertumbuh dalam situasi tidak aman dan traumatis. Menurutnya, trauma yang lebih dalam dirasakan oleh anak-anak tokoh Tentara Pembebasan Nasional (TPN, sekarang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Orangtua kami sudah melawan sistem, kami mengalami nasib yang sama. Kami juga korban, perasaan yang sama kami alami. Kami ini anak-anak kampung, karena perasaan takut terbawa, kami membutuhkan pemulihan di tempat yang aman, [tempat yang] tidak ada TNI/Polri. Menurut saya anak-anak [yang mengalami trauma itu] perlu ditangani langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

Orang Asli Papua memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap aparaturnegara, apalagi aparat keamanan. Jimmy meyakini, jika Negara mau menghilangkan rasa trauma itu, harus ada pemulihan bagi para korban, dengan melibatkan organisasi non pemerintah.

“Kami bisa terima NGO. Yang bisa merehabilitasi anak-anak TPNPB atau OPM adalah mereka yang pikirannya netral dan fokus berbicara soal kemanusiaan, tidak memihak siapapun,” katanya.

Jimmy pernah aktif dalam Peace Brigades International (PBI), sebuah organisasi nonpemerintah tingkat internasional yang mengampanyekan perdamaian di seluruh belahan dunia, termasuk Papua. Dari PBI, Jimmy mempelajari banyak metode untuk membangun perdamaian di daerah konflik, dan mengatasi trauma akibat konflik.

Sekitar tahun 2006, para aktivis PBI yang datang dari berbagai negara datang ke Papua, dan turun ke berbagai kampung yang pernah menjadi zona konflik. “Mereka datang, mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak berbicara soal Papua merdeka, mereka hanya bicara tentang kemanusiaan. Mereka bikin pelatihan, mereka bikin workshop dan pelatihan, tapi pemerintah usir mereka,” kata Jimmy.

Ia sangat kecewa ketika pemerintah Indonesia mencabut visa sejumlah aktivis PBI dari luar negeri, sehingga seluruh

aktivitas PBI di Papua lumpuh. “Negara mencurigai [mereka], mencabut visanya, dan mereka dipulangkan. [Padahal ketika itu] kami mendapatkan pengetahuan bagus [tentang cara] menghilangkan rasa ketakutan,” kenangnya.

Jimmy merasakan sendiri bagaimana pemerintah Indonesia membatasi berbagai pihak yang mencoba mengulurkan tangan dan membantu anak-anak anggota TPNPB dan OPM. “Kalau orang yang niat baik saja diusir, berarti itu ada pembiaran, sengaja supaya kami mati perasaan, dan kami ditindas seperti itu,” ujarnya.

Pengalaman seperti itulah yang membuat Jimmy menilai Indonesia tidak memiliki niat baik untuk memulihkan hak dan martabat para korban konflik di Papua. Jimmy merasa aparaturnegara Indonesia tidak memiliki cara pandang yang berpihak kepada nilai kemanusiaan, sehingga mencurigai organisasi seperti PBI. “Kami akan selalu berbangga dengan orang yang netral dan membantu kami tanpa embel-embel apapun, [bekerja] demi kemanusiaan,” katanya.

### **Menunggu Rekomendasi LIPI**

Koordinator Dewan Gereja Papua (WPCC), Pdt Benny Giay mengatakan konflik bersenjata yang saat ini meluas di sejumlah kabupaten di Papua telah berdampak kepada ribuan anak asli Papua. Mereka tidak bisa bersekolah harus mengungsi, situasi yang membuat mereka kehilangan hak-hak dasar mereka.

Ia pun menyerukan pentingnya jeda kemanusiaan demi menyelamatkan masa depan anak-anak asli Papua. “Imbasnya adalah anak-anak menjadi korban, dan Negara terus memelihara kekerasan, membiarkan [kekerasan] terus terjadi atas nama proyek tertentu. Itu semua harus dihentikan. Apakah itu perundingan atau dialog, saya tidak mau tahu, yang penting masyarakat hidup damai dulu,” kata Giay.

Giay meyakini, solusi damai hanya bisa dicapai jika pemerintah mau menarik seluruh pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua, baik itu pasukan organik maupun pasukan non-organik. “Pemerintah sebagai [representasi dari] Negara harus menunjuk satu lembaga di negara ini untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan melibatkan TPNPB, Komite Nasional

Papua Barat, dan United Liberation Movement for West Papua,” katanya.

Giay menyebut Jusuf Kalla – tokoh yang menjadi Wakil Presiden pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo – selalu aktif berbicara tentang perdamaian. Jusuf Kalla adalah tokoh yang berperan besar dalam proses Perjanjian Helsinki, perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh.

Akan tetapi, pemerintah tidak mau menempuh jalan yang sama untuk mengakhiri konflik di Papua. Giay mengkritik para pemimpin Indonesia yang sibuk berbicara tentang perdamaian dunia dan memediasi konflik di berbagai negara, namun tak kunjung mengupayakan perdamaian di Papua.

“Indonesia dan negara asing duduk bersama berbicara soal perdamaian. Untuk berbicara tentang perdamaian di daerah lain dan negara lain, Indonesia sangat aktif sekali. Kalau Papua ini, terus dibiarkan, [hingga] bisa berdampak buruk bagi eksistensi Orang Asli Papua,” katanya.

Giay menyatakan konflik Papua harus diselesaikan dengan dialog, dan mekanisme atau cara dialog itu bisa disepakati bersama. “Untuk saat ini, pemerintah Indonesia harus menarik pasukan organik dan non organik, dan [melakukan] demiliterisasi di Tanah Papua. Apapun itu bentuknya. Hentikan semua pembangunan unit militer di Tanah Papua,” tegasnya.

Giay menunggu pemerintah Indonesia menjalankan rekomendasi LIPI untuk menyelesaikan empat akar masalah Papua. “Empat masalah itu adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua. Semua sudah jelas,” katanya.

### **Cacat Prosedur, Tambah Masalah**

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar juga mendesak pemerintah berhenti mengirim tambahan pasukan TNI/Polri ke Papua. Siregar menyatakan kebijakan penambahan pasukan TNI/Polri ke Papua harus dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo, karena terbukti gagal menyelesaikan konflik di Papua.

Siregar juga mengkritik penambahan pasukan di Papua

yang melanggar prosedur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI). “Presiden harus menggunakan prosedur UU TNI, sebab dropingan pasukan itu dikategorikan sebagai operasi militer selain perang. TNI dihadapi kelompok bersenjata TPNPB dalam konteks operasi militer selain perang,” kata Siregar.

Untuk mengerahkan pasukan TNI melakukan operasi militer selain perang, lanjut Siregar, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sejauh ini, penambahan pasukan TNI di Tanah Papua dilakukan tanpa menempuh prosedur itu. “Prosedur lainnya, kalau penempatan pasukan di suatu wilayah berimplikasi kepada konsekuensi ancaman yang dihadapi oleh satu wilayah, [pemerintah harus] menegaskan status wilayah itu apa dulu. [Apakah] tertib sipil, darurat sipil, tertib militer, atau darurat perang. Jadi, jumlah aparat yang banyak, wilayah itu harus diberi status,” ujarnya.

Siregar mengatakan beberapa wilayah konflik di Papua ditempati pasukan militer yang sangat banyak, namun daerah itu tidak diberi status daerah militer. Padahal pemerintahan sipil di daerah itu tidak aktif lagi.

“Bayangkan, banyak sekali satuan tugas non organi, belum lagi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, di mana komando-komando itu lebih banyak berada di Jakarta, bukan di Polda atau Kodam. Seharusnya, penempatan pasukan di Papua memiliki sistem koordinasi dan komando yang jelas,” kata Siregar.

Ia menyatakan penambahan pasukan TNI/Polri di Papua juga mengabaikan kewenangan khusus Gubernur Papua dalam Otonomi Khusus Papua. “Seharusnya Gubernur diajak bicara. Dengan banyaknya pasukan, bahkan pos [pasukan] organik juga ditempati [pasukan] non-organik. Contohnya, [pasukan yang ditempatkan di] Koramil Hitadipa, [Kabupaten Intan Jaya], dia tidak punya pengalaman berinteraksi dengan masyarakat setempat,” ujar Siregar.

Ia pun mengkhawatirkan rencana TNI untuk menambah satuan teritorial di Tanah Papua justru menimbulkan persoalan baru, karena satuan teritorial itu diisi prajurit TNI dari luar Papua yang tidak memahami kondisi sosial dan budaya Orang Asli Papua.

“Kami khawatir kebijakan Panglima TNI yang bilang

akan bangun koramil dan kodim [baru]. Bayangkan kalau itu ditempati [pasukan] non-organik," kata Siregar.

### **Dialog dan Perundingan**

Anak kandung tokoh TPNPB di Wilayah Adat Meepago Tadeus Yogi, Damianus Magai Yogi mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan perlawanan bersenjata jika TNI/Polri tidak ditarik keluar Papua. "Selama ini kami meminta pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai. Tetapi mengapa pemerintah terus mengirim militernya untuk membunuh orang Papua?" Damianus bertanya.

Damianus mendesak pemerintah segera menarik pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua, dan menggelar perundingan antara pemerintah Indonesia dan TPNPB serta United Liberation Movement for West Papua. Damianus menyatakan perundingan itu harus dimediasi secara langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Orang Papua harus bebas dari belenggu penjajahan dan ancaman kepunahan orang Papua. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden, harus segera mengakui 1 desember sebagai hari kemerdekaan orang Papua," katanya.

Damianus menyatakan Indonesia telah mengambil alih segalanya, menyiksa dan membunuh orang Papua. "Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan Papua secara damai, tanpa pertumpahan darah. Mekanismenya adalah bagaimana Perserikatan Bangsa Bangsa dan negara-negara Pasifik memfasilitasi Papua, ULMWP, TPNPB dan Indonesia untuk duduk bersama dan berunding," kata Demianus.

Damianus mengatakan pihaknya akan terus angkat, berjuang sampai Papua merdeka. "Tujuan kami sebagai sayap militer berjuang adalah satu, untuk bersama membangun sebuah negara, dan membawa rakyat dari kegelapan ke terang," katanya.

Mantan narapidana politik (Napol) kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 3 April 2003, Linus Hiluka juga mengatakan pengiriman tambahan aparat keamanan ke Tanah Papua itu bukan solusi untuk persoalan

Papua. "Sebab akan menimbulkan kekerasan yang tidak pernah usai. Orang Papua sudah hidup dalam trauma yang berkepanjangan. Kebijakan itu akan membuat orang Papua hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan," kata Linus.

Linus mengatakan pengiriman tentara sebanyak-banyaknya ke Papua tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat Papua, bahkan berisiko menambah hebat konflik bersenjata di Papua. "Buktinya, pemerintah mengirim pasukan terus menerus, eskalasi konflik di Papua terjadi," kata Linus.

Linus juga meyakini, dialog dan perundingan yang melibatkan pemerintah, TPNPB, OPM, dan ULMWP akan menjadi solusi yang tepat. Ia berharap pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk berunding, agar konflik di Papua ini bisa berakhir. "Perundingan itu juga harus difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak bisa dari orang lain," katanya.

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) LIPI, Cahyo Pamungkas mengharapkan adanya jeda kemanusiaan untuk membuat pasukan TNI/Polri dan TPNPB berhenti berperang. Jeda kemanusiaan itu juga dibutuhkan untuk memberikan akses kepada pengungsi dan masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata diberbagai kabupaten di Tanah Papua.

"Hentikan permusuhan dan tembak menembak. [Segera lakukan] dialog mencari solusi politik yang permanen, yang tidak menggunakan kekerasan. Resolusi konflik pada umumnya menggunakan pendekatan dialog, seperti yang dilakukan di Aceh dan beberapa negara lainnya misalnya, Mindanao Filipina dan Irak," kata Cahyo.

Cahyo menyebut pemerintah harus belajar dari keberhasilan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu menurunkan ketegangan konflik Papua dengan beragam kebijakan. "Namun apakah Indonesia berani meniru kebijakan Gus Dur, seperti mengizinkan Bendera Kejora berkibar di Papua, dan Hai Tanahku Papua dinyanyikan? Termasuk [juga konsisten menjalankan Otonomi Khusus Papua? Pemerintah sekarang justru menolak cara Gus Dur maupun cara-cara resolusi konflik Aceh," kritik Cahyo.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan pihaknya ingin konflik Papua segera berakhir, namun Fakhiri menyatakan tidak mungkin Polri menarik

masukannya dari Papua. Fakhiri justru menilai tuntutan agar pemerintah menarik pasukan TNI/Polri tidak mewakili aspirasi banyak pihak.

“Ada pertanyaan yang pernah saya sampaikan kepada mereka yang meminta penarikan pasukan dari Papua. Kalau saya tarik perkuatan kami di Intan Jaya, berani menjamin keselamatan warga? Berani menjamin tidak adanya penembakan? Tidak ada yang menjamin akan hal itu,” kata Fakhiri.

Fakhiri mengatakan Polri terus berkomitmen untuk memperbanyak anggota Polri yang tumbuh-besar di Tanah Papua. Ia menyatakan pimpinan Polri memberikan perhatian khusus agar kebijakan itu berjalan. “Anak-anak Papua yang kami rekrut nantinya akan mengisi dan menggantikan yang selalu orang bilang ‘tarik perkuatan dari Papua’,” katanya.

Fakhiri menyatakan jumlah personil Polri dan TNI di Papua masih terlalu sedikit dibandingkan tugas berat mereka menjaga 29 kabupaten/kota dengan ratusan kampung. “Sehingga itu, kami membutuhkan perbantuan pengamanan dari luar Papua, untuk membantu perkuatan satuan kewilayahan, lebih khusus [di wilayah] yang sering terjadi gangguan keamanan, kontak senjata, dan lainnya,” kata Fakhiri.

## 4.

# Dialog untuk Menyudahi Konflik Papua, Bukan Pasukan<sup>4</sup>

Oleh: Elfira Halifa



*Theo Hesege, Anum Latifah Siregar, Linus Hiluka*

*Indonesia kata eks tahanan Politik (Tapol) Papua Linus Hiluka, harus besar hati dan membuka diri memikirkan kemanusiaan. Harus duduk bersama dengan OPM dan dimediasi pihak ketiga dalam hal ini PBB atau Internasional. Itu solusi untuk menyudahi konflik Papua, bukan dengan baku tembak atau mengirim pasukan sebanyak banyaknya. Dalam perundingan tersebut, melibatkan Indonesia sebagai pelaku kekerasan dan semua petinggi OPM seperti Egianus Kogoya, Goliath, Demianus termasuk Linus sendiri. Dan perundingan itu jangan dilakukan di Indonesia.*

---

<sup>4</sup>Tulisan ini terbit di Cenderawasih Pos edisi 4 Februari 2021 dengan judul “Dialog Untuk Menyudahi Konflik Papua, Bukan Mengirim Pasukan”.

Sebab, pengiriman pasukan ke Papua bukan suatu solusi untuk menyudahi konflik di Papua, pengiriman pasukan dengan jumlah yang banyak ke Papua tanpa sadar, Indonesia sedang mempromosikan kepada dunia bahwa Indonesia sedang melawan rakyatnya sendiri.

“Memangnya Papua ini negara ? orang orang yang ada di Papua saat ini adalah bagian dari rakyat Indonesia. Masa Indonesia mau lawan rakyatnya sendiri dengan kekuatan pasukan yang banyak, mengirim kekuatan pasukan yang setara dengan melawan negara lain. Masa ko lawan ko punya rakyat sendiri,” tanya Hiluk.

Menurut Hiluk, senjata, atau alat resmi negara yang dibeli dengan uang pajak dari rakyat digunakan negara untuk membunuh rakyatnya di Papua yang sementara berusaha berontak atas pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada rakyatnya sendiri.

Negara melawan rakyatnya di Papua sama sekali tidak berimbang, sebaiknya negara mengajak rakyatnya dan tanya apa yang diinginkan rakyatnya. “Persoalan konflik di Papua harus dibawa ke meja perundingan Internasional, dan Otsus bukanlah solusi dari penyelesaian konflik yang terjadi di Papua. Kenapa aceh bisa Papua tidak bisa ?” tanya Hiluk.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menilai, kasus yang terjadi di Papua sejak tahun 1960-an hingga saat ini sulit untuk diselesaikan dalam bentuk pendekatan apapun. Sebab, warga mulai krisis kepercayaan kepada pemerintahnya sendiri.

“Yang bisa menghentikan konflik bersenjata di Papua hanyalah Presiden, ucapan konflik berhenti itu harus keluar dari mulut presiden. Panglima ataupun Kapolri tidak bisa memutuskan perang dan konflik di Papua berhenti,” kata Theo.

Menurut Theo, perang yang terjadi di Papua atas perintah Presiden terkait dengan penegakan hukum. Presiden tidak mengatakan operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum. Sekarang, apakah Presiden mau cabut pernyataan operasi penegakan hukum tersebut sehingga situasi di Papua bisa aman?

Kedua belah pihak, kata Theo, harus sepakat berdialog untuk menyudahi konflik, terlebih nanti ada pemekaran Provinsi dan Kabupaten. Pemekaran ini akan menjadi lahan konflik dan

akan berdampak pada dugaan pelanggaran HAM semakin meluas di setiap Kabupaten.

“Nanti, 10 hingga 20 tahun kedepan. Orang Papua akan habis di tanahnya sendiri jika konflik ini tidak segera disudahi,” kata Theo.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyelesaikan Papua dengan strategis burung onta. Ia mengumpamakannya sebagai burung onta karena kalau ada bahaya, kepalanya sembunyi di tanah. Artinya, pemerintah menetapkan solusi yang tidak menyelesaikan masalah di Papua.

Contohnya, pemerintah menyelesaikan konflik Papua dengan pembangunan, pemekaran, menyuguhkan otsus jilid II hingga mengirim pasukan TNI-Polri ke Papua. Ingin menyelesaikan konflik tapi tidak menyelesaikan masalah, masalah tetap dibiarkan dan itu mengawatirkan. Karena secara terus menerus memperkuat perasaan sentiment anti Indonesia.

Kata Cahyo, jika sentiment anti Indonesia dibiarkan terus, maka kehendak ingin merdeka akan semakin meningkat. Kekecewaan rakyat Papua meningkat terhadap negeri ini, dan konsekuensinya keinginan untuk merdeka sekalipun tidak diekspresikan secara terbuka, tetapi dalam hati orang papua ingin lepas. Karena di dalam negara Indonesia, tidak ada ruang, tidak ada kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk hidup yang lebih baik.

“Dalam anggapan mereka, pemerintah Indonesia itu bukan pemerintah mereka. Tetapi menganggap pemerintah Indonesia adalah pemerintah kolonial,” ucap Cahyo.

Anggapan kolonial itu muncul di setiap hati orang Papua, terutama mereka yang menjadi korban, Beny Wenda misalkan. Sewaktu kecil keluarganya banyak yang terbunuh akibat korban operasi militer di Pegunungan Tengah pada tahun 1977-1978 yang lain juga demikian, Pemimpin politik saat ini, mereka adalah pada masa kecilnya menjadi korban dari suatu operasi militer pendekatan keamanan.

Seperti dialami Egianus Kogoya, dan banyak lainnya. Keluarga mereka menjadi korban di masa lalu, Sehingga memimpin gerakan poltik papua merdeka. Egianus orang tuanya bagian dari gerakan OPM di Nduga.

“Kalau pemerintah ingin menyelesaikan persoalan Papua. Aspirasi Papua merdeka itu harus ditempatkan dalam kerangka ke-Indonesiaan dengan cara dialog. Yang ditagih orang Papua saat ini adalah pengakuan harkat martabat manusia Papua, hak hidup inilah yang menjadi aspirasi orang asli Papua dan ini yang tidak dipenuhi oleh Indonesia,” kata Cahyo.

Apalagi lanjut Cahyo, dengan labelisasi isu teroris dan sekarang ingin mendirikan banyak kodim dan koramil di Papua. Ini justru remilitarisasi dan tidak menyelesaikan masalah, justru bisa menambah masalah di Papua.

Sementara itu, Direktur Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Anum Latifah Siregar mengatakan, Presiden harusnya mendapatkan persetujuan dari DPR untuk dropping pasukan ke Papua. Selain itu, pengiriman pasukan ke Papua harus terbuka.

Prosedur lainnya, penempatan pasukan di suatu wilayah berimplikasi pada konsekuensi ancaman yang dihadapi di wilayah itu. Ada peraturan Pemerintah pengganti UU menegaskan, status wilayah itu apa dulu, tertib sipil, darurat sipil, tertib militer atau darurat perang. Dengan jumlah aparat yang banyak, wilayah itu harus diberi status. Tapi ironisnya, itu tidak tergambar dalam prosedur.

“Di beberapa wilayah konflik di Papua, militer yang banyak ditempatkan. Tapi itu tidak dikatakan sebagai darurat militer. Padahal, pemerintahan sipil tidak aktif di daerah tersebut,” kata Anum.

Lanjut Anum, penempatan pasukan di Papua harus memiliki sistem komando yang jelas. Bayangkan, banyak sekali Satgas non-organik, belum lagi Kogabwilhan. Dimana komando komando itu lebih banyak berada di Jakarta, bukan di Polda atau Kodam.

“Soal penempatan pasukan di Papua, Gubernur harus diberi kewenangan sebagaimana salah satu kewenangan khusus dalam Otsus adalah pengelolaan tata ruang keamanan dilakukan oleh Gubernur. Maka seharusnya Gubernur diajak bicara, itu dalam UU Otsus yang baru,” jelasnya.

## **Menimbulkan Trauma**

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas menyebutkan, pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua justru menimbulkan luka trauma. Dari

tahun ke tahun ada saja korban dari konflik bersenjata di ujung timur Indonesia ini.

Bahkan lanjut Cahyo, luka dari korban jiwa yang hidup belum tersembuhkan lalu muncul lagi luka baru. Sehingga anak-anak mereka, cucu mereka berpotensi akan ikut bergabung dalam gerakan itu.

“Indonesia secara langsung maupun secara tidak langsung, turut membesarkan gerakan OPM dengan cara masyarakat sipil yang menjadi korban dari operasi militer. Kemudian mereka bergabung dengan gerakan TPNPB,” tutur Cahyo.

Menurut Cahyo, Negara ingin memberikan solusi, tetapi tidak menyelesaikan masalah di Papua. Termasuk dengan masa lalu maupun sekarang, kasus masa lalu tidak adanya penyelesaian masalah pelanggaran HAM, tidak ada rekonsiliasi dan tidak adanya dialog.

“Kekerasan politik dari dulu hingga sekarang mungkin sampai yang akan datang, seperti rantai siklus yang tidak hilang,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internaional Usman Hamid mengatakan, pemerintah di Jakarta tidak memiliki konsistensi dalam menyelesaikan konflik dan menerapkan agenda reformasi di Papua, salah satunya adalah melalui penerapan otonomi khusus untuk Papua.

Otsus adalah jalan tengah. Seperti yang pernah disepakati pada masa pemerintahan almarhum Abdurrahman Wahid dan Megawati, hal ini untuk menengahi keinginan merdeka dari Papua dan keinginan pemerintah Jakarta agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.

“Dalam Otsus, terdapat berbagai hal penting salah satunya pemberian kekuasaan yang otonom secara politik kepada orang asli papua, perlindungan hak-hak tradisional orang asli Papua hingga pemberian otoritas kultural melalui MRP agar seluruh kekayaan alam Papua dan kebijakan kebijakan strategis menyangkut Papua ditempuh dengan persetujuan MRP, atau representasi kultural orang asli Papua,” terangnya.

Dalam Otsus, lanjut Usman, terdapat beberapa kewajiban yang sangat mendasar untuk menyelesaikan kasus kasus HAM. Salah satunya dengan mendirikan Komisi HAM di Papua, mendirikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua,

mendirikan pengadilan HAM yang berkedudukan di Papua dan seluruh agenda reformasi. Namun, apa yang dituangkan dalam Otsus ini tidak berjalan, salah satu sebab utamanya inkonsistensi pemerintah.

Inkonsistensi tersebut kata Usman, bisa terlihat dari pemekaran wilayah Papua yang dilakukan pada tahun 2003, sebelum dibentuknya MRP pada akhir 2004. Inkonsistensi lainnya, pemerintah justru mengembalikan atau mengambil kembali otonomi politik Papua melalui UU Otsus yang direvisi dua kali. Membentuk badan yang terpusat misalnya badan khusus di bawah kantor Wakil Presiden sampai dengan menghapuskan ketentuan pasal di UU Otsus mengenai pendirian partai politik di Papua.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hasegem meminta pemerintah serius dalam menangani konflik di Papua. Sehingga tidak ada korban sipil yang berjatuh akibat dari konflik senjata antara TNI-Polri dan OPM.

Menurut Theo, operasi yang dilakukan di Papua saat ini bukan lagi operasi penegakan hukum, melainkan operasi militer. Dimana terjadi eksekusi, contohnya kata Theo, Selu Karunggu (20) dan ayahnya Elias Karunggu (40) pada tahun 2020 lalu dianiaya hingga ditembak mati anggota TNI di Nduga.

Theo mengingat betul perkataan Presiden bahwa dalam kerangka operasi penegakan hukum, OPM harus ditangkap dan diserahkan hidup hidup untuk lakukan pembinaan. Tapi kenyataannya, TNI yang memiliki emosi yang tidak bisa terkendalikan. Sehingga, tindakan mereka merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

“Yang namanya TNI-Polri, OPM dan TPNPB mainnya pemain permanen sejak dulu. TNI-Polri dan TPNPB-OPM tidak pernah mengakui mereka sebagai pelaku dan kerap saling menyudutkan,” kata Theo.

Lanjutnya, dua kelompok ini tidak sadar bahwa dalam kontak senjata yang mereka lakukan di Papua. Berdampak pada masyarakat sipil menjadi korban.

“Kedua kelompok ini menginginkan perang, tapi tidak pernah berpikir bahwa korban dari konflik bersenjata yang mereka lakukan adalah warga sipil. Selama ini, kedua kubu ini (TNI-Polri dan OPM-red) tidak pernah pikirkan ada orang yang

lebih menderita akibat tindakan mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan, untuk penanganan terhadap anak-anak KKB (versi Polisi), Kapolda sendiri memiliki kebijakan melihat warga masyarakat di tanah papua, bahwa dia itu warga negara Indonesia yang harus dilayani dari sisi kepolisiannya. Yaitu pendekatan humanis untuk bagaimana mengedukasi penegakan hukum.

“Saya tidak pernah melihat masyarakat dari sisi lain, sehingga kalau ada yang melanggar hukum maka tanggung jawab Kepolisian untuk menarik dia keluar dan memberikan edukasi. Hal ini agar mereka bisa hidup sesuai warga negara yang taat atas asas hukum yang berlaku di negara kita sebagai negara hukum,” kata Kapolda.

Lanjut Kapolda, sama halnya terhadap generasi muda yang konteks berlainan paham adalah orang tuanya. Dia selaku generasi muda menjadi tanggung jawab pemerintah yang didalamnya ada Polri untuk menjaga mereka menjadi warga negara yang baik. “Selaku Kapolda, saya melihat mereka sebagai masyarakat yang harus kita sentuh dan kita layani. Mudah mudahan dari mereka ini, bisa menjadi duta pencerahan dan pencerdasan bagi orang tua mereka atau keluarganya yang selalu berpikiran keluar dari Indonesia selaku negara yang ada di tanah Papua,” jelasnya.

Menurut Kapolda, anak-anak KKB atau OPM harus dirangkul, bukan untuk dijauhi. “Tidak pernah saya berpikir bahwa mereka itu warga yang liar, malah mereka harus saya dekati supaya bisa menarik saudaranya yang lain keluar daripada paham yang mereka yakini dan menjadi warga negara yang baik,” ucap Kapolda.

Menurut Kapolda, ada anak anak Papua yang didik Polda Papua sekalipun keluarga mereka terlibat dalam KKB. Mantan Dansat Brimob ini meyakini, dari anak anak inilah bisa menjadi stimulus rangsangan bagi keluarganya yang berada di hutan untuk bergabung dengan negara ini.

Dari pihak kepolisian sendiri, kata Kapolda, akan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Dengan harapan, mereka tidak tergerus dan tidak terbawa arus. Karena mereka sebagai jembatan komunikasi ke dalam.

Kata Kapolda, anak-anak yang keluarganya KKB yang

didik Polda Papua jumlahnya belum berada diangka 10. Mereka rata rata dari daerah pegunungan yang selama ini terjadi kontak tembak.

“Mereka menjadi pengawasan khusus bagi, kita berharap mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarganya untuk meletakkan senjata dan berharap mereka bisa kembali menjadi masyarakat normal,” pintanya.

Sementara untuk mereka yang eks-KKB kata Kapolda, Polisi mendorong mereka untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan masyarakat lainnya yang ada di daerahnya. Tanpa perlu dimata matai, cukup membangun dengan membangun komunikasi yang baik.

Ke depan, Kepolisian kata Kapolda mengurangi langkah atau tindakan yang merugikan kebijakan pemerintah. Lebih sabar dan berusaha membuka diri untuk memaksimalkan pendekatan dialogis, pendekatan kesejahteraan dan komunikasi aktif. Supaya semua elemen masyarakat baik dia yang terpengaruh ataupun mereka yang masih berada di hutan, bisa kembali membangun kampungnya.

Menanggapi penarikan pasukan, Kapolda menyampaikan itu hanya sekelompok orang saja. Jumlah pasukan di Papua sedikit dan harus menjaga 29 kabupaten/kota dengan ratusan kampung. Tentunya anggota TNI-Polri di tanah Papua tidak mampu. Sehingga itu, membutuhkan perbantuan pengamanan dari luar Papua.

“Polri sendiri akan memperkuat Polres polres rawan dengan tenaga pengamanan dari Brimob Indonesia, saya akan membangun perkuatan Brimob di atas tanah Papua untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akibat ketidakpahaman saudara saudara kita yang dari luar satuan Papua terhadap situasi masyarakat dan budayanya,” kata Kapolda.

### **Dialog untuk Mengakhiri Konflik**

Dua pihak yang bertikai TNI-Polri dan OPM harus segera menyudahi konflik untuk mencegah jatuhnya korban. Beberapa solusipun ditawarkan, mulai dari pemerhati HAM hingga pembela hak hak perempuan dan anak.

Direktur Eksekutif Amnesty Internaional Usman Hamid mengatakan, solusi mengakhiri konflik di Papua harus ditempuh dengan jalan non kekerasan untuk mencegah jatuhnya korban

disemua pihak, baik dari aparat maupun dari OPM terlebih dari warga sipil.

“Jalan penegakan hukum lebih dikedepankan daripada jalan pendekatan keamanan yang mengandalkan pengarahannya pasukan militer, itu hanya berujung dengan kekerasan yang merugikan semua pihak,” kata Usman.

Sementara solusi dari Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi) Cahyo Pamungkas, untuk mengakhiri konflik di Papua, perlunya jeda kemanusiaan. Kedua belah pihak harus menghentikan tembak menembak dan memberikan akses kepada pengungsi dan masyarakat sipil yang terjebak.

Para pengungsi akibat konflik harus dijamin hak hidupnya, termasuk akses terhadap kesehatan, pangan dan lainnya dan menjamin keselamatan pengungsi warga sipil.

Selain itu, menurut Cahyo, penghentian permusuhan, tembak menembak. Dialog mencari solusi politik yang permanen yang tidak menggunakan kekerasan. Resolusi konflik pada umumnya menggunakan pendekatan dialog, Cahyo mencontohkan seperti yang dilakukan di Aceh dan beberapa negara lainnya misalnya, Mindanao Filipina dan Irak.

“Solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan konflik Papua adalah dialog, mungkin ada solusi yang lain seperti pada masa Gus Dur. Namun apakah Indonesia berani meniru kebijakan Gus Dur yakni mengizinkan bendera BK berkibar di Papua, dan hai tanahku Papua dinyanyikan termasuk Otsus?” kata Cahyo.

Cahyo menambahkan, apakah Indonesia berani menerapkan kebijakan almarhum Gus Dur itu? Justru pemerintah sekarang, menolak caranya Gus Dur maupun cara cara resolusi konflik Aceh.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hese gem meminta Negara menangani masalah Papua dengan serius, sehingga tidak ada korban sipil yang berjatuhannya dampak dari konflik senjata antara TNI-Polri dan OPM.

Theo menawarkan, dialog yang difasilitasi pihak ketika dan penyelesaian konflik pelanggaran HAM untuk menyudahi konflik di Papua yang terjadi sejak tahun 60-an hingga saat ini. Penyelesaian konflik di Papua kata Theo, tidak bisa

diselesaikan dengan pemikiran orang Jakarta yang menyuguhkan kesejahteraan atau pembangunan infrastruktur di Papua.

“Jika negara ini serius menyelesaikan konflik di Papua, segera lakukan dialog bermartabat, berwibawa dan dialog yang punya harga diri. Dialog harus difasilitasi pihak ketiga, selain itu, pemerintah megijinkan Komisi HAM PBB untuk melakukan pemantauan di Papua secara menyeluruh,” kata Theo.

Menyelesaikan konflik di Papua lanjut Theo, bukan dengan pemekaran Provinsi atau pembangunan yang nantinya berpotensi menjadi lahan konflik yang diciptakan oleh orang orang Jakarta sendiri.

“Dari dialog yang dilakukan antara negara dengan OPM, bisa dilakukan genjatan senjata dan jeda kemanusiaan,” kata Theo.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH-Apik) Jayapura, Nur Aida Duwila peran pemerintah dalam hal ini Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Dinas Pemberdayaan perempuan melakukan pemulihan kepada anak anak dan perempuan di daerah konflik.

Mengajak anak anak dan perempuan untuk kembali ke rumah mereka masing masing, atau menyediakan rumah aman bagi anak anak dan perempuan yang ada di daerah konflik.

“Harus ada pembelajaran berharga yang bisa mereka terima, sehingga kedepannya, mereka lebih baik daripada hari ini. Jangan biarkan anak anak ini menyimpan sesuatu yang menjadi bommerang suatu saat bagi kita,” kata Nona

Solusi yang ditawarkan Direktur Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Anum Latifah Siregar yaitu, harus ada jeda kemanusiaan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak hak dasar.

“Jangan berpikir dengan membangun jembatan, membangun infrastruktur yang besar itu bisa meredam konflik di Papua. Bukan itu yang disuguhkan untuk rakyat di Papua, tapi hak hak dasar pendidikan dasar mereka bagaimana,” kata Anum.

Seharusnya pemerintah kata Anum, memberikan pemenuhan hak hak dasar. Selain itu, aksi aksi kekerasan itu harus diselesaikan secara hukum. Sehingga masyarakat percaya pada pemerintah.

Sementara itu, eks tahanan Politik (Tapol) Papua Linus

Hiluka menyampaikan, untuk mengakhiri konflik di Papua maka lakukan perundingan antara Indonesia dan OPM. Namun, perundingan itu jangan dilakukan di Indonesia. Sehingga Goliath, Egianus dan semua panglima di Papua, termasuk Linus sendiri bisa hadir.

“Indonesia harus berbesar hati dan tidak perlu takut membuka akses di Papua, sehingga komisi tinggi HAM PBB bisa mengadvokasi semua kasus pelanggaran HAM di Papua,” ucapnya.

Untuk mengakhiri konflik, Linus sebagai eks Tapol meminta kepada Presiden Jokowi agar Tarik pasaukan yang dikirim ke Papua, sekaligus hentikan pengiriman pasukan. Sebab, Papua bukan suatu negara melainkan Provinsi yang sedang dihuni oleh rakyat Indonesia.

“Jangan Jokowi lawan rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Hiluk juga meminta agar hentikan segala stigma penghinaan, rasisme yang ditujukan kepada orang Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri berjanji, untuk mengurangi langkah atau tindakan yang merugikan kebijakan pemerintah, Polri bakal lebih sabar dan berusaha membuka diri untuk memaksimalkan melalui pendekatan dialogis, pendekatan kesejahteraan dan komunikasi aktif.

Cara yang dilakukan Polda Papua ini supaya semua elemen masyarakat baik dia yang terpengaruh ataupun mereka yang masih berada di hutan, bisa kembali membangun kampungnya.

Selain itu, Polri kedepannya memperbanyak anggota Polri di papua yang berasal dari anak Papua sendiri. Sehingga, anak anak papua yang direkrut nantinya mereka yang mengisi pengganti yang selalu orang bilang tarik perkuatan dari Papua.

“Saya berharap saudara saudara yang selalu memanfaatkan moment ini untuk kepentingan politik kelompoknya dengan membodohi saudaranya sendiri segera berhenti. Mari kita selaku anak negeri, memberikan edukasi agar generasi muda kita bisa tumbuh besar memantapkan pengalamannya untuk mengisi pembangunan di tanah Papua. Sehingga dia merdeka dalam segala hal,” kata Kapolda.

## 5.

# Konflik Bersenjata Tak Surutkan Mimpi Mereka<sup>5</sup>

Oleh: Theresia F. Tekege



Seorang anak pengungsi dari Kivirok di depan gubuk - Wagadei/aktivis KNPB

*Pembakaran fasilitas umum pada 13 September 2021 oleh TPNPB/OPM dan penyisiran oleh aparat gabungan TNI/Polri terjadi di Kivirok. Peristiwa itu menyebabkan Gabriella Meilani, tenaga kesehatan meregang nyawa di tangan TPNPB/OPM. Selain Gabriella, sejumlah tenaga medis lainnya terluka. Tak kurang juga seorang anggota TPNPB, Elli Mimin yang meninggal dunia dan anggota TNI yang terkena tembakan.*

---

<sup>5</sup> Tulisan ini terbit di *wagadei.com* edisi 8 Februari 2022 dengan judul yang sama

Data SKPKC Fransiskan Pegunungan Bintang menunjukkan, pengungsi Kiwirok berdasarkan usia, bayi 6 orang, SD 22 orang, SMP 31 orang, SMA 14 orang dan dewasa 140 orang, sehingga total pengungsi sebanyak 213 orang di Oksibil. Pengungsi lainnya Kiwirok Kota, Apom Pomding, wilayah Distrik Oklip (Kampung Oktem, Pelepkon, Okbumul).

Ratusan warga sipil memilih untuk mengungsi di hutan-hutan, Papua Nugini dan Oksibil. Di Oksibil mereka bertemu pengungsi lainnya dari Distrik Okhika, usai perjalanan sekitar satu minggu melewati tebing, jurang, kali dan hutan lebat.

Begitu tiba di Oksibil, mereka tinggal di posko pengungsian milik gereja GIDI. Tiga hari kemudian disebar ke tujuh belas titik di Oksibil. Ada juga yang menumpang di rumah-rumah keluarga.

Para pengungsi Kiwirok sekitar 200 orang banyaknya, termasuk di dalamnya perempuan, anak-anak dan anak sekolah. Belum dipastikan kapan mereka pulang kampung, karena masih trauma dan tak punya rumah lagi di kampung halaman. Kini mereka menanti uluran tangan pemerintah, untuk membangun kembali rumah-rumah yang telah dibakar kelompok bersenjata.

Selain itu, dari wajah-wajah lugunya terpancar harapan agar aparat keamanan dan pemerintah memberikan jaminan keamanan. Setelah itu baru bisa pulang.

Di pengungsian, mimpi anak-anak Kiwirok dan Okhika masih dirajut, meski terjadi konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Satu per satu mereka menuturkan mimpinya.

“Kakak, saya mau jadi konsultan. Saya harus bangun saya punya kampung,” kata Gian, salah seorang pengungsi.

Gian bukan nama sebenarnya. Dia adalah siswa salah satu SMA di Kiwirok. Konflik bersenjata terpaksa membuat dirinya bersama sejumlah anak melanjutkan sekolah di pengungsian, yaitu, Oksibil.

Gian tetap bersemangat menimba ilmu di ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Dia bermimpi agar kelak menjadi konsultan.

Tangannya memegang pensil sambil menari-nari di atas kertas putih ketika disambangi pada Desember 2021. Rupanya dia sedang menggambar denah sebuah rumah.

Siswa lainnya adalah Hendrik. Bukan nama sebenarnya. Siswa kelas X sebuah SMA Negeri di Kiwirok ini juga terpaksa

mengungsi di hutan rimba. Di sana dia merawat bapak tua dan tantenya.

Empat bulan lamanya dia tinggal hutan rimba bersama bapak tua dan tantenya yang berkebutuhan khusus. Beberapa hari kemudian dia akhirnya tiba di Oksibil karena hendak membelikan makanan dan minuman.

Anak usia 16 tahun ini terlihat masih trauma. Gerakannya awas ketika bertemu orang baru. Ini beralasan sebab tembakan pada betis kanannya dari arah tak dikenal alias peluru nyasar, membuat dia masih menahan sakit.

“Saya tidak mau sekolah kakak. Saya takut. Saya punya luka ini (sambil tunjuk bekas luka) adalah bekas tembakan saat saya ke kampung ambil selimut dari hutan,” kata Hendrik.

Anak lainnya adalah Opianus (bukan nama sebenarnya). Dia sudah berbulan-bulan mengungsi di Oksibil. Niatnya untuk sekolah dilanjutkan di SMP Negeri Oksibil.

Opinus sudah mengikuti ujian semester ganjil ketika ditemui pada Desember 2021 di Oksibil.

Sedangkan anak pengungsi lainnya adalah Melvin, siswa SMP di salah satu sekolah. Dia menceritakan kesehariannya di sekolah bersama anak-anak Oksibil lainnya. Teman-temannya di sekolah memperhatikan dia dengan baik.

“Kami juga mendapatkan pelajaran seperti sedang bersekolah di kampung (Kiwirok),” ujar Melvin yang bercita-cita menjadi akuntan.

### **Tetap Sekolah Meski Tinggal di Gubuk**

Opinus ditemui ketika duduk melingkari tungku api bersama teman-temannya di sebuah gubuk. Siswa SMP Negeri Kiwirok ini memilih tinggal di gubuk daripada posko pengungsian. Dari gubuk ia ke sekolah di Oksibil.

“Saya tinggal di sini dengan teman-teman, yang penting saya bisa sekolah,” kata lelaki berusia 15 tahun itu.

Opinus bersama teman-temannya harus menempuh jarak yang cukup jauh ke sekolah. Mereka harus membayar jasa ojek Rp 30 ribu. Sehari harus menghabiskan Rp 60 ribu untuk membayar ojek pergi-pulang sekolah. Dia mengaku sering kelaparan sebab bantuan yang diberikan pemerintah setempat hanya sekali-sekali.

“Pulang sekolah kadang kami tidak makan. Tidak ada

makanan di rumah. Pemerintah bantu juga tidak selalu. Mama (orangtua wali) di sini juga tidak selalu ada uang,” katanya.

Opianus bercita-cita menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dia tertarik dengan aparat berbaju loreng ini ketika menggendong ransel dan memegang senjata.

“Saya (kalau) besar mau jadi tentara, kakak. Dari kecil senang sekali melihat mereka jalan di kampung gantung pistol di celana dan bawa tas besar-besar di belakang,” ujarinya.

Berbeda dengan Opianus. Gian merasa nyaman karena tinggal di rumah keluarga di Oksibil. Setidaknya anak 17 tahun ini tidak kelaparan meski harus kewalahan di ongkos transportasi.

“Kalau dari sini ke sekolah sangat jauh. Harga ojek juga mencapai Rp 30 ribu. Saya mau jalan kaki pagi tidak bisa, saya bisa terlambat. Jadi, kalau ada uang saya naik ojek pagi dan pulang jalan kaki. Kalau tidak ada uang, saya tidak ke sekolah,” kata Gian.

Anak lainnya adalah Fransisco, seorang siswa SMA yang mengungsi ke Oksibil.

“Saya tidak sekolah di Abmisibil. Tidak ada yang urus saya sekolah di sini,” ujar, lelaki 17 tahun ini.

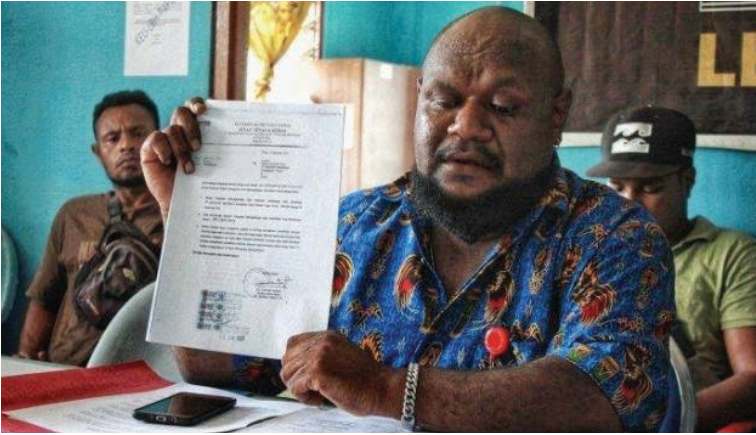
Lain halnya dengan Mama Maria, yang salah seorang anaknya sekolah di Oksibil. Maria kewalahan mengurus anaknya yang harus menghabiskan Rp 60 sehari untuk membayar ojek dan uang makan bagi anak-anaknya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Pegunungan Bintang Yohanes Kakyarmabin menyesalkan pembakaran sekolah dan fasilitas kesehatan.

“Sungguh sayang, anak-anak tidak bersalah sudah menjadi korban atas semua ini,” kata Yohanes.

Yohanes mengharapkan agar Pemkab Pegunungan Bintang mengundang semua elemen masyarakat agar hak anak-anak yang menjadi korban konflik di Kiwirok dapat dipenuhi. Setidaknya sesegera mungkin membangun sekolah, sehingga anak-anak bisa bersekolah lagi.

Pastur Deken Dekenat Pegunungan Bintang Keuskupan Jayapura, RD James Kosay juga menyayangkan hal serupa. Oleh sebab itu, dia berharap agar Kiwirok segera pulih sehingga anak-anak bisa merajut masa depannya di sekolah dan membangun kampung halamannya dan Pegunungan Bintang.



*Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobai – Dok. PBH Papua*

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobai berkata, perlindungan terhadap anak di pengungsian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada bagian kesepuluh pasal 52-66 tentang anak, yakni, kekerasan seksual, beribadah, kesehatan, pendidikan, hak hidup, tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, perlindungan dan tidak dirampas kebebasannya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Anak di Pengungsian menyatakan, bahwa negara melalui pemerintah daerah wajib menjawab semua kebutuhan anak-anak di tempat konflik bersenjata/pengungsi, termasuk menjamin hak hidup, pendidikan, kesehatan, tempat hidup yang layak, dan lain-lain, selama anak-anak itu berada di pengungsian.

Oleh sebab itu, Pemkab Pegunungan Bintang jangan tinggal diam atas nasib masyarakat sipil, terutama nasib anak-anak korban pengungsi Kiwirok di Oksibil.

“Tidak ada alasan bagi pemerintah dengan mendalilkan ini bukan pengungsi dan lain sebagainya, lalu membiarkan rakyatnya menghadapi situasi konflik bersenjata sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang jangan tinggal diam. Segera memenuhi hak-hak masyarakat sipil terutama anak-anak di pengungsian dari Kiwirok di sejumlah wilayah di Pegunungan Bintang,” kata Gobai di Jayapura,

Minggu (30/1/2022).

Gobai berpandangan bahwa pendidikan adalah hak dari setiap warga negara, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Indonesia sudah meratifikasi konvensi Jenewa pada tahun 1958, maka secara hukum dan kewajiban sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat di daerah konflik (pengungsi) termasuk hak-hak anak dan perempuan.

“Tidak benar pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan menjawab hak-hak masyarakat sipil di pengungsian,” katanya.

Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Perekonomian Rakyat Papua, Aki Logoh saat penandatanganan pengungsi Nduga pernah menyatakan harapannya, agar pemerintah dan gereja lebih memperhatikan nasib pendidikan anak-anak pengungsi. Mereka harus mendapat tempat yang layak agar ada kesempatan untuk belajar.

“Seharusnya pemerintah buka mata. Gereja juga buka mata. Kita semua kerja sama, pemerintah, masyarakat, gereja. Kita semua kerja sama untuk mengangkat anak-anak ini,” kata Aki Logo.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengambil langkah, untuk tetap menyekolahkan anak-anak asal Kiwirok. Mereka dititipkan di sejumlah sekolah di Oksibil.

“Yang utama bagi kami adalah hak pendidikan anak jangan hilang karena ada konflik, ada persoalan politik,” kata Kepala Sub Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang, Bernardus Tapyor, Kamis (16/12/2021).

Data yang dihimpun dari SKPKC Fransiskan menyebutkan sekitar 60 anak pengungsi Kiwirok belajar di Oksibil. Enam ratus lainnya di pengungsian alias tidak sekolah. Namun Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang mendata lebih dari 750 siswa belajar di Oksibil, dari SD sampai SMA.

Anak-anak pengungsi ini belum bisa bersekolah di Kiwirok karena sekolahnya telah dibakar. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sedang membangun kembali sekolah-sekolah yang sudah dibakar.

“Kalau nanti tahap pembangunannya dan daerah kembali aman, maka semua akan balik sekolah di sana,” ujar Tapyor.

Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito menghimbau kepada semua pihak di kabupaten ini untuk mencari solusi bersama. Pemkab Pegunungan Bintang mesti membuka ruang untuk membicarakan solusi atas konflik bersenjata di daerah ini.

“Konflik ini terlalu rumit. Dari Kiwirok hingga Serambakon. Pemda Pegunungan Bintang harus duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat dan semua pihak yang lain, agar mencari solusi yang baik untuk kembali menciptakan situasi yang kondusif, aman dan damai di kabupaten ini,” katanya.

## 6.

# Harapan Mama Rita dan anak-anak Papua<sup>6</sup>

Oleh: Neno Karlina Papatungan



*Seorang anak Papua sedang mengekspresikan kreatifitas saat parade budaya. (Foto: Ronny A. Buol)*

*Sektor ekonomi menjadi penting, terutama untuk perempuan asli Papua, sebab tidak hanya soal keberlangsungan dan pemenuhan taraf hidup lebih baik. Akan tetapi, berkaitan erat dengan pendidikan serta pemenuhan gizi anak.*

Mama Rita tidak pernah berharap lebih, sebagai perempuan orang asli Papua (OAP) harapannya sederhana, bisa tetap hidup sehat bersama keluarga dan bisa memenuhi kebutuhan dasar terutama bagi anak-anaknya.

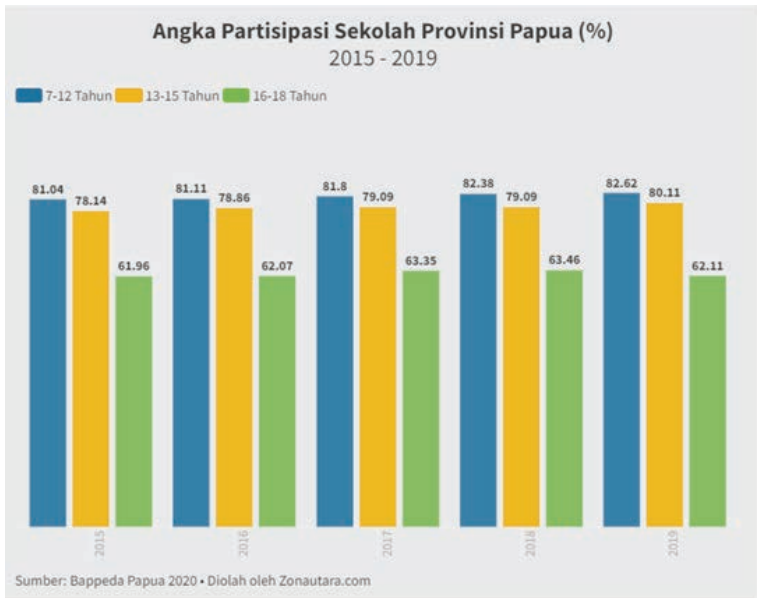
---

<sup>6</sup> Tulisan ini terbit di [zonautara.com](http://zonautara.com) edisi 27 Januari 2022 dengan judul yang sama

“Bisa makan, dan semua anak-anak di kampung sehat, itu sudah. Mereka bikin Sa semangat tetap jualan cari uang. Biar sudah mereka tidak sekolah, tidak apa,” ucapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebut angka partisipasi sekolah (APS) di Mimika selalu berada di atas APS Papua dalam kurun waktu tahun 2017 - 2019. Meski untuk rentang usia 16-18 tahun, angka APS tidak sebagus rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

Makin tinggi angka APS, maka semakin banyak jumlah anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan. Rendahnya APS di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pendidikan orang tua, kesehatan anak, rasio guru dan faktor ekonomi keluarga.



Jika dilihat dari angka putus sekolah, di seluruh Provinsi Papua, hingga tahun 2019 masih ada siswa yang tidak dapat menikmati pendidikan lebih lanjut, meski angkanya termasuk kecil.



“Anak hanya 1 sekolah, sampai SD. Guru jarang masuk kelas, anak-anak lebih memilih keluar kelas, jadi anak ikut cari pakis sudah,” kata Maria pedagang OAP di pasar Sentral Timika asal kampung Pariipi.

Maria mengatakan, dirinya tidak menyekolahkan anak di tempat lain karena jaraknya sangat jauh.

“Sekolah jauh, tidak ada ongkos untuk pergi ke sana, anak-anak cuma main lebih baik bantu orangtua,” Maria memberi alasan

Tak hanya pendidikan, pemenuhan gizi anak menjadi persoalan yang juga perlu mendapat perhatian serius. Dinas Kesehatan Mimika mencatat, saat ini Mimika masih mengoleksi angka stunting yang tinggi yaitu 11 persen dari 300 anak. Dengan rincian wilayah Wania dan Distrik Mimika Timur menjadi penyuplai angka terbesar. Di Puskesmas Timika, tahun 2021 saja, tercatat ada 24 anak kurang gizi, 1 di antaranya gizi buruk.

“Sudah saatnya penyelesaian stunting dilakukan secara bersama. Tidak parsial saja. Apalagi stunting ini menjadi program nasional. Bagaimana menciptakan generasi Papua

yang cerdas jika angka stunting sulit ditekan,” kata Wakil Bupati Mimika, Johannes Retob.

Johannes mengatakan, soal pendidikan, sebenarnya baik pemerintah maupun PT Freeport Indonesia (PTFI) yang membentuk yayasan khusus menyalurkan dana CSR, sudah memberi dukungan terhadap OAP, terutama untuk anak-anak Suku Amungme dan Kamoro, serta 7 suku kekerabatan lainnya.

“Kalau OAP mau sekolah kemana saja akan dibiayai dan ini sudah dilakukan. Tapi bentuk pendidikannya yang perlu dipikirkan lagi. Bagaimana anak-anak ini bisa memiliki pola berpikir vokasi. Kalau dia berpikir belajar di universitas, dia sarjana, dia tidak akan lakukan apa-apa. Yang kita arahkan adalah pendidikan dia itu harus vokasi,” kata Johannes.

Johannes mengakui belum bisa berbuat banyak. Dirinya berharap, semua jajaran pemerintah memiliki mental yang sama. Aparatur pemerintahan di Mimika harusnya memiliki mental pelayan, bukan dilayani.

“Karena persoalannya semua ingin dilayani akibatnya masyarakat tetap akan seperti ini, dan banyak program yang sudah dikonsepskan secara baik oleh para ahli tidak dijalankan. Struktur anggaran kita belum bisa menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Johannes.



*Siswa di Papua ikut berpartisipasi dalam parade budaya. (Foto: Ronny A. Buol)*

## **Pendidikan Vokasi Bagi Anak Papua**

Terasa sulit bagi OAP mengikuti metode pendidikan formal yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Orang asli Papua butuh pendekatan yang kontekstual berbasis kebudayaan.

“Mereka harus dikembalikan ke alam, misal diminta menulis nama-nama klan, edukasi by praktik,” jelas Prof. Dr. Cahyo Pamungkas, Ph.D., peneliti sosiologi etnisitas dan multikulturalisme dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Cahyo menjelaskan, OAP memiliki seperangkat kearifan lokal, yang sekarang mulai punah dan harus dihidupkan sebagai pintu masuk untuk mendorong pendidikan. Hal ini penting, sebab OAP telah melewati sejarah panjang, meninggalkan tanah mereka serta digusur. Cahyo menilai OAP telah mengalami disorientasi.

“Mereka misalnya, memiliki daun-daun tanaman obat. Kita dukung dengan riset khasiat apa yang dikandung tanaman tersebut dan bagaimana digunakan untuk kesehatan. Tidak bisa kita paksakan dengan obat-obatan baru yang asing bagi mereka,” kata Cahyo.

Menurut Cahyo, solusi bagi ketimpangan ekonomi sebagai akar utama semua persoalan dasar OAP di Mimika adalah, program-program pembangunan harus dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat adat Papua dengan melibatkan pihak gereja, pemuda, dan organisasi perempuan. Dewan adat dan gereja dilibatkan dalam proses penyusunan, implementasi dan evaluasi program-program pembangunan.

Program-program pembangunan yang sesuai dengan kondisi alam, kapasitas, dan nilai-nilai kultural OAP di Mimika menjadi penting untuk mendorong ekonomi OAP yang lebih baik. Pendekatan melalui pendidikan vokasi dan membangun mentalitas melayani bagi aparat pemerintahan, bisa mendorong lahirnya program-program yang lebih ramah tradisi asli, sehingga benar-benar bermanfaat bagi orang asli Papua.

Jika semua dilakukan, bukan tidak mungkin, harapan Mama Rita sebagai perempuan asli Papua memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan melihat anak-anak Papua sehat, tidak hanya sekadar harapan belaka. Di kemudian hari, tidak akan ada lagi mama-mama Papua yang menukar motor dengan ladang, dan bisa hidup setara dengan sesama dari suku manapun di Indonesia.

## 7.

# Lapak Jualan Mama-Mama Papua Harus Mendapat Perhatian Khusus<sup>7</sup>

Oleh: Neno Karlina Paputungan



Mama-mama Papua sedang berjualan. (Foto: Ronny A. Buol)

*Persoalan transportasi yang sulit di Mimika terpaksa telah membuat Mama Rita menukar lahan dengan sepeda motor. Mama Rita tidak ada pilihan. Sebab, sebagai perempuan asli Papua, atau lebih dikenal dengan sebutan mama-mama asli Papua, Mama Rita memegang peran utama dalam menopang ekonomi keluarga. Sebagaimana Mama Rita harus ke hutan, saat ini Mama Rita juga harus ke pasar.*

“Kalau dulu. Belum jualan sebab masih gampang dapat sagu, *karaka* (kepiting), dan ikan. Cuma setelah *Sa* besar,

---

<sup>7</sup> Tulisan ini terbit di *zonautara.com* edisi 27 Januari 2022 dengan judul yang sama

kehidupan sangat sulit. Banyak orang pendatang jual beras. Jadi *Sa* harus jualan (daun pisang, pakis, salak) dulu, baru dapat uang untuk beli beras,” ujar Mama Rita.

Di Mimika, keterwakilan perempuan orang asli Papua (OAP) paling banyak hanya terlihat di pasar-pasar tradisional. Aktivitas jual beli di pasar kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan. Mama-mama Papua umumnya hanya menjual hasil kebun atau alam, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Sementara perempuan pendatang menjual rupa-rupa produk.

Berdasarkan laporan UNDP pada tahun 2012, peran perempuan Papua dalam menggerakkan ekonomi terutama dari sektor pertanian lebih besar dari pada laki-laki, yaitu sebesar 60 persen. UNDP adalah lembaga yang bekerja untuk mendukung Indonesia mengentaskan kemiskinan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan daerah serta membantu mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 di seluruh Indonesia.

Sebagai penggerak perekonomian, perempuan asli Papua tak hanya mampu membuka lahan, mencari sagu di hutan dan ikan di sungai. Namun, perempuan Papua juga mampu menjual hasil kebunnya, guna memperoleh keuntungan bagi keberlangsungan kebutuhan hidup. Tapi, meski sudah berjualan cukup lama, banyak mama-mama Papua di Mimika tidak memiliki lapak di pasar. Hanya beberapa saja yang bertahan, lebih banyak menjual kembali lapak mereka kepada pendatang.

Mama-mama Papua memilih duduk berjualan di pinggir jalan sebagai bentuk penghormatan atas apa yang mereka yakini. Mereka percaya, tanah seperti seorang ibu yang memberi kehidupan, sehingga harus dihormati.

“Apa yang kita jual itu semua tumbuh dari tanah. Nanti kalau jualan di atas meja-meja (di lapak), kita akan sial, tidak akan laku,” jelas Mama Rita.

Berbeda dengan Mama Rita, Mama Wenda yang enggan menyebutkan marganya, jauh-jauh datang ke Timika dari Kagupago, Distrik Paniai Timur. Mama Wenda mempertahankan lapak yang diperolehnya saat pembagian lapak dari pemerintah Timika. Dia mulai merasa terusir.

“Saya liat mama-mama jual semua lapak. Akhirnya lapak-lapak pasar jadi milik pendatang. *Sa* tidak mau seperti

itu. Walau hanya menjual sayur, bahkan jika tidak ada jualan sekalipun, *Sa* akan tetap bertahan di tempat ini. *Sa* juga tidak mau diam-diam saja seperti mama-mama yang lain. Mama-mama Paniai *to*,” jelas Mama Wenda sambil tersenyum.

Untuk mendukung mama-mama Papua, pemerintah provinsi sudah membangun beberapa pasar khusus mama-mama Papua, seperti di jalan Percetakan Kota Jayapura, Pasar Praha Sentani, dan di kabupaten-kabupaten lain.



*Mama Papua dengan lapak jualan mereka di pinggir jalan. (Foto: Ronny A. Buol)*

Pasar-pasar ini dibangun dengan konsep pasar lokal modern. Walau tidak semodern di Jayapura, di Timika tahun 2019, pemerintah sempat membangun pasar di Distrik Wania. Pasar yang dibuka pada 23 Oktober ini bisa menampung 84 pedagang dengan desain lapak yang lebih rendah. Tujuannya agar pedagang bisa menaruh dagangannya tidak terlalu tinggi. Namun, pasar itu hanya digunakan beberapa hari oleh pedagang asli Papua, lantas ditinggalkan begitu saja.

Meski ada persoalan lahan di pasar Distrik Wania atau yang lebih dikenal Pasar SP 4 ini, namun bagi pedagang OAP, yang menjadi persoalan dasar adalah pasar tidak ramah dengan kepercayaan dan tradisi mereka. Terdapat keyakinan bagi OAP bahwa saat berjualan harus berada di baris paling depan, terutama bagi suku Amungme. Amungme sendiri terdiri dari dua kata “Amung” yang artinya utama dan “Mee” yang artinya

manusia.

“*Sa* jualan saja di sini (pinggir jalan). Kalau di pasar, tempat *Sa* di bekalang. *Sa* harus duduk jualan di paling depan. Biar terlihat to,” ucap Ony Magai, (21), pedagang OAP suku Amungme, dari Distrik Jila.

Hal serupa juga dikatakan kerabatnya, Mama Wenda Magai, (42). Mama Wenda yang sehari-hari menjual umbi-umbian (keladi, batatas, singkong), sebenarnya memiliki tempat berjualan di deretan depan. Namun kondisi pasar yang jauh dari jalan, dan sekarang justru dipagar beton membuat Mama Wenda tidak nyaman.

Kondisi pasar yang tidak ramah tradasi membuat OAP menjadi sulit mengembangkan daya saing mereka di pasar. Tindakan menjual lapak karena mereka merasa tidak mampu bersaing dengan pedagang modern. Ini membuat mereka semakin tidak diuntungkan. Produk modern masih dikuasai pendatang. OAP memiliki keterbatasan tidak memiliki jalur distribusi, karena tidak mahir dalam komunikasi. Dan untuk usaha mikro, OAP kesulitan bertahan sebab sulit mendapatkan bantuan modal dari perbankan.

“Modal saya dari tabungan dan hasil gaji suami dari perusahaan. *Sa* tidak masuk KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua -red), *Sa* cuma pengusaha kecil saja,” kata pengusaha anyam rambut OAP, dari suku Amungme, Margaret Dimpau.



*Mama-mama Papua lebih memilih menggelar dagangan di pinggir jalan. (Foto: Ronny A. Buol)*

## Posisi Mama-Mama Papua Tidak Diuntungkan

Dilansir dari *BumiPapua.com*, pada tahun 2009, Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Papua secara berkelanjutan melakukan pelatihan pada pengusaha asli Papua yang tergabung dalam KAPP.

“BI memiliki ketentuan bahwa perbankan wajib menyalurkan kredit, minimal 20% kepada usaha mikro dan kecil. Di sinilah BI mempunyai kewajiban melakukan pelatihan terhadap usaha mikro dan kecil itu,” kata perwakilan BI Provinsi Papua, Tigor Naek Sinaga, dikutip dari *BumiPapua.com*.

Tak hanya itu, Kepala Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua, Muhammad Mussad saat dihubungi menegaskan, Papua memiliki lembaga Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang diharapkan menjadi penghubung antara usaha kecil menengah dan perbankan. Namun, lembaga itu belum efektif melakukan tugasnya sebagai penghubung.

“Jika KAPP menunjukkan hasil positif, Pemda pasti akan meningkatkan bantuan modal usahanya,” katanya.

Sesuai catatan Pemprov Papua tahun 2016, Gubernur Papua Lukas Enembe, selaku Pembina KAPP memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp25 miliar kepada 2.870 pengusaha asli Papua yang berada di 29 kabupaten/kota. Sayangnya, hal ini dianggap tidak terlalu banyak membantu.

“Sebagai pengusaha saya lihat, KAPP ini bagus. Tapi belum sungguh-sungguh,” kata Munawir Yakub kepada *Zonaturata.com*.

Kesulitan OAP dalam mendapat bantuan modal diminta menjadi perhatian pemerintah. Perbankan yang ada di Timika dituding tidak mau memberi pinjaman kepada OAP.

“Bank nasional di Papua khususnya Timika, tidak (mau) memberi kredit pada orang Papua, jadi buat apa ada di Papua. Orang lokal susah sekali mendapatkan bantuan modal. Sudah seharusnya bank terutama yang plat merah mendukung, jangan diskriminatif. Negara harus memudahkan semua bidang dan akses. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harusnya memberi jaminan, atau mendorong agar orang lokal juga bisa mendapat modal. Atau paling tidak

ada program CSR atau apa,” ungkap tokoh adat Amungme, Manuel John Magal.

Manuel juga membenarkan soal pasar yang tak ramah tradisi, dan tak pula menampik bahwa, OAP kerap menjual lapak yang diperolehnya, karena keterbatasan melihat peluang perdagangan modern, sehingga mereka semakin tidak diuntungkan.

## 8.

# Mencari Model Ekonomi yang Berpihak pada Orang Asli Papua di Mimika<sup>8</sup>

Oleh: Neno Karlina Paputungan



Mama Papua berjualan di tepi jalan di Mimika. (Foto: Neno Karlina Paputungan)

*Jauh sebelum ada jalur transportasi dan masuknya transmigrasi ke Papua, terutama di Timika, orang asli Papua (OAP) hidup selaras dengan alam. Setiap suku asli di sana punya kepercayaan yang menjunjung alam.*

Sebagai suku yang mendiami Mimika, suku Amungme terkenal sebagai penakluk dan tinggal di daerah dengan ketinggian lebih dari 2000 hingga 4000 mdpl dengan kemiringan

---

<sup>8</sup> Tulisan ini terbit di [zonautara.com](http://zonautara.com) edisi 26 Januari 2022 dengan judul yang sama

40 derajat. Mereka memanfaatkan alam untuk bercocok tanam, menanam keladi, tebu, dan jenis tanaman lain. Suku Amungme tidak hidup nomaden, kecuali dalam sistem pertanian. Mereka biasa mengelola lahan secara bergantian menggunakan batu jenis tertentu dari Uhibu, Intan Jaya, yang diubah menjadi kapak.

“Rumah tetap, kebun saja yang berpindah,” kata tokoh adat suku Amungme, Menuel John Magal, awal Desember 2021.

Mata pencaharian mayoritas suku Amungme adalah berternak dan bercocok tanam. Untuk memenuhi kebutuhan protein, suku Amungme akan berburu ke gunung atau ke dataran yang lebih rendah. Hasil buruan juga biasa dijual. Mereka menggunakan kulit kerang jenis tertentu (kulit bia’) sebagai mata uang.

“Walau tidak ada danau atau laut, tapi kulit kerang ini didapatkan suku Amungme dari danau Paniai,” jelas Menuel.

Suku Amungme fleksibel dalam memenuhi ekonomi. Mereka bisa diajak bertukar barang (barter) jika bertransaksi dengan suku Kamoro yang memang menggunakan sistem pertukaran.

“Biasa untuk transaksi tembakau di Nawaripi, Manasari. Dari Kamoro naik bawa kapak, pisau, dan alat keterampilan yang mereka tukar di situ. Mereka harus berjalan mendaki gunung Cartenz dan lewat bibir kolam Grasberg untuk turun ke Himba. Dari sana mereka dapat mata kapak dan garam dari sumber air khusus yang asin. Kedua barang dagangan ini digunakan bayar kepala (sebagai harta perempuan). Tentu semua interaksi dilakukan dengan berjalan kaki,” papar Menuel.

Suku Amungme menjalankan perekonomian dengan cara yang merdeka tanpa ketakutan dan gangguan. Hidup bahagia ini telah berlangsung sejak lama. Mereka juga membuat gelang dan menganyam noken.

“Bahkan bentuk kehidupan sosial suku Amungme yang sejahtera kala itu digambarkan dalam rajutan simbol-simbol tertentu di noken mama-mama Paniai,” ujar Menuel.

Suku Amungme tidak mengenal sistem kerajaan. Kepala suku baru muncul belakangan. Setiap keputusan merupakan keputusan kolektif.

“Orang merdeka tapi demokratis. Jika ada masalah, semua akan didiskusikan terutama antar pemimpin,” jelas Menuel.



Salah satu sudut di Pasar Inpres Mimika. (Foto: Ronny A. Buol)

### **Pengaruh Perusahaan di Papua**

Namun seiring berjalannya waktu, kedamaian dan kejayaan OAP terutama suku Amungme mulai tergerus. Keadaan berubah ketika perusahaan masuk, memaksakan uang sebagai tolak ukur kekayaan dan kemakmuran yang justru berbeda dari sisi tradisi dan cara pandang OAP. Tak hanya itu, mulai adanya persaingan dan pembangunan yang tidak berpihak pada OAP, membuat OAP menjadi terbelakang terutama dalam sektor ekonomi.

“Sebagai orang yang mengalami dua zaman (dulu dan sekarang), saya merasa sedih. Orang Amungme, yang nenek moyangnya sebagai penakluk menjadi menyerah. Kenapa mereka begitu? Sebab setelah kehadiran PTFI (PT Freeport Indonesia) mereka gampang sekali mendapat makan. Mereka tidak kerja, apalagi jika ada keluarga yang bekerja (di perusahaan). Mereka cenderung tidak beraktifitas, membuat mereka tidak sekuat dulu. Sebenarnya bukan hanya suku Amungme, bahkan pemerintah gampang sekali mendapat uang, sehingga mentalitas kita menyedihkan,” kata Manuel.

Menurut Manuel, dahulu suku Amungme harus kerja keras untuk mendapatkan kelas sosial yang tinggi, sekarang

untuk mendapat uang sebagai alat tukar menjadi mudah. Sementara, kebanyakan masyarakat Amungme belum memiliki keterampilan, pendidikan dan pengalaman dalam berbisnis, atau dengan kata lain, belum bisa mendorong ekonomi yang lebih modern. Segalanya masih dilakukan secara konvensional, sehingga tidak siap bersaing dengan pendatang.

“Ini seperti mengalami benturan budaya. Sewaktu tradisional mereka serba bisa, lantas dipaksakan menjadi modern dan mereka serba tidak bisa sama sekali. Hal ini yang membuat mereka tidak berdaya,” keluh Menuel.

Benturan ini membuat generasi Amungme melemah. Anak muda yang harusnya memiliki tenaga kuat untuk produktif malah tidak bekerja, sebab mereka tidak mampu menghadapi modernitas. Di sisi lain, kemudahan yang didapat lewat bantuan perusahaan justru membuat mereka semakin menjadi rapuh.

“Tidak ada masalah dengan masyarakat pendatang. Dunia sekarang menuntut kita untuk tidak eksklusif hanya satu suku saja. OAP sudah terbiasa dengan keragaman suku. Masyarakat harus bisa beradaptasi dengan siapapun yang datang. Hanya saja, pemerintah itu harusnya memberikan proteksi, memberikan kesempatan pemberdayaan yang sama, agar masyarakat asli Papua bisa berkompetisi,” ujar Menuel.

Proteksi terhadap kekayaan alam, menurut Manuel, harus benar-benar dilakukan pemerintah. Tidak bisa sembarang mengeluarkan ijin. Papua merupakan tanah adat, sudah seharusnya alam di dalam tanah adat dikelola sebagaimana memperhatikan tradisi dan adat istiadat orang asli Papua.

“Bukan OAP yang malas, tetapi pemetaan dan dukungan pemerintah dalam mencari jalan keluar bagaimana pun karakter masyarakatnya yang kurang. Padahal, tanggungjawab itu harusnya melekat,” kata Menuel.

Terpisah, Elisabet Maria Tsome, pengusaha salon dan minimarket OAP dari suku Amungme, mengatakan, untuk bisa bertahan membangun usaha, dirinya justru banyak belajar dari pendatang. Elisabet tidak pernah memandang pendatang sebagai sebab perbedaan ekonomi.

“Harus kita akui bahwa yang kuasai ekonomi di Papua, khususnya di Timika adalah pendatang. Tapi saya tidak ada masalah. Saya justru menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk bangkit. Saya tahu, bahwa OAP tidak dilahirkan untuk

ekonomi, tapi dilahirkan dengan rasa sosial yang tinggi dan saya bersyukur atas itu,” kata Elisabet.

Elisabet menyadari bahwa dorongan dalam pengembangan ekonomi OAP sangat minim, tapi hal tersebut tidak membuatnya berkecil hati. Elisabet memutuskan untuk perlahan-lahan terus belajar.

“Saya menerapkan aturan ke adik-adik, jika dia tidak bekerja, maka dia tidak bisa dapat uang. Ini kemudian dilihat oleh karyawan saya yang lain, dan terus berlanjut. Jadi kenapa tidak saling mendukung. Baik dengan sesama orang Papua maupun dengan pendatang. Bisa kita liat, pendatang kiosnya berjejer sama, tapi mereka yakin akan berkatnya masing-masing. Jadi bagi saya tidak ada masalah, sebab saya berdiri memandang ke arah yang positif,” jelas Elisabet.

Hanya saja, Elisabet berharap pemerintah bisa lebih sensitif terhadap perkembangan ekonomi OAP. Apa yang telah menjadi identitas OAP, atau pun potensi yang dimiliki OAP harus didukung.

“Untuk OAP saya hanya bisa bilang bahwa mari mengembangkan apa yang kita punya. Budaya dan kearifan lokal yang tidak harus susah-susah kita pelajari lagi. Pinang, sagu, dan rambut adalah keahlian kita mari lestarikan dan kembangkan, tentu semua itu butuh dukungan pemerintah,” kata Elisabet.

### **Orang asli Papua Perlu Didengar**

Senada dengan Elisabet dalam melihat posisi OAP, tokoh adat suku Kamoro, Maruanus Maknaipeku menuntut pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi akar rumput dalam setiap pembangunan dan kebijakannya. Saat ini pemerintah terkesan hanya mengejar kesuksesan pribadi tanpa melihat kebutuhan masyarakat bawah.

“Kami tidak hanya mempersalahkan eksekutifnya, tapi juga legislatifnya. Apakah sejauh ini mereka telah memberi masukan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Ibaratnya, mungkin (mereka anggap) orang matilah yang telah memilih mereka, sehingga aspirasi masyarakat susah sekali didengar,” kata Maruanus.

OAP terutama Kamoro, jelas Maruanus, memiliki keinginan untuk maju dan bersaing, hanya saja tidak pernah

diberi kesempatan untuk berdaya. Tidak dibina, didampingi bagaimana menjadi lebih maju, menjadi nelayan yang baik, yang sukses.

“Yang ada, nelayan Kamoro justru diminta menumpang pihak ketiga, sehingga ketika ada masalah di laut, kita yang disuruh hadap-hadapan. Jadi jika seperti ini terus, bisa dibilang nelayan Kamoro akan hilang. Harusnya ada regulasi yang lebih berpihak ke nelayan Kamoro dan kemudian dibarengi dengan pendampingan untuk peningkatan SDM,” kata Maruanus.

Semangat OAP dalam menuntut hak dasar dan keberpihakan terhadap tradisi, guna peningkatan taraf hidup lebih baik mendapat dukungan dari berbagai komunitas paguyuban suku di Mimika.

Sekretaris Kerukunan Keluarga Jawab Besartu (KKJB) Mimika, Mustofa, menganggap APBD yang besar dari PTFI, membuat (pemerintahan) tidak sehat. Menurutnya ada banyak potensi di bidang lain yang selaras dengan budaya OAP yang belum dieksplorasi dan dikembangkan.

“Kenapa ini tidak didorong, sektor yang dikuasai OAP. Program pemberdayaan yang ramah tradisi harus ada, sebab ini akan menjadi kunci ekonomi OAP yang lebih baik,” kata Mustofa.

Ketua Bidang di KKJB, Reddy Wijaya, yang juga Anggota DPRD Mimika, membenarkan hal tersebut. Menurutnya butuh upaya yang lebih keras dari pemerintah.

“Kita dari paguyuban ingin mendorong OAP agar lebih berkembang dalam sektor ekonomi, tapi jika pemerintah sendiri kurang, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Semua kembali ke pemerintah, harus ada dukungan untuk memberi edukasi kepada semua warga termasuk OAP itu sendiri,” kata Reddy.

Menurut Reddy, ada beberapa program pembinaan KKJB yang turut mengajak OAP belajar bersama dalam mengelola pertanian, semisal di SP 5, SP 6 dan SP 9. Ada juga yang setelah ikut belajar, akhirnya bisa melakukan budidaya ikan di tambak.

“Pada prinsipnya kita masyarakat urban juga mau mendorong OAP untuk lebih maju lagi secara ekonomi. Kita mengupayakan kolaborasi dan menghindari terjadinya konflik. Pemerintah harus lebih kreatif lagi. Contoh bangun balai latihan kerja, banyak kerja-kerja yang potensinya bagus untuk

OAP. Itu tugas kita untuk mendorongnya, dan terutama peran pemerintah. Sekali lagi, meski kita KKJB ingin mendorong ini dan itu, tapi kalau dari pemerintah kurang dukungan ya kita tidak bisa berbuat banyak,” ujar Reddy.

### Jumlah Sarana Perdagangan di Mimika Tahun 2020



Sumber: Mimika Dalam Angka 2021 • Diolah oleh Zonautara.com

Interactive content by Flourish

Tak hanya KKJB, paguyuban lain seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menduga pemerintah belum melakukan pendampingan atau pemberdayaan yang tepat sasaran. Pemerintah diminta tidak setengah hati dalam mendorong berkembangnya ekonomi OAP.

“Sebagai orang yang telah tinggal bahkan berpihak di Timika, kami mencoba memberi ruang terhadap OAP. Kami tidak boleh mengesampingkan hal ini, bagaimanapun kami mencintai tanah ini. Terlepas dari suku apa, faktanya anak-anak kami sudah lahir di sini. Terkadang kami merasa lebih Papua dari orang Papua,” kata Ketua Keluarga Bugis Sidrap di Mimika, Munawir Yakub.

Munawir optimis, jika didampingi dengan benar OAP akan memiliki kemampuan yang sama dengan suku-suku pendatang yang lebih dulu mendapat akses pendidikan.

“Di tempat saya, banyak adek-adek (OAP) yang sudah bekerja dari remaja. Mereka bekerja sambil belajar, banyak yang sekarang jadi ahli pada bidangnya. Ahli otomotif di bengkel, atau di usaha-usaha yang lain,” ucap Munawir.

Setelah adanya otonomi khusus (otsus), walau banyak lemahnya juga, dibanding dulu, Munawir mengatakan,

komposisi OAP di berbagai sektor sudah ada peningkatan walau masih kecil.

“Otsus membolehkan putra daerah masuk dalam perusahaan, dan aturan lain yang lumayan berpihak. Dan ya, pemerintah sebenarnya telah melakukan pendampingan, seperti dibentuknya Kamar Adat Papua, yang menjadi kendaraan untuk para pedagang Papua memperjuangkan hak-hak mereka. Tapi, kalau dari kacamata politik, entahlah menurut saya, pemerintah tidak serius, tidak sungguh-sungguh memperjuangkan itu,” jelas Munawir.

Keadaan ini membuat pendatang banyak menguasai sektor-sektor penting di Mimika, termasuk dalam pemerintahan. Sebut saja, Jawa yang menguasai sektor pertanian, perikanan dan rumah makan, Bugis Makassar menguasai perdagangan, Toraja menguasai peternakan babi. Madura menguasai transportasi.

### **Mentalitas Aparat Pemerintah**

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan sebenarnya pemerintah telah berupaya. Tetapi ada persoalan lain yang tak kalah penting, yaitu mentalitas.

“Pemerintah sudah memberikan perahu, dan jaring. Solusinya adalah pendampingan 24 jam, mampukah pemerintah melakukan itu? Faktanya, pemerintah belum melakukan pendampingan dan pengawalan secara terus menerus. Kalau kita kasih jaring, kita harus kasih tahu, jaring ini diapakan. Karena tidak ada pendampingan, ketika kita cek lagi, ternyata jaringnya sudah dijual. Dan tidak diteruskan. Nah, apakah kita harus menyerah dan kalah? Saya rasa tidak. Pemerintah harus mempunyai hati,” kata Johannes.

Menurut Johannes, kerja organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah solusi. Mama-mama Papua, misalnya, akan tetap konvensional karena ada kepercayaan dan tradisi yang mengakar. Kebiasaan ini harus dilihat dan didukung. Jadi pembangunan atau apa pun harusnya ramah tradisi, sehingga OAP bisa merasakan manfaatnya.

“Memang ada perencanaan seperti itu, tapi realisasinya kan belum,” aku Johannes.

Johannes sendiri tak membantah jika sebenarnya pemerintah sudah tahu, tentang penyebab OAP tidak bisa

bersaing dalam bidang ekonomi.

“Penelitian dan riset dari luar banyak sekali yang telah disodor ke pemerintah. Kita semua sudah tahu. Intinya adalah, kita harus memiliki hati, agar kita bisa memahami mereka seperti apa, maunya seperti apa. Baru kita bangun sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu prinsipnya,” kata Johannes.

Menurut Johannes, saat ini komposisi OAP dalam pemerintahan terbilang masih sedikit, 30 persen OAP banding 70 persen pendatang di legislatif, dan 20 persen OAP banding 80 persen pendatang di tataran eksekutif.

“Persoalannya orang luar ini, atau justru OAP itu sendiri paham atau tidak persoalan OAP? Betul ekonomi dan IPM kita bagus, tapi bukan untuk OAP dan Mimika secara keseluruhan. Sampai-sampai Mimika yang kaya raya ini, di dalam kota belum memiliki transportasi umum. Dalam kota saja tidak ada transportasi umum yang memadai, apalagi di pedalaman,” jelas Johannes.



Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat diwawancarai Zonautara.com. (Foto: Ronny A. Buol)

Di sisi lain, Veronika Kusumaryati, seorang antropolog pemerhati Papua lulusan Universitas Harvard, mengungkapkan,

kehadiran PTFI banyak mengubah kondisi dan status OAP. Sejak kedatangan pertama tahun 1967 dan beroperasi sekitar tahun 1973, Freeport telah mengambil tanah-tanah masyarakat adat Amungme dan Kamoro –seizin pemerintah Indonesia– sehingga jelas ini berdampak pada kehidupan kedua suku ini di sana.

Selama operasinya di tanah Papua, Freeport mempekerjakan OAP (sekarang sekitar 25 persen dari total jumlah karyawan), kebanyakan di level bawah operasional. Kebanyakan karyawan datang dari bagian barat Indonesia, jadi yang banyak mendapatkan keuntungan dari operasi ini lebih banyak orang luar (bukan orang asli).

“Freeport juga membayar pajak dan berbagai setoran lain termasuk untuk TNI/Polisi, dan ini yang dianggap OAP merugikan karena kehadiran TNI/Polisi mengakibatkan banyak kasus pelanggaran HAM. Terakhir, Freeport melakukan banyak program di CSR (corporate social responsibility), seperti beasiswa untuk 7 suku di wilayah konsesinya. Untuk yang terakhir, (CSR) saya tidak bisa menilai sukses/gagalnya karena saya kurang data,” kata Veronika.

Secara umum, Veronika menjelaskan, kegiatan Freeport memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat di Timika. Sektor tambang banyak menyumbang untuk GDRP Papua, tetapi harus ditanyakan apakah sumbangan ekonomi ini sudah didistribusikan ke masyarakat, terutama yang terkena dampak operasi tambang.

“Melihat indikator pembangunan OAP yang masih rendah, bisa dikatakan bahwa sumbangan perusahaan tambang seperti Freeport, tidak serta merta meningkatkan status ekonomi kebanyakan OAP, mungkin hanya sekelompok elit OAP dan orang Indonesia,” kata Veronika.

Padahal, pemerataan ekonomi akan membawa pengaruh pada ekonomi OAP yang selama ini tidak dibangun kapasitasnya. Veronika menilai, persoalan di Mimika sangat kompleks dan sampai sekarang model pembangunan ekonomi di sana belum berpihak pada pemain kecil seperti OAP.

“Saya kurang yakin, apakah negara dan perusahaan berkomitmen melakukan politik redistribusi sumber daya ketika proses konsentrasi kekuatan dan kekayaan masih pada segelintir orang,” kata Veronika.

Veronika pesimis ada solusi yang memuaskan semua pihak. Akan tetapi Veronika mengatakan, solusi untuk OAP tentu saja adalah penghentian/moratorium kegiatan tambang supaya alam dan masyarakat Papua bisa memikirkan model ekonomi yang lebih berpihak.

“Tetapi apakah pemerintah dan korporasi akan melakukan ini? Saya ragu,” ujar Veronika.



*Alun-alun Distrik Kuala Kencana. Wilayah ini sepenuhnya dikelola oleh PT Freeport Indonesia. (Foto: Ronny A. Buol)*

Terpisah, Vice President Industrial Relations PT Freeport Indonesia, Demi Magai mengatakan, produksi tambang di Freeport semakin meningkat. Namun, dari tahun 2016 hingga tahun 2018 ada penurunan yang terjadi berkaitan dengan kontrak karya dan izin usaha pertambangan khusus.

“Target produksi saat ini lebih banyak adalah tembaga, sekitar 22 ton per hari, sementara emas masih dibawahnya. Tahun 2018 bonus produktifitas tembaga (untuk karyawan) sama dengan emas karena sekarang emas dibawah produksi tembaga,” jelas Demi.

Demi mengatakan, tembaga di Freeport merupakan tembaga terbaik kelas dunia dan saat ini, operasi tambang terbuka sudah ditutup sementara. Pihak Freeport melakukan

pengelolaan lingkungan dan penghijauan kembali.

“Kalau Deep Ore Zone (DOZ) sudah tutup, sekarang yang beroperasi adalah tambang underground GBC, DMLZ dan Kucing Liar,” jelasnya.

Demi menegaskan bahwa Freeport berperan sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Provinsi Papua dan Mimika.

“Kehadiran Freeport positif sekali tentu memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” kata Demi.

Demi menguraikan bahwa saat ini dari 7.700 karyawan Freeport, permanen diluar kontraktor, 40 persen adalah karyawan orang asli Papua. Angka tersebut sudah dikurangi dengan 1.200 karyawan Papua yang ikut dalam mogok kerja beberapa tahun lalu.

Menurut Demi, ada 9 orang asli Papua yang duduk di posisi strategis manajemen PTFI, termasuk dirinya. Salah satu adalah direktur bernama Claus Wamafma.

Sebagai putra Papua yang termasuk dalam 7 suku, Demi berharap, pendapatan daerah khususnya yang diperoleh dari Freeport bisa bermanfaat untuk semua stakeholder, terutama di Kabupaten Mimika.

“Putra daerah harus punya planing yang jelas, harus tahu arah pembangunan kelolanya kemana. Dan kepemimpinan harus terus kerjasama dengan Freeport. Mungkin selama ini masih belum maksimal namun Freeport terus berkomitmen untuk bisa menjalin kerjasama dengan Pemda karena sudah mejadi kewajiban Freeport harus memberikan kontribusi. Berharap pemimpin daerah bisa menjadi pemimpin yang transparan dan memiliki komitmen untuk membangun Mimika,” harap Demi.

## 9.

# Keadaan Memaksa Harus Bisa<sup>9</sup>

Oleh: Kristina N. Rejang



*Wirinus Magi, terlihat sedang memantau cabe yang ditanami di pekarangan rumah*

*Di Kampung Mulia Kencana SP7, Distrik Iwaka, tampak di salah satu pekarangan milik warga terlihat hamparan tanaman cabai berjenis shypoona yang ditanam dengan konsep greenhouse.*

Di sana, seorang pria sedang sibuk merawat tanaman cabai tersebut. Pria itu adalah Wirinus Magi yang merupakan putra asli suku Wano, Kabupaten Puncak Jaya.

Saat ditemui, Wirinus terlihat sangat bahagia. Pasalnya 500 pohon cabai yang ditanam kini sudah bisa dipanen, berbekal

---

<sup>9</sup> Tulisan terbit di [seputarpapua.com](http://seputarpapua.com) pada 26 Januari 2022 dengan judul yang sama.

ilmu tani yang disalurkan oleh Binmas Noken Polres Mimika, kini dalam seminggu ia bisa memanen sampai tiga kali.

“Awalnya saya hanya bisa tanam *petatas* (ubi jalar), keladi, gedi tapi sekarang sudah bisa tanam cabai, jahe juga sudah panen,” kata Wirinus.

Memang awalnya ia merasa agak kesulitan dalam menanam, namun selalu dibina akhirnya bisa. “Sekarang banyak yang ikut saya tanam, ada yang tanam sayur kangkung, sawi dan bayam, ada juga tanam padi dan jahe,” jelas Wirinus.

Dulu, ia masih tergabung dengan sembilan teman lainnya dalam bentuk kelompok, namun kini sudah bisa mandiri dan mengerti cara menanam cabai.

“Pemda memang pernah bantu tapi tidak tiap hari bina kaya bapa Binmas Noken, menurut saya, bagaimana kami mau mandiri kalau pemerintah tidak dekat, kami mau pemda dekat ajar tanam, tenaga kami kuat jadi kami bisa,” kata Wirinus.

Selain Wirinus di SP7, ada juga John Murib yang kini mahir menanam padi, cabai dan jahe. Lainnya adalah Etinus Wenda yang menanam sayuran jangka pendek seperti kangkung, sawi dan bayam.

Jika ada motivasi dan keinginan yang kuat, semua bisa dijalankan meskipun banyak tantangan. “Melihat orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa ? Kenapa orang lain bisa maju secara ekonomi, sementara orang Papua tidak bisa ? Saya mau berbisnis seperti yang lain,” itulah motivasi sederhana dari Ferdinand Chondy seorang putra Papua asli Sarmi-Papua

Memilih berhenti dari pekerjaannya di sebuah lembaga adalah hal yang sulit. Ia harus menguatkan mental demi cita-cita menjadi pengusaha mini market. Hingga dua tahun berjalan, akhirnya ia mampu membeli dua unit motor dan menginventasi tanah senilai ratusan juta.

Ia masih terus belajar mengatur dengan baik omset dan laba. Semua dijalankan dengan tekun, membedakan antara produktif dan konsumtif hingga akhirnya Ferdinand membuktikan dirinya mampu menjadi pelaku bisnis.

“Tantangan yang terberat dari orang berbisnis adalah mental, karena banyak yang harus dikorbankan, ini tantangan berat ganggu di mental, tapi apapun itu saya sudah ambil keputusan harus komitmen,” kata Ferdinand.



*Ferdinand Chondy saat berada di mini market miliknya*

Ini juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan asli Amungme, Maria Elisabeth Tsolme. Memanfaatkan hasil dari profesinya sebagai PNS dan suami sebagai Karyawan PT.Freeport Indonesia, ia membangun dua cabang usaha salon khusus sambung rambut dan kini merambah ke usaha mini market.

Sambung rambut ini memang sudah menjadi fashion orang Papua dan menjadi keahlian yang tidak perlu lagi kursus. Elisabeth kini pekerjakan tujuh karyawan asli Papua.



*Maria di Salon anyam rambut miliknya*

Elisabeth mengatakan, Orang Papua prinsipnya bukan dilahirkan sebagai pedagang yang individualis. Hal ini karena kebanyakan orang Papua terikat dengan kuatnya kekerabatan.

Sampai saat ini juga Elisabeth mengaku masih terkendala sosial yang tinggi. Pasalnya ia tidak bisa menawarkan diskon kepada pelanggan karena diskonnya sudah harus ada untuk saudara-saudaranya.

“Saya tidak bisa kasih diskon. Karena ekonomi saya selalu turun-naik karena sosial. Apalagi kalau saudara sakit, saudara kecelakaan kita harus keluarkan terus. Lebih banyak yang keluar dari pada pemasukan. Kita kalah di bisnis karena jiwa sosial kita, tapi mau tidak mau harus berusaha,” ujarnya.

Motivasi yang menjadi penguat adalah ingin membuktikan bahwa ia bisa tanpa harus meminta kepada Pemerintah, PTFI, YPMAK tapi menggunakan modal sendiri.

“Saya mau tunjukkan bahwa tanpa kalian saya bisa. Dan akhirnya saya bisa buktikan itu memang keuangan sangat rumit tapi saya mempertahankan satu prinsip bahwa saya bisa, kenapa saya harus beli dari kios lain, saya juga bisa,” katanya.

Menurutnya kehadiran orang pendatang juga bisa membuatnya termotivasi karena ia tidak ingin melihat sesuatu dari sisi buruk.

“Saya ingin kita sesama OAP juga harus saling support, jangan ada iri atau gengsi, meskipun kita tidak terlahir dari pedagang yang hebat tapi kita juga bisa, kalau menumbuhkan gengsi dan saling benci maka tidak akan maju,” kata Elisabeth.

Ia juga berharap agar sesuatu yang Tuhan sudah berikan untuk orang Papua seperti mahir anyam noken, pinang, dan menganyam rambut termasuk dengan ukir dan sugu bisa dikembangkan oleh OAP dan terus dilestarikan.

## **Pendampingan Bukan Jawaban**

Veronika Kusumaryati, Antropologi lulusan Harvard AS mengatakan kehadiran perusahaan Freeport banyak mengubah kondisi dan status Orang Asli Papua. Dari kedatangan pertama tahun 1967 dan operasi sekitar tahun 1973 Freeport telah mengambil tanah-tanah masyarakat adat Amungme dan Kamoro seizin pemerintah Indonesia sehingga jelas ini berdampak pada penghidupan kedua suku ini. Kebanyakan karyawan datang dari bagian barat Indonesia jadi yang banyak mendapatkan

keuntungan dari operasi ini lebih banyak orang luar (bukan orang asli).

Terakhir, Freeport melakukan banyak program di Corporate Social Responsibility) (CSR) seperti beasiswa untuk 7 suku di wilayah konsesi Freeport.

Secara umum, kegiatan Freeport memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat di Timika. Sektor tambang banyak menyumbang untuk PDRB Papua.

“Tetapi harus ditanyakan apakah sumbangan ekonomi ini sudah didistribusikan ke masyarakat, terutama yang terkena dampak operasi tambang. Melihat indikator pembangunan OAP yang masih rendah bisa dikatakan bahwa sumbangan perusahaan tambang seperti Freeport tidak meningkatkan status ekonomi kebanyakan OAP ‘mungkin’ hanya sekelompok elit OAP dan orang luar Papua,” katanya.

Veronika mengungkapkan, sektor ekonomi masyarakat asli selama ini tidak dibangun kapasitasnya. Persoalan di Mimika sangat kompleks dan sampai sekarang model pembangunan ekonomi di Timika belum berpihak pada pemain kecil seperti OAP.

“Saya kurang yakin apakah negara dan perusahaan berkomitmen melakukan politik redistribusi sumber daya ketika proses konsentrasi kekuatan dan kekayaan masih pada segelintir orang,” ujarnya.

Di Mimika berbagai kelompok suku yang ada di Papua, ada kelompok suku mendiami area gunung, ada juga area pantai. Orang gunung punya tradisi pertanian.

“Jadi mereka sebenarnya biasa melakukan pertanian ini yang menjadi masalah kan tanah mereka diambil oleh perusahaan jadi mereka sudah tidak bisa lagi mempraktekan pertanian mereka. Kemudian dari Pantai, suku Kamoro sebenarnya bukan berburu dan meramu tapi lebih ke nelayan. Selama ini mereka memiliki dusun sagu, sungai sungai yang menyediakan ikan sebagian dirusak oleh tailing perusahaan,” jelas Vero.

Jadi menurutnya ini persoalannya bukan masyarakat Papua bisa menyesuaikan diri atau tidak, namun terjadi perubahan yang sangat besar, radikal dalam kehidupan mereka dan pendampingan bukan jawaban dari perubahan yang sangat radikal dari masyarakat Papua asli.

Menurutnya, memang solusinya harus dipahami dulu apa yang

sebenarnya terjadi didalam kehidupan masyarakat asli Mimika.

“Ini yang menurut saya menjadi masalah ketika CSR, program-program pemerintah itu hanya omong soal pendampingan tapi belum memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka, mental mereka,” ujarnya.

Sebagaimana dikatakan Veronika, tidak ada solusi instan. Diperlukan upaya memahami kondisi dengan lebih baik dulu, dengan cara melakukan penelitian antropologi tentang apa yang sudah terjadi dan bersama sama dengan masyarakat untuk melihat ke depan.

“Jadi menurut saya kata pendampingan terlalu sederhana untuk memecahkan persoalan yang besar ini. Pada kenyataannya ekonomi Timika sudah berubah, masyarakat asli Papua sudah termarginalkan. Tidak lagi menguasai sumber daya dan ruang hidup mereka. Ruang hidup mereka kan sekarang ada di perusahaan, pemerintah dan pendatang,” katanya.

Jadi hal tersebut perlu dipahami oleh semua pihak, jadi korporasi atau masyarakat pendatang atau pemerintah terlalu terburu buru mencari solusi sementara persoalan sendiri itu belum dipahami.

Menurut Veronika, pemerataan ekonomi ini mensyaratkan suatu perubahan kebijakan yang sangat radikal tentang konsep keadilan, kelestarian, “Dan saya mempertanyakan apakah Freeport, pendatang, dan pemerintah ini punya komitmen untuk itu, kalau dia tidak punya komitmen untuk pelestarian, keadilan, yah susah, mau bicara soal apapun, dengan berbagai pendekatan, kesejahteraan, tidak ada artinya. Karena persoalan dasarnya tidak dipahami,” ungkapnya.

### **Kontekstual Berbasis Kebudayaan**

Cahyo Pamungkas, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, dasar atau praktek OAP berbeda. Mereka kebanyakan masih berdasar pada sistem pertukaran, memberi dan menerima. Tanah itu bagi mereka tidak dibeli, tapi diserahkan. Dan mereka bersifat komunal, yang satu akan menanggung yang lain.

“Jadi mereka tidak mengenal keluarga inti yang harus diprioritaskan. Kalau ada uang, itu akan habis dipakai bersama, sebab untuk bertahan di alam, mereka terbiasa membangun sistem sosial yang begitu erat. Selain karena, mereka memang

sangat dekat dengan alam, hidup dari alam. Jadi uang bukan ukuran kesejahteraan,” kata dia.

Cahyo menjelaskan, OAP tidak menolak pembangunan, hanya saja butuh pemahaman yang baik terutama dari sisi tradisi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan, sehingga OAP memang benar-benar bisa merasakan manfaatnya.

“Sebenarnya pembangunan di Mimika tidak jauh berbeda, rencana strategis pembangunan kampung, program dana kampung itu sama di seluruh Papua. Ada desa mandiri, listrik membangun, desa pintar, cuma berbagai program itu, sejauh ini bisa dikatakan belum berhasil.” katanya.

Korelasi ekonomi yang erat, bagi OAP tidak selalu mendesak sebab pendekatan yang dilakukan harus tetap kontekstual berbasis kebudayaan. Akan sulit bagi OAP mengikuti sistem pendidikan yang selama ini diterapkan.

“Mereka harus dikembalikan ke alam, sembari edukasi by praktek,” jelas Cahyo.

OAP memiliki seperangkat kearifan lokal, yang sekarang mulai punah dan harus dihidupkan sebagai pintu masuk untuk mendorong pendidikan. Hal ini penting. Sebab mereka, usai mengalami sejarah yang panjang, dan telah meninggalkan tanah, digusur. Cahyo menilai OAP mengalami disorintasi.

“Mereka misalnya memiliki daun-daun tanaman obat. Kita dukung dengan riset khasiat apa yang dikandung tanaman tersebut dan bagaimana digunakan untuk kesehatan. Tidak bisa kita paksakan dengan obat-obatan baru yang asing bagi mereka.” katanya.

Selain itu, ia pun menyarankan semua konsep harus dibangun dengan nilai kebudayaan. “Misalnya setiap sebulan sekali ada pertemuan dan dialog mendalam antara Bupati, masyarakat adat baik Amungme, kamoro juga suku kekerabatan lain, juga dari gereja tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bagaimana memecahkan persoalan pembangunan,” ujarnya.

## Harapan

Melihat kondisi kehidupan ekonomi orang Amungme dahulu dan sekarang, Manuel John Magal menyampaikan ungkapan kesedihannya. “Jauh sekali saya benar benar sedih, karena saya sudah mengalami dua jaman ini, sebelum dan

sekarang. Orang-orang amungme yang tadinya nenek moyang mereka itu penakluk sekarang orang-orang yang menyerah," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut karena kehadiran Freeport sehingga menjadi gampang sekali mendapatkan pekerjaan, uang yang besar sehingga membuat semua benar-benar tidak bisa beraktivitas sehebat dulu. Begitupun melalui pemerintah.

"Makanya mentalitas masyarakat saya ini tidak tahu butuh berapa waktu untuk merubah mentalitas ini, mentalitas segala hal bisa dapat dengan mudah," katanya.

Sekarang kata Manuel sebenarnya mau mendapatkan alat tukar itu gampang tapi karena kebanyakan dari masyarakatnya belum memiliki gambaran mengenai keterampilan, pendidikan, pengalaman untuk berbisnis dan untuk usaha kegiatan perekonomian yang modern.

"Jadi alami bentukan modern sehingga ini semacam mengalami satu benturan budaya yang tradisional serba bisa akhirnya mau coba begini tidak bisa mau coba itu tidak bisa. Mereka sendiri susah dan langsung menyerah jadi tidak berdaya begitu," ujarnya.

Sebenarnya, untuk menjadi pengusaha orang Papua juga bisa hanya saja harus melalui proposal, analisis bisnis mendalam akhirnya membuat mereka selalu mempunyai pemikiran bahwa mereka 'tidak bisa'.

"Oh saya tidak bisa, itu selalu ada didalam sini (otak) dan didukung lagi dengan gampang dapat duit akhirnya motivasi untuk kerja keras itu sudah tidak ada," ungkapnya.

Manuel yang kini menjalankan Yayasan Generasi Amungme Bangkit (GAB) ini mengatakan antropologo orang Amungme bukan berbisnis namun mereka bercocok tanam dan beternak untuk itu harus ada orang yang mengetahui kelebihan dan kekurangan masyarakat Amungme sehingga perekonomiannya bisa terkontrol.

"Kalau tidak, bisa termakan jaman. Tidak heran di Timika namanya berdagang di pasar itu produk modern dikuasai pendatang karena masyarakat sendiri punya keterbatasan, mereka tidak punya jalur distribusi kalau mereka punya jalur distribusi harus punya komunikasi sampai di Ambon, Makasar, Surabaya, Jakarta harus mulai dari sana lalu datangkan barang tapi kemampuan itu tidak ada," ujarnya.

Kemudian tempat penjualan masyarakat asli ditanah, di pinggir jalan sementara para pendatang memiliki pemahaman perlu membuka toko yang besar dan lainnya. Menuel mengatakan dengan sendirinya, masyarakat asli akan termarginalkan karena tidak bisa berkompetisi.

Ia mencoba membuat sebuah toko yang pekerjaannya adalah Mama-mama Papua yang diajar dengan memutar sesuatu dari yang nilainya kecil, namun masih terkendala dengan sistim kekerabatan.

“Saya sudah bangun dan bina dan semua itu terkontrol sudah bagus, namun saat datang hari raya, modal bisnis mereka langsung pakai habis. Ada saudaranya masalah langsung uangnya pakai, itu menjadi tantangan juga. Memang saya juga sadari bahwa antropologi mereka bukan berdagang tapi tidak ada salahnya jaman menuntut kita,” kata Menuel.

Kelemahan lainnya adalah modal ada niat yang tinggi tapi tidak punya modal jadi ‘garuk kepala’. Ia pun sedikit mengkritisi Bank Nasional yang ada di Papua yang menurutnya tidak bisa kerja keras untuk memajukan ekonomi OAP.

“Bank bank Nasional kalau tidak mau kasih kredit ke orang Papua, ngapain hadir disini. Bank bank juga jangan diskriminatif. Harus permudah segala bidang. Peran bank Nasional harus kerja keras. Kalau tidak angkat kaki saja lebih baik swasta yang punya hati,” tegasnya.

Kebanyakan pekerjaan mama-mama Amungme pada dasarnya adalah bercocok tanam, namun hingga kini, menurutnya peran PTFI belum maksimal karena belum sepenuhnya mengambil hasil bumi dari OAP.

“Coba Kasih vendor nya orang asli jadi mama mama tidak perlu jualan di pasar habis itu taro sampai sore bahkan tiak laku, besoknya sudah tidak bisa jual apalagi sayur akhirnya jadi makanan babi jangan sampai seperti itu harus betul betul misalnya hasil Bumi aksih kepercayaan orang Amungme, sementara hasil Laut kasih Kamoro supaya ada keberpihakan,” katanya.

Kemudian tugas Pemda adalah mendampingi OAP dan perlu kerja keras dengan APBD yang menginjak 4 Triliun menurutnya pembangunan ekonomi harus ada bagi OAP. Karena selama ini, pembangunan ekonomi terlihat hanya didalam kota sementara di Distrik Pegunungan dan Pesisir tidak

ada kegiatan ekonomi yang berarti.

“Kesulitan itu yang dihadapi. Di sini Pemda harus benar benar kerja keras, pemerataan harus dilakukan sehingga ada kegiatan ekonomi dimana mana. Pemda harus dongkrak supaya ekonomi bisa menyentuh akar rumput,” ujarnya.

Mengenai kedatangan orang luar Papua dan sukses di Mimika bagi Menuel tidak menjadi masalah karena menurutnya dunia sekarang modern, tidak eksklusif hanya satu suku saja, dunia sudah global dan masyarakat pun perlu adaptasi dengan pendatang.

Namun, menurutnya pihak pendatang pun harus bisa mengerti, biarlah apa yang bersentuhan dengan alam di Mimika menjadi hak OAP.

Menurut Menuel, pemda harus berikan proteksi karena proteksi itu yang penting supaya bisa ajari kemampuan berkompetisi dengan pendatang.

“Ada ‘pendatang yang bernafsu mau merebut semua peluang, pemerintah harus beritahu mengingatkan tidak boleh begini,” katanya.

Misalnya penjualan kayu Pemda harus kerja keras tidak boleh kasih orang dari luar percayakan orang asli, yang diinginkan OAP adalah segala sesuatu yang dari alam seperti pinang, ikan, sagu dan segala sesuatu dari tanah adat harus orang adat yang kelola.

“Pemda harus kerja keras berani proteksi untuk ini. Kalau tidak pemda juga tidak ada gunanya. Saya rindu masyarakat bisa menikmati hidup seperti dahulu, bisnisnya merdeka. Sekalipun ada pendatang semua berjalan lancar dan harus merdeka dan bagaimana caranya harus ada regulasi,” pungkasnya.

Marianus Maknaipeku, tokoh Kamoro mengatakan semua dinamika ekonomi Orang Asli Papua yang patut disoroti adalah Dinas terkait. Dimana menurutnya tidak ada niatan dari dinas seperti Disperindag maupun Dinas Koperasi untuk bisa mengangkat masyarakat kecil menjadi bisa.

Ia meyakini, orang Kamoro pasti bisa saja, namun menurutnya belum ada pendampingan yang intens untuk menyelesaikan masalah ekonomi perdagangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

“Kami punya sagu ada, ikan juga, tapi pendampingan

belum ada, yang terjadi kami diberikan kebutuhan lalu ditinggalkan tanpa ada pendampingan terus menerus. Ekonomi tidak berkembang lama-lama semakin miskin bukan membaik,” ujarnya.

Mengenai kehadiran OAP, Marianus mengatakan menjadi hal yang wajar jika mereka berdagang dan memang mereka mempunyai ilmu perdagangan. “Kerja keras namanya saja orang merantau harus kerja keras, kami menerima apapun yang menjadi hak semua orang,” katanya.

Namun, menurutnya para pendatang luar Papua hingga kini memang belum ada keterlibatan untuk memberikan kontribusi seperti melatih atau ikut memajukan ekonomi perdagangan dengan OAP.

“Contoh kecil di Pomako. Sekarang nelayan nusantara yang kuasai, orang asli tidak ada. Batas hak adat mereka ambil semua,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan adalah tidak adanya satu produk hukum atau regulasi khusus yang berpihak kepada hak berdagang yang berpihak kepada OAP demi peningkatan ekonomi OAP.

“Pinang, kelapa, sugu semua ke pendatang, bagaimana kita mau merdeka dalam ekonomi ? karena tekanan ekonomi semakin tinggi mereka bertahan dikampung mereka akan tertinggal bagaimana mereka bisa bersaing,” ujarnya.

Menurutnya, suku Kamoro sesungguhnya ingin memiliki kemampuan namun karena tidak pernah diberikan kesempatan misalnya seperti binaan nelayan yang baik.

“Malahan nelayan ditumpangi pihak ketiga untuk melaut, dibiayai pengusaha lalu melaut. Nelayan nusantara juga banyak yang melaut. Lama-lama nelayan Kamoro juga akan hilang karena tekanan pihak lain,” katanya.

Untuk itu ia berharap keterlibatan dan regulasi yang berpihak kepada suku asli Mimika harus bisa dikaji dengan baik. “Jika itu dibiarkan, akan terus begini,” pungkasnya.

## Tentang Penulis



**Adi Briantika**  
Tirto.id

Hingga buku ini terbit, saya masih seorang juru warta di Indonesia. Akhirnya saya ke Papua!



**Alfonsa Jumkon Wayap**  
Suaraperempuanpapua.id

Menjadi wartawan sejak 2010. Kini sebagai asisten redaktur suaraperempuanpapua.id. Pernah terlibat dalam perjalanan jurnalistik dari kampung ke kampung (Buku: Perjalanan Jurnalistik dari Kampung ke Kampung Jilid II). Magang sebagai Fotografer di Harian Fiji Sun, Pasifik Selatan selama dua bulan. Menulis tentang Ekonomi Perempuan Papua di *Indoprogres* dan masih banyak pengalaman lainnya yang tidak dapat saya urai satu persatu. Hobi saya: traveling, baca buku, fotografi.

Kesan melakukan investigasi yang dilakukan oleh AJI Indonesia kepada kami: Saya sangat apresiasi.

Pesan: AJI harus terus melakukan Fellowship seperti ini kedepannya.



**Atamus Kepno**  
Suarapapua.com

“Karena Aku bukan anak raja dan bukan anak imam besar, maka ku memilih penulis”

“Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis”

Saya Atamus Kepno Alumni Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (UNSRIT) SULUT Jurusan Ekonomi. Meski bukan profesi Jurnalis, namun Saat ini saya sebagai Kontributor suarapapua.com untuk menyuarakan kaum tak bersuara.

Kesan:

Terima Kasih AJI Indonesia sudah memberikan kesempatan dalam peliputan kolaborasi tentang Isu HAM di Tanah Papua.

Pesan:

Fellowship ini tidak kali ini saja, namun kedepan lebih terbuka lagi agar mengangkat Isu HAM di Tanah Papua terhadap publik. Dan melalui tulisan saya ini, Semoga bermanfaat bagi hak ulayat Tanah adat di Saukoby Biak Utara dalam proses penolakan rencana pembangunan Bandar Antariksa yang selama ini dihipnotis para elit politik lokal bersama penguasa.



**Dwi Bobby Kurniawan**  
Tiffanews.com

Selama berkecimpung di dunia jurnalistik kurang lebih 6 tahun, secara pribadi sangat sulit bahkan nyaris tak pernah melakukan liputan mendalam. Hal itu tentunya berkaitan dengan pesatnya persaingan media saat ini, yang lebih mengusung kecepatan dalam menyajikan berita terkini.

Sebagai peserta saya sangat berterima kasih telah diberi kesempatan oleh panitia. Sebab melalui program fellowship kami bisa mendapat ilmu dari para mentor, dan selanjutnya melaksanakan tugas peliputan.

Tentunya ini menjadi bekal bagi kami dalam melakukan tugas jurnalistik kedepan, untuk mampu menulis lebih mendalam terutama berkaitan dengan ketidakadilan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih, kepada panitia serta mentor yang telah memberikan kami semua kesempatan untuk lebih baik.



**Dwi Reinjani**  
Kantor Berita Radio (KBR)

Dwi Reinjani atau biasa dipanggil Rei ini, Seorang jurnalis perempuan yang bercita-cita keliling Indonesia bahkan dunia untuk mengabarkan kebenaran. Sejak kecil berambisi punya banyak teman dari berbagai suku, ras, agama dan alam. Tidak suka seafood karena alergi, ayam goreng adalah satu-satunya makanan favorit yang tidak pernah bosan ia makan. Gunung merupakan simbol hidupnya besar, tangguh, penuh misteri, namun menyimpan banyak kehidupan. Sejak terjun menjadi wartawan tahun 2014 hingga sekarang, liputan bencana alam, konflik dan perdagangan organ tubuh, menjadi cerita yang paling berkesan. Moto Hidup “Hidup untuk berjuang dan untuk diperjuangkan”

Kesan mengikuti Fellowship ini, tentu menyenangkan karena akhirnya saya bisa menginjakkan kaki di Boven Digoel, Papua dan menulis secuil kisah masyarakat di sana. Program semacam ini perlu diperluas agar lebih banyak lagi wilayah Indonesia ter blow up dan pemerintah serta masyarakat tahu apa saja masalah yang terjadi di negaranya.



**Elfira Halifa**  
Cenderawasih Pos

“Bernama panggil El di kalangan teman teman jurnalis, lulusan S1 Jurusan Mipa Matematika di salah satu Universitas di Ambon. Menjadi relawan di Kelas Inspirasi Jayapura, suka traveling dan saat ini menjadi Jurnalis di Cenderawasih Pos.”

Kesan:

“Kagum dengan para mentor dan pembimbing serta orang orang yang berada di lingkaran ini (Fellowship). Memberikan bimbingan terbaik, tak henti hentinya mengarahkan, dan yang sudah sabar serta selalu menguatkan dengan kata-kata ‘Tetap semangat’ manakala dikejar kejar deadline.”

Pesan:

“Terima kasih para mentor, orang-orang keren dan hebat di Lingkaran ini. Terus sehat dan berkarya, siapapun yang membaca tulisan ini. Kelak bisa membawa perubahan untuk anak-anak dan Perempuan Papua. Terlebih, mereka yang menjadi korban konflik bersenjata atau yang mengungsi di tanahnya sendiri di Papua. Peluk untuk anak anak dan mama-mama Papua yang hingga saat ini masih bertahan, semoga keselamatan dan keamanan menyertai dimanapun itu”



**Hengky Yeimo**  
Jubi.co.id

Hengky Yeimo Lahir dan besar di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Ia, menamatkan Sekolah Dasar (SD) Inpres Sinak, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sinak, Kabupaten Puncak. Setelah itu ia, menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di YPPK Adhi Luhur Colese Lecocq d'Armandville di Nabire, Papua. Selama SMA, saya tinggal di Asrama Teruna Karsa milik Paderi Jesuit. Setelah telah itu saya melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi STIKOM Muhammadiyah Jayapura.

Saat berada di bangku SMA saya beberapa adik-adik serta sahabat saya Arnold Belau Pemimpin redaksi Suara Papua kami mendirikan Majalah Black Koteka. Majalah tersebut terbit bulanan. Kami menuliskan isu-isu tentang Pencemaran Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Hukum, Persoalan yang dialami oleh Remaja Papua dan Kebudayaan dsb. Majalah Black Koteka tersebut terbit hingga 6 edisi dan Fakum.

Semasa SMA saya juga aktif menulis di blogspot saya. Namun saya terus mengasah bakat menulis saya. hingga selama kuliah saya juga sering menulis Opini di media lokal di Papua seperti Pasific Pos, Papua Pos, Cenderawasih Pos dan beberapa media Online lainnya.

Saya terpanggil menjadi wartawan sejak Tahun 2012. Saya mulai bekerja sebagai Jurnalis 2012-2015 di Majalah Selangkah Online, setelah media tersebut tidak beroperasi lagi. Saya bekerja di media online jubi.co.id pada Akhir Tahun 2014 hingga sampai saat ini.

Pada Tahun 2012 saya bersama rekan-rekan mahasiswa terlibat dalam Perumusan Indikator Papua Tanah Damai Perspektif Mahasiswa yang diwadahi oleh ISM Ilalang.

Saya pernah terlibat dalam Sekolah Pengelola Keberagaman yang diselenggarakan oleh CRCS, UGM, STFT Ilalang dan UIN Alfatah selama 5 hari dan ketika itu kami menuliskan karya tentang pluralisme dan keberagaman di daerah Transmigrasi yang terletak di kabupaten Keerom Papua.

Saya berterimakasih kepada AJI Indonesia yang telah membuka peluang Fellowship bagi wartawan-wartawan muda di seluruh Indonesia untuk meliput tentang sektor keamanan dan HAM di Tanah Papua.

Pengalaman saya setelah mengikuti Fellowship ini saya menjumpai prahara kehidupan anak-anak TPNPB, OPM, Korban Pengungsi, Penyintas, nasib mereka benar benar diacak acak oleh negara yang harusnya melindungi mereka. Memberikan HAK mereka, tapi tidak justru mereka mengalami diskriminasi, teror hingga ancaman sungguh ironi.

Fellowship ini sangat penting. untuk melibatkan wartawan di seluruh Indonesia untuk menulis tentang kehidupan di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tapi juga kaya akan persoalan persoalan yang rumit untuk diuraikan.

Satu hal yang selalu mengusik saya bahwa banyak Profesor Doktor yang mendapatkan titel dari penderitaan orang Papua. Namun mengapa intelektual-intelektual ini tidak terlibat kembali untuk mengurai dan menyelesaikan masalah yang telah dia pelajari dan dalam.

Semoga ada Fellowship lain yang dibuka bagi wartawan lain di Indonesia yang membantu mengurai persoalan yang begitu kompleks di Tanah Papua tapi juga persoalan yang dihadapi oleh suku bangsa lain yang ada di Indonesia. Tanpa melibatkan jurnalis asing yang dinantikan OAP meskipun Presiden Joko Widodo sudah berjanji namun janji tinggal hanyalah janji.

Semoga buku ini hadir di tangan pembaca sekalian mengetuk nurani kalbu jiwa, bertindak untuk menyelesaikan masalah. Agar setiap kita mendapatkan kehidupan yang layak selayaknya manusia yang merdeka bebas tirani apapun di muka bumi ini.



**Imelda Vinolia**  
Suarariau.co

Saya Imelda Vinolia, lahir di Pekanbaru, Riau. Menjadi jurnalis sudah 21 tahun. Berbagai bidang sudah saya ikuti dalam meliput berita. Namun konsentrasi pada Human Right baru dua tahun ini. Selain itu saya juga meliput masalah lingkungan, sosial, energi terbarukan dan perempuan.

Mengikuti training Keamanan Papua pada Juli 2021 merupakan jembatan saya mengenal isu Papua lebih dekat. Dan saya termasuk yang beruntung bisa mengikuti Fellowship untuk menulis Papua dengan datang langsung ke Papua yakni ke Sorong 12 - 19 Januari 2022. Serta menulis soal isu suku Moi yang terbit di media online suarariau.co sebanyak 3 kali terbitan. Tulisan itu selain menambah khasanah baru dalam media kami, tulisan ini juga ditampilkan dalam 3 angle dan merupakan salah satu kebanggaan dan kenangan saya dalam meliput salah satu sudut permasalahan di bumi cendrawasih.

Saya berharap sebagai jurnalis Sumatera, untuk bisa kembali meliput Papua untuk menggali isu lainnya seperti sosial, ekonomi dan wisata. Alasannya, karena banyak hal yang patut diangkat dari keunikan dan kultur serta SDA Papua yang tersimpan selama ini.

Terima Kasih AJI INDONESIA dan teman-teman PAPUA YANG SUDAH MENDUKUNG SERTA mentor Mas Faridil yang sabar mengarahkan kami serta staf AJI yang juga sangat-sangat sabar terlibat dalam persiapan training hingga proses fellowship hingga buku ini terbit.

Salam Bahagia, Salam sehat. Tetap Jaya, Amin.

Salam  
IMELDA VINOLIA



**Jekson Simanjuntak**  
Media Jakarta

Jekson Simanjuntak, seorang jurnalis lepas yang bersemangat mendatangi tempat-tempat baru untuk berjumpa orang-orang baru demi mendapatkan pengalaman yang baru. Sehari-hari ia bekerja secara independen sebagai jurnalis lepas untuk beberapa media online. Salah satunya Mediajakarta.com. Baginya, jurnalisisme adalah bagian dari kehidupan yang memaksanya selalu belajar dan tak pernah puas. Sejak menjadi jurnalis, pencapaian terbesarnya adalah ketika berhasil menuliskan temuan dari lapangan dengan bahasa yang sederhana dan memberi ruang kepada mereka yang terpinggirkan untuk terus bersuara. Atas jerih payahnya, beberapa kali dia diganjar penghargaan untuk kompetisi karya jurnalistik yang menurutnya ibarat sebuah bonus. Karena yang terpenting adalah berkarya dengan tetap patuh terhadap kode etik jurnalistik.

Teruntuk fellowship HAM Papua, dia mendapatkan pengalaman dan pencerahan baru. Dia memahami bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Papua ternyata begitu kompleks yang harus segera diselesaikan agar tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Salah satunya terkait dengan program vaksinasi di Merauke, Papua. Sebuah kondisi yang tidak sesederhana yang dikira. Dan melalui fellowship HAM Papua, Jekson berupaya untuk memotret realitas tersebut.



**Kristina N. Rejang**  
Seputarpapua.com

Nama saya Kristina Novita Rejang. Saya biasa akrab disapa Kristin.

Saya kini berusia 28 tahun. Saya anak kedua dari empat bersaudara, saya sudah berkeluarga dan memiliki satu anak.

Meskipun latar belakang kuliah adalah Pertambangan, namun sudah tertarik menjadi wartawan sejak selesai kuliah karena mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik dan pertama kali berkesempatan bekerja menjadi seorang wartawan di salah satu perusahaan surat kabar yang ada di Timika.

Saya sudah pernah bekerja di beberapa kantor media pemberitaan dan saat ini saya bekerja di Seputarpapua.com salah satu media online Papua yang berkantor di Timika.

Karya-karya yang sudah dimuat di surat kabar, dan website sudah lebih dari ratusan judul karena sudah menjadi wartawan sejak tahun 2017 hingga kini.

Berawal dari Fellowship peliputan HAM di Papua yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), saya menemukan banyak pengalaman yang sangat 'BERHARGA'.

Bahwa menjadi jurnalis itu luas, menulis itu bukan hanya sekedar memenuhi kuota berita, tapi bisa membawa dampak positif untuk mengangkat hak-hak orang banyak.

AJI membuat saya berkembang, membuat saya bukan saja hanya menjadi seorang penulis yang dulu di surat kabar dan sekarang di media online, namun karya saya akhirnya bisa dimuat menjadi sebuah buku.

Apresiasi saya yang sebesar-besarnya untuk AJI sebab memberikan ruang untuk saya belajar menjadi jurnalis yang bertanggung jawab untuk berusaha menjawab dimensi kebutuhan masyarakat.



**Mukhamad Qistiyanto**  
Papuaterkini.com

Saya Seorang Reporter di Media Online Papuaterkini.com. Selain itu juga saya konten kreator membikin video profil dan video klip lagu, saya hobi menulis dan traveling.

Saya senang dan bersyukur sekali bisa ikut program Fellowship AJI Indonesia. Bertambah ilmu dan wawasan tidak kalah seru dapat sahabat-sahabat baru dan ilmu yang bermanfaat sekali dari mentor-mentor yang berpengalaman.

Untuk terbitnya buku ini saya ucapkan terima kasih pada AJI Indonesia dan semoga bukunya nanti bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua.

Terakhir saya ucapkan terima kasih atas suksesnya program ini kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung. Bila ada kekurangan, saya dengan rendah hati ucapkan beribu maaf.

Cendrawasih burung irian terima kasih cukup sekian.



**Neno Karlina Papatungan**  
Zonautara.com

Suka bertualang. Berkelana ke tempat-tempat baru, terutama di alam bebas memungut pengalaman serta pembelajaran untuk dirangkai menjadi kata-kata.

Mencintai sastra fiksi dan tradisi. Terus mengembangkan keterampilan diri dalam menulis. Berminat pada isu-isu tertentu, seperti lingkungan, gender, hak perempuan, anak dan kaum minoritas. Tercatat sebagai anggota AJI Manado, dan beberapa kali menerima fellowship liputan mendalam.



**Reiner S Brabar**  
Suarapapua.com

Jurnalis suarapapua.com

Kesan: AJI luar biasa, banyak cerita baru yang saya temukan.

Pesan: Dunia perlu mengetahui tentang fakta yang terjadi di Papua



**Reno Surya**  
Project Multatuli

Reno Surya adalah penulis lepas yang bermukim di kota Surabaya. Pria kelahiran 1996 ini, tulisannya fokus menyorot isu-isu seputar Hak Asasi Manusia (HAM), kebudayaan, dan mengulik isu-isu perkotaan. Tulisannya pernah dimuat di VICE, The Jakarta Post, New Naratif, Al Jazeera English, South China Morning Post, Asian Democratic Chronicle, dan Project Multatuli.

Kesempatan menapakkan kaki di tanah Papua, adalah pengalaman berharga baginya. Selain terjadi krisis kemanusiaan, informasi tentang kekerasan yang terjadi di Papua tak tampak begitu terang. Sebab, pers dibatasi, dan akses liputan dipersulit. Kesempatan bertemu dengan pengungsi kampung Sekom kelak akan ia ingat di sepanjang hidupnya. Menceritakan episode terkelam dari krisis kemanusiaan lewat penuturan seorang pengungsi dari Nduga, yang sejak tahun 2018 hidup limbung di kamp pengungsian Kampung Sekom. Salah satunya adalah Raga Kogoya, sosok mama yang berani dan tangguh menerjang badai nestapa menjadi pengungsi di rumah sendiri.



**Theresia F. Tekege**  
wagadei.com

Saya Theresia F. Tekege. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua. Saat ini selain sebagai Mahasiswa, Theresia juga sebagai Reporter di wagadei.com, Anggota Komunitas Sastra Papua, Anggota Gerakan Papua Mengajar, dan bergabung dengan Komunitas Teater di Jayapura.

Kesan : Terimakasih AJI Indonesia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk meliput ISU HAM di Papua yang selama ini saya rindukan.

Pesannya : Kedepan, Semoga Fellowship seperti ini tidak berhenti di Tahun ini saja tetapi kedepan lebih terbuka dan berkolaborasi lebih luas lagi untuk ungkapkan apapun yang tersembunyi selama ini di Papua.

ISBN 978-979-3530-54-3



9 789793 530543